

BERBAGI KISAH & HARAPAN

Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak

“Kita dihadapkan pada suatu era dimana perubahan merupakan suatu keniscayaan. Sebenarnya setiap hari kita menyaksikan perubahan tersebut, tetapi tidak menyadarinya. Mendengar dan menyaksikannya tapi tidak paham implikasinya.”

Sri Mulyani Indrawati



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Berbagi Kisah & Harapan

Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak

Tim Kerja

Editor

*Agus Budihardjo, Agus Suharsono, Amin Subiyakto,
Budi Harsono, Herru Widiatmanti, Junaidi Eko Widodo,
Muhammad Tanto, Romadhaniah, Samon Jaya,
Sanityas Jukti Prawatyani, Tjandra Prihandono*

Disain Sampul: *Susanto*

Fotografer Sampul: *Muh. Romadhoni*

Illustrator: *Rizki Khoirunisa*

Tim Pendukung:

Aris Sugiyanto, Eko Susanto, Ferlina Istiastuti,

Fitrina Milla, Marsono, Ricky Wellyando

Diterbitkan oleh
Tim Dokumentasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta, Oktober 2009

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melalui satu fase penting dalam sejarah birokrasi di Indonesia yakni modernisasi DJP. Modernisasi yang bergulir sejak tahun 2002 merupakan bagian dari reformasi birokrasi Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Modernisasi DJP telah melalui tahapan yang cukup panjang, yang tentu saja tidak selalu berjalan mulus. Banyak kendala dan keterbatasan yang dihadapi baik kendala internal maupun eksternal. Perjalanan modernisasi DJP melahirkan banyak kisah dan harapan dari para pegawai DJP sebagai pelaku dan bagian dari proses modernisasi. Kisah atau pengalaman yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi, motivasi dan pembelajaran kita bersama untuk menjaga kesinambungan modernisasi, sekaligus menjadi jembatan menuju Reformasi Birokrasi Jilid Dua.

Kami menyadari sepenuhnya, reformasi birokrasi di DJP masih jauh dari sempurna dan masih ditemukan perilaku pegawai yang tidak mencerminkan nilai-nilai organisasi DJP. Untuk itu kami bertekad untuk senantiasa memperbaiki diri, dan sangat berharap peran serta pihak eksternal dalam mengawasi dan ikut menjaga kesuksesan program ini.

Buku ini disusun untuk menyambut Hari Keuangan yang ke-63 dan sebagai persembahan DJP kepada Departemen Keuangan dan institusi pemerintah pada umumnya, agar proses reformasi di DJP dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat menjadi inspirasi dan motivasi dalam mensukseskan program reformasi birokrasi secara nasional.

Apresiasi dan ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh kontributor naskah baik dari internal maupun eksternal DJP, Tim Dokumentasi Perpajakan, Direktorat KITSDA dan juga TAMF yang sangat berperan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mochamad Tjiptardjo', with a large, stylized flourish on the left side.

Mochamad Tjiptardjo
Direktur Jenderal Pajak

SEKAPUR SIRIH

Apa arti modernisasi bagi seorang petugas di lapangan? Apa realitas reformasi birokrasi dalam pengalaman sehari-hari seorang pelaksana di Direktorat Jenderal Pajak? Tentu kita tidak boleh mengharapkan konsepsi atau idealisasi dari suatu proses perubahan. Maka demikianlah pula dengan kumpulan pengalaman sehari-hari yang dituangkan dan dikumpulkan dalam “Berbagi Kisah & Harapan, Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak” ini. Sebagian tulisan menggambarkan betapa pahit dan getirnya bergulat di masa lalu mempertahankan integritas dengan gaji yang rendah. Pada tulisan lain, kita menemukan si petugas akhirnya hanyut juga mengikuti irama dan praktik umum di kala itu. Atau cuplikan yang menyodorkan fakta bahwa absensi secara elektronik adakalanya begitu menyusahkan, dan memaksakan pilihan antara mendahulukan urusan anak atau urusan kantor.

Kalau kita mencoba menangkap pesan dasar dari sebagian besar - kalau bukan seluruh penulis - adalah, masing-masing menerima, merindukan dan mengharapkan terus berlanjutnya proses modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak. Di sejumlah tulisan kita menemukan para petugas pajak yang dahulu tidak berani atau malu memberitahu secara terbuka bahwa dia bekerja di Kantor Pajak, maka setelah modernisasi mereka merasa punya harga diri untuk mengaku bekerja di Kantor Pajak. Menarik untuk dicermati bahwa untuk petugas pajak faktor perbaikan gaji berperan sangat penting. Faktor kenaikan gaji ini justru menjadi unsur kritikan atau bahkan sinisme dari para pakar dan politisi. Tentu semua itu maksudnya adalah agar modernisasi jangan hanya berhenti pada kenaikan gaji saja.

Sejauh ini proses modernisasi dan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak cukup berhasil. Para analis, politisi, dan kalangan pers pada umumnya mengakui keberhasilan tersebut. Kunci keberhasilan reformasi di lembaga pemerintah yang sebelumnya dikenal termasuk yang paling bobrok ini bersumber dari sejumlah faktor dan kiat yang telah ditempuh. Kesempatan yang terbatas ini tentu bukan tempat untuk membahasnya. Dalam kesempatan ini cukuplah disampaikan gambaran umum suasana aparat

Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi dan menjalani reformasi itu sendiri.

Reformasi dalam pengertian paling kongkrit diwujudkan sebagai rangkaian perubahan, yang dalam kasus Direktorat Jenderal Pajak, menyangkut struktur organisasi, konfigurasi kantor, persyaratan jabatan, undang-undang, kebijakan, metode kerja, SOP, kode etik dan penegakan hukum. Dengan demikian proses ini merupakan rangkaian kejadian yang bahkan menyakitkan di lapangan. Mengapa reformasi itu berjalan dan berhasil baik di institusi yang tidak sulit menyalahgunakan kekuasaan dan memperoleh “*penghasilan*” dalam jumlah besar? Salah satu jawabannya adalah di dalamnya ada segelintir aparat yang masih menjaga integritasnya, sebagian besar aparat yang sudah larut tapi mengakui mereka salah dan ingin berubah, dan hanya sebagian kecil saja yang tetap sinis terhadap perubahan.

Konstelasi yang demikian “hanya” membutuhkan program perubahan yang mampu merangkul mereka dan memberi mereka kepercayaan menjadi aktor dan pusat dari perubahan itu sendiri. Tentu di dalamnya perlu *event* bersama, seperti *sunset policy*, yang menjadi kancah mewujudkan kiprah bersama, solidaritas, dan nilai-nilai baru. Rangkaian proses yang demikianlah yang membawa para aparat pada kesadaran baru bahwa mereka adalah para pelaku yang berharga dan bermartabat, dan pada gilirannya melahirkan rasa bangga dan berguna sebagai petugas pajak.

Semoga reformasi Direktorat Jenderal Pajak jalan terus, menjadi contoh dan sekaligus lokomotif bagi perubahan institusi publik di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2009

Darmin Nasution

PENGANTAR

Proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak melahirkan banyak kisah yang sangat menyentuh untuk dapat dibagi bagi para pelakunya agar bisa saling menguatkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa modernisasi ini bukanlah suatu proses transformasi yang berjalan mulus tanpa kendala dan cacat. Akan tetapi secara alamiah kisah-kisah negatif ternyata tumbuh lebih subur dibanding kisah-kisah positif. Untuk mengimbangi hal tersebut, dan dalam rangka memelihara dan menyemai kisah-kisah dan harapan yang penuh inspirasi selama proses modernisasi DJP, kami merangkumnya dalam sebuah buku yang diberi judul “BERBAGI KISAH & HARAPAN. Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak.”

Kisah ini dikumpulkan dalam jangka waktu satu bulan dari tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009. Kiriman naskah datang dari pegawai DJP di seluruh Indonesia, dan diperkaya dengan tiga naskah dari kontributor eksternal yang terlibat dan/atau turut mengamati perjalanan modernisasi DJP. Mengingat banyaknya kisah yang masuk ke tim kerja, tidak semua bisa dimuat dalam satu buku. Naskah-naskah yang dimuat dalam buku ini telah melalui proses editing yang semata-mata bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memaknai kisah-kisah yang disajikan.

Kami berharap, buku ini dapat diterbitkan secara berseri, mengingat reformasi birokrasi di DJP masih akan terus berproses, terus bergulir dan menjadi sebuah *way of life*. Bagi para pegawai yang kisahnya belum dimuat dalam buku ini, atau yang karena kesibukannya belum dapat membagi kisahnya, semoga nama Anda akan tercantum dalam buku-buku BERKAH edisi berikutnya.

Semoga buku kecil ini dapat menjadi benih harapan positif yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon rindang berbuah ranum dan berakar kuat dalam proses reformasi birokrasi di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2009

Tim Editor

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Sambutan Direktur Jenderal Pajak | iii |
| Sekapur Sirih | v |
| Pengantar | vii |
| Surat Untuk Kang Rhoma, Marsono Kuncung | 1 |
| Sing Penting Halal, Mutaqin | 4 |
| Belajar Sebelumnya, Tang Dewi Sumawati | 7 |
| Tionghoa, Tommy | 11 |
| Jangan Buang, Marihot Pahala Siahaan | 15 |
| Terbang di Awan, Irwan Aribowo | 19 |
| Yang Mana Lagi, Dadi Gunadi | 21 |
| Indah Pada Waktunya, Eko Yudha Sulistijono | 23 |
| Tidak Ada Akar, Tjandra Prihandono | 26 |
| Mabok Angkot, Rini Raudhah Mastika Sari | 29 |
| Malam Yang Bahagia, F.G. Sri Suratno | 33 |
| Demi Waktu, Riza Almanfaluthi | 36 |
| Semangat Teh Gendul, Yulius Yulianto | 39 |
| Alien, Rosafiati Unik Wahyuni | 42 |
| Permen Kopi, Agus Suharsono | 46 |
| Komunikasi Gorengan, Andy Prijanto | 48 |
| Terima Kasih, Ani Murtini | 51 |
| Layanan Sepenuh Hati, R. Huddy Santiadji Musiawan Murharjanto | 54 |
| Ketulusan Hati, Rony Hermawan | 58 |
| Injury Time, Sri Rahayu Murtiningsih | 61 |
| RIP: Iri, Martin Purnama Putra | 64 |
| Sebuah Perjalanan, Teguh Budiono | 67 |
| Serambi Madinah, Sri Sulton | 70 |
| Sang Teladan, Yunita | 73 |
| Hidup Ini Pilihan, Windy Ariestanti Hera Supraba | 76 |
| Akhirnya Datang Juga, Yeni Suriany | 79 |
| Indahnya Kebersamaan, Ari Saptono | 82 |
| Sang Kurir, Yusep Rahmat | 87 |
| Angpaw Lebaran, Windy Ariestanti Hera Supraba | 91 |

| | |
|--|-----|
| Enam Puluh Rupiah, <i>Joko Susanto</i> | 94 |
| Sehati Sepikir, <i>Jeffry Martino</i> | 97 |
| Hutang Pulsa Bayar Pulsa, <i>Hanik Susilawati Muamarah</i> | 100 |
| Ompung, <i>Eli Nafsiah</i> | 102 |
| NO Amplop, <i>Desi Sulistiyawati</i> | 104 |
| Information Center, <i>Heru Widayanto</i> | 107 |
| Seharusnya, <i>Andy Prijanto</i> | 111 |
| Remunerasi, <i>Atjep Amri Wahyudi</i> | 114 |
| Kembalikan, <i>Agung Subchan K</i> | 117 |
| Pede Aja Lagi, <i>Muhammad Halik Amin</i> | 119 |
| Modernku, <i>Sandi Syahrul Winata</i> | 122 |
| Tahuna, <i>Afan Nur Denta Soewoeng</i> | 125 |
| Dua Hari Yang Berarti, <i>Hermawan</i> | 128 |
| Kawal Modernisasi, <i>Primandita Fitriandi</i> | 131 |
| Renungan Hati, <i>Prasetyo Ajie</i> | 135 |
| Nasionalisme di Lebatnya Rimba, <i>Ari Pardono</i> | 139 |
| Si Hitam Manis, <i>Suwandi</i> | 143 |
| Esprit De Corps, <i>Nufransa Wira Sakti</i> | 146 |
| Jam Kantor, <i>Agus Dwi Putra</i> | 151 |
| Jelang Pensiun, <i>Hendro Kusumo</i> | 154 |
| Sampai Di Sini, <i>Hardjono</i> | 157 |
| Kini Saya Bangga, <i>Sekti Widihartanto</i> | 159 |
| Menuju Cahaya, <i>Abdul Hofir</i> | 163 |
| Aku Orang Pajak, <i>Sarbono</i> | 166 |
| Pergi Dengan Indah, <i>Yacob Yahya</i> | 169 |
| Hati Yang Bertasbih, <i>Abdul Gani</i> | 172 |
| Modernisasi & Infaq, <i>Oji Saeroji</i> | 175 |
| Haura, <i>Nur Fathoni</i> | 177 |
| Wartawan & Fiskus, <i>Yacob Yahya</i> | 182 |
| TIP, <i>Ninoy Estimaria</i> | 185 |
| Setitik Embun Penyejuk Hati, <i>Tutik Setiyawati</i> | 188 |
| BADE KA A éR, <i>Agus Suharsono</i> | 191 |
| Jagadu, <i>Rosafiati Unik Wahyuni</i> | 194 |
| Boss Vs Leader, <i>Windhy Puspitadewi</i> | 197 |
| Poster Anti Korupsi, <i>Yond Rizal</i> | 200 |
| Pionir-pionir Modernisasi, <i>Tang Dewi Sumawati</i> | 202 |
| MerekaLah Penerus “De Je Pe”, <i>Sri Rahayu Murtiningsih</i> | 205 |
| Namaku RajaWali, <i>Kholid H. Sutanto</i> | 207 |
| Mesin Absensi & Reformasi Pajak, <i>Rendi A. Witular</i> | 212 |
| Bersama Melukis Makna, <i>Arief Alamsyah Nasution</i> | 214 |

BERKAH...

*Adalah kemauan untuk menerapkan nilai-nilai
dalam kehidupan sehari-hari,
yang ternyata lebih terhubung ke masalah hati, masalah nurani,
agar kita bisa mulai menata kembali hati,
untuk bisa setulus hati
bekerja membangun negeri*

SURAT UNTUK KANG RHOMA

Marsono

Jakarta, 16 September 2009

Teruntuk :

Kang Rhoma,
Sahabat lamaku
di bumi Allah

Assalamualaikum, Kang Rhoma

Apa kabarmu, Kang? Masih inget aku kan? Aku, Kuncung, temen satu seksimu dulu. Lama sekali kita tidak berjumpa. Sekarang aku sudah mempunyai dua anak lho, laki-laki semua. Gimana denganmu, Kang? Tentunya sudah banyak juniormu?

Kang, masih inget gak, ketika kita masih bujangan. Kita bisanya cuma cengar-cengir aja ketika ada *akhwat* yang menggetarkan hati lewat di depan kita. Haha, gak nyangka ya, akhirnya kita diberikan keberanian untuk melamar gadis pilihan kita masing-masing.

Aku masih sering lho, mengingat-ingat kebersamaan kita. Saat kita bersama tinggal di mess kantor yang kumuh itu. Aku juga masih inget ketika kantor kita kebanjiran tahun 2002. Aku dulu gak habis pikir dengan caramu berpikir. Kenapa saat itu kok kamu mau kembali ke kantor, menyelamatkan peralatan kantor saat kantor kita *kelelep* air setinggi dua meter. Emangnya kamu digaji berapa? Kenapa kamu gak mengeluh? Kamu dulu saat dimarahi kok tidak terlihat sedih atau marah? Oya, makasih ya, sudah merawatku saat aku jatuh dari motor beberapa waktu sebelum kejadian banjir itu.

Kang, gimana kuliahmu? Dulu kan kamu pernah cerita, katanya diketawain ketika minta diskon biaya kuliah. Dikira aneh ya, pegawai pajak kok minta diskon biaya kuliah, padahal kan harusnya banyak duitnya. Masa sih, malah minta keringanan SPP. Tapi, aku sih maklum aja, karena kan kampusmu tidak tahu pribadimu.

Aku dulu tidak sekuat dirimu, Kang. Malah bisa dikatakan mengalami *double personality*. Untungnya aja gak sampai jadi psikopat (amit-amit deh). Kadang bisa jadi orang baik dan jujur, tapi kadang larut dalam kekacauan.

Ingat gak Kang, aku pernah nolak uang dari Wajib Pajak yang mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tapi saat itu malah agak aneh rasanya.

Ingat Kang Gembul, temen kita yang agak botak? Dialah yang mengajakku bangkit dari kekalutan saat di kantor. Dia yang mencarikan aku pekerjaan sambilan lho. Kecil-kecilan sih, cuma membuat laporan keuangan. Saat itu aku mau aja ngambil pekerjaan itu karena hanya membuat jurnal dari bukti transaksi yang berserakan. Maklum, saat itu petugas akuntingnya berhenti jadinya tidak ada yang mem-posting. Dulu sih mikirnya gini: daripada melakukan kejahatan di kantor mending menjual kemampuan tanpa melakukan rekayasa. Tapi, sekarang hal itu dilarang. Eh, sebenarnya sih dilarang dari dulu, hanya saja, sekarang jelas sekali aturannya dalam buku kode etik.

Tapi dari Kang Gembul itulah aku mulai mendapat pencerahan. Tahu gak, dia dulu sebenarnya kan “jagoan” lho. Tapi lebih dulu insyaf. Pernah lho, dia bilang gini, “Kuncung, sebagai kakak kelasmu, aku bisa saja membuatmu lebih dahsyat daripada aku. Kamu kan lebih tahu akuntansi daripada aku, pasti jika aku ajarin sedikit, hasilnya akan luar biasa. Itu jika kamu bertemu aku sebelum sekarang. Tapi sekarang aku gak mau ngajarin kamu, Cung. Aku gak mau ada yang mewarisi ajian sesatku. Nanti aku ikut kualat. Aku sudah berhenti, Cung!”

Sejak dia bilang begitu, aku jadi lebih mantep, Kang. Aku jadi tahu kenapa kalian kok terlihat akrab, gitu. Ternyata kalian satu pandangan tho? Tapi sejak itu aku jadi kadang-kadang pergi dari kantor saat jam kerja. Inget gak? Aku sih gak pernah bilang ke kamu, tapi sebenarnya aku punya kerja sambilan, ndesain sistem dan ngasih konsultasi perpajakan ke perusahaan yang baru berdiri. Tapi untungnya tidak ada yang macam-macam dari klienku dan bukan WP di kantorku. Habisnya kalau tidak seperti itu, aku gak bisa nabung. Wah, kalau di zaman modernisasi kayak gini, pekerjaanku dulu jelas terlarang meskipun tidak merugikan negara, tapi akan muncul konflik kepentingan.

Gara-gara ketemu kalian, aku dulu pernah bertarget pada Kang Gembul, “Targetku setelah ini adalah, 80% hartaku harus berasal dari yang halal.” Sekarang semua sudah beda ya Kang. Ketika ada modernisasi, target 80% dari yang halal harus aku revisi, Kang. Setelah membuang yang tidak halal di masa lalu, aku harus bertarget 100% halal. Alhamdulillah, sekarang suasana juga nyaman ya, Kang. Tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk berbuat jujur. Gak perlu lagi *double personality*. Sekarang aku yakin Kang

Rhoma sudah tidak terasing lagi, kan? Sekarang semuanya sudah kayak Kang Rhoma semua, jujur semua. Sistemnya juga sudah mendukung. Dah ada kode etik, ada remunerasi dan ada penegakan hukum. Aku juga gak perlu lagi kerja sambilan, apalagi yang harus menimbulkan konflik kepentingan kayak dulu. Sudah gak perlu ngabur-ngabur saat jam kerja. Rasanya gak pantes lagi kalau kerja gak bener.

Mudah-mudahan Kang Rhoma jadi tambah semangat kerjanya dengan modernisasi ini. Bisa meneruskan kuliah lagi tanpa harus meminta keringanan SPP dan bisa meneruskan usaha jualan berasnya. Oya, satu lagi Kang, bisa beli koin dinar lagi karena ternyata koin dinar yang kita beli dulu di tahun 2002, sekarang nilainya dah naik 250%! Sayangnya kita cuma beli 1 koin aja ya? Abisnya, mana ada duit saat itu? Hehe...

Makasih ya Kang, dengan mengenalmu, bagian hidupku lebih berarti. Kang Rhoma dan Kang Gembul ternyata lebih dulu “modern” meskipun saat itu belum mulai modernisasi di instansi kita. Nilai-nilai organisasi yang sekarang ada, ternyata lebih dulu kalian punyai. Masa sekarang ini adalah masa kemenanganmu Kang, yang juga jadi masa kemenangan kita bersama. Tapi ingat ya Kang, meski dalam masa kemenangan harus tetap bersyukur dan terus berkomitmen.

Sampai ketemu ya Kang. Salam buat Kang Gembul jika ketemu dengannya.

Wassalamualaikum wr.wb.

Teman karibmu,

Kuncung

SING PENTING HALAL

Mutaqin

“Ati-ati yo le, kerjo ga usah ‘neko-neko’, sak madya wae sing penting halal”, begitu pesen ibuku via telepon di hari pertama kerja dulu tahun 2000. Saat itu aku jawab, “that’s right, oke mom.. don’t worry be happy!”, he he cah ndeso wae pake Bahasa Inggris. Maklum kalo ibuku senantiasa khawatir, secara 30 tahun jadi seorang guru yang pengen anaknya juga digugu lan ditiru.

Setahun berselang ketika pulang kampung pas lebaran. Suasana ceria berubah jadi hampa, karena sengsara juga mendapati kulkas di rumah rusak, musim panas pula. So, ada inisiatif lah beliin kulkas baru buat ibu, kulkas polytron satu pintu seharga sejuta dua ratus. Barang pertama yang aku persembahkan untuk ibuku tercinta. Secara gaji saat itu belum ada sejuta, yang pas-pasan buat makan, bayar kost dan beli pulsa setiap bulannya... gimana caranya? Kok bisa beliin kulkas? Ya bisa dong... orang pajak gitu loh he he....



“Ati-ati yo le, kerjo ga usah ‘neko-neko’..bla..bla..bla” itu lagi pesen ibuku ketika aku balik lagi ke Jakarta. “Oke deh mom...” jawabku sambil tersenyum. Dalam ati, dikit-dikit ga papalah, Bu (beneran cuma dikit kok kalo ‘Jumat ceria’.. ya kan ? Kan ya ? he he).

Waktu terus berlalu, mengalir seperti air... aku ikuti aliran air mau kemana, namanya juga semut prajurit, ikut aturan main aja. Dapet bagian diterima, ga dapet bagian ya cari sendiri he he.

Yang rakus biarlah rakus, yang lurus biarlah lurus. Begitulah diriku, kadang rakus kadang lurus. Seolah-olah balita yang kadang ngompol ga tahan mo pipis, padahal tahu kalo ngompol pasti diomelin emaknya (nyambung ga sih? he he). Seperti balita yang corat-coret tembok asik aja padahal bapaknya bakal uring-uringan (tambah ga nyambung deh...). Semua terjadi sebagai kompilasi antara coba-coba, ikut-ikutan, tantangan, kebutuhan, pencapaian dan akhirnya ketagihan. Begitu analisisku untuk cari pembenaran. Meski “*ati-ati yo le, kerjo ga usah ‘neko-neko’..bla bla bla*” selalu terngiang.

Sampai pada akhirnya kutemukan jodohku di tahun 2003, satu komunitas juga denganku, orang pajak juga. Asik nih, tapi... gawat juga nih. Kalo sampe dosa, bisa jadi dosa kuadrat! Orang bijak taat pajak, orang pajak bijak-bijak, tapi paling bijak: kawin sama orang pajak! He he... Bermodal 5 juta duitku 5 juta duitnya, menikahlah kami... dan ga usah ditanya duit itu dari mana...?

Bermodal kasur dan kompor di dapur di sebuah kontrakan, kami buka lembaran baru. Mengarungi samudra kehidupan; TV 14 inch setia menemani kami, naik motor berstiker FIF kemana kami pergi, asik sekali kami pikir saat itu. Lama-lama capek juga. Enak juga kali ya kalo punya mobil? He he lagi-lagi masalah pencapaian dan harga diri. Belum juga kebeli... ya sudahlah ikhtiar aja terus.

Akhir 2004 lahirlah putri pertama kami. Setiap kali aku ngaca, bertanya-tanya, anakku mirip aku apa ibunya ya. Yang pasti wajahnya mirip orang pajak lah.. he he! Dan saat itu berharap agar nantinya anakku tidak seperti kebanyakan orang pajak. Sejak kelahiran putriku, dikit-dikit makin rajin aku ikut-ikutan baca buku religi yang dibeli istriku, dan minimal lebih bisa nahan ngantuk pas pak khotib kasih khotbah tiap Jumat. Suatu saat ada khotib yang bilang, “korupsi, kolusi itu godaan setan, yang berbuat berarti setan, hasilnya akan dimakan oleh anak-anak setan!” Wowowo... mosok anakku yang cantik itu dibilang setan! Enak ajjaah..huh!

Terlahir dari keluarga pegawai negeri sederhana, dari kampung yang nun jauh di sana, hanya ingin menikmati sekolah gratis (tapi lulusannya bisa kawin ma artis 😊). Dalam hati ini sebenarnya hanya ingin hidup *nrimo* apa adanya, setelah lulus kuliah jadi pegawai negeri, dapet gaji dan hidup sederhana sewajarnya. Ada penolakan sebenarnya dalam hati ini, ketika pada saat itu menerima dan pada akhirnya berharap menerima tanda terima kasih, uang lelah, “Jumat ceria”, atau apapun namanya. Tapi apa boleh buat, jemaah yang lain juga berbuat hal yang sama, bahkan Jumat-nya lebih ceria.

Hanya bisa berdoa, berilah hamba-Mu ini rejeki yang halal dan.... buanyak ya Allaaaah.

Pada akhirnya terdengar sayup-sayup kabar gembira, akan didirikan sebuah kantor pajak, Wajib Pajaknya besar-besar, pegawainya hasil seleksi dengan gaji plus tunjangan yang menggiurkan, dan satu lagi pegawainya jelas-jelas dilarang korupsi. Wow kereeen...!!

Ternyata bukan sekedar isu, tapi beneran! Alhamdulillah ada secercah harapan. Berangan-angan sama dengan seorang teman, seandainya begini, seandainya begitu, semuanya *halalan toyyiban!* Sampai pada akhirnya tiba di ujung penantian. Penantian akan sebuah harapan baru, sistem yang baru, penghasilan yang...nih baruuu halaaal. Ada harapan untuk bisa lebih nyaman mengaktualisasikan diri untuk bangsa ini... ckckck...!!

Sebuah penantian panjang bagi institusi ini hingga pajak bisa menjadi seperti saat ini. Aku..., apalah artinya aku. Hanya semut prajurit pelaksana. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kebijakan bapak - ibu ratu semut di atas sana. Aku yakin ada harga yang harus dibayar, harga yang sangat mahal yang dikorbankan beliau-beliau ini yang membuat pajak bisa menjadi seperti ini. Bersama-sama kita, semut-semut yang membawa butir-butir gula ini seluruhnya untuk kesejahteraan bangsa. Toh kalo bangsanya sejahtera, orang-orang pajaknya dah pasti sejahtera toh? Sedikit banyak memang relatif, yang penting halal!

Terima kasih Ibu..., Ibu termasuk satu dari sekian banyak orang tua yang senantiasa mendoakan anaknya, orang-orang pajak ini, untuk bisa hidup dalam keberkahan. Doa Ibu juga sehingga pajak bisa menjadi seperti ini.

“Ati-ati yo le, kerjo ga usah ‘neko-neko’, sak madya wae, sing penting halal...” terima kasih ya bu... *I miss u.. I love u.*

BELAJAR SEBELUMNYA

Tang Dewi Sumawati

Jam di dinding masih menunjukkan pukul 10.10 WIB ketika telepon di meja kerjaku berdering, “Selamat ya Mbak, jadi Kasi Potput ya...?” Serasa jantungku berhenti berdetak sesaat, bukan karena senang tapi karena tidak suka.

“Kenapa sih Mbak, kok gak seneng? Kan sudah pernah di Potput, jadi Kasubsi Verifikasi, kan gampang kalo jadi Kasi”, pertanyaan yang muncul dari sobat-sobatku. Memang benar apa yang mereka bilang dan aku juga merasa bahwa untuk menjadi Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh (Kasi Potput) tidaklah sulit, tapi yang membuat aku tidak bisa menerimanya adalah karena konsekuensi tak tertulis dari jabatan Kasi teknis pada waktu itu. Sedangkan empat tahun sebelum itu aku sudah memutuskan untuk bertobat dan memulai kehidupan yang lebih bersih lagi sesuai tuntunan agama.

Bayang-bayang masa lalu yang pahit saat menjadi Kepala Subseksi (Kasubsi) Verifikasi Potput kembali melintas. Memang sejak dari awal bekerja sekitar tahun 1994 aku tidak pernah bisa mengakui bahwa uang *haw-haw* (sebutanku dan sobat-sobatku untuk uang hasil nego) itu halal. Dan aku sendiri tidak pernah bisa melakukan pekerjaan itu. Kalaupun ada pembagian biasanya untuk dibagi-bagi lagi, dan aku tidak pernah menggunakannya untuk keperluanku sendiri apalagi untuk membeli makanan.

Sewaktu aku menjadi Kasubsi Verifikasi Potput itu, jabatan Kasubsi Pengawasan Pembayaran Masa kosong (kedua subseksi ada dalam satu Seksi Potput) sehingga otomatis hampir semua urusan seksi menjadi urusanku, dari mulai pengawasan pembayaran masa, verifikasi, menyiapkan bahan untuk rapat sampai menjamin honor empat pegawai honorer yang sudah ada di Seksi Potput bertahun-tahun.

Hal yang bertentangan dengan hati nuraniku waktu itu adalah aku harus melakukan nego untuk menutup kas seksi, karena kalau aku tidak melakukan itu maka empat pegawai honorer itu tidak gajian. Padahal mereka mempunyai keluarga yang harus makan dan anak-anak yang harus

sekolah. Itulah konflik diri yang paling berat yang pernah aku rasakan dan ternyata aku tidak dapat membohongi diri sendiri, sebagai manusia biasa ternyata aku punya kelemahan dan aku tidak dapat menutup kelemahan itu .

Setelah mengalami sakit beberapa kali, akhirnya aku menemukan jati diri yang membuatku tidak bisa seperti orang-orang pajak pada umumnya. Akan tetapi aku yakin bahwa orang sepertiku tetap mempunyai manfaat walaupun tidak “lazim” pada saat itu. Bukankah Allah SWT menciptakan segala sesuatunya bermanfaat bagi kehidupan? Walaupun hanya setahun aku menjabat di situ, tapi kondisi saat itu benar-benar membuat aku berubah 180 derajat, dari seorang yang penurut menjadi seorang yang mencoba tegas dan kukuh pada prinsip.

Itulah kehidupan, justru dengan ditempa kondisi yang tidak kondusif itulah akhirnya aku bisa menentukan sikap dan berani menunjukkan prinsip hidup. Ibaratnya, untuk menjadi pisau yang tajam, sebungkah besi harus dibakar dan dipukul terus-menerus oleh pandai besi sehingga menjadi sebuah pisau. Memang sakit, hancur, tapi setelah berlalu ternyata bermanfaat buat kehidupan. Akhirnya aku dapat melalui semua itu dan bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Setelah posisi Kasubsi, aku dipromosikan ke kantor wilayah (Kanwil) selama hampir empat tahun dan selama di Kanwil itu pula tidak ada konflik diri lagi, karena tidak ada lagi tuntutan yang macam-macam.

Manusia berusaha tapi Allah jualah yang menentukan segalanya. Adanya Surat Keputusan (SK) mutasi jabatan dari Kasi di Kanwil menjadi Kasi Potput PPh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), membuat aku merasa Allah sedang mengujiku lagi untuk membuktikan pertobatanku dan komitmenku. Namun aku berusaha mencari jalan (kalau bisa) agar tidak pada posisi itu. Berbekal keberanian dan kejujuran, aku memberanikan diri menghadap Bapak Kepala Kanwil untuk menjajaki kemungkinan menukar SK mutasi tersebut. Karena aku yakin pada saat itu kursi Kasi Potput masih laku sehingga seharusnya tidak sulit untuk menukarnya. Biarlah aku di seksi nonteknis saja asal pikiran tenang dan tidak terjadi konflik batin lagi, bahkan kalau bisa ditukar. Ternyata Allah mempunyai rahasia lain, SK mutasi tidak bisa direvisi dan aku harus ikhlas menjalaninya.

Saat itulah aku merasa Dia belum menerima tobatku dan aku berkomitmen akan menunjukkan sekuat tenaga kesungguhanku bertobat dan akan mewarnai Seksi Potput sesuai dengan apa yang aku yakini kebenarannya, yaitu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melayani

dengan hati dan tidak bernegosiasi dengan Wajib Pajak (WP) bila ada pemeriksaan. Ternyata di luar dugaan, aku dipertemukan dengan anggota tim yang masih muda dan pintar-pintar dan pada saat komitmen awal ternyata mereka semuanya mau mengikuti usulanku untuk mencoba “*modern sebelum modern beneran.*” Anggota timku yang berjumlah tujuh orang itu merupakan karunia dari Allah SWT karena Dia telah membuka hati mereka sehingga mau mengikuti sesuatu yang dianggap mustahil pada saat itu. Siapa sih yang nggak mau duit pada saat gaji pas-pasan dan tuntutan kehidupan yang begitu berat? Tapi pada saat itu aku masih mengizinkan mereka menerima “terima kasih” yang wajar dan mereka selalu melaporkan apa pun yang terjadi kepada diriku. Sedangkan aku sendiri sesuai dengan komitmenku, tidak akan menerima apa pun, termasuk “terima kasih”. Bagian untuk Kasi dimasukkan kembali ke kas seksi dan dengan cara itulah keperluan seksi dipenuhi. Gaya manajemen yang belum ada teorinya di buku manajemen mana pun. Pada saat itu kami pulang kantor paling cepat jam 17.30 dan sering hari Sabtu kami masuk untuk merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa paksaan dan tanpa uang lembur semata-mata hanya karena rasa tanggung jawab.

Kepala kantorku (namun Allah SWT lebih menyayangi beliau sehingga telah memanggil pulang beliau) pada waktu itu ternyata bisa menerima dan malah mendukung komitmenku untuk tidak bernegosiasi dengan WP bila ada pemeriksaan, sehingga semua temuan masuk ke kas negara. Pada saat itu ada beberapa pemeriksaan yang membuat kami berbangga karena tidak sepeser pun kami menerima “sesuatu” ataupun “terima kasih” dan kami bisa memasukkan ke kas negara dalam jumlah yang cukup besar menurut ukuran kami, ratusan juta rupiah.

Namun apa pun yang disembunyikan akhirnya terbuka juga. Demikian pula dengan cara kerja kami yang sengaja kami sembunyikan ternyata akhirnya diketahui oleh pihak lain. Akhirnya tim kami menjadi buah bibir di antara para pemeriksa yang lain seolah mereka tidak percaya pada apa yang telah kami lakukan. Namun setelah mereka tahu memang begitu adanya, mereka pun maklum dan mulai tertarik ingin tahu bagaimana kami bisa seperti itu. Ada tiga WP BUMN yang pada waktu itu kami layani seperti itu. Dan ada satu WP (BUMN *catering* udara) yang merasa tidak percaya dengan pelayanan kami, mereka tetap mengajak makan di luar tapi kami menolak, mereka juga mengirim amplop dan tetap kami tolak. Akhirnya mereka mengirim kue ke kantor. Untuk yang ini akhirnya kami mengalah dan

menerima kue tersebut. Tetapi yang penting pada saat sebelum itu kami tidak pernah meminta dan menerima kue dari WP, meskipun pada saat itu bukan merupakan pelanggaran kode etik (karena belum ada ketentuan mengenai kode etik).

Ada rasa bahagia, percaya diri dan ihsan dalam dada, merasa Allah SWT begitu dekat dan melihat segala yang kami lakukan. Saat itu rasa kekeluargaan di antara anggota tim begitu kental. Silaturahmi kami berlanjut hingga kini walaupun masing-masing sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan kami tidak berada dalam satu tim lagi tapi kami tetap dekat. Lebih kurang tiga tahun aku menjalankan *ijtihad*-ku (kalau boleh dibilang begitu) dan syukur bisa berjalan baik tanpa masalah yang berarti. Pengalaman selama tiga tahun itu telah menginspirasi para anggota timku. Mereka semakin yakin bahwa menjadi fiskus yang bersih dan amanah adalah suatu keniscayaan. Dan bagi aku sendiri semakin menguatkan komitmen dan semakin bersemangat mengajak sebanyak-banyaknya teman menuju “modern”. Akhirnya begitu terbuka penawaran untuk mengikuti seleksi kantor modern yang sangat mensyaratkan integritas, kami ikut semuanya dan sekarang telah menjadi agen-agen perubahan di lingkungan masing-masing.

TIONGHOA

Tommy

Sejak zaman penjajahan di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah dibagi dalam tiga strata. Strata pertama adalah orang-orang Belanda dan Eropa, strata kedua orang-orang Asia Timur, dan strata ketiga adalah penduduk asli atau yang lebih dikenal dengan sebutan bumiputra. Sampai kemerdekaan Indonesia, bentuk ini sudah dihapus, tapi pembagian ini sangat berdampak bagi orang-orang Asia Timur, khususnya orang keturunan Tionghoa. Karena orang-orang keturunan Tionghoa dan Asia Timur lainnya tidak memiliki kesempatan dalam berkarier dalam bidang pemerintahan, maka mereka memilih melanjutkan hidup dengan cara berdagang atau berusaha.

Sebelum lahirnya undang-undang perpajakan tahun 1983, aparat pajak merupakan sosok yang begitu mengerikan bagi warga keturunan Tionghoa. Wajar saja mereka takut, karena sebagian besar berkecimpung dalam usaha berdagang dan biasanya dengan pola terpusat dalam kegiatannya. Mengapa aparat pajak sangat ditakuti? Karena mereka bekerja seperti intelijen yang memantau kegiatan warga Tionghoa, dan pada saat itu tata cara pemungutan pajak ditentukan oleh aparat pajak, bukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan penuturan ibu saya, dulu aparat pajak paling senang dengan tindakan menyegel tempat usaha seseorang apabila tidak membayar pajak sesuai dengan penetapan aparat pajak meskipun semuanya tanpa dasar hitungan yang jelas. Tambahnya lagi, ketika itu, ibu saya yang menjaga toko (pemilik toko adalah paman saya sendiri) didatangi oleh petugas pajak yang membawa segel untuk menyegel segala peralatan dan perlengkapan toko. Semua tempat tidak ada yang luput untuk disegel, bahkan sebuah laci tempat perlengkapan sembahyang di bawah altar leluhur pun ikut disegel. Ibu sempat berkata, “Apa hubungan antara penyegelan itu dengan altar sembahyang?” Namun petugas pajak itu tidak mau tahu. Ia malah marah dan berteriak, “Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Siapa suruh tidak bayar pajak. Kalau tetap gak mau bayar, lebih baik

pulang ke negaramu di Cina sana. Kalau mau cari makan di negara kami, kamu harus bayar, tidak usah banyak protes. Dasar Cina!”

Ibu sangat tersinggung dengan caci maki itu. Ibu hanya bisa menceritakan kembali hal itu kepada paman saya. Ibu menganjurkan paman untuk menantang orang-orang pajak itu supaya menghitung secara riil berapa pajak yang harus dibayar dan menuntut petugas pajak yang gaya bicaranya kasar tersebut. Tetapi paman lebih memilih untuk bekerja sama dan berdamai dengan petugas pajak, sehingga tidak perlu memperpanjang masalah. “Bagaimanapun kita sebagai orang Cina tidak akan pernah menang”, kata Paman. Akhirnya pajak yang dibayar adalah yang sesuai hitungan petugas pajak karena sesuai aturan pada waktu itu, yang menghitung pajak adalah petugas pajak, dan bukan Wajib Pajak. Sang petugas pajak itu pun diberi sedikit “uang rokok” untuk memproses secepatnya pelepasan segel.

Sampai dengan berlakunya undang-undang perpajakan pun, kondisi aparat pajak tidak jauh berbeda. Masih banyak praktik-praktik tidak terpuji dari petugas pajak untuk mendapatkan “sesuatu” dari Wajib Pajak. Saya masih ingat ketika duduk di bangku SMA, Ayah saya pernah dipanggil ke kantor pajak. Sebagai orang yang sangat awam, hitungan pajak masih dianggap sangat rumit dan susah untuk ditulis dan dilaporkan. Biasanya Ayah memakai jasa seorang petugas pajak untuk menghitung dan memperhitungkan berapa besar pajak yang harus dibayar. Petugas tadi tentunya diberi imbalan sejumlah uang. Beberapa kerabat ayah sering dipanggil ke kantor pajak dan disuruh untuk menaikkan angsuran pembayaran pajak, yang tentunya akhirnya mereka juga memberi uang sebagai sogokan.

Itulah secuil sketsa apa yang terjadi di masa lampau. Memang instansi pemerintah tidak hanya instansi perpajakan, tetapi setidaknya itu potret masa lalu yang ada dan terjadi pada keluarga saya sebagai pembelajaran di masa depan. Ketika mendaftar penerimaan pegawai di Departemen Keuangan (induk organisasi Ditjen Pajak), ibu memandang penuh pesimistis kepada saya. Ibu berkata, “Tidak ada WNI keturunan Tionghoa yang akan diterima di instansi pemerintah, terlebih lagi semacam Ditjen Pajak”.

Saya memaklumi pandangan Ibu seperti itu, mengingat pengalaman buruknya bersama petugas pajak. Tetapi saya optimis bahwa perubahan yang signifikan telah terjadi. Salah satu indikasinya adalah pola perekrutannya melalui sistem *online* dan terpusat, yang sangat kecil

kemungkinannya untuk dipelintir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Akhirnya saya pun diterima di instansi yang begitu prestisius bagi saya. Dan yang lebih membanggakan lagi saya sudah menjadi bagian yang akan terlibat dalam mensukseskan reformasi menuju modernisasi organisasi yang telah menanamkan prinsip profesionalisme dan integritas bagi setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saya telah mengubah persepsi Ibu dari pesimistis menjadi suatu kenyataan yang dapat dibanggakan oleh semua orang di negeri kita yang tercinta ini.

Telah banyak langkah-langkah konkret dari DJP melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) yang telah memberi sanksi bagi oknum-oknum pegawai yang tidak bisa mengikuti prinsip modernisasi yang telah dikumandangkan sejak tahun 2002. Pemecatan secara tidak hormat merupakan sebuah sanksi yang merupakan sanksi ideal bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin dengan sanksi ini bisa memberi *deterrent effects* bagi pegawai DJP, karena sudah sering dilakukan di perusahaan-perusahaan yang menerapkan manajemen yang modern, mengingat ‘harga’ kepercayaan seseorang begitu ‘mahal’ untuk ukuran saat ini.

Sebagai WNI keturunan Tionghoa, saya memiliki rasa bangga akan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Saya merasa yakin bahwa saya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa, menurut saya ada beberapa tipikal dan karakteristik orang-orang Cina yang membuat mereka bisa sukses :

- Kalau punya uang, lebih baik ditabung atau diinvestasikan kembali, meskipun baju sudah butut.
- Kalau ada lembur paling senang, sehingga bisa menambah penghasilan dan bekerja dengan giat (keuletan).
- Hidup sederhana, dengan prinsip “bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”.

Bangsa Cina dikenal sebagai bangsa yang telah bermigrasi ke seluruh penjuru dunia, mungkin karena di negara asalnya sering dilanda masalah. Sebagai bangsa pendatang, bangsa Cina sering dipandang oleh penduduk asli sebagai bangsa yang kelihatannya buas dalam bisnis, tamak dan rakus. Menurut saya itu karena orang-orang keturunan Tionghoa sejak dulu memang memiliki keahlian dalam dunia perdagangan dan tidak banyak

bidang lain yang mereka kuasai. Karena filosofi/karakteristik di atas, dan dilandasi dengan semangat dan kerja keras, mereka menjadi cukup berhasil di bidangnya sehingga boleh dikata orang-orang Cina telah memegang ekonomi Indonesia. Dengan semangat itulah, orang-orang Cina tidak menyerah pada nasib ketika merantau dan selalu ingin meningkatkan taraf hidupnya.

Tidak ada salahnya kita sebagai Warga Negara Indonesia bisa memetik kebudayaan orang-orang keturunan Tionghoa untuk bisa eksis dalam hidup sehari-hari. Saya tidak merasa berbeda dengan warga Indonesia lainnya, meskipun sebenarnya tidak patut karena WNI keturunan Tionghoa pun sebenarnya juga warga Indonesia. Kalau Inggris Raya (Britania Raya) pernah berjaya sebagai Negara Adikuasa, dengan semboyan “*Britain Rules the Waves*“, yang artinya “tidak ada matahari yang tenggelam di wilayah Inggris Raya” (karena luasnya wilayah jajahan Inggris), demikian halnya saya sebagai warga keturunan Tionghoa pun bisa berbangga dengan pemikiran bahwa semangat dan kerja keras “*Chinatown* telah tersebar di seluruh penjuru dunia”.

*Today is the first day of the rest of your life,
Yesterday is a dream, and tomorrow is a vision;
Today well-lived as if it is the only day you have,
Make every yesterday a dream of happiness,
And every tomorrow a vision of hope.*)*

*) Dikutip dari Buletin Buddhajayanti (Media Komunikasi Vihara Girinaga) edisi ke-100, September 2009

JANGAN BUANG

Marihot Pahala Siahaan

Modernisasi DJP. Suatu kata yang selalu meningkatkan adrenalinku setiap kali membicarakannya. Khususnya bila aku membicarakannya dengan pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada kebanggaan, yang kadang berlebih, bahwa DJP sedang melaksanakan modernisasi dan selalu kuyakini keberhasilannya. Karena itu aku akan sangat bersemangat untuk membicarakannya, dengan harapan bahwa semangat modernisasi DJP juga dapat menular ke instansi lain, bahkan kalau bisa pada seluruh komponen bangsa Indonesia. Aku sangat yakin bahwa modernisasi DJP yang merupakan bagian kecil dari reformasi birokrasi, kalau berhasil akan membawa bangsa ini ke arah kehidupan yang lebih baik. Mungkinkah? Saya tahu pasti jawabannya adalah “**sangat mungkin**”. Optimisme yang berlebihan? Hidup memang harus optimis khan?

Pada suatu pelatihan *Training of Trainers* (TOT) Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan diikuti oleh peserta dari berbagai instansi (Eselon I) di Departemen Keuangan dan Departemen lainnya pada bulan Maret 2008, aku ditanya oleh salah seorang peserta dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya, apakah memang modernisasi DJP sudah berjalan dengan benar dan pegawai sudah “bersih” semua? Suatu pertanyaan yang sangat menarik dan menantang. Sebagai pegawai DJP yang sangat meyakini bahwa modernisasi DJP sedang berlangsung dan berproses mengarah pada tujuan yang ditetapkan, aku meyakinkan rekan tadi bahwa sistem yang dibangun dalam modernisasi DJP akan membawa DJP menjadi instansi yang semakin bersih dan memenuhi harapan masyarakat. Sistem yang akan membuat pegawai berpikir berulang kali untuk melakukan pelanggaran. Sistem yang digariskan oleh pimpinan DJP dan diyakini akan berhasil.

Pertanyaan lain yang menarik dari rekan tadi, kemudian muncul lagi. Apakah mungkin? Bukankah DJP masih dihuni oleh pegawai lama, yang telah terkontaminasi akan manisnya kekuasaan untuk memperoleh uang dari jabatannya? Paradigma yang telah melekat, bahkan dalam masyarakat, DJP adalah instansi yang sangat rentan KKN.

Pertanyaan yang sangat masuk akal bukan? Bagaimana menjawabnya? Aku teringat akan pengalamanku melaksanakan Diklat Sistem Administrasi Modern (SAM) di lingkungan Kanwil DJP D.I. Yogyakarta di bulan Nopember dan Desember 2007. Betapa bersemangatnya teman-teman mengikuti Diklat SAM yang kami selenggarakan. Betapa dengan Diklat SAM, semangat modernisasi DJP yang digariskan oleh pimpinan DJP diterima oleh semua pegawai, dengan harapan dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas.

Dengan tersenyum aku jawab pertanyaan rekan tadi dengan sebuah perumpamaan. “Ada sebuah rumah yang lantainya sangat kotor. Selama ini rumah tersebut selalu disapu dengan sebuah sapu. Sapu yang sama, sehingga sapu tersebut lama-lama menjadi kotor. Dapat dipastikan bahwa hasil sapuan tidak maksimal, sehingga ruangan tersebut tetap saja kotor. Suatu ketika, pemilik rumah berkeinginan untuk membersihkan lantai tersebut sebersih-bersihnya, karena akan datang tamu istimewa. Untuk itu dia dihadapkan pada kenyataan pembersihan harus segera dilakukan tetapi sapu yang tersedia dan dapat digunakan untuk tujuan tersebut hanyalah sapu yang masih baik dan berfungsi, tetapi dalam keadaan kotor. Tentunya dia juga memiliki pilihan lain, yaitu mencari sapu lain yang masih bersih. Hanya saja itu berarti harus ada upaya lebih (*extra effort*) dari orang tersebut, yaitu membeli sapu terlebih dahulu, baru menggunakannya untuk menyapu lantai tersebut. Tentunya bila sapu baru sudah dapat digunakan, maka sapu pertama disingkirkan saja. Pilihan mana yang akan diambil pemilik rumah tersebut?”

Rekan tersebut berkata, “Pilihan kedua adalah lebih baik, karena hasil akhir lantai akan lebih bersih karena sapunya masih bersih”. “Ya betul sekali”, jawabku. Lalu aku lanjutkan, “Hanya saja untuk pilihan kedua dibutuhkan upaya lebih, yaitu uang untuk membeli sapu baru dan waktu serta tenaga untuk mencari sapu yang akan dibeli tersebut. Memang, hasilnya akan diperoleh lantai yang bersih. Tetapi bukan berarti pilihan pertama tidak bisa dipertimbangkan, bukan? Mengingat sapu yang ada masih dapat digunakan, bukankah pemilik rumah sebenarnya dapat tetap menggunakannya? Tentunya setelah terlebih dahulu mencuci sapu itu sebersih mungkin. Kemudian dapat digunakan untuk menyapu lantai yang kotor. Mungkin hasilnya belum maksimal. Untuk itu sapu tersebut perlu dicuci kembali setelah digunakan menyapu. Setelah bersih gunakan untuk menyapu lagi. Dalam proses pencucian tersebut kerap dijumpai beberapa helai ijuk sapu yang terlepas karena rusak, otomatis ijuk tersebut tidak dapat

lagi digunakan untuk menyapu. Tapi inilah konsekuensi dari pencucian sapu tersebut”.

Kondisi perumpamaan tersebut berlaku di DJP. Sapu lama dengan ijuk yang ada pada sapu tersebut dapat disamakan dengan pegawai DJP yang ada saat ini. DJP berubah untuk mencapai tujuan menjadi institusi yang terpercaya dalam mengemban tugas memasukkan pajak ke kas negara. Pilihan untuk pelaksanaan modernisasi ini adalah mengganti pegawai yang telah ada dengan pegawai baru atau tetap memberdayakan pegawai yang ada yang telah memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh DJP. Merekrut pegawai baru yang diyakini “masih bersih” dan “membuang” pegawai yang ada bukanlah pilihan yang terbaik karena membutuhkan waktu dan biaya, sementara pegawai yang akan diperoleh belum tentu memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan DJP.

Mempertahankan pegawai lama akan membuat pelaksanaan pekerjaan berlangsung dengan lancar. Hanya saja masalah integritas pegawai yang rentan dengan tindakan KKN harus diperhatikan. Untuk itu para pegawai diperkenalkan dengan sistem administrasi modern sedini dan *se-intens* mungkin. Selain itu pengawasan internal ditingkatkan untuk mengatasi pegawai yang masih bertindak tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini ibarat pencucian terhadap sapu lama yang selalu dilakukan oleh pimpinan DJP. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan kode etik pegawai dan internalisasi kode etik setiap saat. Dalam proses ini mungkin saja ada “beberapa helai ijuk sapu” yang terlepas, tetapi itu adalah konsekuensi bagi “helai ijuk sapu” yang telah rusak dan harus dilepaskan agar tidak mengganggu kinerja sapu secara keseluruhan.

Rekan tadi tampaknya memahami ceritaku. Dan itulah hal yang kuharapkan, disertai doa semoga pembicaraan ini membawa perubahan bagi dia juga dalam bekerja di instansinya. Obrolan tadi selalu kuingat. Bahkan pada saat aku kemudian berkesempatan menjadi trainer dan mengajar pada PPAKP mulai tahun 2008 sampai sekarang. PPAKP adalah suatu program yang diadakan oleh pemerintah untuk melatih para pembuat laporan keuangan pemerintah dari semua satuan kerja (Satker) yang ada pada kementerian dan lembaga non departemen di seluruh Indonesia. Maksudnya adalah agar laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan apabila diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lagi memperoleh predikat *disclaimer* (tidak memberikan pendapat).

Peserta PPAKP berasal dari berbagai instansi dari seluruh Indonesia. Hal ini membuat aku dapat bertemu dengan pegawai dari berbagai penjuru Indonesia. Dari perbincangan dengan para peserta di dalam maupun di luar kelas, aku mengamati bahwa reformasi birokrasi adalah suatu keharusan demi perbaikan kinerja pemerintahan. Hal ini membuat aku bersemangat untuk berbagi tentang modernisasi DJP dengan para peserta. Dan biasanya mereka akan sangat antusias, dan bertanya apakah instansi mereka juga dapat berubah sebagaimana DJP? Tanpa keraguan dan dengan penuh keyakinan aku akan berkata “Bisa, kenapa tidak”.

Materi yang sering kusampaikan adalah “Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah” (PKKIP). Dalam memberikan penjelasan akan materi ini aku sering menggunakan DJP sebagai contoh. Bagaimana sistem yang dikembangkan di DJP, termasuk penerapan *Key Performance Indicator* (KPI), yang saat ini sudah diperbarui menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Sungguh bangga untuk menyampaikan fakta bahwa DJP sudah menggunakan IKU dalam mengukur kinerja instansi, sementara sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang PKKIP, keharusan penggunaan PKKIP pada setiap instansi pemerintah paling lambat diterapkan tahun 2010. Sungguh bangga rasanya karena aku menjadi bagian dari DJP, instansi pemerintah yang selalu terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Satu harapan yang selalu kutanamkan pada para peserta diklat. Instansi mereka, sebagaimana DJP membutuhkan pegawai yang berintegritas baik, tidak hanya pegawai yang memiliki kemampuan teknis *mumpuni*. Karena itu modernisasi DJP selalu kujadikan contoh. Bila ada pertanyaan “mungkinkah instansi dapat berubah sementara masih dihuni oleh pegawai lama?” maka dengan senang hati dan penuh keyakinan aku akan menceritakan kisah tentang sapu tadi. Cerita yang sama seperti kusampaikan kepada teman pada pelatihan TOT PPAKP. Dengan pesan yang sama, “*Jangan buang sapunya, bersihkan!*” Semoga.

TERBANG DI AWAN

Irwan Aribowo

Kisah nyata ini, barangkali merupakan hal yang tidak terlalu istimewa bagi banyak orang, namun bagi saya, hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat ‘luar biasa’. Saya menemukan sebuah pelajaran berharga, suatu tekad kejujuran dan keinginan berubah. Cerita ini terjadi di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa, pada saat belum memasuki era reformasi, namun agenda modernisasi sudah mulai digulirkan, berikut ini kisah selengkapnya.

Seperti hari-hari sebelumnya, kembali beliau datang ke ruangan saya. Dengan wajah yang penuh dengan rasa kebingungan dan tekanan, beliau menyampaikan dan menumpahkan kegalauan hatinya. Sebut saja beliau dengan nama Pak Fulan (bukan nama sebenarnya). Jabatan beliau adalah sebagai Kepala Seksi di salah satu seksi teknis. Memang, kita harus jujur mengakui bahwa beban dan tanggung jawab seorang Kepala Seksi teknis saat itu sangatlah besar, selain harus mendukung pencapaian target penerimaan negara (KPP) juga tidak boleh ketinggalan (hukumnya mungkin mendekati wajib) adalah mencari target anggaran kantor lainnya dalam bentuk ‘dana taktis’.

Singkat cerita, Pak Fulan mengalami kendala perang batin yang sangat hebat ketika beliau sudah mulai ingin berubah dan berniat untuk memulai pekerjaan dengan jujur dan sebaik-baiknya. Alasan beliau sangat realistis, karena modernisasi DJP yang sudah mulai digulirkan, tinggal menunggu waktu saja sampai ke kantor kita. “Inilah kesempatan berubah, mau kapan lagi? Masa terus-terusan kita selalu berbohong dalam bekerja?”, begitu yang sering beliau curhat-kan. Dalam kondisi riil dimana beliau harus berinteraksi dengan kepala kantor maupun lingkungan kantor, terlebih di seksi yang harus beliau kelola, pertentangan dalam hati selalu muncul. Bukan murni masalah pekerjaan melainkan embel-embel ‘dana taktis’ yang harus beliau penuhi. Setiap rapat pembinaan, hampir selalu saja beliau kena marah kepala kantor, dari sudut apa saja selalu dianggap salah. Sikap kepala kantor kepada Pak Fulan dirasakan sangat tidak mengenakkan bahkan terkesan selalu memojokkannya dan menganggapnya tidak bisa bekerja. Semprotan

amarah tersebut sudah dirasakan dan disadari oleh Pak Fulan karena keinginan yang sangat dari kepala kantor agar Pak Fulan melakukan sesuatu yang ‘lebih’ terutama dalam memenuhi pundi-pundi ‘dana taktis’ kantor.

Seiring dengan berjalannya waktu, kami terus saling bersilaturahmi dan berdiskusi dalam “mengatur strategi” dalam bekerja dan menghadapi atasan kami, hingga suatu saat pada waktu selesai sholat Ashar, tiba-tiba beliau muncul di mulut pintu ruangan saya. “Saya seperti terbang di awan Pak...” begitu ucapan beliau dengan wajah yang sangat cerah. “Apa yang terjadi, Pak?” tanya saya. Selanjutnya Pak Fulan menceritakan kejadian yang baru dialaminya. “Tadi selesai sholat Ashar, dengan terlebih dahulu membaca Basmallah, saya nekad masuk ke ruangan kepala kantor minta waktu untuk menyampaikan uneg-uneg saya dan tekad saya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak mau lagi melakukan KKN!”. “Lalu, bagaimana respon kepala kantor?” tanyaku penasaran karena begitu cepatnya beliau mengambil sikap. “Kepala kantor akhirnya mau nggak mau bahkan terpaksa harus menerima dan memahami keinginan saya Pak” ujar Pak Fulan. “Alhamdulillah..., selamat Pak”, sambutku sambil menyalami beliau.

Sejak saat itulah, tampak banyak perubahan dari Pak Fulan. Dalam kesibukannya sehari-hari terlihat wajah yang segar dan cerah. Bahkan, kepala kantor pun terlihat ‘respect’ dengan beliau. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, karena telah Engkau berikan tambahan orang-orang baik di sekeliling-ku. Amin.

(mengenang sahabatku “I”)

YANG MANA LAGI

Dadi Gunadi

Modernisasi banyak menyimpan kisah yang membuat hati ini bertambah syukur kepada Yang Maha Kuasa. Salah satunya karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati alam modernisasi ini, alam yang membawa jiwa raga ini meninggalkan alam jahiliah. Jahiliah? Ya, betul. Anda tidak salah baca. Yang saya maksud dengan masa jahiliah adalah masa dimana kebenaran menjadi suatu bahan tertawaan dan olok-olokan, masa dimana kejahatan berdasar menjadi hal yang lumrah dilakukan, masa dimana harta haram dan *syubhat* menjadi hal yang membanggakan, masa dimana “setoran” menjadi alat perekat atasan dan bawahan dan sejenisnya.

Bagi saya, mungkin juga Anda, modernisasi ternyata bukan mimpi. Ya, karena modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) inilah yang membuat niat saya untuk keluar dari DJP untuk menjadi widyaiswara tidak jadi. Bagaimana mau keluar dari DJP, padahal modernisasi telah membuat penghasilan meningkat signifikan, jenjang karir pun sudah mulai jelas. Kini senioritas tidak terlalu penting dibanding kinerja. Buktinya banyak yang muda-muda sudah jadi kepala kantor ataupun eselon tiga lainnya. Jangan lupa dan yang sangat penting adalah, kerja dengan hati nyaman, tenang tanpa harus berbuat yang tidak sesuai hati nurani dengan dalih perintah atasan. Oh, nikmat yang mana lagikah ya Allah yang aku lupakan?

Bagi saya, mungkin juga Anda, modernisasi membuat harta saya bertambah barokah, bisa mencicil rumah, punya *laptop*, cuma.... belum sempat aja mencicil kendaraan, dan ...di tahun-tahun mendatang insya Allah umroh dan naik haji bukanlah impian. Amiin. Oh, nikmat yang mana lagikah ya Allah yang aku lupakan?

Bagi saya, mungkin juga Anda, modernisasi membuat integritas dan profesionalitas kerja Anda meningkat, harapan untuk mengikuti diklat, *training* dan mendapatkan beasiswa semakin terbuka lebar. Tidak mesti harus kenal dengan orang Kantor Pusat baru bisa dipanggil diklat. Alhamdulillah, nikmat yang mana lagikah ya Allah yang aku lupakan?

Bagi saya, mungkin juga Anda, modernisasi membuat orang tua, istri dan anak-anak saya bangga dan bahagia. Dan membuat diriku juga tidak

malu menjawab kalo ada yang nanya ”Kang, kerja dimana ?”, “di Kantor Pajak”, jawabku. Padahal, dulu aku sering menjawab “di Depkeu” saja. Maluuu..., karena *image* orang pajak dulu itu sangatlah “korup” meski banyak juga yang “lurus-lurus saja”. Jadi, nikmat yang mana lagikah ya Allah yang aku lupakan?

Bagi saya, mungkin juga Anda, modernisasi mungkin membuat tempat tugas saya ataupun Anda jauh dari keluarga. Bisa jadi Anda sekarang seminggu sekali pulang-pergi naik bis atau kereta api. Bisa jadi malah sebulan sekali Anda baru bisa terbang dengan pesawat untuk melepas kerinduan dengan keluarga yang Anda cintai. Namun, itu adalah sebagian dari harga sebuah reformasi yang terbungkus dalam suatu modernisasi. Karena reformasi membutuhkan “pasukan-pasukan yang militan” yang siap ditebar di ladang mana saja di negeri tercinta ini untuk menjadi “pupuk-pupuk” modernisasi. Berbahagialah apabila Anda termasuk yang berada di dalamnya. Jadi, nikmat yang mana lagikah ya Allah, yang aku lupakan? Hingga hari ini, saya bisa ikut berbangga dan ikut berkata lantang:

Ayo teruskan modernisasi !

Jalan terus jangan sampai berhenti!

Meski banyak rintangan dan duri !

Tak usah bimbang apalagi ngeri !

Kami siap untuk berbakti, demi bangsa dan negeri ini !

Untuk menggapai harapan diri dan ridho Illahi Robbi !

INDAH PADA WAKTUNYA

Eko Yudha Sulistijono

Sungguh, aku tidak percaya kalau nasibku bisa berubah. Karena bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (sebelum modernisasi), sepertinya bukan ‘Allah’, tetapi ‘uang’ yang maha kuasa. Bila Anda punya uang, maka posisi dan pengaruh apa pun bisa Anda raih. Maka, orang-orang kecil seperti saya hanya akan menjadi penonton di pinggir lapangan yang bertepuk tangan dengan terpaksa atas permainan “uang yang maha kuasa”. Sangat mustahil bagi saya menjadi pemain, apalagi sampai menyarangkan gol indah. Namun kini, semuanya seperti berbalik dengan begitu mudah. Keadilan itu menjadi mungkin, kesempatan itu menjadi sangat dekat. Asa yang pernah kukubur dalam-dalam kini bersemi seperti rerumputan menggapai hujan.

Inilah ceritanya.

Awal aku bekerja di DJP tidak pernah terbersit keinginan yang aneh-aneh, bekerja ya bekerja saja. Apalagi aku tidak tahu apa dan bagaimana bekerja di Pajak itu. Aku tidak pernah mengenal orang pajak sebelumnya. Aku hanya cukup bangga bahwa statusku sebagai PNS. Bahkan, ini pun tidak menolongku untuk mendapatkan seorang pendamping. Aku harus minta tolong seorang ustadz di Al Mukmin Ngruki untuk menggenapkan agamaku.

Awalnya biasa-biasa saja. Aku cukup bahagia dengan istri tercinta. Dengan gaji & Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Negara (TKPKN) yang kuterima aku bisa hidup cukup walau setiap tahun harus memikirkan kontrakan. Aku tidak peduli dengan teman-temanku yang dengan segera memiliki rumah, motor, mobil dengan status lajangnya. Bahkan saudaraku sendiri yang dulu sama-sama prihatin saat kuliah di Jurangmangu kini jauh meninggalkanku. Tapi saat itu aku merasa paling kaya. Bukankah seorang istri solehah adalah kekayaan yang tiada terhingga? Yang selalu mengingatkanku bahwa ada kekayaan yang tiada terbayangkan di akhirat nanti.

Aku mulai apatis dengan institusiku. Bukan saja karena nasibku yang tiada harapan, namun karena citra buruk yang melekat padanya. Tetangga atau orang-orang yang ketemu di jalan selalu mencibir bila aku bilang

bekerja di pajak, tetapi di sisi lain mereka juga berespektasi terlalu tinggi. Mereka selalu bilang kalau kantor pajak bergelimang uang korupsi (dengan nada sinis), tetapi mereka juga bilang kalau aku orang bodoh karena tidak mampu memanfaatkan kesempatan. Masyarakat kita agaknya sudah sangat permisif dengan moralitas. Orang tuaku (ibuku) walaupun sepertinya mendukungku, tapi aku tahu beliau menginginkan aku seperti saudaraku. Aku benar-benar dalam persimpangan. Di lubuk hatiku aku menginginkan surga yang selalu diceritakan istriku, tapi realitas selalu mendorongku untuk berpikir pragmatis. Ya Allah, kapan pertolongan itu datang.

Saat modernisasi mulai bergulir, aku tidak peduli dengan hiruk pikuknya. Pikirku saat itu, itu hanyalah omong kosong di siang bolong. Itu hanyalah *move* anak-anak muda menuju kursi kekuasaan. Selebihnya hanyalah mars yang dinyanyikan di rapat-rapat. Aku tidak peduli dengan janji remunerasi, yang aku pikirkan hanyalah nasib anak-anakku di kemudian hari. Maka aku tetap menjadi manusia apatis yang meratapi nasib buruk yang tak berkesudahan. Yang aku syukuri, aku tidak sampai berprasangka buruk kepada Tuhanku.

Namun rupanya Allah berkehendak lain. Modernisasi itu bergulir dengan cepat melumat sekat-sekat kekuasaan yang telah kokoh dibangun dengan uang. Manusia-manusia congkak yang dulu merasa sangat perkasa, kini uangnya tidak mampu menolongnya. Aku segera terbangun dari keputus-asaan. Ya Allah, ternyata pertolongan-Mu begitu dekat. Dengan sisa-sisa harapan kubangun asa baru jauh melampaui tingginya awan. Kenapa tidak? Bukankah kini manusia gembel mempunyai kesempatan yang sama dengan manusia terhormat.

Aku mulai memiliki kepercayaan diri. Dengan remunerasi baru yang kuterima aku berani menyekolahkan anakku di sekolah terpadu yang *full day school*. Alhamdulillah aku juga sanggup menempati rumah yang layak milik sendiri. Kini, aku tidak lagi harus berbohong sebagai buruh pabrik tekstil, atau turun angkot jauh dari kantor. Aku punya keberanian untuk mengatakan “aku orang pajak”. Modernisasi mungkin jawaban Tuhan atas doaku dan doa orang-orang yang senasib denganku. Dulu, di akhir tahajudku selalu kulantunkan doa, “Ya Allah bukakan pintu rizki-Mu sedikit saja, aku khawatir meninggalkan anak keturunanku dalam keadaan lemah”. Tapi Allah menjawabnya dengan jumlah yang tak kuduga. Jumlah yang jauh melebihi kebutuhanku.

Kawan, aku jadi teringat puisi yang kutulis di masa susah dulu. Puisi untuk membesarkan hati anak-anakku, terkhusus hatiku sendiri yang sempat nyaris berputus asa bahwa Allah akan menjadikan semuanya indah pada waktunya.

Semua Akan Menjadi Indah Pada Waktunya

Kun Fayakun!

Ribuan galaksi tercipta dalam kedipan mata

Tapi tak..

Dia menciptanya dalam enam masa

Kun fayakun!

Semesta raya luruh seketika

Tapi tak..

Dia kabarkan tanda-tanda kehancurannya

Aha!

Pasti Tuhanku tidak sedang bermain-main.

Apalagi main dadu, koprok, rolet, cap jie kia

Subhanallah

*Dia sedang mengajar manusia,
bahwa semua akan menjadi indah pada waktunya*

TAK ADA AKAR

Tjandra Prihandono

Lima tahun lalu tepatnya bulan September 2004, aku, seperti hari-hari sebelumnya, hampir setiap sore selalu hadir dalam pembahasan persiapan dan penyusunan konsep-konsep aturan peralihan KPP/KPPBB/Karikpa kepada KPP Pratama. Maklumlah sejak Juli 2004 Kanwil DJP Jakarta I yang saat ini lebih dikenal dengan Kanwil DJP Jakarta Pusat, adalah Kanwil yang menjadi *prototype* Kanwil yang menerapkan Sistem Administrasi Modern DJP.

Hampir setiap sore kami selalu berkumpul di ruang aula /ruang rapat Kanwil DJP Jakarta I tepatnya di gedung A lama lantai 4. Ruang rapat itu cukuplah sederhana namun tidak mengurangi semangat kami untuk selalu berdiskusi dan tukar pendapat dengan serius untuk menyusun langkah-langkah kesuksesan kanwil dalam menerapkan Sistem Administrasi Modern (SAM). Kala itu keseriusan kami tidak menjadikan “rapat” kami “kaku”. Rasa kebersamaan yang begitu terjaga dengan santun, ada senda gurau ada pula canda tawa. Tidak ada arogansi Kakanwil, tidak ada superioritas para Kabid dan tidak ada ego para Kepala Seksi. Semua menghablur menjadi satu tekad, mensukseskan penerapan SAM walau dengan segala keterbatasannya. Masih terngiang kata-kata yang memompa semangat kami saat itu bila kami terkendala dalam sarana dan prasarana, “Tidak ada rotan akar pun jadi, tidak ada akar rumput pun jadi”, demikian kata Bapak Kepala Kanwil ketika itu, dan kami pun terus bekerja dengan tetap semangat.

September 2004 itu begitu istimewa, kami mendapat kabar bahwa keputusan tentang pemberian tunjangan khusus bagi pegawai di lingkungan Kanwil dengan sistem administrasi modern telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Terlihat wajah cerah dan penuh semangat melingkupi wajah kawan-kawan dan atasan kami. Semangat pun terus menggelora untuk membentuk *prototype* KPP Pratama yang harus selesai pada bulan Desember 2004. Kabar itu membuat bayangan *take home pay*-ku yang akan meningkat karena rapel tunjangan khusus selama tiga bulan dari Juli sampai dengan September dengan hitungan kasar berkisar duapuluh-an juta. Asa itu akhirnya sirna karena tunjangan khusus itu diberikan terhitung sejak bulan

Oktober. Waktu itu kami sedikit kecewa, namun kekecewaan itu tidaklah terlalu lama, teman-teman yang selalu mengingatkan, “Yang penting, Tunjangan Khusus telah disetujui, berarti kepastian Modernisasi DJP terus berlanjut.” Kami pun aktif kembali hampir setiap sore hadir di ruang rapat untuk berdiskusi lagi untuk kesempurnaan pengalihan dan pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta I.

Diskusi-diskusi itu berjalan bagai air yang mengalir, kadang kala tenang kadang kala bergelombang. Para Kabid dan Kakanwil silih berganti hadir menyejukkan suasana saat diskusi mulai hangat, dan solusi demi solusi pun terus didapatkan dalam suasana penuh kekeluargaan.

Hari-haripun berlalu, KPP Jakarta Gambir II telah berubah menjadi KPP Pratama dan namanya menjadi KPP Pratama Jakarta Gambir II. *Prototype* itu akan diterapkan pula pada KPP/KPPBB serta Karikpa. Kamipun secara bersama-sama terus mengumandangkan gema modernisasi baik kepada sesama pegawai di lingkungan kanwil juga kepada pihak lain seperti para Wajib Pajak, aparat Pemda dan pihak lainnya, tentu saja dengan tidak meninggalkan tugas pokok untuk mengamankan penerimaan. Banyak masukan dari luar maupun dari dalam DJP, ada kritik saran yang membangun dan banyak pula sindiran yang mematahkan semangat. Sindiran “orang tersesat di jalan yang benar” atau “orang modern di lingkungan tradisional” membuat kami hanya bisa tersenyum.

Sekitar Februari 2005, saat itu suasana Rapat Koordinasi sedang hangat membahas topik persiapan pembentukan empat belas KPP Pratama lainnya yang diamanatkan selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Maret 2005, namun suasana menjadi cukup gaduh karena tersiar kabar pembentukan diundur sampai akhir Desember 2005. Ada wajah-wajah kegirangan ada pula wajah-wajah yang menanti sebuah kepastian, kami hanya bisa diam dan saling pandang dengan sebuah harap semoga kabar itu tidak benar.

Minggu demi minggu terus berlalu, apa yang kami cemaskan tidaklah terjadi karena ada berita bahwa KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta I harus tuntas bulan Juli 2005, dan bergulirlah KPP Pratama secara bertahap walau diisi oleh pejabat sementara. Tantanganpun kembali bergulir, teknologi, sarana dan prasarana sangatlah terbatas.

Detik demi detik berlalu. Menyusun rencana kerja, membuat konsep-konsep usulan aturan peralihan, usulan Uraian Jabatan, persiapan materi paparan dan sosialisasi, menerima tamu dari luar, peninjauan kesiapan di

lapangan dan tidak lupa melakukan langkah-langkah pengamanan rencana penerimaan yang tidak mengesampingkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Di samping itu, komunikasi dan konsultasi dengan Kantor Pusat juga merupakan rutinitas sehari-hari. Dengan keterbatasan yang ada, kadang kala membuat kami merasa seperti bayi yang dilahirkan namun tercampakkan, dibiarkan kedinginan dan dibiarkan kepanasan, tetapi semangat terus digelorakan untuk keberhasilan *pilot project* ini.

Saat ini lima tahun telah berlalu, apa yang dulu dicita-citakan sekarang telah menjadi kebanggaan. Dari berita pelambatan modernisasi sampai dengan percepatan modernisasi silih berganti berhembus. Banyak sudah kendala dan hambatan yang ternyata dapat diselesaikan, banyak pula sindiran dan cemoohan yang bisa dipatahkan dan banyak pula yang dulu pesimis, saat ini berubah optimis. Masih terngiang sebuah kata yang lima tahun lalu menyemangati kami **“tidak ada rotan akar pun jadi, tidak ada akar rumput pun jadi.”**

MABOK ANGKOT

Rini Raudhah Mastika Sari

Alkisah setahun yang lalu suasana kantor terasa tegang dan mengharukan, Surat Keputusan (SK) Mutasi Pelaksana dan AR, keluar. Bagi rekan-rekan yang masih ditempatkan di kota, tidak bisa bersyukur 100% karena ada rekan-rekan lain yang di mutasi ke daerah-daerah. Bagi yang dimutasi ke kantor baru, jelas ada yang kecewa, bahkan ada yang menangis, tapi itulah... sebagai PNS kita sudah bersedia ditempatkan di mana saja, tidak pandang bulu.

“Kenapa aku harus keluar dari sini?”, tanya karibku yang dipindah ke daerah, matanya sembab sisa tangis tadi malam. Aku tidak sanggup berkata apa-apa, mutasi karyawan dalam rangka modernisasi memang sudah diketahui, namun bagi kami kaum perempuan, kami hanya menyiapkan mental untuk dipindah ke tempat yang tidak jauh. Bahkan aku pribadi sudah janjian dengan karibku (kebetulan statusnya masih *single*), bila dia dipindah ke kota yang kumau, kami akan bertukar tempat. Ternyata dia memang dipindah tapi di kota yang jauh dari bayangan kami, jauh dari perhitungan kami, di KPP Pratama Barabai, kurang lebih 4 jam perjalanan dari tempat kami saat ini. Dia menangis, dia bukan wanita yang mudah bepergian. Aku ingat betapa tersiksanya dia saat naik bus menuju Balai Diklat Balikpapan, hampir tidak pernah berhenti dia muntah, apalagi bila harus tiap minggu pulang pergi naik angkot? Duh..., aku tidak bisa membayangkan tubuhnya yang kurus akan semakin mengecil.

Dia tidak menuntut janji kami untuk bertukar tempat, karena baik dia maupun aku sama-sama tahu hal itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Apa jadinya bila aku nekat mengganti posisinya, sementara 3 orang anak-anakku yang masih kecil beraktivitas dikota kami saat ini. Seandainya karibku dipindah di KPP yang hanya berjarak 1 jam perjalanan dari kota kami (seperti perjanjian kami), bisa saja pertukaran itu terjadi. Tapi rupanya Allah SWT berkehendak lain, jadi yang bisa kulakukan hanya mencoba menghiburnya dan mencoba mengatakan bahwa apa pun yang terjadi, bahagia maupun sedih, sedikit maupun banyak, pasti dibalik itu ada hikmahnya.

Walhasil karibku berangkat ke tempat tugasnya yang baru. Dia dan yang lain benar-benar *'mbabat alas'* karena KPP Pratama Barabai adalah KPP pemekaran. Aku sendiri di-Nota Dinas-kan di Seksi Pelayanan di KPP Pratama Banjarmasin dan langsung *didapuk* di TPT. Antara percaya dan tidak percaya, aku mencoba untuk menjalaninya. TPT bagiku adalah wajah KPP, jadi aku akan mencoba memberikan pelayanan prima. Itu niatku, tapi kenyataannya aku malah dirisaukan oleh tanggung jawabku yang lain, antar jemput anak sekolah, karena suamiku dipindahtugaskan ke luar kota (kota yang ingin kutuju, yang ingin kutukar dengan karibku).

Minggu pertama di TPT aku mencoba menutupi rasa kagetku, memahami -Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) yang kadang lelet kadang *error*, memahami rekan kerja baru yang semuanya adik-adik juniorku, memahami WP yang bermacam-macam karakter, dan memahami protes-protes WP akan fasilitas kantor bila PLN *byar pet*.

Minggu kedua.. senyum, minggu ketiga senyum.....

Beberapa minggu berlalu, di antara senyumku aku semakin terseok dengan tugas-tugasku sendiri, aku mulai lemah, sementara volume kerja TPT tidak ada kurang-kurangnya, apalagi bertepatan dengan program *sunset policy*. Hampir selalu diatas jam 6 sore kami baru bisa pulang kantor, bahkan tidak jarang kami petugas TPT pulang mendekati jam 9 malam. Belum lagi tanggal 20!!! Duuuuh.... benar-benar "sindrom 20". Suasana TPT tidak kalah dengan antrian BLT, berjubel !

Kadang pilu juga kala memandang rekan-rekan seksi lain bisa pulang tepat jam 5 tanpa beban. Tidak ada kecewa..., tapi jujur ada rasa "tidak rela" di lubuk hati terdalam. Betapa mujurnya mereka bisa pulang tepat waktu, sementara kami masih berkutat dengan pekerjaan. Bahkan di saat rekan-rekan lain bisa santai di hari Sabtu, libur dengan keluarga, kami petugas TPT rela ngantor untuk merekam pelaporan yang diterima secara manual (saat server dibawa ke Kantor Pusat untuk pergantian program SIPMOD). Karena di saat hari efektif kami tidak mungkin bisa menyentuh PR-PR kami itu, jadi kapan lagi bisa mengerjakannya selain berinisiatif mengambil hari libur kerja.

Aku menangis....

Subhanallah, selama bertugas aku tidak pernah menangis akibat tekanan pekerjaan, baru kali ini, benar-benar baru kali ini. Bukan hanya masalah pekerjaan yang membuat aku menangis, tapi karena tanggung jawabku terhadap buah hatiku. Gadis kembarku baru kelas 1 SD dan adik

mereka baru berumur 9 bln, sementara aku belum dapat *helper* (yang membantu) pekerjaan rumah tangga di rumah. Aku juga belum sanggup meng-ojek-kan gadis-gadis kecilku untuk berangkat sekolah. Aku menangis! Seperti karibku yang masih menangis juga di tempat kerjanya yang baru.

Rekan-rekan TPT lainnya pun mulai jenuh, “sampai kapan?” Yah.... sampai kapan modernisasi yang tidak benar-benar siap baik infrastrukturnya maupun manajemennya ini mampu kami lalui, mampu kami jalani. Lepas dari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan itu, aku salut dengan rekan-rekan TPT yang lain, mereka masih muda, mereka adik-adik lulusan Program Diploma Keuangan (*prodip*), mereka pintar-pintar. Di saat kami pulang malam, di saat kami lembur, mereka tetap semangat, tetap ceria, dan yang terpenting walau ada rasa “dongkol” mereka tetap bekerja..bekerja..bekerja..dan bekerja mengejar tanggung jawab. Sesuatu yang luar biasa bagiku. Dan di saat tanggal sepi Wajib Pajak, di saat aku dan adik petugas TPT melaksanakan sholat Dhuha, kami bertukar cerita, bertukar keluh kesah lalu tersenyum sendiri mengingat modernisasi di KPP, beban kerja, serta tunjangan yang diterima.

“Kelelahan, kekecewaan, kejenuhan dan waktu tidak bisa digantikan dengan apa pun, tidak juga dengan tunjangan besar,” ucap mereka lirih. Aku mengangguk setuju, sangat setuju karena walau secara *financial* terbantu tapi ada banyak hal yang hilang dari kami, terutama bagi kami yang berkuat dengan pelayanan di TPT.

Dua bulan berlalu.. aku jumpa karibku...

Dia semakin kurus (sesuai dengan perkiraanku), tapi tidak ada kesedihan lagi di garis wajahnya. Dia sudah bisa tersenyum walau garis kelelahan jelas terpancar. Kami bertukar cerita, ada cerita sedih, ada cerita lucu, ada juga cerita marah. Sebentar kami tercenung, sebentar gemas, sesaat kemudian kami tertawa. Aih..., dulu hampir setiap saat kami berbagi ilmu, berbagi pengalaman tidak ketinggalan berbagi *gossip*. Dia juga dulu yang selalu mengingatkan aku untuk tidak terlalu “galak” pada suami. Di akhir pertemuan kami, aku memberanikan diri menanyakan perasaannya selama di KPP baru.

“Hampa,” singkat dia menjawab. Aku mengangguk dengan senyum menggoda, kurengkuh pundaknya, mencoba menggoda dengan mengingatkan penyakitnya ‘Mabuk Angkot’. Karibku membalas dengan menjentikkan kuku jari kelingking dan jempolnya.

“Kecil..., tidak ada apa-apanya. Biar diulahnya batumpuk model iwak wadi, ulun kada mauk lagi....., biasa sudah”, jawab karibku dengan logat dan bahasa Banjar yang medok. Aku terkesima mencerna ucapannya, dia bilang walau ditumpuk bagai ikan asin, dia sudah tidak mabuk lagi naik angkot. Ini



benar-benar berkah, sekecil apa pun perubahan yang menuju kebaikan adalah “Berkah”.

Lalu aku sendiri, apa yang kudapat dari Modernisasi ini? Ternyata walau babak belur, tapi ada banyak berkah juga yang kudapat. Aku lebih berempati, lebih cerdas bekerja, *gaptek-nya* kurang, dan akibat banyaknya beban, ibadahku juga semakin bertambah. Harapanku, semoga modernisasi ini tidak memutus *ukhuwah* dan menjadikan kita manusia yang individualisme.

MALAM YANG BAHAGIA

F.G. Sri Suratno

Hari Jum'at bagiku merupakan hari yang sangat menyenangkan dan penuh harap serta penantian. Pagi pukul 04.30 WIB bangun dari tidur, menjalankan kewajiban sebagai seorang pemeluk agama kemudian menyisihkan sebagian waktu untuk berolah raga diakhiri dengan sarapan pagi dan menjalankan tugas sebagai seorang yang telah menerima 'uang muka' dan berutang dari rakyat berupa gaji dan TKPKN untuk memenuhi kebutuhan fisik, sandang dan perumahan selama sebulan.

Kenapa Jumat bagiku begitu berarti? Karena setelah Senin hingga Kamis berpisah dengan keluarga, pada Jumat malam kami dapat bertemu dan berkumpul kembali untuk berpisah Senin subuh minggu berikutnya. Jadi, hari Jumat menjadi terasa sangat istimewa, namun durasinya terasa lebih lama dari hari lain; sedangkan Sabtu dan Minggu terasa sebagai hari dengan durasi yang pendek/singkat.

Hari-hari pendek yang menurutku singkat itu kadang kami manfaatkan untuk pergi dan makan bersama di luar rumah dengan menu yang serba sederhana (kaki lima, tenda, lesehan, dan sejenisnya). Sabtu yang lalu (15 Agustus 2009) kami berburu nasi bakar kemangi dengan lauk sambal terasi dan ikan bandeng presto.

Ketika kami tiba di tempat jualan itu, telah banyak orang di sana. Ada yang sedang asyik ngobrol, ada yang serius menikmati makannya, adapula yang berlalu lalang datang dan pergi. Aku menebarkan pandangan mataku ke semua sudut dan jejeran mobil yang diparkir di tepi jalan; naluriku (sebagai fiskus) tertuju pada pertanyaan "Sudah ber-NPWP apa belum ya mereka itu?".

Kami dapat tempat duduk di lesehan/tikar, di mana di sekeliling kami mayoritas adalah anak-anak muda. Dari telepon genggam dan pakaian yang digunakan serta minyak wangi yang disemprotkan, mereka adalah anak orang kalangan menengah ke atas.

Sambil menunggu pesanan makanan datang, sementara kami menyeruput minuman yang dihidangkan oleh pramusaji, tiba-tiba datang seorang anak perempuan kecil penjual kue, kira-kira berusia 8 tahunan,

dengan menjinjing sebuah keranjang yang kelihatannya lumayan berat untuk ukurannya. Anak perempuan kecil itu menawarkan kue-kue dagangannya kepada kami.

“Bu..., Pak..., beli ya kue saya, tolong ya Bu, Pak, dari tadi belum ada yang membeli, semua yang datang saya tawari tapi tidak ada yang mau, saya takut kalau pulang nanti kuenya tidak ada yang laku, Ibu saya marah dan kue-kue ini basi”.

“Nggak Dik, terima kasih, kami sudah banyak kue di rumah”, sahutku. Anak perempuan itu masih duduk menunggu di samping kami; kasihan, iba, tapi tidak enak juga, bercampur dalam hati dan pikiranku. Sejurus kemudian aku berpikir: “Lebih baik kutawarkan sebungkus nasi bakar kemangi dan segelas teh hangat untuk mengisi perutnya. Barangkali saja dia belum makan, atau kuberikan beberapa uang receh supaya dia segera berlalu dan tidak mengganggu acara makan kami.

“Adik sudah makan?” tanyaku, “Belum, Pak” jawabnya, “Dari jam berapa kamu jualan” lanjutku. “Dari jam dua sepulang dari sekolah”. Iba, trenyuh, pilu rasa hati ini mendengar jawaban gadis kecil itu. Kami dan sebagian besar yang ada di lokasi itu terkesan berlimpah kesenangan, kemewahan (mobil, baju bagus, ponsel terbaru, parfum semerbak, dompet tebal, sementara di sekitar kami ada seorang anak kecil berjuang menahan lapar, menahan rasa cemas, kehilangan waktu bermain dan belajarnya tetapi tidak seorang pun peduli kepadanya.

Ketika kutawarkan untuk memesan makanan (tentu kami yang akan membayarnya), tanpa kuduga sedikit pun dia menjawab “Terima kasih Pak, tapi saya tidak akan memesan makanan yang bapak tawarkan dan saya tidak akan makan sebelum kue saya ini ada yang membeli”. “Sombong juga anak ini” pikirku. “Ya sudah kalau begitu, ambil ini sedikit uang buat kamu ya” – sambil kusodorkan lembaran uang lima ribu rupiah. Lagi-lagi gadis kecil ini menolak “Terima kasih Pak, saya tidak mau menerima uang Bapak. Ibu saya mengajarkan supaya saya tidak menerima apa pun secara cuma-cuma”.

“Bukankah adik perlu uang?”, tegurku. “Ya Pak, tapi saya tidak mau meminta, saya maunya berjualan”. Deg rasa jantung dan hatiku, di usiaku 46 tahun yang setua ini pada malam yang bahagia ini, aku mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, ya seorang gadis kecil yang berumur 8 tahun.

Mulutku terkunci rapat dan tak mampu mengucap sepatah kata pun, air mata membasahi sanubariku, sesal menyelimuti jiwaku. Aku merasakan

berdosa telah memandang enteng bocah tersebut. Namun ternyata anak itu jauh lebih mulia dari diriku.. Anak itu tidak mau menerima suatu pemberian atau penghargaan secara cuma-cuma, tanpa usaha. Sementara itu aku.... sebagai pegawai DJP aku setiap bulan menerima gaji dan TKPKN yang begitu besar, padahal aku masih melakukan berbagai kebohongan-kebohongan kecil.

Aku teringat bagaimana aku terkadang tidak kembali ke kantor setelah bertugas keluar, padahal sebenarnya masih ada yang bisa ku lakukan di kantor meski hanya 20-30 menit. Aku menggunakan Surat Tugas itu untuk berbohong. Di saat lain, aku kadang-kadang sering terlambat kembali ke kantor setelah keluar makan, atau sering aku memanfaatkan waktuku untuk *surfing* internet yang tidak berhubungan dengan pekerjaanku!!

Tuhan, aku malu! Kejadian malam itu, mampu menyadarkanku, dan memberiku pelajaran berharga. Kejujuran dan integritas anak kecil itu membuat diriku merasa ‘tidak berarti apa-apa’. Aku malu melihat hati dan sikapnya yang sangat mulia.

Semoga kejadian yang kutemui malam itu, senantiasa mengingatkanku tentang siapa diriku, sesamaku, lingkunganku, dan semoga pula dapat memberikan inspirasi bagi setiap orang yang membaca tulisan ini. Malam yang bermakna, Tuhan hadir mengingatkanku melalui malaikat kecilnya. Peristiwa itu selalu kuabadikan dalam hati sebagai “Malam yang Bahagia”.

DEMI WAKTU

Riza Almanfaluthi

Awal 2003, suatu hari saya bertanya kepada atasan saya, seorang Koordinator Pelaksana Penagihan,

“Bapak kalau berangkat dari rumah jam berapa?”

“Jam enam pagi,” jawabnya.

Jawaban yang membuat saya kagum dan tentunya juga mengejutkan saya. Serta membuat saya berpikir dalam-dalam dan bertanya-tanya dalam hati, “Kok bisa *yah*? Kayaknya saya *enggak bisa deh*.”

Ya, bagaimana tidak? Ia berangkat dari rumahnya yang berada di pinggir Bekasi (bukan di pinggir Jakarta loh ya) pagi-pagi sekali dengan menempuh puluhan kilometer, dan pada saat yang sama saya masih bergelung dengan selimut saya di atas kasur rumah saya di pinggir Bogor. Pula tentunya ia bangun kurang dari jam enam pagi untuk mempersiapkan segalanya. Mulai dari bangun tidur, lalu mandi dan sholat shubuh, sarapan, membersihkan mobil seadanya, lalu berangkat. Tentunya ia yang paling awal datang di kantor. Sedangkan saya dengan jarak tempuh yang hampir sama, baru berangkat ke kantor pukul setengah delapan pagi, yang tentunya tiba di kantor satu jam kemudian. Itu pun dengan kondisi belum sarapan. Sampai di kantor sarapan dulu, baca-baca koran, mengobrol ke sana ke mari dengan kawan, lalu efektif mulai bekerja pada pukul sembilan pagi lebih sedikit. Bagaimana dengan absen?

Pada saat itu kantor saya, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Tiga belum memulai mereformasi dirinya, belum modern, masih dengan budaya lamanya. Budaya PNS pada umumnya. Absen masih menggunakan gaya lama, mengisi di sebuah lembar kertas formulir dan masih bisa titip sama teman. Kalaupun tidak, sampai sore pun lembar absen pagi belum juga beranjak dari meja. Saya masih punya kesempatan menorehkan tanda tangan saya di lembar absen, jam berapa pun saya datang. Otomatis di awal bulan gaji saya masih utuh. Tak ada potongan sepeser pun. Tapi begini-begini, saya masih punya rasa tidak enak kalau datang begitu siang. Kompensasinya saya pulang lebih larut untuk menggantikan jam yang hilang karena keterlambatan tersebut. Walaupun

demikian tetap saja di hati yang paling dalam saya merasa menjadi orang yang tidak menghargai waktu.

Bertahun-tahun dengan kondisi ini membuat saya menjadi orang malas. Bahkan meragukan kemampuan diri saya untuk bisa berangkat pagi-pagi sekali atau tepat pukul enam pagi. Dengan banyak alasan tentunya. Yang paling sering adalah mencari pembenaran dengan berpikir bukan saya sendiri yang melakukan ini. Diakui, budaya di kantor kami memang masih seperti demikian. Yang rajin atau pun malas, gajinya tetap segitu-segitu juga.

Sampai suatu ketika, arus modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimulai sejak tahun 2002 mulai menyentuh kantor saya. Akhir tahun 2003 sudah beredar pengumuman seleksi pegawai KPP Modern. Saya ikut seleksi tersebut. Tentunya dengan harap-harap cemas tentang masa depan dan bisa tidaknya saya lolos seleksi itu. Katanya kalau kantor sudah modern gaji pegawainya akan dilipatgandakan, “ini yang saya tunggu”, pikir saya. Struktur organisasi kantor akan dirubah, “tidak apa-apa”, pikir saya lagi. Kode etik akan diterapkan, “saya siap”. Suap menyuap *enggak* akan ada lagi, “lahir batin saya senang sekali mendengar berita ini.” Dan yang pasti absen dengan *finger print* akan diterapkan, “waduh...ini yang berat.” Satu alasan saja sebenarnya saya ikut modernisasi ini. Saya ingin berubah. Satu pertanyaan setelahnya adalah, “saya siap berubah atau tidak *yah?*” Mau tidak mau saya harus berubah.

Alhamdulillah, saya lolos seleksi tersebut. Jabatan saya telah berubah. Semula pelaksana, kini saya telah menjabat sebagai *Account Representative* (AR). Tugasnya melakukan pengawasan, memberikan konsultasi, dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak. Dulu Wajib Pajak harus menghubungi banyak meja kalau berurusan dengan kantor pajak, kini cukup dengan menghubungi *AR-nya* saja.

Efektif per November 2004 kantor saya sudah menjadi KPP Modern. Masalah absen tentunya diperketat. Sebagai sarana uji coba—menunggu mesin *finger print*-nya tiba dan dipasang—absen masih dengan cara mengisi kertas formulir absen, tapi langsung diambil oleh penanggung jawab absen tepat pukul setengah delapan pagi. Kemudian pada jam lima sore lembaran absen baru dikeluarkan lagi.

Bila ada yang terlambat atau pulang cepat, siap-siap dipotong tunjangannya masing-masing 1,25%. Kalau membolos sehari, apa pun kondisinya entah sakit atau benar-benar malas, kena potong 5%. Jumlah potongan yang amat besar bagi saya. Potongan yang menghilangkan

kesempatan saya untuk membeli dua sampai delapan kotak susu buat anak-anak saya. Dan yang terpenting lagi, setiap keterlambatan akan membuat saya bertambah malas, tidak semangat melakukan apa pun di kantor.

Oleh karena itu, kini ada yang berubah, apalagi setelah mesin *zero tolerance—finger print*—terpasang. Saya harus bangun sebelum shubuh, paling telat pada saat adzan berkumandang. Saya harus mempersiapkan segalanya sebelum jam enam pagi. Perjalanan yang ditempuh satu jam dengan naik motor harus dipersiapkan dengan matang sekali. Faktanya saya mampu melakukan semuanya hingga menyentuhkan jempol saya di mesin absen dengan sepenuh hati.

Sesungguhnya mesin itu tidak peduli dengan saya. Ia cuma mengenal jempol saya yang harus menempel padanya tepat waktu. Tidak peduli saya harus menyabung nyawa, salip sana salip sini, sedang sakit perut, anak sakit, jalanan macet, hujan lebat, ditilang polisi, nafas bengek mandi asap knalpot, telat sedetik pun tetap dihitungnya. Tapi dengan semua pengorbanan itu, pada akhirnya membuat saya berubah. Detik-detik yang berjalan menjadi menit yang sangat berharga bagi saya. Pada akhirnya saya memang mampu untuk berangkat dari rumah jam enam pagi. Tiba di kantor kurang dari jam setengah delapan. Sampai jam delapan saya sudah melakukan banyak hal, menyelesaikan pekerjaan kantor tentunya.

Modernisasi telah mengubah saya untuk menghargai waktu. Itu didukung mulai dari pejabat yang paling atas sampai pelaksana yang paling bawah. Semua tahu setiap keterlambatan satu detik pun ada risiko yang harus ditanggung. Tidak ada toleransi. Bahkan untuk lupa absen sekali pun. Ah, modernisasi pajak bagi saya adalah suatu awal perubahan dalam memandang waktu.

SEMANGAT TEH GENDUL

Yulius Yulianto

Saya termasuk pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (*Large Taxpayer Office/LTO*) sejak berdirinya kantor tersebut di tahun 2002 yang berlokasi di eks gedung Humpuss di bilangan Monas. Berhubung kantor baru, jumlah pegawai dan fasilitasnya belum selengkap kantor pelayanan pajak yang ideal. Petugas pelaksana baru satu atau dua orang per seksi, ruang kerja yang bisa digunakan hanya TPT dan sebuah ruangan luas untuk *Account Representative (AR)* dan fungsional, furnitur dan peralatan kantor belum memadai, *job description* pun belum ada.

Kami terbiasa bekerja ditemani debu, karena proses renovasi gedung yang belum selesai. Waktu itu gedung Humpuss dalam kondisi kosong dan rusak karena telah ditinggalkan penghuninya selama tiga tahun. Lantai *basement* yang bisa digunakan hanya B1, karena B2 dipenuhi puing-puing dan B3 digenangi air rembesan setinggi hampir 1 meter. Air rembesan ini menjadi hunian yang nyaman bagi segala jenis nyamuk. Saya dan beberapa teman kepala seksi bahkan pernah beternak ikan lele di “kolam” ini, dengan harapan bisa segera memusnahkan kawanan nyamuk beserta anak cucunya, disamping – siapa tahu bisa dipanen untuk oleh-oleh istri di rumah.

Meski fasilitas belum memadai, hal yang didahulukan adalah ruang pelayanan kepada WP dan fasilitas untuk AR. Saya dan teman-teman kepala seksi, harus rela berbagi meja kerja dan bergantian menggunakannya. Saya dan teman-teman kepala seksi, harus rela berbagi meja kerja dan bergantian menggunakannya. Pengulangan kalimat ini bukan salah cetak tetapi untuk meyakinkan Anda bahwa ~para kepala seksi~ benar-benar secara bergantian menggunakan meja yang sama untuk bekerja, karena saat itu baru ada 2 – 3 meja yang bisa digunakan untuk menulis dan meletakkan komputer. Tetapi meskipun dengan fasilitas terbatas, proses permohonan WP harus tetap dilaksanakan.

Sebagai Kepala Seksi Pelayanan, yang paling menyita waktu dan tenaga saya adalah masalah berkas. Karena WP yang diadministrasikan adalah WP Besar, berkasnya pun BESAR-BESAR. Bagaimana merapikan berkas kalau gudang berkas dan rak berkasnya tidak ada? Itu baru satu

persoalan yaitu menampung berkas. Persoalan lain adalah, bagaimana meneliti berkas-berkas kiriman yang sangat banyak jumlahnya untuk memastikan kelengkapannya. Bisa dibayangkan saat itu, kiriman berkas dari satu KPP harus diangkut dengan beberapa truk *colt diesel* ukuran sedang. Kesibukan semakin bertambah karena pengiriman berkas dari berbagai KPP dilakukan bersamaan pada hari terakhir batas waktu pengiriman. Untuk urusan ini, saya dibantu oleh kawan-kawan tidak hanya dari KPP, tapi juga dari Kanwil. Bahkan Kepala Kantor pun rela menggulung lengan baju dan “melantai” ikut membereskan berkas-berkas, terutama yang diperlukan untuk proses perpajakan yang ada jatuh temponya, seperti proses restitusi, penagihan, dan pemeriksaan.

Hampir setiap hari saya dan segelintir petugas di seksi pelayanan, mengenakan kaos dan masker. Untuk sekedar memberikan perhatian dan motivasi kepada petugas, saya sering membelikan teh *gendul* (botol) sekedar untuk melepaskan dahaga. Berhubung tidak ada warung di sekitar kantor dan untuk menghemat pengeluaran karena saat itu belum menerima tunjangan tambahan, setiap hari saya membawa beberapa teh *gendul* yang saya beli di warung sebelah rumah karena saya bisa membeli dalam satuan *krat*, bukan mengecer. Lumayaaaan... saya bisa *ngirit* hampir sampai Rp 1.000,- per *gendul*. Lumayan to?

Teh *gendul* tadi saya masukkan ke dalam tas kerja yang saya *cangklong* sambil *numpak honda bebek*. Setiap malam, sepulang kantor, saya bawa kembali *gendul-gendul* kosongnya untuk saya tukar keesokan harinya dengan teh *gendul* yang baru. Hal ini berlangsung terus selama petugas seksi pelayanan masih berkutat dalam membereskan berkas yang menumpuk itu.

Dengan segala keterbatasan, saya tetap berupaya memelihara semangat yang tinggi, untuk memotivasi diri sendiri dan petugas seksi pelayanan. Saat itu saya termotivasi oleh harapan (karena baru janji) untuk menerima penghasilan yang lebih tinggi. Meski harapan itu baru terwujud kurang lebih delapan bulan kemudian, saya bersyukur *tenan* karena semangat kawan-kawan tidak surut untuk mewujudkan LTO sebagai pionir modernisasi.

Hal lain terkait berkas yang tak kalah menghebohkan adalah ketika LTO, untuk pertama kali, harus ambil bagian dalam Rapat Pimpinan (rapim) DJP. Coba bayangkan bagaimana menyajikan data penerimaan kalau berkas belum diterima dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) belum terpasang? Akhirnya para Kasi di lingkungan Kanwil LTO, dengan mobil dinas

kijang panther yang masih sangat terbatas, harus berjibaku dengan waktu untuk berburu data di KPP asal.

Terbatasnya sumber dan berlebuhnya semangat, membuat pegawai LTO menjadi lebih akrab. Perasaan senasib sepenanggungan dan persamaan visi telah menghilangkan batas-batas protokoler antara Kepala KPP maupun Kepala Bidang dengan Kepala Seksi, AR, Fungsional dan pelaksana. Komunikasi tidak lagi kaku, dan semua pegawai bisa menyatu (nyaris tanpa batas). Mungkin ini yang bisa disebut sebagai 'budaya baru' di lingkungan kantor pajak. Kekompakan dan semangat saling membantu tanpa ada pamrih pada akhirnya menimbulkan suasana kerja yang *semedulur* bagaikan saudara. Suasana nyaman yang mungkin tidak ditemukan di kantor pajak lain pada saat itu. Bahkan, keakraban tersebut masih saya rasakan sampai sekarang, tujuh tahun kemudian, walaupun banyak dari kami sudah mutasi dan promosi ke unit kerja lain. Saya percaya, kondisi di atas didasari semangat agar LTO sebagai *prototype* kantor pajak modern, berhasil menjadi pionir modernisasi.

Saat ini, kantor pajak modern telah beranak pinak menyebar di seluruh Indonesia. Bagi saya, ini sebuah kesuksesan sekaligus kebanggaan besar. Kalau tidak sukses, tentu tidak akan ditiru dan dijadikan model, juga tidak akan menjadi tujuan studi banding (*benchmark*) dari beberapa otoritas pajak Negara lain. TPT yang menjadi tanggung jawab saya dan merupakan wajah LTO saat itu, juga semakin *kinclong* dan *ayu*, sehingga tidak malu-malu saya tampilkan ketika rombongan “turis” modernisasi berkunjung. Dengan melihat fasilitas dan cara kerja pegawai LTO, dipermanis dengan senyum *pringas pringis* saya sebagai Kasi Pelayanan, membuat saya cukup PeDe untuk mengatakan mereka puas dengan modernisasi yang dimulai di LTO.

Barangkali tidak semua pegawai DJP mengetahui bahwa awal “perjuangan” modernisasi DJP diawali dengan masa sulit dan berdebu-debu, dan bahwa remunerasi yang layak tidak serta merta diterima sejak semula. Tapi itu semua sudah terbayar lunas. Kantor pajak modern yang membawa perubahan kultur, cara kerja, dan sikap pegawai telah ada dimana-mana. Saya dan teman-teman seperjuangan bangga bisa turut ambil bagian dalam proses awal perubahan ini walaupun hanya dengan *dopping* semangat sebuah teh *gendul*.

ALIEN

Rosafiaty Unik Wahyuni

Untuk menulis tentang ini, mau tak mau aku terpaksa me-refresh situasi masa lalu yang sebenarnya bukan suatu hal yang baik untuk dikenang. Tak ada hal lain yang kumaksud, hanya untuk sekadar pembandingan saja, lain tidak.

Berawal dari perubahan yang terjadi pada Direktorat Jenderal Pajak tempatku bekerja. Reformasi ini memang sudah waktunya dilakukan. Bertahap pun tak jadi masalah, yang penting niat dan komitmen seluruh jajaran didorong oleh pimpinan yang memang mendukung dan merencanakan perubahan ini. Aku bergabung dengan perubahan ini di awal tahun 2005. Kantorku di sekitar Harmoni, Jakarta Pusat. Ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama pertama di Indonesia. Satu gedung dengan kantor lain yang belum masuk dalam tahapan perubahan, membuat perbedaaan dua kantor ini begitu mencolok. Mobil bagus yang berjejer di area parkir itu, dapat dipastikan milik warga kantor sebelah. Sementara jajaran sepeda motor yang banyak itu, hmm... pasti milik warga kantorku. Walau ada beberapa dari kami yang membawa mobil ke kantor tapi itu jumlahnya tidak banyak.

Untuk mengejar waktu absen di pagi hari yang dibatasi pukul 07.30 WIB tanpa toleransi, membuat teman-teman memilih cara tercepat untuk mencapai kantor dari rumah mereka yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Ada yang menjadi *member of roker* (rombongan kereta), *member of nebeng.com* yaitu *sharing* mobil dari beberapa kawasan yang searah (biasanya kawasan yang tidak dilintasi jalur kereta api - ada dari Tangerang dan yang terbanyak dari kawasan Cibubur), dan mereka yang paling mengerti cara tercepat untuk *mobile* di Jakarta memilih sepeda motor sebagai sarana transportasinya.

Untuk urusan *tebeng menebeng*, aku sangat terlibat di dalamnya. Kadang aku *ditebengi* namun lebih sering aku yang *menebeng*. Urusan ini tidak membedakan siapa kepala kantor, kepala seksi (kasi) atau staf pelaksana. Siapa saja bisa menumpang pada siapa yang membawa mobil. Mobil kepala kantor pun jadi tempat penyerbuan kami untuk menumpang

bila tak ada pilihan lainnya. Walau di awalnya aku masih segan dan sering kukatakan dengan praduga bersalah, “Masa aku rela sih menambah jam kerjaku di perjalanan pulang. Cukuplah rapat di kantor, tak perlu disambung di mobil lagi”. Namun akhirnya mobil itu pun menjadi pilihanku setelah ku dengar cerita dari beberapa teman *penebeng* bahwa kepala kantor aman-aman saja dalam perjalanan, tidak mengungkit masalah pekerjaan. He he..

Di waktu-waktu tertentu bila memerlukan sarana transportasi di siang hari, taksi bukan lagi pilihan kami. Ber-bis Transjakarta rasanya pilihan yang lebih baik, karena bisa menjamin kecepatan dan ketepatan waktu, bebas stres akibat kemacetan yang tak berpangkal tak berujung, nyaman dan aman, serta membuat kami lebih sehat karena harus berjalan kaki mendaki dan menuruni jembatan untuk mencapai haltenya. Semua pernyataan yang terakhir itu hanyalah dramatisasi dari usaha untuk mengatur pengeluaran keuangan kami. Ini bahasa lainnya dari ‘*pengiritan*’. Tak heran bila suatu hari kami menemukan seorang teman dengan jabatan Kasi, Pak Teuku, berjalan kaki dari halte bus Transjakarta terdekat menuju kantor. Seorang teman mengatakan, “Lihat tuh Pak Teuku, jalan kaki nunduk bawa map gitu, macam orang yang tidak diterima lamaran pekerjaannya. Dulu, mana ada Kasi yang naik bis jalan kaki seperti itu?”. Ha ha... (sorry ya, Ku..)

Sekadar membandingkan, di masa lalu cukup dengan jabatan sebagai Kasi saja sudah mampu membuat seorang Satpam berlari menghampiri mobil Sang Kasi untuk menyambut kedatangannya, membukakan pintu, memberi hormat seraya mengucapkan selamat pagi – siang - sore (tergantung waktu) dan siap membawakan tasnya sampai ruangan. Hmm... sangat *bossy*.. Sekarang, apa perlunya Satpam menyambut kedatangan Kasi yang turun dari bus atau kendaraan roda duanya, macam Pak Dicky yang setia dengan sepeda motornya dari rumahnya di Pondok Kopi sana.

“Kalo bawa mobil, stress gue, Nik. Mesti nempuh berapa jam perjalanan,” begitu katanya waktu kutanya, ”Kok mau sih Pak Dicky, pake motor?” Kalau sekarang Pak Dicky disambut seperti dulu Satpam menyambut kedatangan seorang Kasi, kupikir wajarlah, Pak Dicky sudah menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor.

Jabatan Kasi pun tak cukup mujarab untuk membuat warga kantor memberikan prioritas dalam antrian absen di sore hari saat pulang kantor. Di awal berjalannya kantor itu dulu, untuk melayani 100-an pegawai kantor, mesin *finger print* yang tersedia hanya satu, di ruanganku di lantai dasar. Jadi

dapat dibayangkan, bagaimana mengularnya antrian pegawai yang akan menyetorkan jarinya pada mesin itu untuk menandai kehadirannya di pukul 17.00. Tak seorangpun yang mempersilakan kami untuk absen duluan. Antrian absen tak mengenal jabatan, sungguh demokratis. Tapi disitulah serunya. Tidak ada yang mengeluh dengan panjangnya antrean, karena saat itu adalah waktu untuk kami bercanda, saling mengatai, dan menyoraki bila ada teman yang berusaha menyela antrian. Wooooey! Antriiii...! (Bayangkan bila ini terjadi di masa dulu. Apa ada yang berani menyuruh Kasi untuk antri? He hee... *nggak* kebayang..)

Itu baru untuk urusan absensi, berkendara dan bertransportasi. Berikutnya, urusan makan!

Di minggu-minggu pertama di kantor itu, adaptasi dimulai untuk masalah membayar makan siang. Walau makan siang dilakukan bersama, tetapi untuk urusan pembayaran, kami mulai membiasakan diri untuk membayar sendiri-sendiri, seperti teman-teman yang bekerja di perusahaan swasta. Tak ada yang mau dibayari, dan terlebih tak ada yang sudi membayari. Tak ada yang lebih kaya, dan tak ada yang lebih miskin. Harus ada 'dalam rangka'-nya bila membayari teman, bisa dalam rangka ulang tahun, atau dalam rangka naik pangkat, atau dalam rangka sedang baik hati.

Di masa lalu, ini bukan hal yang wajar. Ketentuan tak tertulis yang berlaku adalah sebagai berikut: atasan membayari bawahan, laki-laki membayari perempuan, yang lebih kaya membayari yang lebih miskin, yang lebih berada membayari yang kekurangan. Menilik ketentuan tersebut, untuk dua keadaan terakhir, sebenarnya apa yang salah ya? Hmm.., yang salah adalah situasinya. Situasi dan sistem saat itu yang membuat ada yang lebih kaya dan ada yang lebih tidak kaya, ada yang lebih berada dan ada yang lebih tidak berada. Tak enak menyebut mengapa situasinya dapat menjadi demikian adanya. Belum lagi bicara ada mereka yang berada di seksi (yang disebut) teknis dan non teknis. Aturan yang tadi disebut di atas jadi akan berlanjut: seksi teknis membayari seksi non teknis. Uuughh... menyakitkan!

Masih di urusan makan. Beberapa minggu yang lalu aku bertemu dengan beberapa teman kerja seangkatan untuk membicarakan rencana tentang angkatan kami. Pertemuan ini kami adakan sambil makan siang di sebuah rumah makan. Sampailah pada urusan pembayaran *bill*. Kami saling berpandangan. "Gimana nih?" Aku perempuan sendiri, tapi bukan berarti aku ragu mengeluarkan dompet (*dompet doang*, isinya *kagak*). Bukankah

aturan sebelumnya perempuan dibayari laki-laki? He he... “Sudah, kita bantingan aja!” Si L jadi pembuka, 200 ribu *jebret*, wajar, dia eselon 3 dan dia memang baik hati. 5 orang lainnya belum eselon 3. Bung E, A, P, aku, masing-masing mengeluarkan 50 ribu. “Kurang satu lagi,” kata yang kebagian meneliti *bill* dan jumlah uang terkumpul. H diujung yang terakhir membanting, *gocap!* “Yak, pas!” tagihannya 440 ribu sekian untuk makan ber-enam. Bantingan, ha ha.. apakah hal ini memalukan? Kupikir tidak. Memang, karena tak ada boss lagi disini.

Perubahan ini mungkin tidak menyamankan bagi sebagian orang yang tak ingin berubah. Rambut di kepala sama hitam, isi otak tak kan tertebak. Dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. *Halah...*

Biarlah, mereka yang tak ingin berubah anggap saja bukan bagian dari kami. Lebih baik berpisah dari institusi ini. Hanya akan menjadi duri dalam daging, menjadi setitik nila dalam susu yang sebelanga. Melawan arus perubahan kurasa hanya akan merepotkan diri sendiri. Kembalikan saja semua pada hati nurani. Aku ingat kata seorang pejabat DJP yang sering kupanggil Abah pada suatu kesempatan konsolidasi waktu kami menjadi Kantor Pratama pertama. “Kita adalah *alien*, mahluk aneh karena menjadi minoritas dalam perubahan ini”, katanya. Namun sekarang mereka yang tak ingin berubahlah yang menjadi *alien*. Bukan begitu, Abah?

PERMEN KOPI

Agus Suharsono

Adult Learning Principle (ALP) atau prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa adalah metode standar yang digunakan dalam pendidikan dan latihan (diklat) yang mengiringi modernisasi DJP. Selama ini diklat dijalankan melalui metode konvensional dengan sistem klasikal. Dulu yang namanya diklat, para peserta duduk manis menghadap ke depan, pengajar berdiri atau duduk di depan kelas, mengajar. Sesekali diselingi tanya jawab untuk pendalaman materi dan mengusir ngantuk (ini kadang yang utama). Perbedaan yang sangat mendasar dan nampak nyata antara metode konvensional dengan ALP pada intinya adalah bahwa orang dewasa itu tidak senang digurui dan lebih senang dilibatkan dan dikompetisikan.

Karena suatu kondisi saya terlibat dalam diklat dengan metode ALP. Awalnya sebagai peserta dan kemudian sebagai fasilitator. Fasilitator adalah istilah yang digunakan bagi pengajar. Tidak ada lagi istilah guru dalam metode ini, apalagi yang bersifat menggurui. Semua proses pembelajaran dibuat dalam sebuah permainan. Ternyata orang dewasa juga masih senang dengan permainan. Meskipun itu hanya permainan anak-anak, seperti menyanyi, berteriak dan tepuk tangan, fakta tak terbantahkan bahwa orang dewasa ternyata anak-anak juga. Anak ibunya masing-masing tentunya.

Saya rasa yang membuat diklat ini paling seru adalah adanya kompetisi. Peserta tidak duduk manis seperti anak sekolah, tapi dibuat kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok duduk melingkari sebuah meja bundar. Agar suasana kompetisi makin panas, masing-masing kelompok harus membuat nama kelompok, logo, dan yel-yel. Kompetisi diciptakan dengan aturan tentang pemberian *point* plus untuk mereka yang aktif dan *point* minus untuk yang melanggar misalnya terlambat masuk, mengantuk atau HP-nya berbunyi.

Sebagai fasilitator ternyata tugasnya lebih mudah. *Kayak* moderator *aja*, memandu agar jalannya diskusi terarah. Semua materi disajikan kemudian didiskusikan oleh seluruh peserta diklat. Biasanya dalam diskusi ini ramai sekali, selain materinya menarik, juga karena ada hal baru berupa

tambahan *point* untuk setiap pendapat. Waktu yang diberikan serasa selalu kurang karena tiap kelompok tidak mau kalah dengan kelompok lainnya.

Yang paling seru adalah ketika masing-masing kelompok menunjukkan kreasi yel-yelnya. Semua kreasi dan ekspresi muncul tidak memandang lagi tua, muda, laki-laki, perempuan, semua menjadi seperti anak-anak. Bernyanyi, berteriak, menari dan bertepuk tangan. Walaupun sebenarnya dari beberapa kelas yang saya ikuti agak susah membedakan antara ketika mereka bernyanyi atau berteriak. Mirip.

Untuk mempertahankan konsentrasi peserta dan untuk menghilangkan rasa kantuk, ternyata yel-yel menjadi alat yang sangat efektif. Terutama untuk masa-masa kritis yaitu setelah makan siang. Siapapun yang pernah mengajar pada jam setelah makan siang pasti pernah merasakan bagaimana sulitnya menjaga agar mata peserta tetap terbuka. Menurut saya sebenarnya caranya mudah sekali. Jika perjalanan pembelajaran dan intensitas diskusi mulai menurun, beberapa peserta sudah kelihatan kehilangan konsentrasi atau terlihat ada tanda-tanda kantuk mulai mendera, *break* sebentar. Sebagai fasilitator, saya selalu mengisi *break* ini dengan mengadakan lomba yel-yel. Bukan mana yang paling merdu atau paling indah, penentuan pemenangnya adalah kelompok yang meneriakkan yel-yel paling keras. Ajaib, biasanya semua tidak mau kalah, teriak kuat-kuat dan biasanya tertawa atau saling menertawakan. Kemudian wajah-wajah kembali *sumringah* dan bisa kembali ke *laptop* membicarakan materi selanjutnya.

Banyak peserta yang kaget dengan metode ini. Pada awalnya banyak yang menyangka yang namanya diklat itu ya duduk manis menghadap ke depan mendengarkan guru bicara. Yang sehat bisa bertahan menjaga matanya tetap melek sedangkan yang kurang sehat akan terlelap. Ini metode baru yang kenapa ya, baru saat ini dilaksanakan, tidak dari dulu. Memang kadang bunga akan mekar sangat indah pada waktunya.

Pengalaman yang tidak terlupakan adalah ketika selesai diklat, ada seorang ibu-ibu mendekati saya sambil mengeluarkan sebuah bungkus dari tasnya. Saya menyelidik dan menduga-duga apa yang dibawanya.

“Pak, diklatnya ternyata tidak membuat ngantuk ya, biasanya saya kalo diklat bawa permen kopi agar tidak tertidur. Sekarang membukanya saja tidak sempat”, kata ibu tadi sambil mengeluarkan sebungkus permen kopi yang masih utuh dari tasnya. Syukur kalo begitu.

KOMUNIKASI GORENGAN

Andy Prijanto

Yang saya alami pada saat awal tahun penempatan pertama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah modernisasi mungkin sederhana, namun dampaknya menjadi besar. Lazimnya di zaman pra-modern dulu jarang sekali terjadi komunikasi antara pegawai KPP dan pegawai Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Di samping memang unit kantornya berbeda, ada sesuatu batas yang tidak nampak, yang juga mempengaruhi, seperti ada perbedaan *maqom* atau kasta.

Cirinya (menurut saya) di Karikpa hubungan personal-nya tampak lebih harmonis, informal, dan seirama dengan rasa *egaliter* yang kental. Sementara itu, saudara kandungnya di KPP lebih mengedepankan hubungan formal jabatan, kelompok-kelompok, dengan nilai-nilai *feodal* yang cukup terasa.

Masuknya era modernisasi yang menumbangkan pondasi-pondasi korupsi, kolusi, dan nepotisme rupanya juga sangat berpengaruh terhadap budaya dua kutub yang berbeda tersebut. Para mantan jebolan Karikpa yang semula ber-*lifestyle* tinggi dipaksa untuk mereduksi gaya hidupnya. Gaya *egaliter* mereka yang kerap menembus batas-batas formalitas kedinasan kini juga harus menyesuaikan dengan jabatan-jabatan yang ada di kantor modern. Sementara itu eks-anggota KPP yang masih memelihara budaya “*feodal*” yang sering lebih mengedepankan pangkat dan jabatan juga harus tahu diri. Anak buah bukan lagi batu loncatan seperti dulu yang hanya untuk sekedar pijakan baginya.

Perbedaan budaya organisasi yang berbeda memang awalnya membuat komunikasi dan hubungan personal di antara anggotanya terhambat. Bahkan masing-masing pihak masih merasakan adanya *invisible line* atau garis tak kasat mata sehingga walaupun sudah menjadi satu keluarga besar dalam satu unit kantor, masing-masing pihak masih setia dengan budayanya.

Di sinilah keunikan yang ada di kantor saya, yang dapat mengubah dua budaya yang berbeda itu menjadi satu sinergi yang dampaknya sangat positif bagi kemajuan kantor. Cara yang diawali dari kebiasaan informal yang

sangat sederhana, bahkan mungkin tampaknya dianggap mustahil untuk mengakrabkan antara pegawai fungsional dan non-fungsional, adalah kebiasaan ‘camilan’ gorengan di sore hari.

Dimulai dari sekitar empat orang yang terdiri dari dua orang fungsional pemeriksa dan dua orang *Account Representative* (AR) yang memang sudah saling kenal sejak lama, yang setiap sore setelah shalat ashar sering membeli camilan gorengan seperti pisang goreng, tempe, tahu, bakwan, dan sejenisnya. Secara iseng-iseng mereka kemudian mengirimkan pesan melalui *IP messenger* kepada seluruh teman AR dan Fungsional Pemeriksa. Akhirnya, dari hari ke hari peminat acara camilan sore ini semakin banyak. Otomatis karena semakin sering bertemu, para anggota ‘komunitas camilan’ ini makin saling kenal dan akrab satu sama lain. Hanya dalam waktu dua minggu komunikasi dan hubungan personal antara AR dan Fungsional Pemeriksa di kantor saya menjadi hubungan yang indah. Dampak berikutnya adalah menjurus ke hubungan formal pekerjaan yang saling mendukung. Kegiatan pemeriksaan selalu dikomunikasikan dengan AR-nya untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif terhadap Wajib Pajak.



Lama-kelamaan anggota komunitas ini akhirnya meluas sampai ke Kasi dan Supervisor, bahkan terkadang Kepala KPP ikut juga ke luar ‘kandang’. Hingga akhirnya hubungan formal dan informal menjadi lebih baik. Rasa

empati tumbuh di antara pegawai yang berpengaruh pada kinerja kantor secara keseluruhan. Kendala-kendala pekerjaan yang bersifat teknis dan non-teknis sangat mudah dicarikan jalan keluarnya, kadang dengan komunikasi yang sederhana dan non-formal.

Dari mana 'dana komunikasi' gaya itu? Jangan khawatir, walau ada biaya ekstra, biaya tersebut 'legal' dan tidak melanggar kode etik dalam memperolehnya. Caranya, biasanya sebelum shalat ashar salah seorang anggota komunitas mengedarkan sebuah kotak bekas spidol yang fungsinya untuk menampung sumbangan para donatur. Hasilnya lumayan, satu kali edar bisa untuk belanja gorengan tiga hari.

Pengalaman yang sangat sederhana itu ternyata membuahkan hasil yang luar biasa besar. Awal tahun 2009 kami mendapatkan penghargaan sebagai kantor terbaik tingkat nasional untuk pencapaian dan pertumbuhan penerimaan sejak tahun 2006 sampai 2008. Memang hasil tersebut bukan semata-mata karena kami makan gorengan setiap sore. Namun esensi dari gorengan itu adalah sebagai salah satu cara membuka sebuah hubungan komunikasi dan personal yang berbasis biaya rendah.

Kita tidak perlu janji ngobrol bareng di *café*, *mall*, atau lokasi lain yang mahal. Kita juga tidak perlu menyewa seorang ahli komunikasi untuk mengajari membangun suatu hubungan antar pegawai. Bahkan kita tidak memerlukan seorang motivator sekelas Mario Teguh untuk membangun sebuah budaya organisasi yang baik yang mampu menghasilkan pegawai yang berkinerja tinggi. Justru yang kita butuhkan adalah membangun komunikasi dan hubungan personal yang alami, didasari rasa saling menghargai satu sama lain dengan media yang natural juga yaitu berupa sebuah kebiasaan sederhana.

Pengalaman saya di kantor sudah membuktikan bahwa modernisasi yang gaungnya terasa besar juga harus mampu mengubah budaya-budaya yang kurang etis di masa lampau. Perlu ada dorongan motivasi dari para pegawai yang masuk ke alam modernisasi itu dengan kesadaran penuh. Jika motivasi dan kesadaran sudah ada, tinggal mencari media yang efektif sebagai pelumas yang bisa melancarkan kerja sumber daya tersebut, dan salah satu media yang murah dan alami adalah pisang goreng, tahu, tempe, bakwan, dan kawan-kawannya.

TERIMA KASIH

Ani Murtini

“Terima kasih” adalah kata yang sederhana namun butuh keikhlasan dan ketulusan hati untuk mengucapkannya. “Terima kasih” biasanya diucapkan jika kita mendapatkan sesuatu atau memperoleh bantuan dari seseorang. “Terima kasih” termasuk dalam tiga kata ajaib (*the three magic word*) selain kata “maaf” dan kata “tolong”. Kenapa disebut ajaib? Karena kata-kata tersebut akan berdampak sangat besar bukan hanya untuk si penerima tetapi juga untuk yang mengucapkannya. Oleh karena itulah kita sering mendengar orang yang menerima ucapan “terima kasih” menjawab dengan jawaban “sama-sama” atau “terima kasih kembali”.

Saya mempunyai kesan tersendiri dengan kata “terima kasih”. Begini ceritanya, hampir setiap hari rekan kerja saya memberikan *update* anti virus lewat *gtalk* saya juga kepada teman-teman yang lain. Saya sangat berterimakasih, karena saya pikir ini luar biasa. Saya belum meminta sesuatu yang saya butuhkan dan ada orang yang memberi apa yang saya perlu. Saya tidak mengucapkan terima kasih secara langsung, tetapi hanya pencet satu atau dua kata di *keyboard* komputer saya. Kadang saya jawab terima kasih, *thanks*, *trims*, *matur nuwun*, atau kadang cuma bahasa simbol “tx” (tinggal pencet dua huruf saja). Eh, ternyata teman saya ini bilang kalau dari sekian banyak teman yang dikirimin *update* anti virus saya termasuk orang yang selalu mengucapkan terima kasih.

Ternyata memang benar kalau kata “terima kasih” tidak hanya berdampak kepada si penerima tetapi juga si pengucapnya. “Terima kasih”, bagi si penerima menjadikan dirinya merasa dihargai dan juga memotivasi agar lebih banyak berbuat “sesuatu” yang tentunya berguna bagi orang lain. Sedang bagi si pengucap adalah sebagai tanda bersyukur dan menyadari bahwa kita hidup memerlukan bantuan orang lain. Jadi si penerima dan si pengucap “terima kasih” sama-sama memperoleh manfaatnya. Sejak saat itu saya sadar, bahwa saya harus membiasakan diri saya agar mudah mengucapkan terima kasih kepada siapapun, termasuk juga kepada para *office boy* dan *cleaning service*, tentunya dengan ketulusan hati.

Dalam kaitannya kita sebagai pegawai DJP yang sering berhubungan dengan Wajib Pajak (WP) kata “terima kasih” sering sekali kita dengar, baik sebelum modern maupun sesudah modern. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok dari kedua makna kata “terima kasih” tersebut. Dulu sebelum modern, WP mengucapkan kata “terima kasih” kepada pegawai yang telah “membantu” menyelesaikan permasalahan perpajakannya dengan penghargaan sejumlah materi. Terima kasih diucapkan bukan dengan ketulusan hati, tetapi karena adanya hubungan timbal balik yang dianggap menguntungkan bagi keduanya. Terima kasih bermakna sangat sempit dan bukan ucapan tanda bersyukur dan menghargai. Bahkan kadang diucapkan dengan terpaksa dan kedongkolan di hati.

Namun sekarang dengan adanya modernisasi di DJP, kita mengharapkan ucapan terima kasih yang tulus dari para WP yang bermakna sesungguhnya, seperti yang dialami oleh teman saya seorang *Account Representative* (AR). Ketika itu beliau memberikan penjelasan panjang lebar dengan penuh kesabaran tentang perpajakan kepada seorang WP. Padahal AR itu tahu kalau WP tersebut bukan termasuk di dalam wilayah kerjanya. Beliau berprinsip sepanjang bukan masalah teknis pemeriksaan dan hanya meminta informasi, tidak ada salahnya memberikan informasi tersebut. Kadang-kadang kalau WP datang ada suatu keperluan selalu ditanya, “wilayahnya di mana atau AR-nya siapa? Bapak/Ibu hubungi AR-nya saja!”. Kita tidak menanyakan dulu keperluannya, padahal mungkin WP tersebut hanya meminta formulir SSP saja.

Kembali ke cerita semula, rupanya WP tersebut sudah sekian lama tidak ke kantor pajak. Mungkin malas berhubungan dengan petugas pajak. Sekarang baru tahu kalau kantor pajak sudah direformasi dan lebih baik pelayanannya. Semua informasi perpajakan didapat secara gratis. WP tersebut berterima kasih kepada teman saya sampai berkali-kali sambil berkata, “Wah, terima kasih Pak, baru kali ini saya menemukan petugas pajak yang baik seperti Bapak. Saya tidak mau AR yang lain, saya mau Bapak saja”. Tentu saja ucapan WP tadi jadi membuat teman saya terharu, dan kata “terima kasih” dari WP tersebut memotivasi dirinya untuk dapat berbuat yang lebih baik lagi, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain khususnya para WP dalam kapasitasnya sebagai pegawai DJP.

Semoga mengalir kata-kata “terima kasih” lebih banyak lagi yang tulus ikhlas dari para WP lain dan juga para rekan kerja kita, sehingga semakin memotivasi kita agar bisa berbuat sesuatu dengan lebih baik dan

lebih baik lagi. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Dan juga mudahkanlah hati kita untuk mengucapkan terima kasih sebagai tanda syukur kita kepada Sang Pencipta atas nikmat-Nya melalui kepedulian orang lain terhadap kita. “Terimakasih” juga sebagai wujud menghargai orang yang telah membantu kita atau orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita dalam bentuk dan sekecil apapun.

*Terima kasih rekan-rekan ku
Terima kasih para Wajib Pajak
Terima kasih DJP ku
Terima kasih juga atas ucapan terima kasih*

LAYANAN SEPENUH HATI

R. Huddy Santiadji Musiawan Murharjanto

Kisah ini aku awali dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, di bulan Maret tahun 2003, enam bulan setelah berakhirnya pertikaian antar etnis di Kalimantan Tengah. Rasanya masih belum percaya aku ditugaskan di tengah pedalaman Pulau Kalimantan sebagai Kepala Kantor Pengamatan Potensi dan Penyuluhan Pajak (KP-4) Muara Teweh saat pesawat kecil jenis *Britain Norman* milik maskapai DAS berisi 10 orang mulai menapakkan rodanya di Bandara Beringin. Bandara kecil ini hanya mempunyai aktivitas pada pagi hari saja, itu pun dalam satu minggu hanya tiga kali sesuai dengan jadwal penerbangan pesawat rute Palangka Raya-Muara Teweh.

Sebagai seorang Kepala Kantor yang baru, biasanya minggu pertama digunakan untuk beradaptasi di lingkungan sekitar, mulai dari mengenal adat istiadat, budaya, bahasa, kuliner, dan pergaulan sosial. Akan tetapi di hari pertama itu aku harus langsung bertugas disebabkan pada saat itu merupakan minggu terakhir penerimaan laporan SPT Tahunan. Sehabis pelantikan di Kota Palangka Raya aku harus langsung bertugas di kota yang berjarak ± 800 Km dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) induknya. Keesokan harinya aku harus mengikuti beberapa kegiatan undangan dari pemerintah kabupaten serta berkenalan langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya serta Muspida.

Kesan pertama yang kurasa, kota ini sangat sunyi. Menjelang senja hanya satu dua kendaraan bermotor yang melintas dan di tengah malam sering terdengar lolongan anjing liar. Beban moril juga kurasakan karena terpisah dengan keluarga, terutama saat teringat anakku yang baru berusia setahun jauh terpisah ribuan kilometer. Infrastruktur dan fasilitas kota sangat minim dibandingkan dengan yang dirasakan saudara kita di Pulau Jawa. Di kota ini hampir setiap hari mati lampu secara bergiliran dan bila musim kemarau sulit mendapatkan air bersih karena harus menunggu *droping* air tangki dari PDAM. Harga kebutuhan pokok cukup mahal karena sebagian besar bahan pokok diimpor dari provinsi tetangga yaitu Kalimantan Selatan.

Untuk mengatasi ujian pertama ini perlu kecepatan beradaptasi demi menjalankan tugas dengan penuh keyakinan dan tenang, karena yang mendasari kita untuk bertahan adalah belajar untuk dapat bekerja dengan Ikhlas. Di KP-4 terutama di daerah terpencil, bekerja bagai dua belas jam sehari dan tujuh hari seminggu, tidak ada hari libur. Bila di kota besar hari Sabtu dan Minggu dapat bersantai dengan keluarga menikmati fasilitas kota, sedangkan hiburan di sini adalah memberikan penyuluhan dan berinteraksi dengan Wajib Pajak .

Hari demi hari kulalui dan aktivitas pun terus bertambah terutama pada saat terjadi pemecahan kabupaten baru yaitu Kabupaten Murung Raya yang berjarak 100 km dari Kabupaten Barito Utara. Akses jalan darat ke kabupaten ini sering terputus karena rusak. Satu-satunya akses yaitu melalui sungai dengan *speed boat* selama kurang lebih empat jam untuk sampai di ibukota kabupaten yaitu kota Puruk Cahu. Tidak jarang para Wajib Pajak dari kabupaten itu baru melaporkan SPT masa pada hari Sabtu bahkan Minggu. Demi pelayanan aku tetap melayani konsultasi dan menerima laporan pada hari-hari tersebut. Sering keluhan terlontar dari bendaharawan karena tidak berfungsi bank persepsi akibat alasan teknis, juga tidak tersedianya blangko formulir perpajakan. Wilayah ini sebetulnya mempunyai potensi pajak yang cukup besar namun karena kendala akses ke wilayah ini membuat tidak terjangkaunya pelayanan kepada Wajib Pajak. Sempat berpikir untuk mendirikan pos pajak permanen di kabupaten ini, namun setelah beberapa kali berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten terdapat kendala dalam realisasinya yaitu mulai dari personil yang akan di tempatkan sampai dengan infrastruktur yang harus disiapkan. Setelah dilakukan analisis dan perhitungan ternyata cukup memakan banyak biaya dan tidak efisien.

Karena keterbatasan dan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan itu, muncul sebuah ide yang harus dapat bermanfaat dan dapat memberikan pelayanan langsung kepada Wajib Pajak, yaitu Konsep Pos Pajak Bergerak atau *Mobile Tax Unit (MTU)*. Fungsi pos pajak ini nantinya akan memberikan pelayanan mulai dari pembuatan NPWP, menerima laporan SPT, menyediakan formulir perpajakan, *tax clinic*, ekstensifikasi, dan pengaduan masyarakat. Dengan terwujudnya *MTU* ini diharapkan akan membantu fungsi KP-4 sebagai ujung tombak KPP dalam memberikan pelayanan langsung di tengah masyarakat, mengingat luas wilayah kerja KP-4 ini yang hampir sama dengan luas propinsi Jawa Tengah. Basis dari *MTU* ini dapat

berupa kendaraan seperti kapal, mobil atau sepeda motor, yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografisnya.

Segala upaya aku lakukan mulai dari melakukan presentasi di lingkungan KPP, Kanwil sampai dengan membuat proposal ke Kantor Pusat DJP, tetapi apa daya manusia berencana namun Tuhan jualah yang menentukan. Pada saat mulai dengan rancangan dan pembuatan *prototype*, pada bulan Juli 2004 aku dimutasikan sebagai Kasi TUP di KPP Purwokerto. Akan tetapi perjuangan untuk mewujudkan MTU ini tidak pernah berhenti begitu saja, mengingat manfaat besar yang akan dihasilkan dari MTU ini.

Pada akhir tahun 2006 aku ditunjuk menjadi Pjs. KP-4 Banjarnegara untuk menggantikan Bapak Sudiro yang wafat dalam tugas. Aku langsung mempelajari monografi fiskal dan menganalisis potensi pajak di wilayah kerja yang terdiri dari dua kabupaten ini. Di dua kabupaten ini belum terdapat pusat perbelanjaan untuk didirikan pojok pajak. Karena wilayahnya cukup luas serta potensinya cukup besar, dibutuhkan suatu sarana untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat *mobile*. MTU merupakan jawabannya, sehingga kuputuskan untuk segera mengubah mobil dinas KP-4 menjadi Pos Pajak Bergerak dengan pertimbangan bahwa mobil dinas ini harus dioptimalkan penggunaannya sebagai kendaraan operasional.

Dengan dibantu beberapa staf di KP-4, aku membentuk *team* yang bekerja dengan spesialisasi masing-masing. Mulai dari memodifikasi mobil, pemasangan identitas, pemasangan modem dan penyiapan *soft ware* untuk melakukan administrasi perpajakan. Kursi (jok) tengah dan belakang mobil dinas jenis panther dilepas serta diganti dengan meja pelayanan untuk meletakkan laptop dan printer multifungsi. Mobil ini juga dilengkapi dengan pengeras suara, genset, kursi, tenda, *banner*, tempat *leaflet* dan meja konsultasi. Modifikasi ini menghabiskan waktu dua minggu dengan dana swadaya sebesar Rp 2,9 juta. Biaya dapat ditekan karena sebagian besar merupakan peralatan inventaris kantor yang dimanfaatkan.

Akhirnya *prototype* pertama mobil ini berhasil kami wujudkan pada tanggal 1 Februari 2007. Ternyata MTU mendapatkan apresiasi yang sangat positif. Hal itu yang membuat kami terpacu dan terus menyempurnakannya sehingga diharapkan dapat menjadi embrio mobil pajak keliling nantinya. Uji coba perdana dilaksanakan untuk menerima SPT Tahunan dalam rangka pekan panutan dan pembuatan NPWP bagi PNS di Pendopo Kabupaten

Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini ternyata mendapat respon yang positif dari Bupati beserta jajarannya.

Dari kisah ini mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah bahwa sekecil apa pun dan di mana pun ide dan inovasi itu muncul apabila dalam mewujudkannya dilakukan dengan tekun, serius, sepenuh hati dan ikhlas, *Insha Allah* dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Integritas, Profesionalisme, Inovasi dan *Teamwork* adalah nilai-nilai yang harus tertanam di setiap pegawai DJP, apabila kita menghayati dan menjadikannya sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak untuk kemudian dipraktikkan dalam organisasi, dipahami, diyakini dan diimplementasikan, maka segala tugas yang dibebankan kepada kita dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kuncinya adalah kita mau 'bekerja dengan hati'.

KETULUSAN HATI

Rony Hermawan

Pernah saya baca dalam suatu surat kabar bahwa kejujuran dan ketulusan itu tergantung dari cara pandang kita, mungkin itu benar mungkin juga salah. Berikut ini pengalaman pribadiku.

Di atas ketinggian pegunungan Jayawijaya mereka melanjutkan hidupnya, hidup yang harus dilalui dengan keras tanpa bergantung pada orang lain. Mereka adalah Suku Dani, bagian dari bangsa kita, yang sama sekali belum merasakan nikmatnya kemerdekaan yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Dengan bertelanjang dada dan hanya dengan mengenakan koteka mereka harus bertarung dengan dinginnya udara Gunung Jayawijaya, dengan wajah yang keras dan kaku yang terbentuk oleh alam. Mereka terlewatkan oleh teknologi dan budaya yang lewat dalam kehidupannya.

Di pagi hari ketika kabut pegunungan masih tebal menyelimuti dan dingin menusuk tulang (Wamena ada di ketinggian 3.200m dpl) mereka harus memikul hasil kebunnya melewati jalan-jalan di perbukitan dan menjualnya ke kota demi beberapa puluh ribu rupiah yang sama sekali tidak sebanding dengan perjuangannya. Bagi mereka uang bukan segalanya tapi kesempatan untuk bersosialisasi dengan anggota suku yang lain adalah yang tidak kalah pentingnya (sama seperti kita di era modernisasi ini yang segalanya dihitung oleh waktu, sosialisasi dengan teman adalah hal langka).

Dari mereka aku banyak sekali memperoleh pelajaran yang sangat berharga. Kebetulan aku sangat suka *travelling* dan selama aku ditempatkan di Papua aku memanfaatkan benar-benar hari libur untuk mengunjungi beberapa tempat eksotis di tanah Papua, salah satunya adalah Wamena. Selama di Wamena aku beserta istri dan anakku menemukan hal yang tidak aku temukan di tempat lain. Di sebuah pasar ada seorang pria asli Suku Dani menawarkan sebuah kerajinan yang menurutku kurang begitu menarik. Dengan sopan aku menolaknya, tapi aku memberi dia beberapa lembar uang sekedarnya untuk ongkos pulang. Dia menerimanya dengan pandangan yang dipenuhi seribu tanya.

Aku melanjutkan *travelling* untuk mencari orang yang menjual lobster lokal yang sangat enak dan hanya hidup daerah ini. Tapi hari itu mungkin bukan hari baikk. Sudah satu jam aku berkeliling pasar tapi tidak kutemukan lobster yang kucari. Dengan sedikit kecewa aku kembali ke hotel.

Di pagi yang dingin esok harinya, kami sekeluarga sedang makan pagi di restoran hotel dan terlihat seorang penduduk asli yang memaksa ingin masuk tapi ditahan oleh satpam hotel. Dia melongokkan kepalanya dan pandangannya menyapu seluruh ruangan. Begitu melihatku, orang tersebut berteriak dalam bahasa lokal dan melambaikan tangan. Dengan sedikit heran aku datangi orang itu. Oo.. ternyata orang yang nawarin kerajinan kemarin itu.... Akhirnya aku ajak dia masuk dan aku ajak sarapan bareng.

Dengan bahasanya sendiri dan gerakan-gerakan isyarat, dia mulai bercerita tentang keluarganya dimana tiga orang anaknya mati karena malaria dan mereka hidup di balik gunung, sambil menunjuk deretan pegunungan yang membiru. Tiba-tiba dia mengambil sebuah bungkus besar yang ditaruh dalam noken (tas asli orang pedalaman) dan menyerahkannya padaku. Langsung kubuka bungkus itu. Ternyata yang kulihat adalah lobster lokal yang kucari-cari!!!! Dengan suka cita kutanyakan harga dari lobster yang sangat istimewa itu. "Berapa harganya?", tanyaku. Orang itu menggeleng-gelengkan kepala. Aku kebingungan, tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya kuberikan dia beberapa lembar uang lima puluh ribuan. Tak disangka, orang itu mengembalikannya sambil kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Diletakkannya telapak tangan kanannya di dadanya. Aku bertambah bingung. Terpaksa aku minta bantuan pelayan restoran untuk menerjemahkan maksud orang tersebut.

Sesaat kemudian pelayan restoran menjelaskan bahwa aku adalah orang pertama yang dia temui yang memperlakukannya sebagai manusia. Dia tidak mau menerima uang dariku karena menganggapku sebagai saudara. Kaget aku menerima penjelasan itu. Kulihat matanya berkaca-kaca. Dalam kesederhanaannya aku melihat ada ketulusan terpancar dari matanya. Dengan menahan haru kujabat tangannya, layaknya melepas saudara yang mungkin tidak akan aku temui lagi. Kulihat mata istriku pun berkaca-kaca menahan haru.

Dengan pesawat pertama aku kembali ke Jayapura untuk memulai aktivitas rutin sebagaimana biasanya, sementara seseorang dari Suku Dani dengan pandangannya mengikuti pesawatku hingga hilang terhalang

tingginya puncak Jayawijaya yang gagah. Kejadian ini membuatku menerawang, membayangkan institusi tempatku bekerja. Di pedalaman Papua, aku temukan ketulusan hati dari seseorang yang barangkali tidak pernah belajar *personal value* secara formal, namun dia mampu melaksanakannya tanpa paksaan.

Di institusi tempatku bekerja, sering terdengar tentang nilai-nilai organisasi yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai. Bagusnya, nilai-nilai organisasi di institusiku ini tidak bertentangan dengan *personal value* manusia manapun. Jadi mestinya, tidak ada ruginya menerapkan nilai organisasi ini di mana pun, kapan pun. Namun, sering aku mendengar bahkan menemui betapa masih ada (untuk tidak menyebut banyak), pegawai yang terang-terangan melanggar nilai-nilai organisasi tersebut.

Saudaraku di pedalaman Papua telah mengajarku, penerapan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Pun tidak paralel dengan maju tidaknya peradaban. Kemauan untuk menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari ternyata lebih terhubung ke masalah hati, masalah nurani. Kita bisa mulai menata kembali hati kita agar bisa setulus hati saudara baruku dari pedalaman Papua, sejak sekarang.

INJURY TIME

Sri Rahayu Murtiningsih

“Lho, hari ini kan mas Tio berenang?”, kata guru anakku saat dilihatnya anak keduaku tidak membawa perlengkapan berenang ketika kuantar ke sekolahnya. *Mak deg*, seolah jantungku berhenti berdetak. “Kenapa kemarin aku tak melihat buku penghubungnya? Apakah ketinggalan di sekolah?” Anak keduaku ini kadang lupa untuk membawa pulang bukunya. Namanya juga anak baru berumur 4 tahun. Dan kini harus kuputuskan, kembali ke rumah untuk mengambil baju renang anakku atau melanjutkan perjalanan ke kantor? Bila kembali ke rumah berarti bisa terlambat ke kantor, dan bila melanjutkan ke kantor berarti anakku hanya menjadi penonton teman-temannya yang berenang, padahal renang adalah ekstrakurikuler favorit anakku. Kuputuskan untuk kembali ke rumah.

Kupasrahkan anakku kepada gurunya dan aku kembali ke rumah untuk mengambil baju anakku. Setelah kuambil baju renang anakku dan kuberikan ke gurunya, kulihat jam di HPku menunjukkan pukul 07.04 WIB. “Laju motor harus kencang nih”, kataku dalam hati. Jarak kantor dari sekolah anakku kurang lebih 11 km.

“Ya Allah berilah kelancaran jalan menuju ke kantor, pendekkan jalannya ya Robbi”, doaku. Membayangkan terlambat ke kantor, potongan seratus ribu lebih terbayang dalam pikiranku. *Eman-eman*. Uang sebesar itu bisa buat beli buku anakku.

Dulu perasaan itu nggak pernah ada. Absen masih manual, bisa dirapel pula. Anak rewel tinggal telepon ke teman kantor, memberitahu aku berangkat agak siangan. Teman akan maklum, toh mereka juga sering begitu. Kini, setelah modern, jangan harap! Mesin *finger print* tak mau diajak kompromi. Terlambat satu menit pun tidak ada kata maaf, terlambat tetap terlambat. Baik satu menit, satu jam atau lima jam, potongan tetap satu seperempat persen. Walau sebenarnya ada rasa ketidakadilan, aturan tetap aturan, terlambat berapa pun tunjangan dipotong sama besar.

Mengingat itu, kupacu motorku. Kupencet klakson kuat-kuat, tin... tinnnnnn... saat ada mobil “JOEN” yang berjalan pelan-pelan di depanku, agar sedikit minggir memberiku jalan. Mobil “JOEN” adalah mobil kursus

yang digunakan untuk belajar menyetir. Mungkin karena belajar, walau kubel agar sedikit minggir ya tetap saja jalan di tengah. Akhirnya sedikit kupacu motorku untuk menyalipnya, Wessss..... berhasil juga. Alhamdulillah.

Lepas dari mobil “JOEN”, baru lima menit jalan sampai di depan pasar Karah, macet lagi. “Apa ya?”, tanyaku dalam hati. Kutengok-tengok ke depan, kucari penyebab macet. “Ada Komo lewatkah?”. Sampai leherku pegel nggak kelihatan biang macetnya. Akhirnya kuputuskan mengikuti arus motor kebanyakan, merayap di sebelah jalan yang seharusnya bukan untuk jalan motor. Walau pelan yang penting jalan. Dan tidak terlambat, itu yang utama.

Akhirnya kemacetan dapat kutembus, sampai Karah, Gunung Sari menyeberang ke Bukit Mas. Lancar. Kularikan motorku di Jalan Bukit Mas, sampai Bundaran H.R. Muhammad, kena lampu merah. Berhenti sebentar, ambil nafas, kulihat jam tanganku pukul 07.26 WIB. Tinggal empat menit. Deg-degan juga. Mudah-mudahan jalan di depan lancar. Sebenarnya tinggal dua atau tiga kilometer sudah sampai kantorku. Yang jadi pikiranku, untuk



sampai kantorku harus melewati Gudang Ekspedisi . Kadang-kadang ada truk besar yang keluar masuk gudang, yang bikin macet jalan. Begitu lampu hijau menyala, langsung kularikan lagi motorku menyalip mobil-mobil yang masih melaju pelan karena baru mulai jalan.

Ternyata tak ada truk yang keluar masuk gudang, doaku dikabulkan Tuhan. Diperlancar dan diperpendek jalanku. Sampai halaman kantor, kuparkir motorku di depan tempat parkir, kuberikan kunci motorku kepada Pak Man tukang parkir sepeda motor di kantorku agar menempatkan motorku dan aku langsung lari menuju mesin *finger print*. Mesin menunjukkan pukul 07.29.25 WIB. “Belum terlambat!” sorak hatiku. Segera kumasukkan jari manis tangan kiriku ke mesin *finger*

print. Detik demi detik berlalu menunggu verifikasi mesin atas jariku, dan dijawab, “Anda belum terdaftar”. Ganti kumasukan jari kelingking tangan kananku ke mesin *finger print*. Jawaban masih sama, “Anda belum terdaftar”.

Verifikasi pertama gagal, verifikasi kedua gagal. Aduh... entah siapa yang berulah, mesinnya atau tangannya. Kadang-kadang susah bila mau absen. Akhirnya kugosok-gosokkan jari-jari tanganku ke rambut, jurus ampuhku bila susah absen. Kumasukan kembali jari manis tangan kiriku ke mesin, dan tepat pukul 07.30 detik ke-11 baru deh mesin menjawab “verifikasi sukses”. *Alhamdulillah*. Hampir terlambat.

Dengan langkah pelan-pelan, aku berjalan menuju kursiku, sambil mengatur nafasku yang sedikit terengah-engah. Sampai kursi, langsung duduk, *mak nyusss*, rasanya legaaaaa hatiku. *Alhamdulillah*. Kuambil telepon dan menelepon seseorang yang berada nun jauh di sana, dan bekerja di direktorat yang sama hebatnya dengan aku.

Tuutttttt,..... tutttttt.....”Assalamu’alaikum,” sapa suamiku.

“Wa’alaikum salam, tadi hampir saja terlambat Mas, baju renang mas Tio ketinggalan, jadi harus balik ke rumah dulu, tapi semua beres kok”. Setelah cerita sedikit masalah perjalanan pagi ini dengan suami, kututup telepon. Kuambil catatanku kemarin sore yang berisi rencana kerjaku hari ini dan memulai kerja hari ini dengan ikhlas. Modernisasi menuntut kerja keras dan cerdas. Sepadan dengan tunjangan yang kuterima.

R.I.P : I R I

Martin Purnama Putra

Suatu rasa bernama Iri ditemukan tewas bunuh diri di sebuah kantor instansi pemerintah paling bergengsi di negeri ini. Ia nekat mengakhiri hidupnya setelah hubungan cintanya diputus oleh kekasihnya yang bekerja di instansi tersebut.

“Saya baru sadar bahwa menjalin hubungan dengannya hanya akan menghancurkan kehidupan saya. Itulah alasan kenapa saya mengakhiri hubungan kami,” ungkap Mukhlis (nama samaran) sang mantan kekasih. Sang mantan mengaku tidak sedih atas kematian Iri.

“Ia memang lebih baik mati, sebab keberadaannya hanya akan menghancurkan kehidupan siapa saja yang menjalin hubungan dengannya. Ia membuat tidur saya tidak nyenyak, membuat saya tidak bersemangat, dan menjauhkan saya dari kebahagiaan. Kini hati saya lega setelah kepergiannya,” tutur Mukhlis sambil tersenyum.

Kisah di atas tentu saja hanyalah kisah perumpamaan. Namun apa yang dialami Mukhlis benar-benar terjadi. Pernah ada rasa iri di hatinya, iri yang menyiksanya. Namun seperti kisah di atas, Mukhlis telah berhasil melepaskan hatinya dari belenggu rasa iri itu. Mukhlis adalah kawan baik saya. Dia juga seorang pegawai yang baik. Sekilas, Mukhlis terlihat baik-baik saja. Gelagatnya tidak terlalu menampakkan bahwa ia memendam rasa iri. Sekilas semua terlihat wajar. Hanya karena kami berkawan baik-lah maka ia tak sungkan untuk mencurahkan isi hatinya kepada saya, dan dari situlah saya mengetahui bahwa ia tidak sepenuhnya dalam keadaan baik.

Saya tentu tidak dapat menceritakan seperti apa rasa iri yang dipendamnya itu. Tidak penting menurut saya. Yang lebih penting adalah bagaimana ceritanya sehingga ia bisa terbebas dari penyakit hati yang telah bertahun-tahun menjangkitinya. Dan kisah terbebasnya Mukhlis dari belenggu iri hatinya dimulai semenjak modernnya kantor kami.

Semenjak modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ada aktivitas baru di kantor kami, yaitu *In House Training* (IHT). IHT ini dijadikan ajang untuk berbagi pengetahuan (*transfer of knowledge*) tentang perpajakan. Tiap-tiap seksi diminta untuk membawakan sebuah materi yang sudah

diagendakan. Setelah materi selesai dipresentasikan, para peserta IHT diminta untuk memberikan tanggapan. Tak jarang terjadi diskusi yang menarik pada sesi ini. Celetukan lucu yang mengundang gelak tawa pun tak ketinggalan mewarnai IHT yang membuat ceria hati kami. Selain membahas materi tentang perpajakan, terkadang IHT juga dijadikan ajang untuk mensosialisasikan peraturan baru, memusyawarahkan rencana kegiatan kantor, atau pernah juga diisi acara bebas seperti saling berbagi pengalaman, lomba membuat yel-yel, dan acara-acara lain yang bertujuan untuk mengembangkan rasa kebersamaan di antara pegawai.

Pada suatu hari, aula yang biasa kami gunakan untuk IHT terlihat berbeda. Kursi yang biasa berjajar rapi di sana telah lenyap berganti hamparan karpet yang berbeda-beda polanya. Ada acara apakah ini? Ternyata kepala kantor menginginkan sesuatu yang berbeda untuk IHT kali ini. Ya, beliau mengundang pembicara dari luar, yakni seorang motivator dari ESQ. Sang motivator membuka ceramahnya dengan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh teman dari sang motivator (kita sebut saja Pak Ary) tentang seorang petugas penjaga pintu tol.

Umumnya, jarang kita menjumpai penjaga pintu tol yang bersikap ramah. Hal ini dapat kita maklumi, sebab menjaga pintu tol adalah pekerjaan yang sangat monoton dan membosankan. Lagi pula gajinya pun biasa-biasa saja. Namun, pada suatu hari Pak Ary bertemu dengan seorang penjaga pintu tol yang selalu tersenyum ramah ketika memberikan tiket tol. Pak Ary sangat terkesan dengan sikap penjaga tol itu dan mereka pun berkenalan. Singkat cerita Pak Ary bertemu lagi dengan si penjaga pintu tol dan mereka pun berkesempatan untuk berbincang. Pak Ary bertanya, “Kenapa sikap Anda berbeda dengan para penjaga pintu tol pada umumnya. Apakah gaji Anda lebih besar dari yang lainnya?”

“Tidak, gaji saya sama dengan yang lain,” jawabnya.

“Lalu kenapa Anda selalu terlihat selalu cerah dan ramah, sedangkan petugas yang lain terlihat cuek dan kaku?” tanya Pak Ary.

“Saya hanya mencoba memaknai pekerjaan saya. Saya selalu tersenyum kepada setiap pengguna jalan tol yang melewati pintu saya. Menurut agama saya, senyum adalah sedekah, maka bayangkan berapa banyak sedekah yang telah saya berikan setiap hari,” jawabnya dengan rendah hati.

“Setiap orang yang saya beri senyuman akan merasa gembira, dan membuat orang lain gembira adalah suatu kebaikan. Bayangkan berapa

banyak kebaikan yang saya lakukan setiap hari,” lanjutnya tanpa ada kesan menyombongkan diri.

“Dan lagi, setiap kali saya mengeluarkan tiket, saya selalu menyertainya dengan doa, semoga mereka selamat sampai tujuan. Bagi suami, saya doakan semoga dapat bertemu kembali dengan istri yang dicintainya. Bagi orang tua, semoga dapat berjumpa lagi dengan anak-anak yang dikasihinya. Dan setiap kali saya mendoakan mereka, saya merasa bahagia. Coba Anda hitung berapa banyak kebahagiaan yang saya rasakan di setiap harinya. Itulah kenapa saya selalu terlihat cerah dan ramah.”

Kisah ini sangat menyentuh hati saya, dan saya yakin teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Seorang penjaga pintu tol dengan gaji pas-pasan saja mampu memaknai pekerjaannya dengan begitu luar biasa, lantas bagaimana dengan kami yang memiliki pekerjaan bergengsi ini?

Secara tak sengaja mata saya tertuju kepada Mukhlis. Saya melihat ia melepaskan kaca matanya, ia mengusap matanya yang terlihat sembab. Apa yang sedang terjadi pada dirinya? Ternyata kisah penjaga pintu tol tadi mempunyai pengaruh yang hebat bagi dirinya. Ya, itulah saat dimana Mukhlis berkenalan dengan Reli yang kemudian ia jadikan kekasih barunya menggantikan Iri yang telah ia putuskan. Iri tidak terima dicampakkan begitu saja, ia marah dan mengancam bunuh diri.

“Aku selalu setia menemanimu sepanjang hari, bahkan di kantor. Waktu tidur pun aku selalu mendampingi. Kenapa kau tega memutuskanku?” Iri mengiba.

“Memang, tapi kebersamaan denganmu adalah neraka bagiku,” kata Mukhlis ketus. Iri pun frustrasi, ia mencekik lehernya sendiri, memukul-mukul kepalanya, dan akhirnya menghantamkan kepalanya ke tembok. Dan begitulah, Iri pun tewas seketika.

Kini Mukhlis hidup bahagia bersama Reli. Reli selalu mengingatkan agar Mukhlis tidak lagi cemburu ketika melihat orang lain melebihi dirinya. Mukhlis harus ikut bahagia ketika melihat temannya mendapat kesuksesan, ia harus rela ketika orang lain lebih kaya darinya, lebih beruntung darinya, karena hanya dengan sikap rela itulah ia akan mendapatkan kebahagiaan. *Rest in Peace, I r i.*

SEBUAH PERJALANAN

Teguh Budiono

Sintang merupakan salah satu kota di Kalimantan Barat. Dengan menempuh perjalanan ± 9 jam perjalanan dari Pontianak, Anda akan sampai ke calon ibukota Provinsi Kapuas Raya (jika diijinkan oleh Pemerintah Pusat). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sintang terbentuk sejak 1 Desember 2008. Salah satu kantor terakhir dalam era modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebelum menjadi KPP Pratama merupakan Kantor Pengamatan Potensi dan Penyuluhan Pajak (KP4) dengan KPP induk di Singkawang. Jarak Sintang ke Singkawang yang begitu Jauh (±420 km) membuat pengawasan di Sintang menjadi terbatas. Itulah awal timbulnya banyak permasalahan perpajakan di sini.

Sebelumnya saya bertugas di KPP Singkawang dengan jabatan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Saat Modernisasi menyapa Kanwil DJP Kalimantan Barat, saya diangkat sebagai *Account Representative* (AR) dan dimutasikan ke KPP Pratama Sintang, KPP Pratama terjauh di lingkungan Kanwil DJP Kalbar. Saat itu saya cenderung lebih memilih tetap menjadi pelaksana di Singkawang daripada harus menjadi AR di Sintang. Ya, Sintang merupakan momok yang menakutkan bagi kami, para pegawai di Singkawang. Perjalanan yang sangat jauh dengan jalan yang rusak parah adalah hal yang harus 'dinikmati' saat harus menuju Sintang. Bagi perantau, hal itu juga jadi permasalahan saat akan kembali ke kampung halaman.

Akhirnya, saya harus berangkat ke Sintang untuk menjalani tugas baru. Dengan menyewa mobil bersama teman-teman yang juga dimutasikan ke sana, kami berangkat pukul 07.30 WIB dan baru sampai Sintang pukul 17.00 WIB. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Setelah melihat kantor yang akan menjadi tempat kerja kami, rasa lelah itu menjadi berlipat. Kantor kami sangat sederhana jika tidak ingin kami bilang kecil. Sangat berbeda dengan kantor di Singkawang. Sungguh, saat itu kami sudah pasrah dan menerima keadaan. Dengan fasilitas kantor yang seadanya, wilayah kerja terdiri dari tiga kabupaten yang sangat luas yaitu Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu, ditambah lagi kami adalah AR yang masih baru promosi

dengan bekal kemampuan seadanya. Terasa berat bagi kami menjalani tugas ini.

Tetapi keadaan itu berubah. Semangat kami mulai timbul ketika mulai bertemu dengan Wajib Pajak di sini. Ketidaktahuan mereka akan perpajakan sungguh membuat kami terkejut. Ternyata mereka bukannya tidak patuh, tetapi hanya tidak mengetahui kewajiban mereka. Saat mereka membuat NPWP, yang ada hanyalah pemikiran bahwa jika sudah memiliki NPWP masalah sudah selesai. Mereka tidak sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Bahkan untuk mengetahui hal tersebut pun sulit bagi mereka karena terbatasnya informasi yang dapat mereka akses. Saat itu terbersit dalam pikiran saya, inilah ladang jihad saya. Kesempatan untuk dapat mengabdikan kepada negara lebih besar, terpampang di depan mata. Memang hal ini takkan mudah. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Namun, itulah indahnya perjalanan kami. Perjalanan mewujudkan masyarakat yang sadar pajak di wilayah Sintang dan sekitarnya.

Secara bertahap, kami mulai merencanakan langkah-langkah yang harus kami lakukan. Dimulai dengan keinginan menyatukan visi dan misi, kesediaan untuk berkomitmen lebih tinggi dan kesadaran untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian demi tercapainya pelayanan ke Wajib Pajak dengan lebih baik. Forum AR pun kami buat sehingga keluhan kesah AR dapat tertampung dan tercipta sebuah solusi bagi masalah-masalah yang kami hadapi. Tidak ada dikotomi antara Waskon I dan II, yang ada hanyalah *Account Representative* KPP Pratama Sintang. Pemisahan itu hanya untuk keperluan administrasi saja.

Ternyata, perjuangan ini memang tak mudah. Wajib Pajak yang sudah terbiasa dimanjakan mulai memusingkan kami. Saat penyampaian SPT Tahunan adalah saat yang paling menyibukkan bagi kami, karena kami harus menyediakan waktu lebih banyak untuk memandu Wajib Pajak mengisi SPT Tahunannya. Kami berkomitmen untuk tidak memanjakan Wajib Pajak dengan membantu mengisi SPT Tahunan mereka. Kami hanya dapat membantu hingga tahap memandu dan konsultasi pengisian SPT Tahunan. Lebih dari itu, kami dengan tegas menolaknya. Awalnya memang terjadi penolakan dari Wajib Pajak, tak jarang mereka sinis kepada kami. Bahkan ada yang terus terang menanyakan biaya untuk mengisi SPT Tahunan mereka. Melihat itu semua, kami hanya bisa mengelus dada dan berharap mereka dapat beradaptasi dengan keadaan ini.

Sungguh, merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami para AR saat melihat Wajib Pajak mulai patuh. Saat mereka bisa mengisi SPT Tahunan dan SPT Masa tanpa panduan dari kami lagi. Ternyata setelah konsultasi yang telah kami lakukan, ada kesan positif dari Wajib Pajak. Mereka mulai tidak lagi meremehkan pajak dan berusaha menjadi Wajib Pajak yang patuh. Mereka membandingkan keadaan sekarang dengan kondisi dahulu. “Mas, coba dari dulu kantor pajak seperti ini. Jadi kami tahu kewajiban kami apa aja. Kami mau kok bayar pajak. Kan, ini juga buat kita-kita juga”. Komentar itu yang sampai sekarang menjadi penyemangat bagi saya khususnya untuk terus berjuang. Ternyata mutasi saya ke Sintang membawa sebuah manfaat bagi saya. Saya baru sadar bahwa sesungguhnya apa yang ada di pikiran kita, terkadang hanya ilusi-ilusi yang dapat melemahkan mental kita.

Setelah sembilan bulan menjalani tugas sebagai AR, saya berterima kasih kepada Allah swt. yang memberikan saya kesempatan untuk beribadah dengan cara yang berbeda. Kepada rekan-rekan AR KPP Pratama Sintang yang terus bekerja dengan senyum dan canda, tetapi tetap serius dengan komitmen. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan II yang memberikan bimbingan dan berbagi ilmu *Excel Pivot table*-nya. Kepala Kantor yang terus menyemangati kami saat kami mulai lelah.

Tulisan ini saya dedikasikan untuk para AR di KPP Pratama Sintang : Pak Noriman, Bang Gunawan Sutrisno, Mas Ari Pardono, Nadhiev Maurice, Yuhdi Susanto, Ismail Budiono dan Rudy Wibowo.

SERAMBI MADINAH

Sri Sulton

Di tengah malam yang larut nan sepi, langit-langit kamar kost yang kusam seakan menghadirkan gambar-gambar dari *in focus* hati dan pikiranku. Saat aku memandangnya dengan tatapan kosong, untuk dapat menghadirkan wajah belahan jiwa: istriku yang tercinta dan dua buah hatiku, anak-anakku yang sangat kukasihi. Apalagi tadi siang saat menelepon istriku dari kejauhan terdengar sayup suara anak perempuanku, “mau-ayah, mau-ayah...!”, tanda si sulung sangat rindu pada ayahnya. Suara itu mengoyak rindu tanpa aku bisa memeluk atau menyentuhnya.

Sebelum di tempat tugas yang baru, aku bertugas di salah satu KPP Pratama di Jakarta Pusat, yang merupakan *pilot project* untuk KPP dengan sistem administrasi modern di Indonesia. Untuk dapat diterima di KPP tersebut aku harus melalui seleksi penerimaan. Alhamdulillah aku diterima. Ketika bertugas di Jakarta aku juga kost sendirian, sedangkan istri dan anak-anakku tetap tinggal di Bandung. Ini semua kami lakukan dengan penuh kesadaran demi kesinambungan terapi dan pendidikan anak sulungku yang berkebutuhan khusus. Lagi pula jarak Jakarta-Bandung relatif dekat jadi setiap minggu masih bisa mudik ke Bandung naik travel dengan harga yang terjangkau.

Si sulung merupakan inspirasiku, penyemangat untuk ikut seleksi di KPP Modern, sebagai langkah awal *hijrah* ke kehidupan yang lebih baik. Teringat saat-saat ikut ujian seleksi kantor modern di Jakarta, aku dan teman-temanku berangkat dari Bandung pukul 04.00 dini hari. Ada kejadian yang tak terlupa, saat makan siang bersama-sama teman dari Bandung. Setelah selesai makan siang dan saatnya membayar, ada seorang teman yang menyeletuk, “sebagai latihan modern bolehlah makan bersama tapi bayarnya sendiri-sendiri!” Tidak ada yang menolak, semua setuju. Meskipun sederhana peristiwanya, tapi terlihat jelas semangat yang mendalam untuk beranjak ke kehidupan yang lebih baik bagi kami semua.

Sampailah giliran saya mutasi ke kota *Serambi Madinah*. Kabar ini membuat aku lemas seolah tak berdaya untuk menapak tegak di atas bumi ini, segera berita ini kusampaikan ke istriku bahwa aku mutasi jauh dari Pulau

Jawa. “Sabar sayang, di mana saja tugasnya asal keluarga bisa kumpul tidak jadi masalah, kita bersama-sama menghadapi pasti akan terasa ringan,” kata istri coba menenangkanku.

Hikmah lain berkarya di kantor pajak modern saat itu adalah istriku memutuskan berjualan baju muslimah.

“Ayah, saya sudah beli tiket buat nanti ayah berangkat, karena kemarin ada seorang ibu yang memborong dagangan yang nilainya bisa untuk beli tiket pesawat,” kata istriku saat aku akan berangkat ke Gorontalo. Kupeluk dan kuciumi seluruh wajah istriku. “Terima kasih cinta, Bunda baik sekali sama ayah, Bunda sudah bersusah payah mendidik anak-anak, sekarang bersusah payah membelikan tiket dengan uang keringat Bunda sendiri, tidak ada kewajiban membantu cari nafkah buat suami!”

Aku terpaksa sendiri tanpa didampingi istri dan anak-anak, karena di tempat tugas yang baru tidak ada sekolah dan tempat terapi untuk anak sulungku yang berkebutuhan khusus. Karena itulah untuk sementara kami berpisah, dan hanya sebulan sekali kami bisa berkumpul. Sungguh berat keputusan ini kami ambil, tapi semua ini semata-mata demi pengobatan dan kebaikan si sulung. Sebuah keluarga sebaiknya memang harus berkumpul bersama untuk saling asih, asah dan asuh agar anak-anak bisa mempunyai *figure* seorang bapak dan seorang ibu, tapi kadang kondisi keadaan yang memaksa untuk tidak selalu demikian.

Hari itu, setelah berangkat dari Cengkareng pukul 06.00 WIB , pesawat mendarat di Bandara Djalaluddin sekitar pukul 10.30 WIT. Perjalanan melintasi sungai, gunung, laut, pulau bahkan melintasi waktu. Dari Bandara Djalaluddin ke tempat tinggalku di rantau yang berupa sebuah kamar kost sederhana, aku naik taxi bandara yang berupa mobil Avanza berplat nomor warna hitam.

Kembali kumenatap langit-langit yang penuh gambar perjalanan hidup diriku, kini terasa semakin tampak jelas wajah istriku dan wajah anak-anakku. Malam ini malam Minggu, malam yang biasanya merupakan saat yang membahagiakan bagi kami untuk bercengkrama dan berbagi kasih, tapi kali ini aku hanya tersendiri dalam sepi di kamar kost. Kuambil telepon genggam untuk menelpon istriku tapi rasa ragu timbul karena sekarang sudah pukul 02.00 WITA yang berarti pukul 01.00 WIB. Aku takut mengganggu tidur istriku. Rasa rindu mendalam mendorongku untuk tetap menelpon istriku.

”Maaf cinta, aku menelepon di malam selarut ini, aku tidak bisa tidur karena kangeeen sekali.”

“Tidak apa-apa sayang, aku dan anak-anak juga kangen”, sahut istriku.

“Rasanya aku tidak kuat lagi di sini. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku perlu cari kerja lain agar kita bisa kumpul?”

“Ayah sayang, yang sabar dan tawakal yach?! Kerja di Kantor Pajak dengan penghasilan yang cukup tinggi adalah anugerah, banyak orang antri ingin kerja di Pajak, malah ayah pengen keluar, tidak perlu sebegitunya, Yang! Ayah di sana sendiri karena pekerjaan, laksanakan dengan ikhlas, niatkan untuk beribadah kepada Allah untuk melaksanakan kewajiban menafkahi keluarga. Meskipun sendiri tanpa keluarga di sana tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, tetap menjaga keharmonisan keluarga. Bunda di sini bisa sendiri mengurus anak-anak, menjaga kehormatan seorang istri. Jadikanlah semua ini sebagai ladang ibadah kita untuk bekal kelak di akhirat!” istriku mencoba menenangkanku.

“Kasihannya Bunda, sudah berat mengurus anak-anak terutama si sulung yang berkebutuhan khusus, malah sekarang tambah sibuk berdagang busana untuk membantu ekonomi keluarga!” tuturku.

“Saya ikhlas melakukan ini, kita dititipi anak yang istimewa karena di pandangan Allah kita mampu. Yakinlah akan anak kita yang istimewa. Ayah sendirian di sana, dan bunda mengurus anak-anak sambil berdagang di sini, adalah ladang ibadah yang perlu kita tanami dengan kebaikan dan keikhlasan”.

Kata-kata istriku yang sejuk seolah memberi kedamaian dalam hati dan jiwaku, memompa semangatku untuk tetap bertahan dalam pengabdian dan berkarya di DJP. Terima kasih Ya Allah, telah Kau anugerahkan kepadaku kekayaan terindah dan tak ternilai... istri yang sholihah.

SANG TELADAN

Yunita

Saya mengenal beliau sudah lama, dari sebelum modernisasi di kantor kami. Tapi hanya sebatas kenal, sekedar sapa ketika bertemu. Seingat saya hampir tidak pernah saya ngobrol dengan beliau sampai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cianjur ~kantor tempat kami bertugas~ menjadi KPP Pratama Cianjur. Kami sama-sama ditugaskan di Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) sebagai pelaksana. Sebelumnya, beliau merupakan Koordinator Pelaksana di Seksi Penerimaan & Keberatan.

Selain sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan penuh perhatian kepada keluarga serta sangat dekat dengan anak-anaknya, hal lain yang saya kagumi dari beliau adalah semangatnya yang tinggi untuk belajar. Belajar komputer dan belajar merekam data perpajakan ke dalam sistem informasi. Saya menyaksikan bagaimana jari jemarinya belajar mengetik angka dan huruf satu demi satu untuk memasukkan data ke komputer. Beliau juga orang yang tidak malu untuk bertanya tentang hal-hal yang beliau belum tahu dan belum bisa.

Menurut saya, beliau adalah orang yang sangat menghargai dan sangat berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Setiap hari datang ke kantor jauh sebelum jam absen pagi berakhir. Bisa dipastikan beliau datang lebih dahulu dari saya. Kalau pun beliau datang belakangan kemungkinan karena beliau ada perlu dahulu, mengantar anak ke sekolah, misalnya. Beliau datang ke kantor sudah dalam kondisi siap untuk bekerja. Tidak seperti beberapa orang dari kami yang datang ke kantor masih dalam kondisi perut kosong alias belum sarapan, sehingga setelah absen, tempat yang selanjutnya dituju adalah kantin. Sementara beberapa karyawan masih asyik sarapan sambil ngobrol *ngalor ngidul*, beliau sudah mulai bekerja dengan tenangnya.

Jam kerja bergulir menuju siang hari, beberapa karyawan mulai berkeluh kesah dengan masalah mata alias mengantuk. Beberapa dari mereka memutuskan untuk ke kantin, entah sekedar pesan kopi lalu masuk ke dalam kantor lagi atau ngopi di kantin. Sementara yang saya lihat Pak Sunyoto tetap tenang pada tempat duduknya, tanpa keluh kesah, masih tetap

bekerja dengan diselingi canda gurau atau obrolan ringan di antara kami, warga Seksi PDI.

Setahu saya beliau tidak pernah makan dan minum di kantin atau sekedar pesan makanan dan minuman dari kantin. Hal itu diamini oleh Bu Kantin yang mengatakan kalau, jangankan makan atau minum di kantin, sekedar “nengokin” ke kantin aja belum pernah. Kok bisa ya? Saya sendiri, walaupun sudah sarapan tetap saja sekitar jam 10-an perut sudah menuntut untuk diisi kembali, makanya *endut*, he..he... he.

Menjelang waktu dzuhur beliau pulang untuk istirahat. Sekitar satu jam kemudian datang lagi untuk melanjutkan aktivitas bekerja. Saat adzan Ashar berkumandang, tanpa *ba bi bu* beliau menuju mushola kantor untuk menunaikan sholat. Selesai sholat beliau balik lagi ke ruangan, melanjutkan pekerjaan. Sementara beberapa karyawan, setelah sholat, masih duduk santai sambil ngobrol-ngobrol di mushola.

Waktu terus berlalu sampai jam absen sore tiba. Beliau absen, kemudian pulang dengan motor vespa tuanya atau dengan mobil kijang yang beliau beli dari hasil uang pinjaman di bank. Begitulah aktivitas beliau setiap harinya di kantor, bekerja tanpa banyak ngobrol, tanpa buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia.

Sampai suatu hari, Selasa tanggal 9 September 2008, bertepatan dengan 9 Romadhon 1429H. Sore hari setelah absen, saya baru saja keluar dari pintu utama kantor ketika saya dengar teriakan seorang teman, “Pak Nyoto *jatoh*, Pak Nyoto *jatoh!*”. Saya langsung ke tempat parkir motor yang letaknya di sebelah kanan pintu utama kantor. Saya lihat beliau sudah duduk sambil merintih dengan kaki diselondongkan. Awalnya saya kira hanya jatuh biasa, tapi ketika saya sentuh kakinya, beliau langsung menjerit tertahan, “Aduh....jangan dipegang.., sakit...” Suasana sore itu langsung ramai, teman-teman yang hendak pulang bergegas menolong beliau. Singkat cerita, beliau langsung dibawa ke “Bengkel Tulang” dengan diantar beberapa orang teman menggunakan mobil dinas.

Esoknya saya dapat berita kalau beliau harus dirawat karena ternyata tulang pahanya patah. Sungguh, saya kaget karena awalnya saya kira hanya jatuh biasa, paling-paling keseleo. Apalagi menurut satpam yang melihat kejadiannya, beliau hanya terpeleset saat hendak memundurkan vespanya dari tempat parkir. Mungkin karena usia beliau yang sudah memasuki kepala lima, dimana tulang-tulang sudah mulai rapuh, sehingga jatuh sedikit saja berakibat fatal. Entahlah.

Setelah kurang lebih dua bulan tidak masuk kerja, beliau mulai aktif kembali, walaupun kondisinya masih memprihatinkan. Dengan menggunakan *kruk*, beliau berjalan pelan dari tempat turun dari mobil ke kursi tempat beliau duduk. Walaupun kondisi fisik beliau tidak seperti dulu, tapi semangatnya tetap tinggi. Semangat untuk bekerja ~datang kantor tidak telat dan langsung bekerja~ semangat untuk belajar, dan semangat untuk menghadapi hari esok. Tentu dengan harapan dapat pulih seperti semula. Amiin.

Satu tahun telah berlalu, tulang paha beliau yang patah masih belum sembuh total, ada kalanya beliau merasa bosan dengan keadaan tersebut tapi saya tetap melihat semangatnya dalam bekerja. Datang jauh sebelum jam masuk kantor. Sementara masih banyak karyawan yang belum datang, beliau sudah duduk tenang di depan komputer. Biasanya, beliau tidak langsung membuka menu perekaman tapi membuka situs Kepegawaian DJP. Jika ada temen sekantor atau teman di kantor lain yang beliau kenal berulang tahun pada hari itu, beliau akan memberikan ucapan selamat, entah secara langsung atau via *email*. Hal kecil yang menunjukkan betapa besar perhatian beliau kepada rekan-rekannya.

Di saat teman-teman berharap agar *grade* mereka dinaikkan, beliau malah sebaliknya, minta *grade*-nya diturunkan. Beliau malu karena tidak kerja *full time*, malu karena waktu istirahatnya lebih lama. Padahal menurut saya, walaupun beliau pulang sebelum jam istirahat dan kembali lagi setelah jam istirahat itu adalah hal yang dapat dimaklumi, karena kondisi beliau. Beliau harus buang hajat dan sholat dirumah ~hal yang belum dapat beliau lakukan dikantor~ karena untuk melakukan itu beliau harus menggunakan alat khusus. Tapi menurut beliau itu namanya korupsi waktu, dan sebagai konsekuensi atas hal itu, beliau minta *grade*-nya diturunkan.

Melihat beliau, sejujurnya saya malu pada diri sendiri dan juga malu pada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, seperti kenikmatan mampu berjalan dengan baik ~tanpa perlu alat bantu~ tapi belum bisa memaanfaatkan nikmat tersebut dengan semaksimal mungkin. Saya malu karena saya belum bisa sedisiplin dan sesemangat beliau dalam bekerja. Beliau telah mengajarkan bagaimana menjadikan DJP modern dengan membangun integritas dan bersikap profesional dalam bekerja. Jika ada pemilihan pegawai teladan, maka saya akan mengajukan sebuah nama untuk dijadikan nominasi dalam pemilihan tersebut yaitu **SUNYOTO...!**

HIDUP INI PILIHAN

Windy Ariestanti Hera Supraba

“Hidup adalah pilihan” siapa yang belum pernah mendengar? Setiap hari, banyak pilihan yang harus kita ambil. Saat membuka mata di pagi hari, kita harus mengambil keputusan, *memilih* apakah akan tetap meringkuk di balik selimut, atau bergegas menyiapkan diri untuk aktivitas hari itu. Selesai mandi, kita akan *memilih* baju. Sesudahnya, kita *memilih* sepatu, sarapan, begitu seterusnya. Hidup manusia sejatinya tak bisa lepas dari pilihan ~dan~ *memilih*.

Kadang-kadang, memilih bisa jadi masalah dari level gampang-gampang susah hingga *complicated*, apalagi jika sudah bermain pada tataran perasaan. Masih ingat *gak*, gelombang revolusi saat mengambil keputusan *memilih* pasangan hidup? Terlalu banyak pilihan kadang juga jadi masalah, lho. Mas Joko pintar tapi Aa’ Encep ganteng. Bang Ucok baik tapi Uda Fahri simpatik. Meski maunya memilih semua yang ada, tapi tetap, *satu* pilihan saja yang boleh diambil untuk menuntaskan masalah.



Pagi tadi Yara, putri kecilku yang berusia enam tahun terbangun dalam keadaan demam. Saat kuberi obat penurun panas, ia masih sempat berbisik sambil tersenyum “Asiiiik, hari ini aku gak sekolah”. Tapi ia kemudian buru-buru menambahkan ~dengan nada cemas~ “Bunda gak ke kantor kan?” Aku hanya bisa tersenyum kecut, teringat pada tumpukan berkas pengurangan PBB dan Laporan Kegiatan

Membangun Sendiri yang sedang kejar tayang untuk bahan Rakorda. Yah,

beginilah keseharianku sebagai seorang *Account Representative* di KPP Pratama.

Lalu, kutinggalkan ia pergi dalam keadaan ia belum mandi, belum sarapan, dan belum sikat gigi, karena aku harus berangkat sebelum jam tujuh kalau masih ingin kebagian absensi *finger print*. Sejak modernisasi diberlakukan, sulit sekali rasanya “mencuri waktu” meski sebentar, karena telat satu menit bahkan beberapa detik berarti *take home pay* akan berkurang sekian persen, yang ~setelah dihitung-hitung~ pokoknya banyak, deh.

Sepanjang jalan menuju kantor aku masih merenungi kejadian pagi ini. Pilihan yang ada terasa begitu sulit. Sisi feminimku menjeritkan, aku ingin menjadi seorang ibu yang ideal, berada di sisi anak-anak saat mereka membutuhkan, dan mencurahkan perhatian serta energi bagi kebutuhan mereka. Di sisi lain, aku adalah seorang pegawai pada sebuah instansi pemerintah yang tengah bertransformasi, dan aku ingin menjadi bagian dari proses penting ini. *Season’s changed*, begitu bahasa gaulnya. Sejarah sedang diukir. Dalam atmosfir kantor, segalanya kini serba teratur, disiplin, dan bernuansakan komitmen bekerja tinggi, atau ~paling tidak~ semua mengarah ke sana. Tuntutan untuk bersikap profesional pun lantas menjadi suatu kebutuhan.

Dilematis. Aku bukanlah seorang yang tak berperasaan, tapi juga bukan manusia tak punya integritas. Aku cinta anakku, dan aku juga cinta DJP tempatku bekerja. Setiap hari aku harus berjuang mengalahkan naluri keibuanku demi tanggung jawab kedinasan. Jadi, aku mesti *memilih* yang mana? Anakku yang meringkuk sakit atau profesionalitas pekerjaanku? Aku mesti jadi yang mana? *Be a good mom, or, be professional?*

Baru saja memindai jariku pada mesin absensi, tiba-tiba ponselku berbunyi. Rupanya salah satu Wajib Pajak (WP) yang menjadi tanggung jawabku ingin bertemu. Hmm...sepagi ini? Dan yang membuatku bengong, ternyata si WP sudah duduk manis di ruang *Information Center*, menantikan kedatanganku. Dalam hati aku mensyukuri habis-habisan keputusanku untuk datang tepat waktu ke kantor.

Sorenya, sekitar pukul tiga sore kembali ada Wajib Pajak lainnya yang ingin bertemu dan menghubungi *via* HP. Aku baru saja kembali ke kantor dari mengantarkan SPPT PBB dan langsung menuju *Information Center*. “Sore, Bu”, spanya, seorang pria hampir setengah baya yang rapi dengan dialek Sunda yang kental. Setelah selesai dengan masalah pajaknya, tiba-tiba

ia berkata kepadaku, “Bu, saya sungguh kagum sama Ibu. Ibu seorang perempuan tapi teguh memegang komitmen”. Aku agak kaget dengan pernyataannya, sekaligus gak ngeh. Emang aku punya komitmen apa ya sama dia? “Maksudnya gimana ya, Pak?” tanyaku. “Iya, sebagai perempuan Ibu kan pasti banyak urusan. Ya anak, ya rumah, ya kantor. Tapi sehabis bertugas Ibu tetap datang kembali ke kantor untuk menemui saya. Artinya Ibu menjaga komitmen Ibu terhadap tugas”, jawabnya.

Tiba-tiba mulutku terasa kering. Hati kecilku malu mendengar pernyataan si Bapak. Seandainya ia tahu bahwa pagi tadi sempat terbersit di hatiku untuk menunggu juniorku di rumah. Tapi untunglah, manifestasiku kepadanya hanya berupa senyuman kecil. Tapi tatapan serius sekaligus respek dari Bapak itu betul-betul tak mungkin kulupakan. Itu ~bagiku~ merupakan “tatapan penghargaan seumur hidup”. Lantas kuresapi kejadian itu dalam-dalam.

Lalu, segalanya terasa lapang bagiku, seperti ada beban berat yang seketika terangkat dari rongga dada. Aku kemudian melihat bahwa keputusanku untuk tetap datang ke kantor tepat waktu, lebih sebagai sebuah pendidikan yang mentransfer pesan kepada anakku untuk menjadi manusia disiplin dan bertanggung jawab. Pendidikan melalui keteladanan ~sebagaimana tuntunan dalam agama~ adalah cara pendidikan yang paling efektif. Dapat satu poin.

Selanjutnya, Tuhan adalah sebaik-baik penjaga. Dengan bersabar, meluruskan niat bekerja sebagai beribadah, kutitipkan permata hatiku kepada Tuhan, pemiliknya yang hakiki. Ini ~hakikatnya~ sebuah pendidikan tentang ketauhidan untuk anakku, sejatinya merupakan sebuah bekal yang luar biasa bagi perkembangan kecerdasan spiritualnya. Dapat poin kedua.

That's it. Hidup ini sejatinya simpel, kitalah yang membuatnya kompleks. Tuhan Maha Penyayang, kitalah yang tak pernah berhenti “berhitung” dengan mekanisme untung-rugi. Sabar dan ikhlas tetap merupakan solusi untuk berbagai kepelikan. Selanjutnya tinggal tawakal. Sesederhana itu. Sepertinya aku telah berhasil berdamai dengan diri sendiri. Hidup memang harus selalu memilih, dan pada setiap pilihan yang diambil, selalu berisi “sepaket” aspek positif dan negatif. Selebihnya tergantung pada kita, mau menyikapinya secara positif atau negatif.

AKHIRNYA DATANG JUGA

Yeni Suriany

Aku terlahir sebagai anak dari seorang pegawai pajak. Istilah pajak sudah tidak asing lagi di benakku. Aku bangga akan pekerjaan bapakku, begitu juga kalau orang-orang sudah bertanya tentang pekerjaan bapakku sudah pasti aku dengan bangganya menjawab “Bapakku bekerja di Kantor Pajak”. Orang-orang selalu memberi respon “Wah asik ya, banyak uangnya”, begitu kata mereka diringi senyuman yang aneh. Aku sih senang-senang saja dengan respon orang-orang itu, tapi aku juga bertanya dalam hati memang gaji pegawai pajak besar ya? Setahuku gaji bapakku biasa-biasa saja. Tapi kenapa orang-orang itu berkata begitu? Semua pertanyaan itu aku simpan di hatiku, aku tidak berani bertanya pada bapakku.... Itu sekelumit kisahku dulu waktu aku masih kecil dan tidak tahu apa-apa.

Sekarang aku ditakdirkan menggantikan bapakku menjadi petugas pajak, meski itu bukan cita-citaku. Aku melakukannya karena hanya untuk membuat senang dan bangga bapakku. Sebagai pegawai baru di lingkungan pajak (dulu sebelum modernisasi) aku mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres (menurutku). Berikut contoh kecil ketidakberesan itu.

Waktu itu aku akan mengambil ijazah diklat pra-jabatanku, pendidikan yang harus kutempuh sebelum aku diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Teman-temanku langsung menadahkan tangannya padaku (maksudnya minta uang) untuk saweran. Aku bingung kenapa hanya untuk mengambil ijazah prajab saja harus memberi uang? Teman-temanku berdalih agar tidak dipersulit dan aku tambah bingung. Kok dipersulit, itu kan ijazah kita? Tapi walaupun begitu dengan menggerutu aku memberi uang juga. Waktu itu aku bingung kalau aku tidak memberi nanti disangka tidak kompak. Yah, aku hanya bisa bingung.

Setelah sekian tahun bekerja akhirnya aku melihat dan mengalami sendiri ketidakberesan yang lainnya. Hal ini mengingatkanku akan omongan orang-orang dulu waktu aku kecil, sampai akhirnya berbagai pertanyaan di hati kecilku dulu terjawab sudah. Oh, ternyata memang pegawai pajak itu banyak uangnya.

Ketika menjalani tugas sebagai petugas pajak sebenarnya aku tidak betah. Ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa menerima ketidakberesan yang terjadi. Apalagi kalau aku melihat beberapa temanku yang baru menjadi petugas pajak, yang waktu pertama bekerja hanya tinggal di kos-kosan seadanya dan tentu saja dengan badan yang kurus kering, namun belum lama bertugas, karena ditempatkan di seksi “basah” (istilah orang-orang), dia sudah tinggal di kompleks perumahan yang lumayan mahal. Belum lagi kendaraan yang dia pakai, dan tentu saja badannya pun sudah tidak kurus kering lagi. Duh, aku semakin tidak betah. Tapi untuk memutuskan keluar pun aku tidak berani karena hal ini akan membuat bapakku kecewa.

Aku tidak ingin membuat bapakku kecewa dan sedih. Dengan menjadi petugas pajak, aku merasa bisa membalas budi padanya. Aku tidak merasa iri dengan teman-temanku, bahkan aku juga tidak munafik, pernah melakukan ketidakberesan itu dan itu membuatku benar-benar tersiksa. Kata-kata benar dan salah datang silih berganti di benakku, karena aku tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Aku diajarkan agar jangan pernah berbuat hal-hal seperti itu.

Cukup sudah aku membebani diri dengan pernah melakukan hal seperti itu. Selanjutnya aku selalu menolak mengerjakan tugas yang menurutku merupakan tugas-tugas yang “tidak beres”. Atas sikap itu banyak teman-teman mencibirku, mengatakan aku bodoh dan entah apa lagi. Tapi aku tidak peduli. Yang penting aku sudah meminimalisir “ketidakberesan” dalam diriku, karena untuk menghilangkannya aku tidak akan bisa. Lingkungan belum mendukung untuk bisa melawan “ketidakberesan” itu. Dalam hati aku berharap akan ada sesuatu yang membuat “ketidakberesan” itu sirna sehingga aku bisa bekerja dengan tenang tanpa takut apa yang aku lakukan itu benar atau salah. Itu dulu.

Sekarang aku sangat bersyukur ternyata apa yang aku harapkan terkabul sudah. Sekarang aku dapat bekerja dengan tenang tanpa takut melakukan benar atau salah dan aku sekarang benar-benar bangga menjadi petugas pajak. Aku tidak malu lagi kalau ditanya tentang pekerjaanku karena aku dengan bangga bisa mengatakan bahwa lingkungan kerjaku sekarang sudah dan akan terus berubah menjadi lebih baik.

Hal yang lebih membanggakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), - sebuah institusi yang pernah mendapatkan predikat terkorup-, merupakan pelopor modernisasi. DJP berani memperbaiki diri demi kemajuan bangsa,

dimana budaya “ketidakberesan” barangkali masih menjadi hal yang biasa di instansi lain. Ini berarti kita bisa menjadi contoh yang baik bagi institusi lain demi negara kita. Semoga dengan perbaikan-perbaikan ini kita dapat membuktikan bahwa kita benar-benar petugas pajak yang handal, yang bersih dan tidak merugikan negara. Semoga hal yang baik ini di masa mendatang akan menjadi semakin baik... Amin.

Terima kasih Bapak, berkatmulah aku terus bertahan dan bangga menjadi petugas pajak. Aku akan terus jaga idealisme yang kau ajarkan. Ya Allah ya Robb, terimalah beliau di sisi-Mu. Abadikanlah pahala buatnya karena baktiku. Amin.

(Kupersembahkan cerita ini untuk bapakku tercinta yang selalu bangga dengan pengabdianya di DJP)

INDAHNYA KEBERSAMAAN

Ari Saptono

“Abi, Dik Razan sakit,” telepon istriku dari pulau seberang. Kami harus berpisah karena aku ditugaskan di Samarinda. Sebenarnya kami berharap setelah lulus dari Program S1 Beasiswa, aku bisa bertugas di Jawa karena *track record* angkatan-angkatan sebelumnya mendapat penempatan di Jawa. Sebelumnya, penempatan pertamaku di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke Majene, Sulawesi Barat dan akhirnya dapat kesempatan tugas belajar.

Saat istriku menelepon, analisa dokter Dik Razan terkena campak. Aku tak banyak khawatir karena penyakit itu tidak berbahaya. Aku tetap berkonsentrasi menyelesaikan tugasku melakukan cetak masal SPPT PBB. Pagi hari istriku menelepon lagi mengabarkan kalau Dik Razan ada di ICU karena sesak napas dan pingsan. Istriku bercerita bahwa ia berusaha membangunkan Dik Razan untuk diberi ASI jam 02.00 dan jam 03.00 tapi tidak mau bangun dan istriku pikir anakku masih ngantuk berat. Saat pagi hari jam 06.00, istriku melihat Dik Razan sesak, baru dibawa dengan bantuan mobil tetangga ke RS Aisyah di Klaten.

RS tersebut tidak bisa berbuat banyak, akhirnya anakku dibawa ke RSUD yang peralatannya lebih lengkap. Aku mengabari ibuku agar menemani istriku di RS. Ternyata anakku terkena demam berdarah. Siang hari tanpa sengaja aku membaca koran tentang *varian* terbaru demam berdarah dimana sang penderita mengalami pingsan selama lima hari untuk melewati masa kritisnya. Ya Allah, apakah ini yang sedang dijalani Dik Razan? Tetapi entah kenapa keinginan untuk pulang ke Jawa menemaninya dikalahkan oleh keinginan menyelesaikan tugas di kantor. Aku harus tabah dan hanya bisa berdoa semoga anakku mampu menghadapi masa kritis itu.

“Abi, kalo bisa pulang ya? Mas Farras juga kena demam berdarah”, kabar istriku mengejutkanku. Kami memiliki tiga orang putra M. Farras Al Faruq lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan 30 Juni 2004, kemudian M. Hafidz Abdurrahman lahir di Solo, Jawa Tengah 10 Mei 2006, dan M. Razan Al Harits lahir di Klaten, Jawa Tengah, 20 Agustus 2007. Aku bimbang antara pulang dan tidak pulang, karena untuk biaya pulang dengan pesawat ke Jogja

sekitar Rp 700.000,-. Uang dari mana? Sedangkan untuk biaya hidup di Samarinda yang sangat mahal aku sudah berhemat semaksimal mungkin, karena dana alokasi untuk keluarga di Jawa yang aku tinggalkan lebih aku utamakan.

Aku berusaha mencukupi kebutuhan mereka sebaik mungkin karena aku tidak bisa mendampingi mereka setiap hari. Kami memang sudah punya komitmen sebelum pernikahan kami untuk membentuk keluarga yang Islami. Kami tidak ingin anak-anak kami makan dari uang yang tidak jelas karena tidak akan berkah, mengingat itulah yang akan membentuk darah, daging dan kelakuan anak-anak kami.

Aku sangat bahagia mendapat istri yang sabar dan setia meskipun dari keluarga yang kurang berada. Pernikahan kami sebenarnya kurang mendapat persetujuan dari orang tuaku yang menginginkan calon pendampingku harus pegawai pajak atau PNS. Aku berusaha meyakinkan orang tuaku bahwa dia adalah yang terbaik karena aku sudah mengenal dia dari sikap dan tingkah laku, juga sifatnya yang menerima apa adanya, sehingga tak pernah mempunyai permintaan yang macam-macam. Sampai hari ini dia tetap menjaga pribadi itu, setiap aku mendapat hasil tambahan dari lembur maupun dinas luar selalu dia tanyakan, “Uang apa ini, Abi? Dari mana ini, Abi?”. *Alhamdulillah* ada yang mengingatkan dan menjagaku untuk bisa berkomitmen menjaga diri dari hal-hal yang tidak benar.

“Abi pulang ya, bantu Ummi mendampingi anak-anak di rumah sakit. Mas Farras tidak mau sama Mbah Ti, maunya sama Ummi terus. Bagaimana Dik Razan? Kasihan dia sendiri berjuang melawan sakitnya”.

Aku harus menentukan pilihan antara pulang dan tidak. Akhirnya kuputuskan untuk tidak pulang karena beberapa pertimbangan antara lain menyelesaikan pekerjaan dan ongkos pulang.

“Sabar ya Mi, mungkin lima hari lagi Abi pulang nunggu dananya cair ya. Dik Razan biar sendiri karena masa kritisnya lima hari, Ummi temani Mas Farras saja”.

Tega, mengapa aku begitu tega membiarkan Dik Razan sendiri. Hari ke-2 Ummi selalu telepon tiap satu jam memohon kepulanganku menemani anakku yang sedang sakit. Aku tetap tidak bisa memenuhi keinginan istriku. Selanjutnya, tidak ada lagi permintaan dari istriku sampai pada hari ketiga istriku menelpon dengan suara lirih hampir tak terdengar, “Abi, Dik Razan sudah dipanggil menghadap-Nya, tolong Abi pulang”, kata istriku berusaha tabah. Bagaikan disambar petir saat aku menerima kabar itu. Saat itu aku

masih berusaha menyelesaikan pekerjaan yang ada. Akhirnya aku masuk ke ruang Kasi-ku untuk meminta ijin. Belum sempat aku berbicara beliau



memintaku untuk mengerjakan tugas yang baru datang.

“Maaf Pak, anak saya meninggal, saya mohon ijin”, kataku berusaha tabah seperti istriku. Kasi-ku kaget karena selama ini aku berusaha biasa-biasa saja meskipun anakku dirawat di rumah sakit. Kasi-ku memberikan ijin sambil mengeluarkan dompetnya dan memberikan sejumlah uang yang cukup banyak bagiku.

“Tidak usah”, kataku menolak.

“Tidak apa-apa, ini dari saya. Tolong diterima”.

Akhirnya aku menerima pemberiannya. Dengan bantuan seorang teman baikku, aku diantar naik motor ke agen tiket pesawat karena terus terang di kantor ini hanya aku yang tidak punya kendaraan. Selama ini aku selalu nebeng sama teman baikku itu.

Ada dua alternatif, lewat Jogja jam 5 sore dengan harga tiket 1,2 juta disambung naik bis selama setengah jam atau lewat Surabaya 700 ribu plus naik bis lagi selama 5 jam ke Klaten. Kukabari istri dan ibuku tentang jadwal tiket itu. Aku berharap pemakaman bisa menungguku agar aku bisa memberikan yang terbaik yang terakhir buat Dik Razan. Ibuku menghubungiku dan berkata, “Nak pemakaman kita lakukan hari ini tanpa

menunggu kehadiranmu ya? Kasihan almarhum anakmu kalau terlalu lama menunggu, ikhlaskan saja ya?”, Ibuku memohon.

“Iya, Bu”, hanya kata-kata itu yang keluar dari mulutku. Penerbangan kali ini terasa hampa, kupandangi awan dari jendela pesawat, ”Dik Razan kamu ada di mana?”, pikiranku menerawang jauh.

Jam 12 malam aku sampai di rumah, sisa-sisa prosesi pemakaman masih ada, tenda di depan rumah pun masih belum dibongkar. Istriku menyalamiku dan tak kuat menahan tangisnya. Semua tamu yang tersisa hanya memandangi dan berbisik, “Ayahnya baru pulang ya?”.

Di dalam kamar aku usap kepala istriku, aku pun tak kuasa menahan tangis meskipun aku seorang laki-laki. “Tabah ya Mi”, kata-kata itu selalu aku ulang. Aku tidak mau menyalahkan dokter yang salah *diagnose* atau istriku yang kuanggap kurang tanggap atas penyakit anakku. Aku juga bersalah. Andai saja aku bisa pulang mendampingi anakku waktu sakit, andai saja keluargaku kuajak ke Samarinda dan sejuta andai-andai yang lain.

Esok paginya aku datang ke makam anakku, ”Maaf ya Dik Razan, Abi tidak bisa menjadi ayah yang baik buatmu,” kataku dalam tangis. “Bahkan saat terakhirmu pasti engkau ingin kumandikan, kukafani dan kugendong ke peristirahatan terakhirmu. Maaf ya, Dik Razan”, kata-kata itu selalu kuulang di sela-sela doaku di pemakaman.

Akhirnya Farras putra sulungku sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit, tapi kata-katanya selalu membuat hatiku bagai teriris-iris, ”Abi, Dik Razan jangan ditinggal sendirian dong di rumah sakit, kasihan khan”. Sampai saat itu ia tidak tahu kalau adiknya sudah meninggal dunia.

Akhirnya aku kembali ke Samarinda. Empat bulan berlalu, dan akhirnya modernisasi dilaksanakan juga di Kanwil Kalimantan Timur. Aku ditempatkan di KPP Pratama Samarinda. Aku berjanji keluargaku akan kuboyong ke Samarinda karena *take home pay* yang aku terima cukup lumayan, meskipun masih sangat mepet untuk biaya hidup yang super mahal di Samarinda. Gaji modern pertama aku belikan tiket dan aku memberanikan diri meminjam uang temanku untuk membayar kontrakan rumah. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa berkumpul dengan keluargaku tercinta.

Modernisasi ini membawa berkah bagiku sehingga aku bisa membawa keluargaku berkumpul bersama di Samarinda. Aku yakin Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka asalkan kita istiqomah dijalan-Nya. Bukankah rezeki itu bukan hanya harta benda? Nikmat hidup berkumpul bersama-sama keluarga yang kita cintai,

menjalankan amanah negara yang dibebankan pada kita juga merupakan rezeki yang tidak ternilai harganya.

Allah memberikan kejutan spesial untukku dengan menghadirkan seorang putra lagi bagi keluargaku dan kuberi nama M. Zaki Abdurrasyid. Tapi aku tidak pernah melupakan Razan putraku yang kutinggal dalam kesendirian di pemakamannya di Klaten, Jawa Tengah. “Dik Razan, demi tugas negara dimanapun Abi ditempatkan di seluruh bumi pertiwi ini, insya Allah Abi akan menjalaninya. Doa kami senantiasa menemanimu di mana pun kami berada”.

SANG KURIR

Yusep Rahmat

Genap lima bulan sudah aku menjadi seorang *Account Representative* (AR). Setumpuk pekerjaan sudah banyak yang kukerjakan, segudang masalah telah banyak kuselesaikan. Maklumlah, saat itu merupakan transisi dari kantor pajak dengan paradigma lama ke kantor pajak yang modern, yang menerapkan aturan kode etik pegawai yang sangat ketat.

Seperti biasa setiap awal tahun kantor pajak disibukkan dengan penyampaian SPT Tahunan baik untuk orang pribadi maupun perusahaan. Ada hal baru kali ini terkait dengan tugasku sebagai seorang AR, yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Biasanya tugas ini dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, entah karena alasan apa, sekarang ini menjadi tugas pokokku tiap tahun sebagai seorang AR.

Pagi ini pukul 7.15 aku sudah sampai kantor. Absen dengan *finger print* lalu bergegas menuju meja kerja. SPPT untuk hari ini kusiapkan setelah sehari sebelumnya kusortir dulu berdasarkan alamat untuk mempermudah penyampaiannya. Rencananya hari ini aku bersama seorang teman akan menyampaikan SPPT sesuai wilayah kelurahan masing-masing.

Matahari sudah mulai meninggi, kami mulai menyusuri jalan dengan menggunakan motor menuju alamat yang tertera dalam SPPT. SPPT pertama, kedua, ketiga sampai keduabelas, dapat kami sampaikan dengan lancar karena alamatnya jelas dan kebetulan ada orang yang menerimanya. Penerima membubuhkan tandatangan, tanggal dan namanya, sebagai tanda bahwa ia sudah menerima SPPT.

Sampai pada SPPT berikutnya, kami tidak menemukan alamat yang jelas. Di SPPT hanya terlihat nama jalan dan nomor rumah 113, namun di lapangan setelah nomor ganjil 111 yang seharusnya 113 tidak ada. Kami mulai menebak-nebak. “Mungkin rumah berikutnya”, kata temanku sambil terus menyusuri jalan. Di depan kami ada sebuah rumah kuno seperti bangunan rumah peninggalan jaman Belanda. Di Bandung, rumah-rumah seperti ini banyak terlihat, biasanya dihuni oleh keturunan bangsawan atau pejabat-pejabat militer tempo dulu. Rumah itu kelihatan tidak terawat, pagarnya

sudah kusam dengan tembok bercat tidak lagi putih dan hitam pudar yang dihiasi bebatuan. Di halamannya tumbuh pohon-pohon besar yang begitu kokoh, di sekitar pagarnya terdapat pohon bunga kertas dan di pintu masuknya terdapat sebuah patung anak kecil berwarna putih yang sedang menenteng kendi air.

Kami coba ketuk pintu pagar, tidak ada jawaban. Berkali-kali kami ketuk tetap tidak ada jawaban. “Mungkin penghuninya tidak mendengar”, batinku. Kami lihat pintu pagar tidak terkunci dan agak terbuka. Semula kami ragu untuk masuk, namun karena teringat tugas, kami nekat juga meskipun hati tidak enak masuk halaman tanpa permisi, dan ada rasa dingin aneh yang menjalar dari ujung jariku bergerak ke arah tengkukku. Perlahan-lahan pintu pagar yang tidak terkunci itu kubuka. Terdengar bunyi deritan pagar keras sekali, yang mengejutkan kami berdua! Kami susuri halaman yang ditumbuhi rumput tidak beraturan. Wangi bunga cempaka yang menyengat, menghampiri hidung kami. Sampailah di depan pintu rumah yang besar ‘yang mirip pintu di rumah sakit’.

Dengan suara tercekat, aku berucap, “Permisiiii...” Tak terdengar ada suara yang menjawab. Berkali-kali kuulang ucapan salam, yang menjawab hanya kesunyian. Kami saling berpandangan, dan dengan ragu pintu ‘yang mirip pintu rumah sakit’ itu bergantian kami ketuk. Namun tetap tak ada jawaban. Akhirnya kami memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Rasanya makin tidak enak dan makin membuat kami ingin segera pergi. Namun ketika kami membalikkan badan, tiba-tiba pintu besar itu terbuka dengan lebar dan terdengar suara deritan cukup keras. Kami mengarahkan pandangan ke arah pintu ‘yang mirip pintu rumah sakit’ itu, tak nampak siapa pun, hanya ruangan yang gelap gulita.

“Hantuuuuu...!!!”, spontan kami meloncat, berteriak dan berlari menuju pagar, sementara SPPT yang kami bawa terlempar entah kemana. Saat kami tengah terengah-engah sambil mencari-cari SPPT yang terlempar, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara.

“Ada apa ya...?”, perlahan terdengar suara lemah perempuan tua, hampir tak terdengar. Kami saling berpandangan mata, lalu melangkah ragu-ragu menghampiri pintu tersebut. Dengan perasaan was-was kami mendekat dan mencari arah suara tadi. Temanku di depan, aku mengekor di belakang. Tiba-tiba temanku terperanjat, “Haaah...????!!!!”, di depan dia berdiri seorang nenek yang tingginya hanya sekitar setengah meter. Setelah kuperhatikan ternyata nenek itu tubuhnya sudah bungkuk hampir

menyentuh lantai. Pantas saja tadi ketika kami berdiri tidak melihat keberadaannya. Fyyuuuuuhh...

Kami segera mohon maaf dan menjelaskan bahwa maksud kedatangan kami hanya untuk menyerahkan SPPT PBB. Nenek tadi mempersilakan kami masuk dan meminta kami untuk menunggu. Kami coba jelaskan bahwa kami tidak bisa berlama-lama karena masih banyak tugas lain dan tidak ingin merepotkan beliau. Ternyata ia menyiapkan minuman serta kue dan dengan sigap menghidangkannya kepada kami.

Sambil menunggu mengisi tanda terima SPPT yang kuberikan dan memang karena haus, kami meminum air yang disediakan. Kami mengutarakan kembali bahwa kami tidak bisa berlama-lama karena masih banyak SPPT yang harus kami antar, namun nenek itu menahan kami sebentar untuk mendengarkan ceritanya. Dalam pikiranku, “nggak papalah, apa salahnya sekalian istirahat dulu sebentar”. Nenek itu menceritakan bahwa ia dan suaminya adalah mantan pejuang kemerdekaan. Sekarang ia hanya tinggal sendiri di rumah dinas militer yang sekarang sudah dibelinya. Suaminya baru saja meninggal dunia sebulan yang lalu, anak perempuan satu-satunya ikut suaminya tinggal di Surabaya.

Mendengar cerita itu, kami tercenung. Seorang renta harus hidup sendiri di rumah sebesar ini. Kami terus mendengarkan dengan tekun apa yang diceritakan nenek itu. Tak lupa kami juga menyampaikan bahwa untuk veteran pejuang dapat mengajukan pengurangan PBB dengan prosedur yang mudah dan tanpa biaya sedikitpun.

“Kewajiban itu harus dilaksanakan tanpa alasan,” tukasnya membuatku terhenyak, jawaban yang benar-benar di luar dugaanku. “Jangan jadi orang yang lemah, jadilah orang yang kuat dan mandiri” tambahannya dengan tegas. Selama ini ia tidak pernah mengajukan pengurangan PBB ke kantor pajak meskipun ia sebagai veteran pejuang, ia selalu menyisihkan setiap bulan dari uang pensiunan veterannya sehingga pada saat ada tagihan PBB ia selalu dapat melunasinya. Nenek yang renta raganya tapi semangatnya menyala-nyala, mengalahkan yang muda.

Srrr...hatiku berdesir kencang. Aku seperti tersadar atas apa yang ada di benakku selama ini bahwa pada dasarnya orang akan menghindari dan kalau bisa mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Hatiku begitu *trenyuh* melihat apa yang dilakukan nenek itu. Ternyata masih ada orang yang dengan sepenuh hati mau menjalankan kewajiban membayar pajak, sekalipun dengan keterbatasan kondisinya. Meski negara memberikan hak

kepadanya untuk mengajukan pengurangan PBB karena ia seorang veteran, namun ia tidak mengambil kesempatan itu. Di sisi lain banyak orang yang secara finansial punya kemampuan namun dengan berbagai alasan yang terkadang dibuat-buat, ia memohon pengurangan atas PBB-nya, sungguh ironis.....

Dialog dengan nenek tadi begitu membekas dan menumbuhkan motivasi. Dengan semangat baru layaknya baterai yang baru di-charge, kami melanjutkan perjuangan untuk mengantarkan SPPT yang masih tersisa, perjuangan yang tentunya tak akan sebanding dengan perjuangan para perintis kemerdekaan dulu.

Saatnya kami memandang tantangan dengan senyum dan semangat. Semangat yang menghapus kenangan buruk kami saat mengantar SPPT. Kenangan dikejar anjing pemilik rumah, sampai kembali di kantor malam hari, kehujanan di tengah jalan yang berakibat begadang karena menyetrika SPPT yang basah, tenggorokan serak, terhamburnya SPPT di perempatan jalan karena tertiuip angin saking banyaknya SPPT yang dibawa, tidak dibukakan pintu hingga alamat yang tidak jelas dalam SPPT, tak lagi membebani kami. Semua itu akan kami jadikan kenangan indah sebagai bagian dari perjuangan.

Ketika melihat hasil penerimaan PBB di wilayahku yang naiknya hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya dan banyaknya ucapan terima kasih yang diterima pada waktu penyampaian SPPT, semua derita dan kesusahan itu sirna. Aku puas, bangga dan terharu bisa menjadi bagian dari perjuangan besar memandirikan bangsa ini.

Salam buat para kurir SPPT seluruh Indonesia. Lanjutkan perjuanganmu..., pasti suatu saat nanti kita tidak hanya jadi kurir SPPT saja. Pada saatnya nanti kita yang menandatangani lembar SPPT tersebut. Hari ini ngepos, kelak jadi bos. Amin....

ANGPAW LEBARAN

Windy Ariestanti Hera Supraba

“Lebaran sebentar lagi...berpuasa sekeluarga...”, suara khas lin Bimbo mengalun lembut dari *speaker* aktif milik seorang rekan di Seksi Ekstensifikasi, mengiringi aktivitas hari-hari kerja yang *slow motioned* di bulan Ramadhan.

Aku tercenung di mejaku yang *krodit*. Lebaran hampir tiba, tapi tak nampak tanda-tanda turunnya Imbalan Prestasi Kerja (IPK) dari langit. Aku teringat para bapak Satpam yang dengan setia menjaga kendaraan kami, menyapa para tamu dan merangkap sebagai tukang parkir. Teringat aku kepada para bapak petugas *cleaning service* yang tanpa lelah hilir mudik untuk mengerjakan ini-itu. Dan Pak Mus, yang mendedikasikan hidupnya pada bidang otomotif, sebagai spesialis tukang parkir dan cuci mobil. Seandainya ada IPK, tentulah mereka semua akan “*kecipratan*” sekian persen dari para pegawai. Atau paling tidak dari sebagian pegawai yang ingin berbagi rezeki.

Lamunan terputus oleh panggilan utukku dari *Information Center* karena ada Wajib Pajak (WP) ingin bertemu. Ternyata WP yang sedang mengurus proses restitusi. WP ini sudah tiga kali *bolak-balik* menemuiku. Kunjungan pertama untuk menyampaikan bahwa ia baru saja memasukkan berkas permohonan pengembalian pajak (restitusi). Kunjungan kedua, untuk memasukkan kelengkapan persyaratan yang kuminta di kunjungan sebelumnya. Lalu di kunjungan ketiga, kembali menanyakan kalau-kalau ada persyaratan yang masih kurang.

Ini kunjungannya yang keempat. Ajaibnya, kunjungan pertama hingga keempat ini terjadi dalam jangka waktu satu setengah minggu alias 8 hari kerja. Dalam hati aku membatin, “*Walah Pak...Pak...mbok sabar sedikit tho*. Kesannya kok saya males banget, padahal tiap dua hari Bapak *dateng* nyariin saya. Jangan-jangan kangen ya sama saya...(hehehe...ke-GR-an)”. Tapi memang ke-*paranoid*-an WP tadi bisa dimaklumi, karena nilai restitusinya mencapai beberapa ratus juta.

Begitulah, ternyata kunjungan si Bapak yang keempat ini bermaksud menyampaikan kabar gembira bahwa uang restitusi telah dicairkan dan di-

transfer ke rekening perusahaan, dan ia mengucapkan beribu-ribu ~bahkan berjuta-juta~ terima kasih karena telah merasa terbantu dan dipermudah.

Rupanya berjuta ucapan terima kasih itu baginya belumlah memadai, karena kemudian ~dengan gerakan cukup lihai~ ia mengeluarkan amplop coklat tebal yang merupakan jurus pamungkas ucapan terima kasihnya. Aku terpana dalam keadaan *shock*. Gerakan refleksku adalah menengok ke kiri dan ke kanan dengan cemas, siapa tahu ada yang menyaksikan kejadian ini dan berteriak; “*Naaa...kamu ke-gap*”. Ternyata tak ada yang memperhatikan. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing.

Si Bapak melemparkan senyuman maklum dengan tatapan arif yang seolah berkata, “*gak ada yang liat kok Bu, ambil aja*”. Dimanifestasikannya dengan ucapan, “Ini sekedarnya saja, Bu. Buat Ibu berlebaran dengan keluarga. Sebagai tanda terima kasih kami karena berkat bantuan Ibu, 200 orang karyawan kami bisa menerima THR tepat waktu dan kami terhindar dari masalah”.

Aku menelan ludah. Sebetulnya aku telah berketetapan hati untuk menjunjung kode etik dan tidak menerima pemberian WP. Tapi tak urung otak manusiawiku mengkalkulasi, kira-kira berapa ya isi amplop itu. Kalo dihitung satu persen saja dari nilai restitusinya, wah, tahun ini bisa lebaran beneran *nih*.

Lalu kudengar diriku sendiri berkata, “Pak, saya sangat menghargai niat dan maksud baik Bapak. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak dapat menerima pemberian dari Bapak”.

Kini gantian si Bapak yang melongo dengan *shock*. Ia tetap berusaha memaksaku menerima amplop itu, namun aku terus menolaknya dengan cara sesantun mungkin. Kami berusaha saling meyakinkan selama lebih kurang setengah jam, setelah itu upayanya makin melemah.

Setelah menemukan tempat berpijak yang lebih pasti ~gestur si Bapak menunjukkan sepertinya ia tidak tersinggung dan mungkin bisa memahamiku~ aku melanjutkan. “Sudah menjadi tugas saya untuk memberi kemudahan kepada Wajib Pajak, baik Bapak, atau siapapun. Gaji saya kan dibayar dari uang pajak yang Bapak bayar. Lagi pula, saat Bapak bilang bahwa saya ikut andil dalam melancarkan pembagian uang THR karyawan Bapak, sudah merupakan hadiah yang tak ternilai bagi saya”.

Si Bapak lantas menatapku lurus-lurus sambil tersenyum. Meski aku tak tahu apa makna senyumnya, namun aku balas tersenyum. Setelah itu, ia menyerah. Kami berbasa-basi sejenak sebelum ia mohon diri. Setelah ia

pergi, masih berkelebat di benakku bahwa kalau tadi aku menerima amplop itu, aku kan bisa membagi-bagikan “rizki” itu kepada Pak Satpam, Pak *Cleaning Service*, dan Pak Mus. Tapi buru-buru kuhalau pikiran jahat itu. Mempertahankan integritas diri memang tidak mudah. Justru di situlah letak pembeda yang membuktikan kualitas diri kita, yaitu ujian-ujian berat semacam ini. Dalam hati aku bersyukur telah diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mempertahankan *self integrity*-ku. Meski aku tak jadi bertambah harta, namun telah bertambah pengetahuan dan keyakinanku tentang integritas diri.

Kupikir, aku berhak sedikit merasa bangga dengan diriku sendiri karena telah mengambil pilihan yang benar. Paling tidak, rasa bangga itu menjadi penghiburan terbesar bagiku atas “kekecewaan” kecil karena tidak jadi dapat *angpaw* lebaran.

ENAM PULUH RUPIAH

Joko Susanto

Hari itu saya kedatangan tamu istimewa, seorang ibu berkerudung yang menggendong bayi mungil didampingi suami yang membawakan tas perbekalan anaknya. Di ruang konsultasi saya menjumpai mereka. Usut punya usut ternyata mereka baru saja selesai mengikuti sosialisasi pajak bagi Wajib Pajak baru di ruang aula.

Pagi itu memang ada acara penyuluhan perpajakan bagi Wajib Pajak baru. Pesertanya cukup *membludak*. Ruang aula yang tidak terlalu luas itu *overload* menampung peserta yang menembus angka seratus orang. Selain menjadi pengisi materi, beberapa *Account Representative (AR)* juga turut hadir sebagai peserta mendampingi para undangan sosialisasi. Saya sendiri tidak mengikuti acara tersebut secara penuh, karena ada surat permohonan yang sudah mendekati *deadline*. Pemateri yang memang eks karyawan Kantor Penyuluhan, Firman Hergunadi dan Hikmah, cukup lihai memaparkan tampilan *power point*-nya dengan sesekali diselingi canda tawa khasnya.

Ketika sesi tanya jawab dimulai, suasana agak berbeda. Gelombang keingintahuan tampak dari antusiasme para peserta. Tidak sedikit yang bertanya bahkan hingga lebih dari satu kali. Ada yang baru tahu kalau dia mendapat jatah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ada yang *complain* dengan jumlah tanggungan yang hanya maksimal tiga orang. Ada yang protes karena harus repot-repot lapor tiap bulan meskipun setoran pajaknya nihil. “*Ribet amat sih, rumah saya kan jauh*”. Kali ini tanya jawab memang berlangsung lebih seru. Kombinasi antara sanggahan dan rasa ingin tahu.

Sifat manusia memang berbeda. Ada yang semangat bertanya dan ada yang diam saja. Memang, bisa jadi yang diam tak bertanya berbaik hati memberi kesempatan kepada saudaranya. *Toh* masih banyak kesempatan lain untuk bertanya. Sebelum acara ditutup, penyaji menampilkan foto-foto lengkap AR dengan wilayah kerjanya. Bagaikan lebah yang sarangnya diganggu, banyak peserta yang mencari AR-nya masing masing. Dari sinilah kisah ini bermula.

Tamu khusus yang mencari saya itu menanyakan berbagai hal sederhana. Maklum WP baru, *alhamdulillah* semua pertanyaan bisa teratasi

tanpa harus tanya sana-sini seperti biasanya. He he... masa, semua harus dikuasai. Hebat bener makhluk bernama AR.

WP saya ini adalah pegawai swasta. Mengaku baru pertama kali ke KPP. Dia menanyakan cara mengisi SPT Tahunan. Saya lihat dia sudah membawa formulir SPT 1770S, fotokopi Kartu Keluarga dan selemba bukti potong lampiran 1721 A-1. Saya menawarkan agar form 1721 A-1 difotokopi dahulu biar punya kenang-kenangan atau arsip di rumah untuk cara pengisian tahun depan. Dia setuju dan minta ijin akan memfotokopinya dahulu di seberang kantor yang harus melewati jalan raya yang lalu-lintasnya padat.

Siapa yang tidak iba. Akhirnya saya menawarkan untuk memfotokopikan formulir tersebut di ruang sekretariat. Nggak sampai lima menit, saya sudah kembali ke ruang konsultasi. Selemba fotokopian yang agak buram itu saya serahkan kepadanya. Perkiraan saya, harga fotokopian sekelas itu di tukang fotokopi Rp.60,- per lembar. Namun siapa sangka uang sekecil itu, bahkan mungkin sering kita sepelekan itu sangat mempunyai arti bagi manusia lain.

Tiga hari kemudian, tepatnya di Minggu pagi ketika saya bermain dengan anak ketiga, Nafis (2 tahun) yang sedang lucu-lucunya, *handphone* saya berbunyi. Di layar tertera nama Kepala Seksi kami, Ibu Dra. Esti Wahjudewati memanggil. Beliau mengabari kalau nama saya ada di surat pembaca. Deg... *astaghfirullah*. Kira-kira terkait kasus apa, batinku. Maklum, selama ini surat pembaca identik dengan keluhan atas pelayanan publik, ketidakcocokan, kekecewaan dan sejenisnya. Untuk kali ini beda, katanya. Sebuah ucapan terima kasih dari Wajib Pajak. Atas semua itu, saya tidak menyangka dan tak juga bangga. Kenapa? Saya merasa Wajib Pajak yang telah saya 'kecewakan' jumlahnya lebih banyak. Mulai pertanyaan kasus yang tidak cepat saya atasi, sosialisasi aturan baru yang masih keteteran, jawaban yang belum tuntas dan sebagainya.



JAWA POS MINGGU, 8 Maret 2009

Kisah nan sederhana ini meninggalkan pesan bagi saya agar jangan pernah menyepelekan hal-hal yang tampak kecil. Saya teringat sebuah kisah lain. Sir Francis Drake, penjelajah asal Inggris di abad ke-16, telah berlayar keliling dunia. Namun, saat menyeberangi Sungai Thames, badai besar mengancam akan membalikkan kapalnya. Dia lalu berseru, "Akankah saya yang telah berhasil menghadapi badai di lautan akan tenggelam begitu saja di sebuah selokan?" Alangkah bijaksana bila kita bertanya, "Akankah modernisasi, yang telah sampai sejauh ini dengan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, akan dikalahkan oleh 'pasir dalam sepatu kita'?" Pasir yang kadangkala kita buat sendiri.

SEHATI DAN SEPIKIR

Jeffry Martino

Modernisasi yang didengung-dengungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang mulai mendapat apresiasi dari berbagai pihak eksternal. Namun di sisi lain ternyata masih belum dapat menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat. Itulah yang pernah saya alami setelah dicanangkannya modernisasi di kantor wilayah (Kanwil) tempat saya bekerja dulu (sekarang saya sudah di mutasikan ke Kanwil lain).

Bukan hal yang mengherankan jika Wajib Pajak PBB adalah Wajib Pajak yang paling sulit dihadapi oleh para fiskus. Hal ini karena Wajib Pajak PBB terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari level bawah sampai level atas dengan tingkat pendidikan yang beragam. Pada saat itu saya ditempatkan di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yang pastinya berhubungan dengan Wajib Pajak PBB.

Peristiwanya terjadi pada pertengahan Januari 2009, pada saat proses cetak masal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dilakukan. Bagi Wajib Pajak yang ingin mengetahui besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat diberikan Surat Keterangan NJOP (SK NJOP) sebagai pengganti sementara SPPT PBB yang sedang dalam proses pencetakan. Suatu hari seorang Wajib Pajak datang sambil membawa SK NJOP yang telah diperolehnya. Kebetulan sekali Kepala Seksi Ekstensifikasi dan pegawai yang lain sedang bertugas di lapangan, sehingga tinggallah saya seorang diri yang harus menghadapi beliau. Dan kemudian terjadilah pembicaraan saya dengan Wajib Pajak PBB tersebut dengan logat dan gaya bahasa setempat.

“Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu?”, sapaku dengan senyum mengembang.

“Begini Dik, saya kemarin udah dapat surat ini (SK NJOP-red). Tapi nilai pajaknya kebesaran ‘kali. Saya minta dikecilkan, Adik bantulah aku,” balas sang ibu. Aku tertegun sesaat, sebelum menjawab. Dalam pandangan si Ibu, mungkin SK NJOP itu dapat diatur sesuai kemauan Wajib Pajak.

“HmMMM, begini ya Ibu, SK NJOP ini merupakan produk hukum, dan besarnya NJOP yang tertera pada SK ini juga ditetapkan berdasarkan

prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak dapat diubah-ubah sendiri sesuai keinginan kita.”

“Halah Adik ini (lagi-lagi memanggil saya adik, mungkin saya terlihat masih sangat muda), gak usah mempersulit gitulah. Di instansi-instansi lain aja gampang kok kalo mau ‘ngurus-‘ngurus kayak gini (sambil tersenyum lebar menatap saya). Dulu aja gampang kok, apa bedanya ama sekarang?” Lagi-lagi saya tertegun, tingkat ke”pede”-an si Ibu benar-benar tinggi sekali. Kalo ukuran sepatu, si Ibu ini ukuran 43 kali ya ?

“Ibu, dulu memang bisa seperti itu dan itu dilakukan oleh oknum pegawai. Tapi sekarang Kantor Pajak sudah modern. Tujuannya agar tata kelola pemerintahan kita lebih baik. Setiap pegawai harus menandatangani kode etik yang isinya antara lain adalah mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Pegawai. Jika kami melanggar, maka kami akan dikenakan sanksi yang tegas” jelasku dengan sabar.

“Halah Dik, apa sih yang gak bisa dilakukan kalo pake duit. Semua orang juga tau, apalagi di daerah sini,” sergahnya. Untuk yang kesekian kalinya saya tertegun dengan perkataan si Ibu yang sangat bangga dan yakin kalau uangnya bisa menyelesaikan masalahnya.

“Maaf ya Ibu, untuk hal ini saya tidak bisa membantu” hanya itu yang bisa aku jawab. Dengan tampang mulai bersungut-sungut, ibu tadi mengambil *handphone* dan ternyata menghubungi koleganya. Percakapan mereka menggunakan bahasa daerah, kira-kira begini pembicaraan mereka:

“Aduh gimana nih..... Boss-nya lagi gak ada. Kata anak buahnya gak bisa diubah, melanggar aturan katanya.” Diam sejenak, kemudian bercakap lagi “Makanya aku mau ketemu boss-nya aja, kalo anak buahnya ini kan gak tau apa-apa dan gak bisa mengubahnya.” (What???? terus terang aku mulai jadi agak emosi mendengar kalimat terakhirnya ☹)

“Dik, aku mau ketemu boss mu aja deh. Kapan baliknya?” tanya Ibu tersebut sesaat kemudian, setelah menutup *handphone*-nya. Aku masih berusaha tenang walaupun sedikit naik darah mendengar pembicaraannya di telepon.

“Oh, bapak paling sebentar lagi *nyampe* kantor, Bu. Kalau Ibu mau menunggu, silahkan saja”, jawabku dengan aksen datar, tetapi masih bisa sambil tersenyum.... (sedikiit sekali).

Kemudian si Ibu pun duduk sambil menunggu kepala seksiku. Rasa cemas menghantuiku. Bagaimana jika ternyata kepala seksiku mengabaikan permintaannya? Aku tak sanggup melihat senyum kemenangannya dan

berhasilnya beliau mendikte DJP (kantorku khususnya) dengan uangnya. Rasanya sungguh menegangkan menunggu kedatangan atasanku, aku bisa merasakan jantungku yang berdetak kencang (ini beneran, bukan *lebay*).

Akhirnya (saat yang ditunggu) datang juga (halah, kayak salah satu acara di televisi aja). Wajib Pajak tersebut pun langsung menghadap kepala seksiku dan mengutarakan keinginannya. Dan....., rasanya lega dan senang sekali melihat Ibu tersebut keluar ruangan kepala seksi-ku dengan tampang masam karena keinginannya tidak dapat terwujud, dan uangnya tidak mampu mendikte DJP. Terima kasih kepada kepala seksi-ku, ternyata kita sama-sama sepikir dalam menjalankan modernisasi DJP di kantor. Sebagai pegawai bawahan, senang sekali rasanya jika atasan mendukung bawahannya dalam menjalankan modernisasi. Semoga kita semua sehati dan sepikir dalam menjalankan modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak yang kita cintai ini demi terwujudnya kemandirian bangsa, Amin.

HUTANG PULSA BAYAR PULSA

Hanik Susilawati Muamarah

Pagi itu kurasakan begitu sibuk. Ada saja Wajib Pajak (WP) yang datang untuk berkonsultasi kepadaku yang kebetulan menjadi salah satu *account representative* (AR) di sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Timur. Menjadi AR memang tidaklah mudah, kadang-kadang pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan oleh AR, akhirnya AR juga yang mengerjakannya. Tapi biarlah, meskipun terkadang terasa berat, namun pelayanan kepada WP tetap harus diutamakan.

Hari itu ada yang berkonsultasi via telepon tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal yang memerlukan kesabaran karena menjelaskan melalui telepon bukanlah hal yang mudah. Benar saja, penjelasan panjang lebar yang aku berikan akhirnya tetap tidak dimengerti oleh WP. Beberapa saat kemudian dia kembali meneleponku, kali ini langsung ke nomor HP-ku. Aku memberikan nomor HP-ku ke WP agar mudah dihubungi oleh WP yang akan berkonsultasi. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari pelayanan kepada WP. Kali ini WP akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke kantor. Dalam hati aku berpikir, "Kenapa tidak dari tadi saja datang ke kantor, kan bisa sama-sama menghemat waktu?". Tentu saja pikiranku tidak kulisankan karena akan menyinggung WP dan merusak profesionalan dalam pelayanan.

Benar juga, akhirnya WP tersebut datang dan meminta penjelasan yang sama. Setelah kujelaskan lagi, kali ini aku coba dengan lebih detil, akhirnya WP bisa memahaminya. Lega rasanya bisa menyelesaikan tugasku. Segera aku kembali ke mejaku dan mulai melanjutkan pekerjaan rutinku, membuat himbauan pembetulan SPT.

Di tengah asyiknya (*baca: pusingnya*) membuat analisis, aku dikagetkan oleh suara sms masuk ke HPku. Kusempatkan melihatnya, ternyata ada pemberitahuan bahwa ada pulsa yang masuk ke nomorku sebesar Rp 50.000,-. "Dari mana ya?" pikirku dalam hati. Segera pikiranku tertuju pada suamiku, orang terdekatku yang mungkin saja mengirimkanku pulsa. Akan tetapi aku sendiri meragukannya karena pola hubunganku dengan suamiku dalam masalah pulsa adalah selalu aku yang membelikan

pulsa suamiku, bukan sebaliknya. "Ah, mungkin suamiku lagi pengen romantis, jadinya membuat kejutan dengan membelikanku pulsa", kali ini aku mencoba berpikir positif pada suamiku. "Tapi masa iya sih, suamiku mencoba ber-romantis dengan modal hanya Rp50.000?" Aku kembali ragu.

Daripada aku penasaran, maka kuhubungi suamiku, ternyata jawabannya seperti yang aku duga. "Wah, kalau ayah yang belikan pulsa ke Bunda, itu tanda-tanda kiamat", canda suamiku sambil ketawa.

Aku jadi bingung sendiri mencari sumber pengirim pulsa. Akan tetapi tidak lama kemudian ada sms masuk, "Bu, maaf, saya hanya bisa kirim pulsa. Terima kasih banyak atas semuanya". Ternyata sms tadi berasal dari WP yang tadi konsultasi ke aku.

"Theng... theng.... waduh, WP ini kok ada-ada saja", pikirku.

"Jangan deh, jangan perbanyak lagi hutangku. Sudah cukup banyak hutangku ke negara ini karena aku terkadang tidak bisa 100% bekerja secara penuh dari jam 7.30 sampai 17.00. Aku sedang berusaha membayar hutang-hutangku ke negara ini melalui pekerjaanku. Jangan ditambahi dengan hutang pulsa segala. Ini bukan masalah besar atau kecilnya jumlah pulsa tersebut. Ini juga bukan masalah jumlah tersebut kurang dari ketentuan gratifikasi KPK. Ini bukan masalah WP telah merasa ikhlas dan tidak ada maksud apa pun. Akan tetapi, ini adalah masalah integritas yang harus kupertanggungjawabkan nanti. Aturan KPK boleh saja membolehkannya, WP boleh saja memang benar-benar ikhlas, dan bisa saja tidak ada yang tahu tentang hal itu tetapi ajaran agama jelas melarang menerima pemberian yang berkaitan dengan pekerjaan. Kebetulan saja hal tersebut tertuang dalam Kode Etik Pegawai DJP. Jikalau tidak sekalipun, tetap saja hal tersebut tidak pantas dilakukan. Jadi, tolong, jangan lakukan itu lagi", aku berbicara sendiri dalam hati.

Segera aku menghubungi teman kerjaku yang berjualan pulsa dan memintanya mengirimkan pulsa ke WP tersebut sejumlah Rp 50.000,-. Setelah itu, aku mencoba merangkai kalimat yang tepat dan tidak menyinggung untuk menjelaskan kepada WP kenapa pulsanya aku kembalikan. Meskipun WP merasa terkejut karena aku kembalikan pulsanya, dia akhirnya paham juga dan menerimanya, plus bonus berterima kasih lagi ... dan mendoakanku, "Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ibu ya..."

Kali ini aku benar-benar lega karena tidak ada benturan antara prinsip integritas dengan fungsi pelayanan. Bisa membantu WP tanpa harus melanggar rambu-rambu dan sekaligus mendapat ucapan terima kasih plus

doa. Aku juga lega karena hutangku tidak jadi nambah dengan pulsa dari WP yang menyulitkanku dalam membayarnya.

OMPUNG

Eli Nafsiah

Uhh... perutku udah terasa keroncongan, liat jam ternyata udah jam 12.00 WIB. Aku bersiap-siap untuk istirahat dan makan siang. Tiba-tiba ada seorang ibu tua yang kelihatan kebingungan, masuk ke dalam ruangan di belakang Seksi Pelayanan. Aku sendiri adalah salah satu pelaksana di Seksi Pelayanan di KPP Pratama Medan Kota. Aku mendekati ibu tua itu (di Medan, ibu tua tadi dipanggil *Ompung* = nenek).

“Ada apa Pung, Ompung ada perlu apa?”, sapaku.

“Anggi, tolonglah aku, aku mau minta pengurangan PBB”, jawab ibu tua itu.

“Ompung bawa syarat-syaratnya?” sambil kujelaskan apa yang menjadi syarat-syarat pengajuan pengurangan PBB tersebut. Ompung mengeluarkan dari plastik kreseknya Kartu Keluarga, SK Pensiun Janda dan lain sebagainya.

“Tolonglah aku Anggi, buatlah permohonan ini, aku gak ngerti”, lagi-lagi Ompung memohon. “Aku sudah capek kali mencari kantor pajak ini”, lanjut Ompung.

“Kenapa Ompung gak suruh anaknya yang ngurusin, Ompung kan udah tua“, tanyaku sedikit keheranan.

“Anakku dua, sudah besar-besar tapi mereka terbelakang mental”, jawab Ompung dengan wajah tuanya, “Jadi akulah yang harus mengurus semuanya”.

Selesai mengisi formulir permohonan beliau, aku meminta Ompung untuk menandatangani permohonan tersebut dan kumasukkan ke Tempat Pelayanan Terpadu. Aku serahkan bukti penerimaan surat (BPS) nya kepada Ompung seraya kuberitahu kepada beliau bahwa suratnya akan di proses. Ompung masih nampak kebingungan.

“Ada apa lagi ‘Pung?’” tanyaku.

“Antarkanlah aku naik angkot, aku gak tau dari kantor ini ke rumahku naik angkot nomor berapa?” memelas wajah Ompung.

“Rumah Ompung dimana? Yuk saya antarkan cari angkot”.

Ternyata rumah Ompung di Jalan Sisingamangaraja. Sebenarnya aku sendiri tidak tau juga angkot nomor berapa yang ke jalan tersebut. Setelah bertanya-tanya kepada WP yang lagi antri di TPT, aku akhirnya tau nomor angkotnya nomor 24. Ompung itu pun aku gandeng, dan kuantar menuju tempat angkot di samping kantor.

Dalam perjalanan menuju tempat angkot Ompung itu berkata, “Anggi, aku ada uang lima ribu untuk kamu ya, untuk beli teh manismu, kan kau udah bantu aku”, kata Ompung.

”Aduh Ompung enggak usah, emang udah tugas kami”, sanggahku.

”Biarlah Anggi, kau kan udah bantu aku”, kata Ompung lagi.

Sambil menepuk-nepuk tangan Ompung, aku berkata “Ompung, doa Ompung saja ya biar kita sehat, kita sama-sama berdoa agar Ompung bisa sabar menjaga anak-anak Ompung dan semua ini menjadi amal ibadah bagi kita. Doakan juga saya bisa bekerja dan menjaga anak-anak dengan baik”.



“Iyalah kalo begitu, terima kasih ya Anggi” kata Ompung lagi. Kami pun sampai ke Jalan Kartini di samping kantor

Setelah Ompung naik ke angkot, aku pun kembali ke ruangan dengan perasaan haru juga rasa syukur yang teramat sangat. Karena hari ini aku sudah bisa menyenangkan sepotong hati tua. Paling tidak dalam hati Ompung akan ada kenangan yang menyenangkan ketika berurusan ke kantor pajak. Aku jadi teringat kepada salah satu pimpinanku, yang bisa menjadi guru dan

tauladan bagiku. Dia pernah mengajarkan kepadaku untuk bekerja dengan ikhlas dan mengawali kerja dengan niat ibadah. Hal itulah yang paling pas dan ingin selalu kupraktikkan dalam era modernisasi ini.

Semoga DJP maju terus.

NO AMPLOP

Desi Sulistiyawati

Agustus 2007. Kusambut hari itu dengan penuh semangat. “Modern”, sebuah kata yang sudah setahun ini selalu didengung-dengungkan oleh seluruh jajaran pegawai akhirnya tiba juga. Bagi saya modern ibarat *taubatan nashuha*. *Alhamdulillah*, kusambut modern dengan segala syukur.

Saat penyampaian SPT Tahunan pun datang. Banyak Wajib Pajak (WP) datang ke kantor dengan kondisi SPT masih rapi di dalam amplop coklat, jangankan diisi bahkan amplopnnya pun belum dibuka.

“Silakan dibuka SPT-nya, Pak,” kataku saat WP itu datang ingin mengisi SPT

“Sudah sama Ibu saja, biasanya juga begitu,” jawab WP.

“Maaf Pak, kami tidak boleh mengisikan, nanti saya ajari cara memasukkan angka-angkanya, silakan ini pulpennya ”, aku tersenyum, sambil menyerahkan sebuah pulpen.

“Sama Ibu saja ah, saya terima bersih saja,” katanya memaksa. Kali ini sambil menyelipkan amplop putih di bawah SPT.

“Duh... ga ada niat buat ngisi SPT sendiri nih WP”, kata hatiku. Sikap WP sudah mulai terlihat meremehkan. Dikiranya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang.

“Daripada buat bayar saya, lebih baik uangnya buat bayar pajak saja Pak ,” kataku pelan tapi tegas sambil mengembalikan amplop itu padanya. Kulihat WP itu kaget sebentar sambil terus menatapku. Sepertinya meyakinkan diri sendiri kalau amplopnnya kutolak. Mungkin juga ini pengalaman pertama baginya, amplopnnya ditolak oleh fiskus.

“Ah, saya ngga bisa cara ngisinya, Bu. Ribet. Sudah sama Ibu saja,” WP itu ternyata masih *ngeyel* dan masih berusaha menyelipkan kembali amplop itu.

“Kalo tidak dimulai sekarang, sampai nanti Bapak ga bisa-bisa ngisi SPT-nya. Gampang koq, Pak. Coba ambil dulu pulpennya, trus tulis NPWP di kolom ini, nama Bapak di kolom ini... bla... bla...” Akhirnya selesai juga acara mengisi SPT kali ini, walau harus memakan waktu hampir satu jam.

Hmm... aku tersenyum lega. Ujian pertama hari ini *alhamdulillah* lulus. Aku lihat teman-teman pun melakukan hal yang sama, bahkan ada yang

sampai meninggalkan WP karena WP-nya maksa ngasih amplop. Ada yang WP-nya *ngeyel* menyelipkan uang Rp20.000,- di selipan sandaran sofa yang aku duduki sambil ngeloyor pergi setelah pemberiannya kutolak. Hingga aku harus mengejar-ngejar WP buat mengembalikan uangnya.

Ada juga kejadian saat ada WP yang dengan *pede*-nya menyelipkan amplop di bawah taplak meja setelah konsultasi hampir dua jam. Aku memintanya agar mengambil kembali amploponya. Kelihatan sekali perubahan sikapnya, yang tadinya sok arogan jadi terlihat salah tingkah. Semula WP ini juga mau terima beres aja, tapi aku pura-pura tidak mendengar dan terus memberikan penjelasan mengenai tata cara pengisian SPT.

Di lain waktu ada WP karyawan dengan status Direktur cabang sebuah perusahaan multinasional. Wow... gajinya spektakuler (untuk ukuran kota kecil, gajinya membuat mata melotot, bingung menghitung nol di belakang angka) datang ingin diisikan SPT Tahunannya.

“Bapak harus ngisi sendiri nanti saya kasih tahu cara mengisinya,” kataku.

“Ngga mau ah, sama ibu saja.”

“Bisa dipecat dong Pak, kalo saya ngisiin SPT bapak,” candaku.

“Ya gak pa pa, Bu. Kalo dipecat nanti Ibu kerja di tempat saya aja” Hiii.. kalau sudah begini, ga berani becanda-becanda lagi deh.

Kalau jaman dulu, fiskus begitu bangga menceritakan keberhasilannya “bernegosiasi” dengan WP saat menemukan peluang. Bangga menceritakan apa-apa yang baru dibelinya setelah musim SPT berakhir, bahkan menganggap hal itu bukan hal yang memalukan apalagi aib. Sekarang aku bangga ketika menceritakan keberhasilan kami menolak iming-iming amplop yang berseliweran. Tidak ada lagi pegawai yang berani bercerita secara terbuka tentang ‘kenakalannya’ walaupun mungkin praktik-praktik seperti itu masih ada, tapi setidaknya fiskus sudah memiliki rasa malu dan takut, serta menutupinya agar tidak diketahui pegawai lain. Menurut saya ini sudah merupakan suatu kondisi moral yang baik.

Setelah modern, tidak ada lagi istilah ‘seksi basah’ dan ‘seksi kering’. Tidak ada lagi rasa sungkan saat menolak pemberian dari teman, atasan atau WP. Semua begitu kompak, semua begitu semangat mewujudkan ‘DJP bersih’. Bangga rasanya bisa menolak saat Wajib Pajak menyodorkan amplop. Suatu hal yang dulu dianggap lumrah, hari ini bisa dengan tegas kami tolak. Bangga rasanya saat bisa bilang ke WP “Pak, daripada Bapak

memberi saya uang, lebih baik kurang bayarnya ditambah saja, masuk kas negara tuh, Pak. Bukan masuk kantong saya”. Menurutku itu suatu kondisi yang melegakan, sungguh menenteramkan. Semua berusaha untuk bersih atau paling tidak merasa malu kalo dirinya masih ‘bermain’...Semoga saja kondisi ini bisa menular ke instansi lain. Amiin...

INFORMATION CENTER

Heru Widayanto

Bertugas di mana saja adalah sebuah amanah. Sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing tempat tugas memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda, atau bahkan kadang sangat berbeda. Tetapi selalu ada solusi dan pelajaran dari tantangan-tantangan tersebut.

Perubahan signifikan pertama saya alami saat pertama kali diangkat dalam jabatan struktural, setelah sekian lama menjabat sebagai tenaga fungsional. Dari pekerjaan nyata dalam melakukan pemeriksaan berhadapan langsung dengan Wajib Pajak, menjadi harus bekerja di balik meja, melakukan analisis dan membuat kebijakan-kebijakan. Setelah agak lama di kantor pusat saya dipindahtugaskan ke Kanwil, dengan pekerjaan tidak jauh-jauh dari analisis dan pembuatan kebijakan tapi dengan ruang lingkup yang lebih kecil, hanya satu Kanwil.

Tantangan paling menarik adalah bertugas di kantor pelayanan pajak (KPP). Di KPP, saya benar-benar merasa menjadi pilot, nahkoda atau masinis (bukan merasa menjadi raja lho...!!), yang harus mengendalikan kendaraan tersebut menuju tujuan yang telah ditetapkan. Harus melayani dan berhadapan langsung dengan Wajib Pajak dan yang paling utama harus mengamankan target penerimaan yang selalu memacu adrenalin. Apalagi saya ditugaskan di KPP khusus, yang termasuk salah satu penyangga utama penerimaan DJP.

Selain itu, ada juga tugas-tugas administrasi yang mengalir tiada henti. Syukur, dukungan teman sekerja menjadikan kami menjadi sebuah *team* yang solid, sehingga semua tantangan pekerjaan bisa diatasi bersama. Selain itu, sumber daya manusia di KPP khusus adalah mereka yang terpilih dalam seleksi pada awal modernisasi, sehingga memang dalam hati mereka sudah berniat dan berupaya untuk menjadi modern.

Setelah sekian lama berada di *comfort zone*, di KPP khusus dengan segala tantangan yang cukup menguras energi, sekarang saya kembali dipindahtugaskan. Kali ini, ke salah satu KPP Pratama, kurang lebih 155 kilometer dari Jakarta. Tantangan baru pun menghadang! Namun sebelum

saya kisah tantangan-tantangannya, perlu diketahui bahwa dengan perpindahan saya dari KPP khusus ke KPP Pratama, walaupun jabatan sama-sama kepala kantor, namun remunerasi yang saya terima berbeda. Berbeda di sini, yang saya maksud adalah turun. *Take home pay* saya sebulan berkurang hampir 20 % karena peringkat jabatan Kepala KPP Pratama lebih rendah dibandingkan KPP Khusus.

Tantangan pertama yang cukup mengganggu adalah suasana kebatinan, karena kalau diibaratkan sekolah, saya ini turun kelas, padahal saya merasa telah melakukan semua hal terbaik di KPP sebelumnya. Sebenarnya sah dan tersedia alasan yang cukup bagi saya untuk mempertanyakan hal tersebut, menyalahkan keadaan atau pun mencari pihak lain sebagai kambing hitam. Tapi saya lebih memilih untuk menerima dan menikmati saja keadaan tersebut. Pasti ada hikmah di balik semua itu.

Ternyata tidak perlu waktu lama untuk menemukan kenikmatan itu. Mutasi kali ini benar-benar bisa membuat saya menikmati hidup di kota yang menyediakan semua fasilitas kenyamanan, Bandung. Satu kalimat untuk menggambarkan Bandung adalah tempat di mana kita bisa makan enak dan tidur enak.

Di Bandung, wisata kulinernya mengoda selera. Wisata belanjanya tidak menguras tabungan. Suasana sejuhnya membuat enak tidur. Pemandangannya juga bagus. Kalau masalah pekerjaan saya rasa di mana saja sama, pekerjaan tidak ada habisnya. Tapi khusus suasana selepas jam kerja, sepertinya Bandung menjanjikan kenikmatan tersendiri. Memang kadang lalu lintasnya macet tapi tidak seperti di Jakarta. Satu jam di jalanan Bandung sudah terlalu lama, padahal satu jam di jalanan Jakarta merupakan waktu yang normal. Memang selalu ada nikmat di balik semua kejadian. Penurunan *take home pay* digantikan dengan kenikmatan dalam bentuk natura. Satu lagi, pulang ke Bogor, *home base* saya juga cepat dan lancar, masuk tol, keluar tol dan melawan arus. Artinya biaya transport bisa dihemat. Kesimpulannya, cukup dengan satu kata “bersyukur”, dan dijamin kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan.

Kembali ke tantangan. Di KPP yang baru, jumlah Wajib Pajak yang ber-NPWP sekitar tujuh puluh lima ribu, jauh lebih banyak dibanding di KPP Khusus. Belum ditambah Wajib Pajak PBB yang jumlahnya ratusan ribu..... Bisa dibayangkan *load* pekerjaan yang harus saya hadapi. Di sisi lain, pegawai di sini, secara teoritis mempunyai kompetensi rata-rata di bawah pegawai KPP khusus. So... tantangan pasti jauh lebih berat!!

Hal baru yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana melayani ratusan ribu Wajib Pajak dengan SDM yang terbatas. Untuk Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) saya rasa tidak ada masalah. Kondisinya sudah luas, bersih, nyaman dan lengkap. Dengan ratusan ribu Wajib Pajak yang harus dilayani oleh hanya dua puluh *Account Representative* (AR), rasanya perlu waktu dua puluh empat jam kerja sehari untuk menyelesaikannya. Wajib Pajak yang datang ke AR silih berganti. Satu hal yang sangat saya hargai dari para AR adalah pelayanan dalam memberikan konsultasi yang sangat prima dan sabar. Kadang Wajib Pajak datang hanya untuk bertanya tentang kenaikan PBB. Setelah dijelaskan (dengan prima dan sabar) Wajib Pajak bisa paham, kemudian Wajib Pajak selanjutnya datang dengan permasalahan yang sama. Mengapa PBB saya tahun ini naik lagi. Jadi harus dijelaskan lagi (juga dengan prima dan sabar). Setelah beres, berikutnya datang Wajib Pajak dengan masalah yang sama. Kondisi yang tidak sehat menurut saya. Waktu AR habis untuk melakukan penjelasan. Terlalu banyak waktu dan energi yang terbuang. Tugas pokok AR untuk melakukan pengawasan dan pengalihan potensi pajak tidak tersedia waktu yang cukup.

Harus ada jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Dari beberapa kali rapat akhirnya diputuskan sebuah solusi yaitu *information center*. Karena TPT kami sangat luas, maka dibuat ruangan khusus untuk melakukan konsultasi, karena loket *help desk* sudah tidak mampu menampungnya.

Tugas melakukan konsultasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak menurut saya bukan tugas AR saja tapi seluruh pegawai. Oleh karenanya, saya menjadwalkan petugas di *information center* bukan hanya AR tapi juga pelaksana dan semua fungsional pemeriksa pajak. Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi harus dilayani di *information center* tanpa harus ditangani oleh AR yang bersangkutan. Wajib Pajak bisa bertemu AR hanya untuk konseling yang berhubungan dengan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan. Agar petugas mempunyai waktu untuk menyelesaikan tugas pokok, maka jadwal bertugas di *information center* dibuat setengah hari secara bergantian. Sekarang waktu AR tidak habis terkuras untuk memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak atas permasalahan yang kadang sama dan berulang.

Dalam setiap perubahan selalu ada resistensi, demikian juga dengan penjadwalan sebagai petugas *information center*. Masih ada petugas yang ragu-ragu dan merasa tidak mampu mengatasi masalah yang ditanyakan

Wajib Pajak. Tapi sisi baiknya semua petugas jadi belajar semua pengetahuan perpajakan. Resistensi juga terjadi dari fungsional pemeriksa pajak yang sering merasa berada di pihak yang *superior* di hadapan Wajib Pajak, sekarang dituntut harus melayani Wajib Pajak. Namun saya memutuskan bahwa keadaan menuntut adanya perubahan, dan semua pegawai, termasuk saya harus mengikuti arus perubahan tersebut. Sejauh ini *information center* kami berjalan dengan baik, dan belum ada keluhan berarti dari fungsional pemeriksa pajak untuk piket sebagai petugas *information center*.

Satu lagi pekerjaan kepala kantor atau atasan pada umumnya, yang menuntut keteguhan hati untuk melakukannya adalah pengenaan sanksi. Ketentuan itu dibuat untuk dilaksanakan, tapi tidak semua atasan berani menerapkannya. Setiap sanksi berimplikasi langsung pada *take home pay* dari pegawai yang dikenakan sanksi. Artinya akan berpengaruh juga terhadap anak dan istri di rumah. Ini juga sebuah tantangan yang harus disikapi dan menjadi tanggung jawab pimpinan.

Ada salah satu pegawai selalu hadir dan pulang tepat waktu, tapi dalam jam kerja dia tidak bekerja, dan bahkan sering tidak berada di tempat. Ini adalah sumber energi negatif yang akan segera menjalar ke rekan kerja lainnya jika tidak disikapi. *Mosok* kita yang seharian bekerja, dengan yang datang kemudian menghilang menerima *take home pay* yang sama. Harus ada pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan. Banyak pegawai yang baik, tetapi ada juga yang tidak baik. Untuk pegawai yang tidak baik dan tidak bisa lagi dilakukan pembinaan, sanksi kepegawaian harus diterapkan. Akhirnya beberapa bulan pegawai tersebut hanya menerima *take home pay* setengah dari yang lain dan dengan status masih dalam pembinaan. Jika tidak berubah, sanksi yang lebih berat sudah menunggunya. Pertimbangan utama dalam pengenaan sanksi adalah pembinaan dan agar energi negatifnya tidak menjalar ke rekan sekerja lainnya. Jadi tidak hanya semata-mata pembinaan kepada pegawai yang bersangkutan tapi juga sebagai pembelajaran bagi pegawai lain dan organisasi.

Bagi saya, meskipun pembinaan dan pengawasan pegawai adalah juga merupakan tugas utama seorang kepala kantor, namun ternyata terasa cukup berat ketika harus melaksanakannya. Tapi saya bertekad untuk terus melakukan hal ini. Dan saya yakin, tidak hanya saya yang belajar dari proses ini tetapi juga pegawai lain di lingkungan kantor saya. Modern juga berarti

keteguhan hati untuk bersama-sama memberi dan menciptakan suasana kerja yang kondusif.

SEHARUSNYA

Andy Prijanto

Pengalaman ini sungguh membuat saya kagum. Saya benar-benar menjadi saksi atas komitmen dan integritas dua senior saya, fungsional pemeriksa di KPP tempat kami berkarier dalam dua tahun terakhir ini. Mereka tidak memberikan saya nasihat lisan yang terkadang terasa klise dan normatif, namun secara nyata tidak mudah untuk dilakukan. Mereka berdua langsung memberikan nasihat berupa keteladanan di depan mata saya. Tanpa kata-kata yang terkesan menggurui, namun mereka mampu membuat saya merasa berhadapan dengan karakter pemeriksa pajak - yang sama sekali berbeda, dengan karakter yang selama ini melekat dalam benak saya.

Sebagaimana layaknya pelaksanaan pemeriksaan, seringkali tim pemeriksa harus mengunjungi lokasi Wajib Pajak yang letaknya jauh di luar kota, bahkan kadang-kadang ke luar pulau. Tentu saja kami harus mempersiapkan dana untuk transportasi dan akomodasi. Hitung-hitungan kami saat itu dibutuhkan biaya sepuluh juta untuk perjalanan lima hari kerja, tentunya tidak termasuk *budget* untuk oleh-oleh. Begitu mudahnya menghitung angka itu, namun tidak demikian untuk mendapatkannya. Bendahara kami yang begitu ketat menjalankan anggaran, selama ini mempunyai pakem bahwa uang perjalanan dinas bisa diberikan bila sudah ditandatangani oleh pejabat setempat di dekat lokasi yang dikunjungi. Setali tiga uang, transport dan akomodasi penginapan baru bisa diganti bila ada bukti sah dan otentik.

Singkatnya, setelah tugas kami tuntas dan segala macam biaya yang keluar sudah mendapatkan penggantian dari kantor barulah segala macam pertanyaan saya terjawab. Rupanya rekan-rekan fungsional pemeriksa melaksanakan tabungan uang perjalanan dinas. Pada saat mereka menerima uang perjalanan dinas untuk pertama kalinya, mereka tidak mengambil dulu, namun digunakan untuk operasional tim. Jadi istilahnya ada *iron money* yang memang dipakai untuk pembiayaan setiap pengeluaran awal untuk keperluan dinas-dinas selanjutnya. 'Uang induk' itu nantinya akan dikembalikan kepada yang berhak bila ada mutasi atau perubahan anggota dalam tim itu.

Walaupun sederhana, pengelolaan dana seperti itu sungguh merupakan solusi terbaik di era modernisasi. Jika dulu kita tidak perlu pusing cari uang untuk dinas karena fasilitas yang masih mungkin ‘diminta’ - misalnya dari Wajib Pajak – sekarang hal itu ‘haram’ dilakukan oleh pegawai pajak. Coba bayangkan jika aparat yang akan bertugas selalu berprinsip ‘seharusnya’ sebelum jalan uang perjalanan dinas diberi dulu. Atau ‘seharusnya’ paling tidak ada uang muka untuk bayar tiket dan lain-lain. Sementara di sisi lain, bendaharawan yang bertanggung jawab besar atas segala bentuk pengeluaran - serupiah sekalipun - berprinsip bahwa uang perjalanan dinas bisa diberikan bila sudah ditandatangani pejabat penerima setempat dan penggantian berdasarkan bukti otentik seperti tiket dan kuitansi hotel, lalu kapan pekerjaan tersebut dapat dimulai.

Dari contoh kasus kecil itulah bisa dilihat adanya esensi modernisasi yang selayaknya menjadi ‘ruh’ baru bagi setiap pegawai DJP yang bertugas. Pertama, kesadaran bahwa sebagai PNS dituntut adanya jiwa pengabdian kepada negara dan pelayanan kepada Wajib Pajak. Peningkatan gaji dan tunjangan yang diberikan negara, dengan kesadaran pribadi dapat kita pergunakan dulu untuk menutupi keperluan dinas, bukankah nantinya akan diganti juga. Jadi sebenarnya hanya pergeseran waktu penggunaan uang saja.

Begitu pula halnya di era modernisasi ini jangan berprinsip seharusnya kalau sudah modern biaya untuk keperluan dinas disediakan sebelum berangkat. Seharusnya untuk melakukan pekerjaan ini-itulah sudah disediakan sarannya, atau prinsip seharusnya-seharusnya yang lain yang justru mencerminkan ‘lembeknya’ diri kita dalam menghadapi situasi tertentu.

Kembali pada pengalaman saya dari melihat contoh berupa teladan dari dua senior pemeriksa di kantor yang telah memegang komitmen integritas dan profesionalismenya terhadap tugas, menunjukkan bahwa fasilitas yang kurang serta mekanisme biaya dinas yang berlaku sekarang bukan merupakan kendala untuk menjalankan tugas. Dengan cara kerja cerdas mereka mampu membuat kreasi menghadapi keterbatasan kondisi. Hebatnya cara yang mereka tempuh tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun.

Dari pengalaman itulah akhirnya saya bisa memahami bahwa modernisasi tidak harus membatasi kreativitas otak kita. Justru sebaliknya harus muncul ide-ide segar untuk mengatasi keterbatasan yang sering terjadi. Di samping itu yang lebih penting adalah memegang komitmen

reformasi birokrasi itu sendiri yang esensinya bermuara pada pegawai negeri yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai penutup kisah kecil ini perlu saya tegaskan adanya benang merah yang mungkin dapat dijadikan teladan atau dapat membangkitkan semangat kita untuk menikmati indahny reformasi di DJP. Tidak seharusnya lagi kita selalu berpikir bahwa untuk bekerja harus dengan sarana yang ideal, tapi motivasilah yang membuat kita mampu. Tidak seharusnya kita berpikir ‘seharusnya begini’ atau ‘seharusnya begitu’ dengan alasan modernisasi, karena, lama-kelamaan kata-kata ‘seharusnya’ hanya akan melemahkan daya kreasi kita.

REMUNERASI

Atjep Amri Wahyudi

Gempa bumi di bagian selatan Jawa Barat pada hari Rabu sore tanggal 02 September 2009 membangkitkan kenangan saya ketika bersama teman-teman satu seksi mengadakan tour ke Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis yang juga merupakan daerah korban gempa, Agustus 2009. Matahari baru saja masuk ke peraduannya ditelan Samudra Indonesia ketika serombongan pria gagah, sekitar 20 orang berkendara moge (motor gede). Mereka sedang mengadakan konvoi moge dikawal seorang polisi muda berperawakan tinggi besar berusia dua puluh tahunan.

Yang hendak saya ceritakan dalam kisah ini bukan gempa atau konvoi moge yang menakjubkan itu. Tetapi sepenggal dialog saya dengan sang polisi muda tadi. “Selamat sore Pak? Baru ngawal rombongan nich?” Sapaku membuka pembicaraan.

“Sore..!!” jawab pak polisi dengan suara mantap, “Iya Pak, kami baru saja keliling di sepanjang pantai selatan dalam rangka Peringatan HUT RI ke-64. Ada anak bos dalam rombongan makanya harus dikawal.” Katanya sambil tertawa masih dengan suaranya yang mantap.

“Enak ya Pak, bisa cuci mata tapi dapat uang jalan.” pancingku.

“Waduh waduh Pak, kalau yang pertama memang iya. Namanya juga jalan-jalan sudah pasti bisa cuci mata, tapi kalau uang jalan, tunggu dulu...!! Sebagai polisi muda yang baru masuk dinas, saya menyadari bahwa saya masih dianggap anak bawang oleh para senior. Jadi uang jalan, uang bensin atau apapun namanya, nggak tahu memang ada jatah apa enggak. Ini saja....,” katanya sambil mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya “dikasih sama yang saya kawal tadi, Eh omong-omong, Bapak punya korek nggak?”

“Wah maaf Pak, kebetulan saya tidak merokok, bahkan boleh dikata anti rokok he..he..he.”

“Wah maaf juga, ya udah ntar aja ngrokoknya, kalau ngrokok sendiri kok rasanya kurang sreg. Tapi kalau Bapak minta rokok saya juga percuma karena rokok saya yah cuma sebatang ini, Pak. Namanya juga dikasih orang Ha..ha..ha”. Ketika mengatakan hal ini seperti ada perasaan

lega tersirat dari wajah dan tawa sang polisi setelah lelah bertugas sepanjang hari.

“Omong-omong Bapak kerja dimana kok tidak doyan merokok?” pertanyaan yang susah saya jawab karena memang tidak ada hubungan antara tidak merokok dengan pekerjaan. Kemudian secara singkat saya menjelaskan tentang pekerjaan saya sebagai PNS di DJP. Namun rasa penasaran saya menyebabkan topik pembicaraan kembali saya arahkan ke pekerjaan polisi muda itu.

“Kalo boleh tahu, emangnya kalau pas dapat tugas luar gini berapa jatah uang jalan Bapak?” kembali saya menyelidik lagi.

“Ya itu tadi Pak, jangankan jumlahnya, ada atau enggak saya juga enggak tahu.”

“Tapi kalau ada jatahnya kan nanti Bapak tahu juga saat teken kuitansi”

“Kan tadi saya juga sudah bilang Pak, saya ini polisi yunior. Jadi semua apa kata dan kemauan Bos. Dan Bapak harus tahu kalau di dunia militer semua yang pangkatnya lebih tinggi berarti dia bos. Tidak peduli tempat kerjanya satu ruang, satu atap, satu gedung atau tidak dengan saya. Saya sampai bingung, Bos saya itu yang mana? Setiap ketemu atau papasan dengan senior harus kasih *tabik*.” Katanya sekali lagi dengan mimik serius. “Ketika saya masih sekolah dulu pernah membaca di koran bahwa polisi adalah PNS yang dipersenjatai. Nyatanya... sekarang kalau saya membuat kesalahan, tinggal tunggu nasib aja. Kalau nasib baik paling cuma dibentak atau disuruh *push up*. Tapi kalau lagi apes terima gamparan sudah biasa he..he..he. Pokoknya kalau masalah pekerjaan memang rada mirip-mirip PNS tapi kalau sudah bicara disiplin apalagi kalau berbuat kesalahan pasti militernya yang menonjol. Dan ini yang membedakan dunia saya dengan Bapak sebagai PNS.”

“Yah udah kita berdoa aja mudah-mudahan rencana pemerintah untuk memberi gaji tinggi ke institusi kepolisian akan menjadi kenyataan.”

“Apa benar rencana itu Pak? Terus terang...saya tertarik jadi polisi karena mendengar adanya wacana itu.” katanya dengan mimik antusias.

“Yang saya dengar... rencana itu akan mulai berlaku beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan rencana itu juga tidak mengalami perubahan, siapa tahu nantinya gaji polisi setingkat Kapolres mencapai puluhan juta sebulan.”

“*Masya Allah...* besar banget Pak. Lantas apa saya juga akan menerima gaji gede?”

“Yah kalau satu polisi sudah bergaji besar pasti yang lain juga sama. Tapi yang sama tentu bukan jumlahnya. Yang sama adalah adanya peningkatan drastis dibandingkan jumlah penghasilan yang diterima sebelumnya.”

“Wah kok Bapak lebih ngerti masalah gaji polisi daripada saya. Apa famili Bapak ada yang jadi polisi?”

“Wah kalau masalah itu kan sudah banyak diulas di koran, selain itu kantor pajak adalah institusi pertama yang pegawainya menerima gaji besar. Istilah kerennya adalah menerima remunerasi” Setelah menjawab saya berharap dia tidak mengejar untuk menanyakan pengertian remunerasi, karena saya hanya tahu implementasinya yaitu *take home pay* jadi gede tapi definisi tepatnya nggak tahu atau tepatnya memang tidak tahu. Tapi bisa kurasakan betapa nikmatnya bekerja di DJP dengan remunerasi tanpa harus kuatir disuruh *push up* atau digampar. Betapa sekarang kita harus bangga menyandang status sebagai pegawai pajak. Bukan hanya bangga bahkan lebih dari itu yaitu rasa bersyukur. Ternyata masih banyak abdi negara lain yang kondisinya jauh di bawah kita.

Dari jauh terdengar suara klakson bus meraung-raung nyaring, memberi kode bahwa rombongan kami akan segera balik ke Bandung. Sambil pamit dan bersalaman saya menyempatkan diri mampir ke sebuah warung untuk membeli korek api dan kembali ke tempat semula untuk menyerahkannya ke Pak Polisi, kemudian segera kabur menuju ke bis yang sudah menunggu. Dari jauh terdengar Pak Polisi berteriak ”**r e m u n e r a s i**!!!!”

KEMBALIKAN

Agung Subchan K

Beberapa hari sepulang istri dari rumah sakit pasca melahirkan anak yang ketiga, kami, keluarga pegawai kantor pajak, kedatangan serombongan Bapak dan Ibu berbaju batik yang kelihatannya pulang dari *njagong manten* (kondangan). Kami persilahkan masuk dan sebagai tuan rumah, kami sambut mereka dengan hangat. Benar juga perkiraan kami, para tamu yang mulia menjelaskan bahwa memang mereka baru pulang *njagong manten* di Jogja, kemudian sengaja silaturahmi ke rumah kami untuk menengok istriku dan si kecil.

Setelah beramah tamah beberapa saat, saya baru tahu bahwa rombongan tamu tersebut adalah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali tempat istri saya bekerja sebagai *Account Representative* (AR). Artinya dalam pekerjaannya, istri saya melakukan pelayanan, pengawasan dan konsultasi terhadap Wajib Pajak tersebut. Beberapa saat kemudian tamu kami mohon pamit pulang ke Boyolali. Dengan isyarat mata seorang Bapak meminta kepada temannya untuk menyerahkan sebuah amplop kepada kami. Suatu hal yang biasa terjadi dalam masyarakat kami ketika ada kelahiran tetangga dan sanak saudara datang ikut berbahagia dan memberikan sesuatu. Akan tetapi tamu kami ini adalah Wajib Pajak yang ada hubungan kerja dengan istri saya di kantor. Menolak pemberian dalam situasi seperti ini bisa menyinggung pihak pemberi. Akan tetapi jika diterima akan bertentangan dengan kode etik kami sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam situasi dilematis tersebut saya harus menguatkan hati untuk bisa mengambil keputusan. “Terima kasih atas kedatangan dan perhatian Bapak, Ibu sekalian, namun sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tidak berani menerima bingkisan dari Bapak dan Ibu karena kode etik di kantor kami melarang menerima sesuatu dari Wajib Pajak” saya sampaikan dengan sopan. Namun rupanya tamu kami tidak berkenan dan memaksa kami menerimanya karena pemberian ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di kantor. Akhirnya kami terima pemberian tersebut

dengan pertimbangan sebagai tuan rumah untuk menghormati kebaikan hati tamu mereka.

Setelah tamu pulang masalah baru muncul, saya dan istri sepakat bahwa pemberian ini tidak berhak kami terima. “Bagaimana cara mengembalikan amplop ini mas?” tanya istri saya gamang.

“Disimpan dulu, besok kalau sudah masuk kantor diserahkan ke Kasimu untuk dibuatkan berita acara pengembalian amplop ke Wajib Pajak “ jawabku.

“Baiklah aku setuju, kebetulan Wajib Pajak tadi sedang dalam prioritas pengawasanku Mas, ada data material dari internet dan sudah dihimbau, sudah di-visit untuk pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tapi masih *mikir-mikir*, barangkali masih memikirkan bahwa kantor pajak masih bisa diajak bernegosiasi untuk penghindaran pembayaran pajaknya”, analisis istriku. Dasar AR, habis melahirkan aja masih sempat menganalisis pelaporan Wajib Pajak.

Setelah istri saya masuk kantor, ternyata ada teman pegawai lain yang juga melaporkan bahwa ia juga diberi amplop oleh Wajib Pajak yang sama. Bersama-sama, mereka melaporkannya kepada kepala seksi masing-masing. Kemudian Wajib Pajak dipanggil menghadap kepala kantor untuk menerima kembali amplop beserta isinya dengan dibuat sebuah Berita Acara. Setelah mendapat penjelasan dari Kepala Kantor serta dua amploponya dikembalikan, Wajib Pajak merasa menyesal, malu telah memberi amplop kepada pegawai pajak. Syukur *alhamdulillah* mudah-mudahan makin banyak Wajib Pajak yang mendukung modernisasi kantor pajak.

PEDE AJA LAGI

Muhammad Halik Amin

Sekitar jam 10 pagi, saya kedatangan seorang tamu yang saya kira saat itu adalah Wajib Pajak. Orangnya sudah cukup tua, umurnya sekitar 50 tahun-an. Bapak tersebut membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun-tahun yang lama, dan setelah saya lihat Nomor Objek Pajak (NOP) dan alamat letak objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya ternyata obyek PBB tersebut berada di wilayah wilayah kerja saya sebagai *Account Representative* (AR).

Dari awal kedatangan, bapak ini sudah menampakkan wajah yang tidak bersahabat. Dengan nada suara yang tinggi, tiba-tiba mengatakan akan menuntut pegawai pajak ke pengadilan. Melihat gelagat yang kurang baik ini, saya persilakan bapak tersebut duduk di depan meja kerja saya, karena pada saat itu ruang tempat *konseling* sedang ada tamu. Lalu saya tanya permasalahannya. Dengan berapi-api, bapak itu bercerita bahwa selama ini dia merasa dirugikan oleh negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Masih cerita bapak itu, bahwa hampir selama 10 tahun, termasuk tahun pajak 2008, tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. Padahal sudah bertanya ke Kantor Kelurahan, tetapi SPPT PBB-nya selalu tidak ada. Dan tahun 2008 ini, SPPT PBB yang termasuk dalam kategori Buku 4 dan 5 disampaikan langsung oleh AR ke alamat objek pajak, tidak melalui pihak Kelurahan. Setelah saya cari, potongan tanda terima penyampaian SPPT PBB atas NOP dan objek yang bersangkutan ternyata ada. Disitu tertera nama seseorang yang menerima SPPT PBB, tetapi si bapak merasa tidak kenal dengan nama orang yang ada di tanda terima tersebut.

Dengan marah bapak itu menyalahkan saya, dan menganggap ini adalah tindakan kriminal dan akan melaporkan ke polisi. Karena, seharusnya dia langsung yang harus menerima SPPT-nya bukan orang lain. Sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa yang menerima tidak harus pemilik objek tanahnya, tetapi beliau tetap marah dan ngotot harus memperoleh SPPT PBB. Maka saya sarankan untuk mengajukan permohonan cetak ulang atas salinan SPPT PBB saja. Bukannya makin reda amarahnya, tetapi semakin

menjadi-jadi. Bapak itu kemudian menelpon seseorang supaya datang ke meja kerja saya. Yang datang adalah seorang wartawan lengkap dengan *name tag* nama surat kabar yang cukup saya kenal dan *tape recorder* kecil untuk merekam. Rupanya bapak tersebut memang sudah bersama wartawan itu, tetapi disuruh menunggu di bawah, di luar kantor, sebelum dipanggil.

Wartawan tersebut menaruh *tape recorder* di meja kerja saya dan mencatat pembicaraan saya dengan orang tersebut. Saya cukup ngeri juga seandainya nanti diberitakan di koran tersebut, bahwa pelayanan kantor pajak tidak memuaskan. Setelah saya lihat-lihat lagi SPPT yang dia bawa, rupanya objek tersebut adalah tanah kosong. Dan saya ingat, pada saat menyampaikan SPPT PBB waktu itu, saya tidak ketemu dengan Subjek Pajaknya karena memang tanah kosong. Kemudian SPPT saya titipkan pada orang yang ada di rumah bapak RT setempat. Karena merasa kenal dengan bapak RT-nya, bapak tersebut menelpon bapak RT, dan ternyata potongan tanda terima itu ditandatangani oleh menantunya bapak RT. Saya kira permasalahannya selesai, karena SPPT PBB tahun 2008 itu sebenarnya ada, tetapi masih ada di menantunya Bapak RT.

Tetapi bapak itu memperlmasalahkan lagi, dan bercerita bahwa selama 10 tahun ini lokasi tanah yang ada di SPPT PBB tersebut sebenarnya masih dalam sengketa, karena ada dua Akte Kepemilikan yang sah atas lokasi tanah yang sama. Akibatnya SPPT PBB-nya pun diterbitkan dua dengan nama jalan dan NOP yang berbeda, padahal objek tanahnya sama. Lokasi tanah tersebut letaknya di *hook* berbentuk *letter L*, dan dua SPPT tersebut menggunakan alamat jalan pada dua sisi yang berbeda.

Yang menyakitkan menurut bapak ini, selama ini yang menjadi alasan lawan sengketanya adalah bahwa mereka disamping memiliki sertifikat tanah juga memiliki SPPT PBB atas tanah yang menjadi sengketa tersebut. Sementara bapak itu tidak memiliki SPTT PBB-nya. Dan SPPT PBB itu yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan oleh mereka. Terbitnya dua SPPT PBB yang berbeda atas objek tanah yang sama inilah yang akan dijadikannya alasan untuk menuntut pegawai pajak ke pengadilan.

Sebenarnya putusan pengadilan atas sengketa tanah itu sudah turun Desember 2007, dan dimenangkan oleh pihak bapak itu. Tetapi karena selama 10 tahun itu merasa dirugikan atas terbitnya SPPT PBB ganda, lebih-lebih lagi selama itu juga tidak pernah menerima SPPT PBB-nya, makanya bapak itu akan menuntut pegawai pajak.

“Nah, karena putusan pengadilan telah memenangkan bapak, sebaiknya Bapak segera mengajukan permohonan pembetulan SPPT PBB-nya. Nanti petugas kami akan melakukan survey ke lokasi kembali. Sehingga akan diterbitkan SPPT PBB yang benarnya atas nama bapak”. Inilah yang saya sarankan pada bapak itu, tetapi rupanya belum memuaskan bapak itu dan minta bertemu langsung dengan Kepala Kantor.

Setelah sholat dhuhur saya langsung menemui kepala kantor dan menceritakan permasalahannya. Kemudian bersama saya, Bapak tersebut menghadap Kepala Kantor tetapi wartawannya tidak ikut masuk. Mulanya kepala kantor bertanya, bapak ini punya hubungan apa dengan orang yang tertera namanya di SPPT PBB. Ternyata bapak ini adalah kakak dari pemilik lokasi objek tanah tersebut.

“Wah, kalau begitu saya nggak bisa membicarakan masalah ini. kalau bukan dengan Wajib Pajaknya. Atau barangkali bapak mempunyai Surat Kuasa?”. Kepala kantor menjelaskan dengan bijak, bahwa kita harus mematuhi kode etik dalam bekerja. Jadi kalau yang mengurus bukan Wajib Pajak yang bersangkutan, harus ada Surat Kuasa. Rupanya bapak itu juga tidak membawa Surat Kuasa.

“Bapak mempunyai penghasilan nggak?” Tanya kepala kantor lagi.

“Pak, saya ini bukan calo tanah, saya punya dong penghasilan. Anak saya aja sekolah di Al Azhar.” Jawab bapak itu. Dalam hati, saya tahu arah pembicaraan kepala kantor.

“Tuh, bapak punya penghasilan. Apakah bapak sudah punya NPWP? Sudah lapor pajak belum?”. Bapak itu semakin nggak enak saja, karena semakin terdesak dengan pertanyaan Kepala Kantor. Bapak itu mengakui bahwa dia memang belum lapor pajak. Akhirnya Bapak itu mohon izin keluar ruangan.

Setelah keluar dari ruangan Kepala Kantor dan kembali ke meja kerja saya, diketahui niat awal bapak itu sebenarnya minta supaya tunggakan PBB yang 10 tahun tidak dibayar itu, dikurangi jumlahnya. Saya jelaskan bahwa sesuai aturan, tidak bisa. Hanya bisa diajukan penghapusan atas dendanya saja, itupun diberikan hanya satu tahun, karena ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Setelah cukup panjang lebar saya menjelaskan, akhirnya Bapak itu minta pamit untuk pulang. Dengan perasaan kalah (menurut penulis), bapak itu berjalan menjauh dari pandangan saya.

Saya sangat bahagia, hari itu adalah hari keberkahan bagi saya. Ketika kita bekerja sesuai dengan aturan dan kode etik, maka pekerjaan itu akan

terasa begitu nikmat. Ketika kita bekerja sesuai ketentuan, apapun kejadiannya, Pede Aja Lagi...!!!

MODERNKU

Sandi Syahrul Winata

Departemen Keuangan, adalah instansi yang tidak pernah terpikir olehku, akan menjadi tempatku bekerja. Ternyata akhirnya nasib membawaku untuk bekerja di sini. Tepat di penghujung tahun 2002 aku diterima di Direktorat Jenderal kita tercinta ini. Setelah mengikuti sekelumit Diklat di Jakarta, akhirnya ditempatkanlah aku di Bandung. *Alhamdulillah* dekat ternyata dengan keluargaku. Mamahku, Papahku, Si AA, Teteh, adikku tercinta, dan keponakanku. Ahhhh... lengkap sudah perasaan bahagia pada saat itu. Terima kasih ya Allah.... Dan awal bulan ditahun 2004, aku sudah mulai bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang dari awal pun aku tidak tahu, mau kerja apa.

Pekerjaanku Kesedihanku

Pada hari-hari pertamaku bekerja di situ – aku masih mencoba membaca situasi, aku masih mencari-cari di mana bagian kepegawaian, berkenalan dengan teman-teman baru yang sama sekali asing bagiku. Bahkan aku masih belum menemukan toilet yang nyaman, ups, maklum aku paling *geuleuh* (sebel) kalo liat kamar mandi kotor.

Sebagai anak muda yang baru lulus sarjana , aku ingin menunjukkan rasa disiplin yang tinggi dengan datang ke kantor sekitar pukul 7 setiap pagi, meskipun tempat tinggalku lumayan jauh dari tempat kerja. Tapi entah kenapa hampir setiap aku datang, pasti pintu kantor masih terkunci dan baru setelah beberapa saat, datanglah *Cleaning Service* yang biasa membuka pintu itu dengan mengatakan,

“Eh, kang Sandi.... punten pantona teu acan dibuka.” (Maaf pintunya belum dibuka). Dengan raut muka kuusahakan manis aku menggerutu dalam hatiku,

“Wah gila.... masa saya datangnya lebih duluan dari *Cleaning Service* kantor”.

Setelah dua minggu, keadaan tidak berubah juga, sehingga mulai timbul godaan-godaan dalam pikiranku. ‘Besok aku mau datang agak siang

aah...!!' Lalu keesokan harinya, setelah shalat subuh, tidak seperti biasanya aku tidur lagi, dan bangun pukul 6.30 WIB kemudian berangkat ke kantor jam tujuh kurang sepuluh pagi, so.... benar saja aku datang berbarengan dengan teman-teman kantor lainnya jam 8.30 WIB, pada hari itu aku baru melihat rekan-rekan sejawat kantor yang sedang absen manual pada saat yang sama. Salah seorang pegawai ada juga yang menyadari kehadiranku lalu menyapa " Oh.. ini ya pegawai baru itu".

"Iya, Pak" balasku.

Kemudian bapak itu dengan mengatakan, "Kok nggak pernah kelihatan ya". Aku tertegun beberapa saat dan terheran-heran. Hatiku berkata, "Aku kan datangnya lebih pagi dari mereka dan langsung menempati meja kerjaku, terang aja Bapak nggak pernah ketemu aku". Sekali lagi itu cuma dalam hati, belum lagi perasaan itu hilang aku dikagetkan dengan pengisian absen yang bohong, bapak itu kan datangnya jam 8.30 WIB sementara bapak itu menulis jam 07.15 WIB di absensi. 'Koq gitu yach...? '. Namun hari-hari berikutnya aku mencoba kembali ke selera asal, tetap datang lebih awal. Hari demi hari kuisi dengan memperkaya wawasan, aku banyak belajar mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, aku pun tak malu untuk bertanya sana-sini sekedar melengkapi kemampuanku yang pas-pasan.

Transisiku Kegundahanku

Awal Juni 2007, gelombang modernisasi mulai menyentuh kantorku. Masa transisi untuk kantorku tibalah sudah, aku ternyata masuk ke kantor pecahan yang baru terbentuk. Namun banyak hal lain yang membuat saya merasa takut untuk maju di kantor modern ini, aku tidak punya bayangan tentang apa yang akan kukerjakan nanti. 'Orang-orangnya kayak gimana? Lalu bagaimana latar belakang kepala kantornya? Apakah akan ada orang baik di kantorku nanti?' semua berkecamuk dalam benakku, hal ini sungguh membuat hati ini tidak tenang, terlebih lagi berbagai isu beredar tak karuan.

Kemudian aku mulai masuk kantor modern dan ditempatkan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dengan tugas melayani Wajib Pajak untuk proses pelayanan PBB saja. Lagi-lagi aku kecewa, hatiku bilang 'kalo gini caranya aku tidak akan maju'. Kesal, marah, dan malas bekerja bercampur aduk menjadi satu.

Waktu berlalu terlampau cepat. Aku masih saja dengan kemampuanku yang seadanya walaupun telah kucoba berusaha untuk membaca aturan-

aturan yang ada dan banyak. Pengumuman Surat Keputusan definitif pegawai keluar tepat di hari terakhir masuk kerja menjelang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1428 H. Surat Keputusan itu menetapkan aku menjadi AR (*Account Representative*).

Kegundahan itu datang lagi mengganggu. Aku sudah mulai menikmati pekerjaan-pekerjaan di Seksi Pelayanan, namun dengan menjadi AR apa yang harus aku perbuat? kata orang menjadi AR adalah super sibuk, lagi-lagi aku pasrah dengan kondisi yang ada. Awal pekerjaan menjadi AR sangat berat sekali, Profile Wajib Pajak, Pbk, Keberatan PPh, STP PPN, aduh..... mahluk apa itu???????????

Modernku Berkahku

Setelah dua tahun lebih aku masuk dikantor modern, banyak sekali berkah yang tak terduga. Ternyata anggapanku selama ini salah, semua orang yang ada di kantor modern tidak ada yang merasa lebih pintar dari yang lain. Semua saling melengkapi, termasuk diriku melengkapi kekurangan yang lain, dan aku merasa menjadi orang yang lebih bermanfaat karena bisa melengkapi kekurangan orang lain, khususnya dengan pengetahuan PBB-ku yang tidak banyak dimiliki oleh AR-AR yang tidak berasal dari kantor PBB. Pengetahuanku tentang perpajakan menjadi bertambah dan khasanah kasus mengenai pajak pun sedikit demi sedikit aku baca dan aku kuasai. Aku menjadi lebih disiplin, *istiqomah*, karena satu sama lain saling mengawasi, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pengkotak-kotakan pegawai saat ini sudah hampir tidak terasa, bahkan aku tidak dapat membedakan lagi mana orang pajak, mana orang PBB, atau pun dari KARIKPA.

Satu lagi yang lebih penting namun sangat personal. Dengan kondisi penghasilanku sekarang, aku menjadi lebih berani dan percaya diri menatap masa depan untuk segera berumah tangga. Semoga modernisasi ini berlangsung untuk selamanya, karena apabila kembali ke jaman pra modern aku akan kembali merasa menjadi orang yang paling bodoh.

TAHUNA

Afan Nur Denta Soewoeng

Pernahkan dirimu ke Tahuna? Diriku pas di Manado pernah ditugaskan ke Tahuna. Ceritanya kenapa sampai ditugaskan ke Tahuna adalah karena diriku baru saja promosi menjadi salah satu kasubbag di Kanwil DJP Suluttenggo dan Maluku. Sebelumnya adalah *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Karena dianggap masih *anget* lulus dari AR, maka diriku dikirim oleh Kakanwil untuk transfer ilmu kepada teman-teman di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahuna. Yang akan diriku ceritakan, bukan masalah transfer ilmunya, tetapi perjalanan diriku ke Tahuna, dan hal-hal yang diriku anggap menarik.

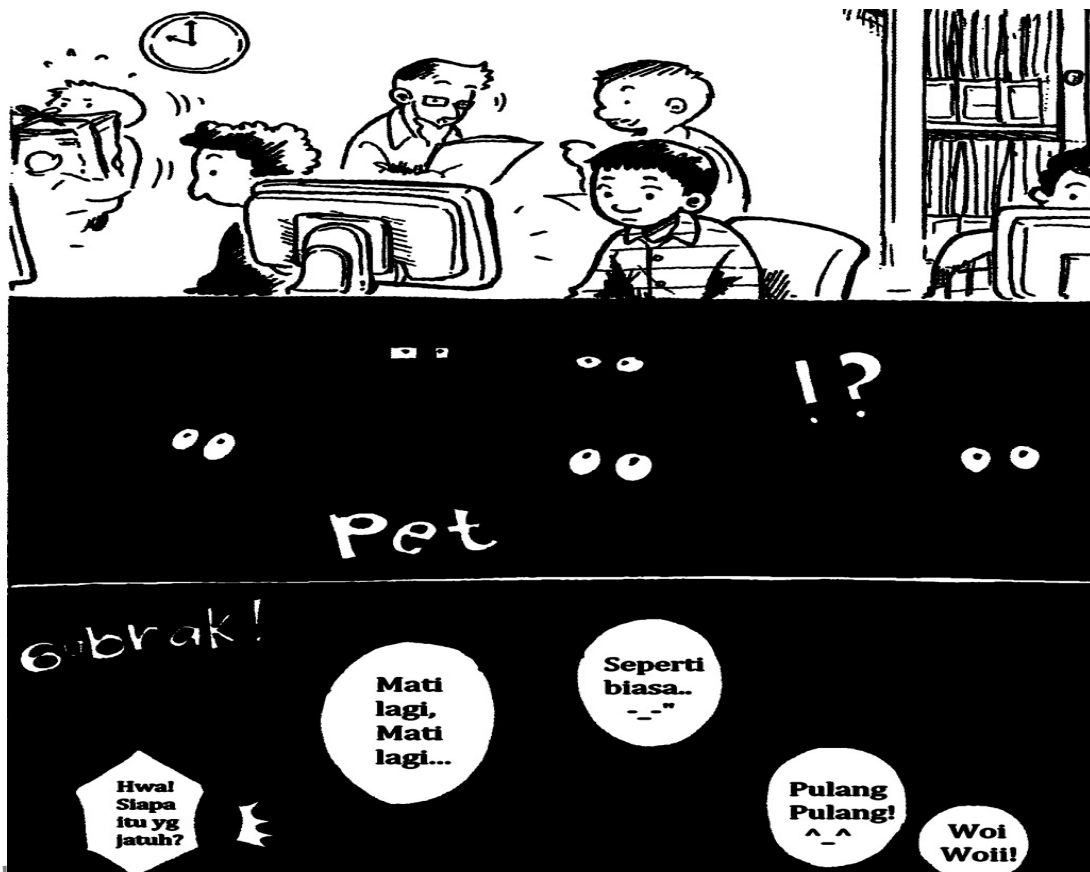
Secara geografis Tahuna termasuk dalam kepulauan Sangihe Talaut. Tepatnya di Sangihena. Jarak dari Manado adalah dua belas jam perjalanan kapal laut. Nah, diriku ceritakan ya - ketika diriku berangkat ke sana. Kami berangkat sekitar jam empat sore bulan April 2009. Sesampainya di pelabuhan diriku agak kebingungan. Karena kapal yang akan diriku naiki nggak ada. Kapal tersebut bernama Terra Sancta. Setelah tanya kiri kanan, ternyata dari deretan kapal-kapal di pelabuhan, Terra Sancta berada di baris paling luar. *Blaiikkk*, gimana ya caranya naik ke kapal. Ketika kutanya pada penumpang yang lain yang berjubel di pelabuhan, ternyata kami harus melompati kapal-kapal yang lain untuk sampai ke kapal yang paling luar. Duh, mirip cerita kancil memperdaya buaya yang mau memakannya. Buaya disuruh berjajar dan kancil melewati buaya tersebut untuk menyeberangi sungai. Ternyata setelah penumpang masuk kapal, belum tentu kapal langsung berangkat, nunggu inilah ... itulah ..., sampe petang datang. Jadilah kami terapung-apung di dalam kapal. Teman seperjuangan wajahnya telah pucat karena diombang-ambingkan gelombang padahal kapal belum berlayar.

Di dalam perjalanan ceritanya lebih ngeri lagi. Karena kapal oleng ke kiri dan ke kanan. Ketika diriku bertanya ke salah satu Kasi Waskon dari KPP Tahuna yang menjemput kami, apakah kapalnya selalu oleng seperti itu, beliau menjawab bahwa keadaan seperti ini adalah keadaan yang tenang. Duh yang kayak gini aja dibilang tenang bagaimana kalo oleng dan mau

karam ya? Lha ... diriku jadi mikir. Kalo diriku hanya tugas seminggu sedang bapak Kasi Waskon ini penempatan penuh, berarti beliau bergelut dengan lautan tiap minggu, apabila seminggu sekali pulang ke Manado. Diriku nggak bisa membayangkan kalo diriku yang ditempatin di sana (semoga saja jangan...he..he). Terus kalo diriku mau nengok *mboke* Rangga (istriku) dan Rangga anakku di Ponorogo, sanggup nggak ya? Diriku juga kadang mikir. Teman-teman yang penempatan hanya pindah beberapa kilo, kadang keluhannya sampe menyayat hati. Bagaimana kalau mereka pindah ke Tahuna ya...

Sesampainya di Tahuna masih pagi sekali, sekitar jam setengah lima. Diriku dijemput oleh Kasubbag Umum KPP Pratama Tahuna. Sebenarnya diriku nggak mau dijemput, soalnya kan dah modern, sudah ada uang perjalanan dinas kok dijemput? Lha kalo nggak dijemput diriku buta akan Kota Tahuna. Maka ketika dijemput diriku *manut* saja. Bukan berarti diriku tidak mau mematuhi kode etik pegawai lho, tapi daripada nyasar...

Hari pertama pertemuan, kami memaparkan cara membuat dan menggunakan *pivot table* dan sistem yang lainnya agar bisa menampilkan data penerimaan pajak dengan tepat. Presentasi berlangsung dengan aman. Nah hari kedua, pas lagi bekerja 'pet', listrik mati, mulai jam sepuluh sampe hari berikutnya. Ternyata listrik digilir, sehingga kami nggak bisa kerja dengan optimal.



Yang lebih mengherankan lagi di Pulau Sangihe atau Kabupaten Tahuna hanya ada satu *traffic light* alias lampu merah. Ketika diriku ceritakan hal ini kepada seniorku waktu kuliah dan sekarang sama-sama kerja di pajak dia bilang, “Ah Wung itu kecil, diriku dulu di Pulau Tarakan, enam tahun malah..., nggak ada tuh yang namanya lampu merah.” *Blaiiikk blaikkk* kirain pas diriku bertugas ke Tahuna adalah hal yang paling luar biasa, ternyata seniorku malah mengalami hal yang lebih RUUAAAARRR BIIIASAAAA ! Nggak ada lampu merah dalam satu pulau. Setelah seminggu di Tahuna waktunya kami pulang ke Manado, kami naik kapal Terra Sancta lagi. Duh seminggu di Tahuna serasa jauh dari peradaban. Itu baru seminggu, bagaimana dengan teman-teman yang penempatan di sana atau di tempat-tempat terpencil di seluruh Indonesia ini? Sungguh besar pengorbanan teman-teman yang ditempatkan di daerah terpencil. Doakan yuk smoga mereka tetap kuat, tetap *istiqomah* ... sebaliknya, bagi teman-teman yang ditempatkan di kota-kota besar, apalagi dekat keluarga, smoga bisa lebih bersyukur dan bekerja yang lebih baik lagi...untuk DJP tercinta!

DUA HARI YANG BERARTI

Hermawan

Kehendak Yang Maha Bijaksana-lah yang menyebabkan kaki lemah ini bisa menginjak tanah yang gersang di ujung barat pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berbekal selembur surat yang berjudul mutasi, kususuri tingginya perbukitan “Tana Samawa”, yang penuh dengan biji tembaga dan gundukan biji emas. Semua perjalanan ini merupakan rangkaian dari perjalanan gerbong modernisasi yang mulai menebar sporanya di ujung Timur nusantara. Upss, capek sekali, sudah dua hari menyusuri pulau ini dari sebelah selatan. Pemandangannya sangat cantik, hampir semua dipenuhi dengan pantai berpasir putih, dengan ombak yang besar dan menggulung. Sungguh panorama yang melegakan. Hidup ternyata memang pilihan. Pilihan juga yang membuat aku terdampar di pulau ini. Dari pertama menjejakan kaki di sini, sudah terlintas dalam benak ini bakal berhadapan dengan bau laut dan penduduk yang mungkin masih agak tertinggal dibandingkan dengan Jakarta.

Dua hari kami pacu Xenia biru berplat merah ini melintasi perbukitan di selatan pulau Sumbawa. Ini pengalaman pertamaku berhadapan dengan penduduk desa, bahkan pengalaman pertama berinteraksi dengan Wajib Pajak di luar Jakarta. Tebakanku agaknya ada yang salah, memang peradaban penduduk di sini masih tertinggal cukup jauh dari Jakarta, tapi rasa kekeluarganya jauh sekali dibandingkan dengan tempat markas besar kami ‘Direktorat Jenderal Pajak’ berdiri. Baru pertama kali bertemu, kami sudah dianggap saudara, apa ada yang salah ya? Pola pikir ‘individualis’-ku yang terbentuk karena terbiasa hidup di Jakarta ? Atau adat ketimuran yang masih sangat kental disini? Yang pasti, di sini hidup orang-orang yang tidak pandai *berminyak air pada sesama*. Mulai dari menawarkan tempat tinggal, menyuguhkan singkong rebus dan ikan bakar yang masih hangat, sampai mengenalkan pada seluruh warga setempat. Agak merinding bulu kudukku diperlakukan seperti itu.

Kedatangan kami memang hanya akan menyampaikan sekelumit aturan perpajakan yang belum tentu mereka mengerti, tapi keluguan mereka jugalah yang membuat aku membatin, ‘Siapa lagi yang akan menularkan

ilmu ini kepada mereka selain kami, ujung tombak terdepan dari institusi ini?'. Warga di sini bukan tidak mau memenuhi kewajibannya, tapi kebanyakan karena ketidakmengertian dan begitu jauhnya jangkauan dari dunia luar. Keluguan penduduk di sini menyadarkan kami bahwa sopan santun dan senyum manis nan ramah adalah cara yang paling efektif dalam berkomunikasi dengan mereka. Sopan akan dibalas dengan senyum lebar mengembang, penyampaian yang santun akan mereka balas dengan dekapan hormat yang luar biasa.

Di ujung rangkaian penyuluhan ini, tak lupa perangkat desa menyelipkan satu amplop kecil yang menurut mereka merupakan tanda hormat kepada kami. *Masya Allah*, sempat terkejut hati ini, apakah sudah begitu mengguritanya kebiasaan seperti ini, hingga penduduk yang lugu ini pun secara sadar mengikuti? Pelan tapi pasti, kami tuturkan dengan lembut, bahwa setiap pegawai pemerintah sudah diberikan gaji yang layak, yang asalnya adalah dari pajak-pajak yang mereka bayar. Bahkan kedatangan kami ke sini pun telah dibiayai oleh negara, juga dari pajak-pajak yang mereka bayar. Jadi sudah menjadi tugas kami untuk memberikan pengetahuan dan pelayanan perpajakan kepada mereka.

Sempat terbaca sekilas rasa terkejut mereka, mungkin karena keluguannya juga. Celetukan kecil mereka sayup terdengar, "*Mungkin kurang banyak Pak ?*". *Masya Allah*, kembali pelan-pelan kami jelaskan, hingga warga disini betul-betul menganggukkan kepala tanda mengerti. *Alhamdulillah*, mereka tidak tersinggung. Sebagian dari mereka, masih dengan nada sedikit tidak percaya berguman, "Apakah masih ada aparat pemerintah (mereka hanya tau kami dari pajak Kabupaten) yang seperti ini?". Dengan tenang dan pasti kami tuturkan bahwa nanti semua instansi akan seperti ini, mari kita sama-sama berdoa. Senyum sumringah mengembang dari tiap sudut bibir bapak-bapak lugu disini, entah itu tanda setuju atau tidak dengan pernyataan kami, lalu teriakan 'amin' menggema dari seluruh warga. Kembali merinding rasanya kami mendengar ucapan pendek itu. Walaupun cuma sejengkal dari begitu luasnya nusantara, tapi sudah ada sedikit pilar kecil untuk membangun kepercayaan masyarakat kita.

"Terima kasih Yang Maha Menyadarkan, yang telah membuka mata hati kami untuk lebih bersyukur. Bumi-Mu ternyata besar sekali!", gumamku. Hari ini aku dan kedua orang rekanku kembali ke kantor. Terbersit perasaan bangga, meskipun cuma setetes, karena telah memberikan kontribusi positif bagi negeri ini. Dan itulah yang membuat hati kami menjadi sejuk.

Sepanjang perjalanan pulang itu semua tertunduk, sepi, mungkin, semua berfikir alangkah nikmatnya telah memberikan pencerahan kepada orang yang tulus mau menerima. Alangkah indahnya bisa menularkan perasaan tenang ini ke semua Wajib Pajak. Semoga semua ini terus bisa menguatkan kami, *pejuang-pejuang timur* yang selalu rindu dengan keluarga yang nun jauh disana.

Dua hari yang melelahkan. Mulai di sinilah, ikatan batin dengan rekan sejawat terbentuk kuat. Dua hari yang menyenangkan, tetesan tekat penuh semangat dari fiskus-fiskus muda di sini untuk bekerja dengan penuh Integritas, membuncha kuat hingga ke ujung terkecil dari tiap unsur yang membentuk kepribadian Kami. Semoga tetesan lain juga akan berkumpul menjadi samudera luas nan biru. Dua hari yang membanggakan, rasa santun dan senyum ikhlas fiskus adalah senjata ampuh di sela kerasnya alam liar pulau terluar dari wilayah kantor kami. Dua hari yang berarti, hari itu adalah awal terbaik dalam meniti tiap langkah menuju perubahan dalam diri kami.

Hari ini, tepat di hari ke-869 setelah kejadian pertama itu, di pulau yang penuh kenangan ini, sudah berpuluh pejuang timur yang terbentuk. Keyakinan dan rasa percaya dalam diri kami semakin besar, bak roda besar yang akan menggilas bagian yang melenceng dari nilai nilai pada institusi kami.

“Wahai pejuang timur, kerinduan akan kerabat pasti akan terus menggoda kita. Teruslah berusaha, teruslah berinovasi! Akan ada saatnya kita merasakan kembali, belaian hangat sang buah hati. Ya Yang Maha Kuat, kuatkan kami dalam berusaha mengisi lembar putih diri dan institusi kami. Berikan kami kesabaran, kemampuan, intuisi dan lindungan-Mu untuk keberhasilan diri, keluarga dan organisasi kami. Ya Yang Maha Tinggi, tinggikanlah juga derajat kami semua, *Amin Ya Rabbal Alamin.*”

*Untuk buah hatiku tersayang, Kakak Wafa,
teruslah menulis,
tumpahkan rasa mu Nak,
kedalam goresan halus nan merdu...*

KAWAL MODERNISASI

Primandita Fitriandi

Aku tak menyangka umur penempatanku di bagian kepegawaian Kantor Pusat DJP cuma seumur jagung. Tidak lebih dari 4 bulan, aku sudah harus berkemas-kemas untuk pindah ke direktorat baru hasil modernisasi, Direktorat KITSDA.

Kuingat saat itu awal tahun 2007, direktorat baru, gedung baru, suasana baru, rekan kerja baru, itulah yang pertama menyapaku. Pertama aku berpikir, paling nanti aku masuk ke salah satu subdit transformasi kepegawaian, lha wong *background*-ku dari kepegawaian. Nota dinas keluar, dan *uups* ternyata aku ditempatkan di Subdit Investigasi Internal, unit terakhir yang kubayangkan akan kumasuki. Masih *blank* sama sekali akan pekerjaan di unit tersebut. Ditambah lagi ada salah satu rekan berkata, "Kasubditnya *workaholic* lho!" *Uups...* tambah *mencelos* hatiku.

Akhirnya bergabunglah aku di unit tersebut. Memang ternyata unit investigasi internal ini unit yang benar-benar baru, belum pernah ada unit di DJP yang menjalankan fungsi tersebut. Denger-denger dari orang sih, unit investigasi internal ini mempunyai fungsi seperti Polisi Militer (PM), Provost, Propam, KPK, cuma ruang lingkupnya hanya di DJP. "*Bismillah*, semoga semua lancar", doaku.

Hari pertama di Investigasi Internal, aku langsung menerima salinan tebal *handbook* dari IRS (*Internal Revenue Service-USA*). "Tolong di-*translate* ya, lalu presentasikan bersama teman-teman," kata Kasubdit. Ya, sebagai unit yang masih baru kami masih mendesain sistem yang cocok, dan cara yang paling mudah adalah dengan belajar dari unit-unit lain yang sudah *settle*. Bahkan kalau dipikir-pikir, siapa sih dari pegawai unit Investigasi Internal yang punya latar belakang intelijen dan investigasi, paling cuma kasubdit dan segelintir rekan-rekan yang lain. Bahkan saat itu tidak ada seorang pun di antara kami yang pernah mendapat pelatihan resmi tentang investigasi. Dengan sistem yang belum sempurna dan pengalaman yang minim, kami sudah harus berlari kencang untuk mulai bekerja melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin pegawai. Sampai-sampai Mr. Bill dari IRS, salah seorang *advisor* kami, mengatakan bahwa unit kami seperti

“*building airplane in the runway during take off*”. Kami benar-benar mulai dari nol, *learning by doing*.

Dan proses pengkaderan pun dimulai. Kasubdit turun tangan langsung untuk membina kami. Bagaimana melakukan pengumpulan data (*surveillance*), bagaimana menyusun pertanyaan dalam proses pemeriksaan, bagaimana melakukan wawancara dan permintaan keterangan secara efektif, bagaimana penyusunan laporan, dan sebagainya. Kami pun mencoba mencari sendiri pelatihan yang cocok buat kami, kerjasama dengan instansi luar DJP pun kami lakukan untuk sekedar berbagi pengalaman. Lama kelamaan akhirnya aku pun cukup mahir, dan yang tak bisa kupungkiri lama kelamaan aku menikmati juga pekerjaan ini. Tahu mengapa? Karena menantang dan mengasyikkan.

Salah satu sifat dari unit ini adalah harus *stand by* kapan pun tugas memanggil. Tak terbilang banyaknya lembur yang harus dijalani, bahkan pulang ke rumah lewat tengah malam sudah biasa dilakukan. Berapa banyak *weekend* yang harus direlakan untuk mengejar kasus yang sedang ditangani. Pekerjaan banyak? Ya memang banyak. Sampai saat ini pun jumlah pegawai yang bergabung denganku di unit investigasi internal masihlah jauh dari memadai untuk menangani semua kasus yang masuk. Jumlah pegawai yang baru bisa membentuk satu kesebelasan sepakbola tentunya juga tidak seimbang dengan pegawai DJP yang lebih dari 30.000 pegawai dan tersebar di seluruh Indonesia.

Pertama berada di unit ini aku sudah tahu bahwa pekerjaanku nanti pasti membuat diriku menjadi sosok yang tidak populer. Sering ada rekan bertanya, “Bener gak sih, KITSDA melakukan razia ke mal-mal?”. Ada juga yang bertanya, “Kalo ke lapangan, KITSDA juga memeriksa komputer ya?”. Kadang aku tertawa mendengar hal itu tapi bersyukur juga karena masyarakat DJP agak percaya akan desas-desus. Dan mereka menyebutnya “KITSDA”, padahal dari 5 subdirektorat di KITSDA hanya 1 subdirektorat yang melakukan fungsi “provost”, yaitu subdit Investigasi Internal. Pernah juga ada tindakan rekan DJP yang agak berlebihan, mereka memberikan ancaman terang-terangan ke kami, entah lewat sms atau intimidasi. Tentunya hal ini tidak kuharapkan, bagaimanapun juga yang kami lakukan hanyalah tugas dan kami harus menjalankannya sebaik mungkin sesuai peraturan yang ada. Tetapi itulah memang konsekuensi yang mau tidak mau harus siap kujalani.

Lalu apakah hal terberat yang harus kujalani di sini? Pekerjaan administrasi bagiku adalah suatu hal yang biasa. Pekerjaan yang berjibun dan lembur adalah hal yang biasa juga. Tetapi sejak kitab sakti yang kupakai berubah dari UU Perpajakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, maka yang terberat bagiku adalah seolah menjadi “Nemesis” bagi sesama pegawai DJP. Aku harus memeriksa pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai DJP dan juga membuat rekomendasi sanksi disiplin terhadapnya. Ya, aku seolah menjadi polisi, jaksa, dan juga hakim yang memutus perkara disiplin pegawai.

Coba deh bayangin, bagaimana rasanya mengetahui permasalahan rumah tangga teman satu kantor dulu. Bagaimana rasanya mengetahui teman seangkatan dipecat. Bagaimana rasanya ketika tiba-tiba teman terdekatku menjadi pihak yang diperiksa. Percaya gak temen-temen, setiap mau meneken LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang berisi rekomendasi sanksi disiplin, hatiku ini masih merinding. Membayangkan bahwa pegawai yang kena sanksi akan merosot drastis *take home pay*-nya, belum lagi konsekuensi mutasi yang mungkin menyertai dan stigma sosial yang terbentuk. Semoga aku tidak menzalimi hamba-Mu, ya Allah. Aku hanya menjalankan tugas dan *Insyallah* semua tugas yang aku lakukan adalah sesuai dengan ketentuan.

Satu hal yang kadang membuatku sedih adalah banyaknya pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin karena ketidaktahuan dan ketidakacuhannya. Mereka dijatuhi sanksi disiplin bukan karena dengan sengaja melakukan pelanggaran, tetapi karena keawaman dan ketidakacuhan mereka akan peraturan kepegawaian. Masih banyaknya perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai ketentuan membuktikan masih banyak pegawai DJP yang awam masalah ini, padahal ancaman sanksinya adalah berat. Belum lagi ada pegawai yang karena sakit/depresi dia tidak masuk kantor lebih dari setengah tahun tanpa ada pemberitahuan atau cuti, dan kemudian masuk kantor hanya untuk menerima surat pemberhentian. Banyaknya kasus pemeriksaan dan keberatan yang lewat waktu juga menunjukkan masih banyak pegawai yang tidak acuh akan prosedur. Sayang sekali kalau ada pegawai-pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin karena masalah seperti ini.

Tentunya tidak akan ada orang yang suka diperiksa, apalagi dijatuhi sanksi disiplin, tetapi DJP sebagai organisasi yang modern memang harus dilengkapi dengan fungsi penegakan hukum dan pengawasan internal yang kuat dan efektif. Pembangunan citra DJP sebagai institusi yang modern dan

bebas dari KKN akan segera terwujud apabila fungsi-fungsi pengawasan internal berjalan dengan efektif. Pada dasarnya pembinaan dan pengawasan internal pegawai dilakukan dengan lebih efektif oleh atasan langsung, bahkan diri kita semua juga bisa berperan dalam pengawasan internal di unit kerja masing-masing. Aku sebagai pegawai Subdit Investigasi Internal akan selalu berkomitmen untuk mengawal modernisasi. Misi inilah yang membuatku tetap bisa bertahan dan bekerja sebaik mungkin, tetapi kalian juga harus melakukannya kawan, tidak mungkin kami melakukannya sendiri. Marilah kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mengawal modernisasi DJP menuju terciptanya institusi yang lebih baik dan lebih bersih.

RENUNGAN HATI

Prasetyo Ajie

*“Apa yang tersimpan di hati sanubari kita, akan tertuang dalam pikiran kita
Apa yang kita pikirkan, akan terucap menjadi kata-kata
Apa yang menjadi ucapan dan prasetya kita, akan terwujud dalam perbuatan
dan tindakan
Apa yang telah kita perbuat, akan menjadi catatan nilai oleh orang lain
Penilaian orang terhadap kita, akan menentukan karir dan kesuksesan kita”*

Demikianlah kira-kira terjemahan puisi yang indah dari Mahatma Gandhi dari buku *“The Secret of Mindset”* yang telah kubaca sembilan bulan yang lalu. Sederhana memang tapi bagiku kalimat demi kalimat terasa begitu indah. Apalagi di saat-saat setelah pulang kantor aku dapat merenung sejenak, “apakah yang telah kukerjakan seharian tadi memberikan nilai tambah bagi staf bawahanku, atasanku dan kolegaku, atau jangan-jangan rapor merah untukku”.

Itulah luar biasa dahsyatnya manajemen perubahan reformasi birokrasi yang telah meresap membumbui jiwaku dengan warna yang jauh berbeda dari tiga tahun yang lalu. Kurasakan betapa mulianya para pemimpin yang telah mewujudkan pesan Mahatma Gandhi berpuluh tahun yang lalu, untuk memberikan kita baju yang baru dan lebih layak, membalut badan kita yang nyaris telanjang dan tidak mempedulikan rasa malu, sehingga kita saat ini menjadi birokrat yang lebih ber-etika dan bermartabat.

“Kok bisa ya?”, banyak pikiran kotor mengusik tidurku. “Apa kesalahanku luar biasa besarnya, apa sengaja aku disingkirkan, atau ini suatu amanah yang mulia untuk menempa jiwaku?” Kubayangkan saat itu anakku yang sedang lucu-lucunya dan baru melanjutkan ke TK besar, harus berpisah untuk sementara waktu karena papanya mendapat promosi di sebuah pulau di tengah Samudera Indonesia, sebuah pulau berukuran 200 x 80 km di ujung barat negeri kita tercinta, 300 km dari daratan Sibolga. Waduh, dari *home base*-ku di Bandar Lampung naik apa ya yang tercepat?

Segala macam cara aku lakukan untuk membuat batin istri dan anakku tegar, *ku-browsing* segala berita dan foto tentang Gunung Sitoli, maklum

baru setahun dilanda gempa dan sebagian tsunami. Bagiku ini adalah “*tour of duty*” yang sangat menantang. Memang pada realitanya semua yang terjadi tidak seindah yang kita rencanakan dan tak seburuk yang kita bayangkan.

Setelah menempuh 40 jam perjalanan via bandara Cengkareng - Jakarta menuju bandara Polonia - Medan, dilanjutkan ke Gunung Sitoli menggunakan pesawat yang berbeda, sampailah aku di tempat tugas yang baru. Aku telah resmi dilantik sebagai kepala seksi di kantor yang serba darurat karena bangunan lama telah hancur oleh gempa.

Enam bulan awal memang merupakan ujian terberat bagiku, karena bagaikan hidup di negeri yang serba asing dari segi bahasa, budaya, makanan dan yang terpenting alamnya yang kental dengan badai dan gempa. Dibenakku hanya terpikir untuk mencari jalan tercepat untuk pindah. Agustus 2007 aku pernah mencoba untuk mengikuti ujian beasiswa S2 di salah satu universitas ternama, kebetulan ada tawaran dari Kantor Pusat. Yah... namanya belum rejeki, karena walaupun memenuhi syarat untuk diterima di universitas itu, tapi aku belum berhasil mendapatkan beasiswanya. Kalaupun aku tetap ingin melanjutkan pendidikanku, harus dengan biaya sendiri. Masih kuingat dengan jelas suara pihak universitas yang menelponku pada hari Jumat jam 9 pagi, yang kala itu memberitahukan perihal terpenuhinya syarat untuk mengikuti kuliah di universitas tersebut. Tapi nggak jadi soal, aku ikhlas kok. Tujuanku kan sudah tercapai karena aku sudah dinyatakan memenuhi syarat. Mungkin aku harus lulus test untuk memperoleh MLB (Master Lompat Batu) dulu di Bawomataluo.... he he he.

Mei 2008 aku berkesempatan ikut Diklatpim IV selama 6 minggu di Magelang. Dalam diklatpim ini aku mulai diperkenalkan dengan *out bond* dan beberapa materi baru. Materi tentang kecerdasan yang dimiliki setiap manusia mengenalkan aku pada proses kesuksesan seseorang untuk menjadi seorang *manager* yang handal sampai akhirnya menjadi seorang *leader* yang bijaksana. Melalui materi ini, terjawablah sudah kegalauanku selama ini dalam menghadapi proses kehidupan yang setiap manusia wajib melaluinya. Kuucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melindungiku dan telah menunjukkan jalan sehingga aku masih melangkah melalui rel yang jelas.

Kecerdasan intelektual (*hard skill*) ternyata masih jauh dari cukup karena baru memberikan porsi 25% saja. Kita masih perlu untuk

memperdalamnya dengan kecerdasan emosional (*soft skill*) yang berperan 50%, yang secara alamiah akan menimbulkan gaya kepemimpinan yang lebih spesifik sebagai seni untuk mengatasi kesulitan dalam bergaul, berinteraksi, mengembangkan diri dan berperilaku dalam menyelesaikan pekerjaan. Kecerdasan Spiritual melengkapi 15% lainnya yang secara kodrati akan selalu mengingatkan kita untuk bekerja semata-mata untuk mendapat ridha Allah SWT, karena Sang Khalik akan sangat membenci hambaNya yang berbuat melampaui batas dalam hal apapun. Sedangkan 10% pelengkap puncak kesuksesan adalah kecerdasan adversitas yang berhubungan dengan lamanya seseorang terlarut dalam suasana hati yang tidak menentu. Makin tinggi kesediaan dan mental seseorang untuk bertanggung jawab atas kegagalan atau kesulitan yang menghadang, sekalipun tidak berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi, makin tinggi usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Sungguh sebuah pelajaran yang sangat membantuku dalam memaknai hidup.

Dua puluh bulan sudah aku jalani tugas di Gunung Sitoli. Sensor syaraf reflektu sudah sangat terlatih jika ada gempa. *Travelling* menjadi *hobby* baruku, di mana pun ada tempat wisata yang menarik aku tak pernah absen mengabadikannya melalui jepretan kamera mungilku. Empat daerah di ujung mata angin Pulau Nias sudah aku kunjungi, bahkan naik pesawat SMAC (jenis *Casa*) ke Padang via pulau Telo pernah aku coba dua kali. Dari ketinggian sana, sangat indah terlihat pemandangan Pulau-pulau Batu, Pulau Tanabala dengan koralnya dan sebageian Kepulauan Mentawai, “*Ya’ahowu Feifu...!*”

Setelah mengikuti Diklat Sistem Administrasi Modern (SAM) tanggal 9 September 2008 di Hotel Niagara Danau Toba, secara resmi reformasi birokrasi mulai diberlakukan di wilayah kami. Kantorku di Gunung Sitoli direstrukturisasi menjadi KP2KP. Posisi sementara saat itu aku ditugaskan sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan di KPP Pratama Sibolga. Selain masih menjalankan tugas pendataan dan penilaian, aku juga ditugaskan untuk melakukan himbauan untuk ber-NPWP bagi yang penghasilannya di atas PTKP dan memiliki properti yang potensial. Aku harus belajar dan terus belajar agar bisa mengikuti peraturan dan transformasi proses bisnis yang cepat berkembang, dengan berpedoman pada uraian jabatan dan *Standard Operating Procedure*. Di sisi lain, aku selalu berusaha menerapkan kode etik secara adil kepada staf bawahanku yang sebagian berumur jauh lebih tua. Horas!!!

Empat bulan berkantor di Sibolga dengan remunerasi setengah modern tidak membuat semangatku lemah dalam bekerja, paling tidak biaya sosialku saat itu semakin rendah dibandingkan dengan tempat tugasku sebelumnya. Tepat 31 Desember 2008 aku pindah tugas lagi ke kantor wilayah di kota Pematang Siantar. Walaupun belum mendekati *home base*, paling tidak aku sudah menerima remunerasi penuh sebagaimana rekan-rekanku yang telah menikmatinya lebih dahulu dan semakin mudah untuk pulang dengan tiga jam perjalanan menuju Medan.

Setelah kurenungi kembali dalam delapan bulan berada dalam ikatan modernisasi DJP, suasana bekerja saat ini jauh lebih nyaman dan pasti. Kenyamanan ini membuat aku tidak ragu lagi untuk senantiasa bekerja secara disiplin, menolak rayuan melanggar kode etik dan menegur bawahan yang tidak *perform*. Aku berharap dan selalu mendoakan agar seluruh birokrat di negeri Indonesia tercinta ini secepatnya dapat menikmati reformasi birokrasi tanpa terkecuali dan secara proporsional di seluruh lapisan jabatan. Kuncinya asalkan kita bersedia memulainya dari diri kita sendiri, di saat sekarang, dan untuk hal-hal yang terkecil dalam pekerjaan. Amin.

NASIONALISME DI LEBATNYA RIMBA

Ari Pardono

Pengalaman ini menjadi pengalaman yang paling berkesan selama aku menjadi pegawai DJP. Aku menemukan banyak nilai kehidupan yang tidak aku dapatkan sebelumnya, karena nilai patriotisme dan nasionalismeku seakan bangkit kembali. Pengalaman ini berawal ketika aku mendapat tugas dari kantor untuk mendampingi Tim Dispenda untuk melakukan sosialisasi sekaligus penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) ke sebuah kecamatan terpencil di sebuah kabupaten di Kalimantan Barat. Perjalanan ke kota itu membutuhkan waktu yang tidak singkat yaitu 6 jam dari ibu kota kabupaten bila kondisi jalan bagus. Bersama dengan seorang kawan dari kantor dan Tim dari Dispenda Kabupaten kami



menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Perjalanan ke lokasi ditempuh

dengan sepeda motor, karena medan yang berbukit-bukit membuat moda roda empat susah untuk menjangkaunya.

Kondisi cuaca hari itu berawan gelap sehingga berpotensi untuk turun hujan. Cuaca akhirnya menjadi pertimbangan kami untuk segera berangkat awal dari jadwal yang telah disepakati sebelumnya yaitu jam 2 siang, maju menjadi jam 1 siang. Selama perjalanan sesekali kami beristirahat. Setidaknya 2 kali kami beristirahat, pertama kali saat hujan datang, kami harus mengamankan SPPT PBB yang kami bawa agar tidak basah, dengan mengganti kardus yang berisi SPPT dengan tas plastik yang kami beli di warung. Istirahat kedua kami lakukan untuk melemaskan otot-otot agar tidak kaku. Semakin jauh perjalanan yang kami tempuh justru hujan semakin lebat, padahal kami tidak mungkin istirahat lagi karena akan menambah waktu dan akan tiba di tempat tujuan semakin malam. Perjalanan tetap berlanjut.

Kira-kira jam 8 malam akhirnya kami sampai juga di Kota Tanah Pinoh tempat tujuan kami untuk mengadakan sosialisasi dan menyampaikan SPPT PBB. SPPT PBB yang kami bawa *alhamdulillah* kondisinya baik, sehingga bisa disampaikan kepada petugas kecamatan untuk dibagikan kepada kepala desa sebelum didistribusikan ke Wajib Pajak. Karena di kota kecil ini tidak ada penginapan akhirnya kami menginap di rumah saudara dari pegawai Tim Dispenda. Kami disambut hangat oleh tuan rumah karena mereka tahu perjalanan kami sangat panjang dan melelahkan.

Acara sosialisasi dilaksanakan di aula kantor kecamatan dan dimulai jam 9 pagi keesokan harinya. Acara diawali dengan pembukaan oleh Bapak Camat yang kebetulan baru dilantik, sehingga acara diiringi dengan perkenalan terlebih dahulu. Di depan para kepala desa yang hadir, Bapak Camat menghimbau agar SPPT PBB dapat disampaikan kepada Wajib Pajak jauh hari sebelum jatuh tempo pembayaran untuk menghindari sanksi administrasi. Tidak lupa juga beliau menyampaikan bahwa PBB adalah pajak yang alokasi pembagiannya dikembalikan ke daerah lagi, sehingga dampaknya akan dirasakan oleh warga kembali dalam bentuk proyek-poyek pembangunan di daerahnya. Bahasa yang digunakan sederhana sehingga banyak di antara peserta yang hadir mengangguk kepala tanda mengerti.

Setelah Bapak Camat menyampaikan sambutan sekaligus pengarahan, giliran kedua yaitu pengarahan yang disampaikan oleh Tim dari Dispenda Kabupaten. Tim ini menyampaikan program-program dari Dispenda untuk

kegiatan di wilayah kecamatan Tanah Pinoh. Diantaranya rencana kegiatan pembangunan dan apresiasi bagi daerah yang dapat melunasi pembayaran PBB paling awal. Dispenda memberi apresiasi khusus untuk masalah ini dalam wujud pemberian sarana penunjang kegiatan kantor misalnya mesin ketik atau komputer. Disampaikan juga bahwa Tim PBB diikutsertakan dalam acara sosialisasi kali ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta apabila ingin mengungkapkan permasalahan PBB yang selama ini menjadi kendala di lapangan.

Berikutnya giliran kami untuk menyampaikan sosialisasi PBB di hadapan para peserta yang hadir. Sosialisasi yang paling awal adalah pentingnya PBB bagi pembangunan di daerah, kemudian kondisi PBB di daerah Tanah Pinoh yang semakin hari semakin naik nilainya karena selain naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), juga semakin banyak jumlah wajib pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini semakin ramai dan berarti pembangunannya sangat pesat.

Kami juga membuka forum tanya jawab untuk mengetahui lebih jauh respon peserta acara ini dan tentu saja permasalahan-permasalahan teknis PBB yang ingin mereka ketahui lebih dalam. Banyak peserta antusias dalam forum ini sehingga tanpa terasa waktu yang diberikan kepada kami sudah habis. Untuk acara-acara seperti ini, pihak panitia dalam hal ini kecamatan, membatasi waktunya maksimal jam 12 siang harus sudah selesai, mengingat kepala desa yang hadir berasal dari desa-desa yang sangat jauh lokasinya. Rata-rata mereka harus menempuh perjalanan empat jam untuk mencapai ibu kota kecamatan. Sehingga apabila acara jam 9 pagi mereka berangkat dari rumah subuh dini hari dan apabila acara selesai jam 12 siang mereka akan kembali lagi sampai rumah jam 4 sore. Kondisi inilah yang membuat aku bersama kawanku semakin paham bahwa PBB yang kelihatannya sangat sederhana ternyata banyak aspek yang terpengaruh. Besarnya ketetapan PBB tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan, tapi justru di sinilah aku dan kawanku menemukan sebuah nilai kehidupan, yaitu kesadaran dan kepatuhan sebagai warga negara.

Kesadaran sebagai warga negara dan kepatuhan itu muncul ketika di ujung acara tiba-tiba datang seorang kepala desa yang terlambat. Begitu turun dari ojek yang mengantarnya, sang kepala desa langsung menuju petugas untuk mengambil SPPT PBB dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Proses itu tidak lama, mungkin hanya berlangsung selama 30 menit, dan sang kepala desa pun bersiap-siap kembali untuk

pulang. Sesaat sebelum pulang, bapak itu bercerita bahwa dia terlambat karena jalan yang dilaluinya rusak berat sehingga perjalanannya menempuh waktu yang lumayan lama. Kalau biasanya waktu maksimal yang diperlukan 6 jam, kini dia harus memutar mencari jalan baru sehingga hampir menghabiskan 8 jam perjalanan. Total perjalanan yang dia butuhkan waktu itu berarti 16 jam perjalanan pulang pergi hanya untuk mengambil SPPT PBB yang nilai total ketetapannya tidak sampai 500 ribu rupiah dalam satu desa.

Pengalaman inilah yang membawa kesan mendalam bagiku, bahwa nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme masih tertanam kuat di lubuk hati seorang kepala desa yang tinggalnya nun jauh di sana, di balik bukit-bukit kecil di Kalimantan Barat. Dengan pengorbanan yang tinggi, sang kepala desa rela menempuh perjalanan jauh sebagai bukti kesetiaan warga negara akan kewajibannya sebagai pembayar pajak. Rasa tanggung jawab aparat pemerintah beliau tunjukkan dengan sungguh-sungguh menyampaikan SPPT pada warganya.

Sebagai informasi, sebagian wilayah Kalimantan Barat berbatasan dengan negara Malaysia. Bahkan di kota tempat kami melakukan sosialisasi, siaran radio negara tetangga terdengar jelas. Di saat akhir-akhir ini rasa nasionalisme terkikis, ternyata kami masih menemukan nilai patriotisme di daerah-daerah terpencil di sela-sela lebatnya rimba di pedalaman Kalimantan, padahal nikmatnya pembangunan belum sepenuhnya mereka rasakan. Di saat kami mengadakan acara tersebut PLN mengadakan giliran pemadaman, listrik menyala hanya dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi, sehingga acara tersebut terselenggara dengan menggunakan *wireless* dan listrik diperoleh dari tenaga diesel.

Di era modern ini marilah kita tunjukkan semangat patriotisme sebagai pegawai pajak dengan bekerja sebaik-baiknya. Kita masih beruntung menikmati tunjangan lebih dari pegawai negeri biasa. Bandingkan dengan kepala desa di atas, tunjangan yang mereka terima mungkin jauh dari yang kita nikmati saat ini. Tetapi pengorbanan yang tulus mereka tunjukkan dengan kesungguhan mereka untuk memungut pajak bagi warganya. Meskipun kehidupan di negara tetangga lebih menggiurkan, fasilitas negara tetangga juga kondisinya jauh lebih baik, tetapi ada nilai dari pajak yang selama ini jarang kita ungkap ke permukaan, “bahwa pajak adalah salah satu ikatan warga negara pada bangsanya, di dalamnya terkandung nilai nasionalisme dan patriotisme yang tinggi”.

Untuk : Erwin, kita menemukan tokoh Laskar Pelangi pada Kepala Desa itu.

SI HITAM MANIS

Suwandi

Beberapa tahun yang lalu, dalam suatu diklat kedinasan, kami peserta diklat tersebut sepakat membeli jaket hitam potongan semi jas sebagai kenang-kenangan atas kebersamaan kami selama mengikuti diklat. Hal pencantuman tulisan yang melingkari lambang Departemen Keuangan pada dada sebelah kiri, menjadi perdebatan alot kami. Beragam usulan yang masuk mengenai redaksi tulisan itu. Tanpa menjelaskan alasan, saya termasuk yang tidak mengharapkan adanya tulisan Direktorat Jenderal Pajak. Cukup dengan tulisan nama diklat yang kami ikuti dan diikuti tulisan Departemen Keuangan di bawahnya. Namun keputusan suara terbanyak menghendaki tulisan berbunyi “Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan”.

Sejujurnya saya sangat suka warna dan model potongan “si hitam manis” ini karena sudah sembilan bulan sepuluh hari saya ngidam untuk memiliki jaket model tersebut. Tapi rasa suka saya pada si hitam manis tidak berjalan mulus hanya karena “cacat kecil” berupa goresan berbunyi “Direktorat Jenderal Pajak”. Memang kenapa dengan tulisan itu? Itulah yang saya ingin bagi ceritanya.

Pada suatu penyuluhan pajak yang pesertanya adalah para bendahara gaji perguruan tinggi swasta se Kota Makassar, saya mendapat serangan dahsyat dari seorang peserta yang sangat apriori pada “orang-orang pajak”. Di saat saya menyampaikan materi sanksi perpajakan jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, saya diinterupsi seorang peserta dengan nada amarah, “Pak, tidak usahlah bicara sanksi-sanksi kepada Wajib Pajak, kenakan dulu sanksi kepada pegawai pajak yang suka korupsi”. Saya belum sempat membuka bibir memberi tanggapan, dia kembali melanjutkan ‘orasinya’ bahwa orang tuanya yang pengusaha bahan bangunan dikenakan tagihan pajak ratusan juta rupiah, hanya karena gagal ‘bernegosiasi’ dengan pemeriksa pajak. “Kami kenal pegawai pajak yang golongan II tapi punya rumah mewah dan hampir tiap tahun ganti mobil...” lanjutnya. “Sudahlah bos tidak usah sok idealis...” Begitu bapak itu mengakiri interupsinya. Jantung saya tiba-tiba berdenyut kencang, muka bias, lutut gemetar, dan

keringat dingin mengalir. Saya nyaris roboh. Saya masih bersyukur acara penyuluhan tanpa moderator itu akhirnya selesai juga dengan susah payah.

Di lain waktu, saat diadakan *talk show* tentang *gijzeling* di Hotel Sahid Makassar yang pembicara utamanya adalah Kakanwil XII DJP Sulselra, seorang wartawan dari media cetak memberi tanggapan negatif terhadap pegawai pajak yang katanya harus lebih dahulu disandera sebelum Wajib Pajak disandera. Bahkan melontarkan istilah “orang bijak taat pajak tapi orang pajak tidak bijak”.

Satu lagi “*memory indah*” dari lapangan penyuluhan, yaitu saat mendampingi kepala kantor pada acara sosialisasi pajak melalui salah satu radio swasta ternama di Makassar. Seorang penelpon di acara tersebut dengan sinis menggambarkan orang pajak yang katanya suka memeras. Dia mengatakan bahwa PAJAK itu adalah singkatan dari Padamu Aku Janji Akan Korupsi.

Petikan-petikan kalimat sinis terhadap pegawai pajak seperti itulah yang membuat saya tidak terlalu bangga dikenali sebagai pegawai pajak. Termasuk tidak mencintai sepenuh hati jaket “hitam manis” saya, hanya karena dia bertuliskan kata “Direktorat Jenderal Pajak”. Di beberapa kesempatan saya lebih sering memperkenalkan diri sebagai PNS atau sedikit lebih khusus PNS Departemen Keuangan.

Saat kita mendengar kritik pedas seperti yang saya kutip dan mungkin ada yang lebih pedas dari itu. Kita memang sakit hati, marah, atau malu tapi bagaimana lagi, lontaran kritik pedas masyarakat itu mungkin ada benarnya. Saya teringat nasehat mulia yang berbunyi “kritikan ibarat orang minum jamu, pada saat sedang diminum pahit memang terasa tapi akan membuat tubuh kita sehat pada keesokan harinya.” Saya sangat bersyukur bahwa kritikan, cercaan, makian dan sejenisnya yang dialamatkan pada DJP ditanggapi sebagai masukan berharga oleh penentu kebijakan sehingga lahirlah program modernisasi DJP yang saat ini mulai memberi titik harapan. Survey lembaga ternama telah menempatkan DJP pada posisi ranking korupsi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Kembali ke jaket, apakah sekarang saya masih tidak pede dengan jaket yang bertuliskan DJP? Tentu tidak! Sekarang jamannya sudah lain. DJP sekarang bukan DJP yang dulu lagi. Jangan kata jaket yang hanya bertuliskan DJP, kalau sekarang ada yang jual baju batik bermotif tulisan DJP, saya yang akan pertama beli. DJP telah menjadi contoh institusi yang berhasil dalam reformasi birokrasi. Jadi apa lagi yang menghalangi

kebanggaan saya sebagai pegawai DJP? Kinerja sudah mulai diakui dan imbalan penghasilan lebih dari cukup.

Saya berharap di sisa waktu kebersamaan saya dengan DJP yang makin cuanntiik saja, saya akan memberikan kenangan indah, termasuk jadi pembela setia jika ada yang menjelek-jelekkkan DJP lagi. Yah, saya akan berkata, “Kalau Anda punya bukti orang pajak melakukan penyimpangan, laporkan! Tapi kalau itu fitnah, jangan dikira kami diam!” Tegas, berwibawa, dan *pede*. Tidak seperti dulu digertak peserta penyuluhan yang belum punya NPWP, saya sudah kencing di celana. Atau saya akan katakan bahwa PAJAK itu adalah akronim dari Padamu Aku Janji Akan Kembali, maksudnya pajak ditarik dari rakyat tapi akan kembali lagi pada mereka. Tanpa saya sadari kebanggaan pada DJP telah tertular tuntas pada istri saya. Itu terdengar jelas dari kalimatnya yang berulang kali mengharapkan anak-anak kami kelak bisa menjadi pegawai pajak dan saya komentari, “Yah..., paling tidak mereka dapat suami orang pajak seperti ibunya.”

Saat tulisan ini naik cetak, usia jaket hitam manis kesayanganku sudah enam tahun lima bulan. Tapi di usianya yang sudah senja, dia masih terlihat rapi-jali dan klimis-manis. Dia masih menjadi pilihan utama mendampingi tuannya bila bepergian naik pesawat dan bila suatu waktu anda bertemu dengannya di bandara, jangan lupa menyapanya. Panggil namanya dengan jelas, pastilah tuannya akan ikut tersenyum ramah dan berkata bangga “Saya pegawai Direktorat Jenderal Pajak”.

ESPRIT DE CORPS

Nufransa Wira Sakti

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelesaikan modernisasi tahap pertama di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pusat pada tahun 2008. Modernisasi ini diawali pada tahun 2002 dengan dibentuknya dua buah KPP Wajib Pajak Besar beserta Kantor Wilayah DJP (Kanwil) Wajib Pajak Besar. Berawal dari *pilot project* di kantor tersebut, akhirnya dikembangkanlah model pelayanan berbasis fungsi serta pengawasan yang ketat terhadap aparturnya. Sebagai kompensasi, diberikan remunerasi lebih besar bila dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi lain.

Setelah sempat terlibat dalam pengembangan sistem perangkat lunak dan perangkat keras serta implementasi di tahap awal modernisasi, saya tidak lagi terlibat secara langsung dalam pengembangan modernisasi di KPP selanjutnya. Hal ini disebabkan karena saya mendapatkan tugas untuk melanjutkan sekolah ke jenjang S3 (strata tiga) di Niigata, Jepang, terhitung mulai bulan April tahun 2005. Pada saat itu, selain Kanwil Wajib Pajak Besar, beberapa KPP di bawah Kanwil Khusus dan Kanwil DJP Jakarta I (saat ini Kanwil DJP Jakarta Pusat) telah mulai menerapkan modernisasi, dimana khusus Kanwil DJP Jakarta I adalah dengan dibentuknya KPP Pratama yang merupakan penggabungan KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa).

Selama masa belajar di Jepang, berita tentang DJP serta perkembangan tahapan modernisasi dapat diakses melalui situs-situs berita yang ada di internet. Walaupun hanya membaca dari berita di media massa, namun informasi yang didapatkan dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai modernisasi di DJP.

Untuk bersosialisasi dengan sesama pelajar, mahasiswa dan alumni yang sedang atau telah selesai melanjutkan sekolah di Jepang, saya juga aktif di organisasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang serta PPI Niigata. PPI Jepang beranggotakan semua mahasiswa/pelajar yang akan, sedang atau pernah bersekolah di Jepang. Oleh karena itu, anggotanyapun beragam profesi seperti anggota PNS, pegawai swasta, dosen, peneliti dan lain-lain.

Karena jaraknya berjauhan, komunikasi antar sesama anggota PPI dilakukan melalui email dengan memanfaatkan fasilitas *mailing list* (milis).

Dengan beragamnya anggota, pembahasan/topik dalam milis pun tidak kalah beragamnya. Mulai dari pembahasan tentang perkembangan politik di tanah air sampai dengan tips mencari universitas di Jepang dibahas di milis ini. Karena tak sedikit yang berstatus PNS, banyak juga topik yang disampaikan berhubungan dengan sistem pemerintahan serta kualitas pelayanan publik di tanah air. Tak jarang pembicaraan berubah menjadi kritik tajam bahkan argumentasi tentang topik yang sedang dibahas.

DJP sebagai institusi pelayanan publik di tanah air juga tak luput menjadi salah satu topik yang sering dibahas. Biasanya yang dibahas adalah pelayanan KPP sebagai ujung tombak DJP, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu peraturan perpajakan terbaru yang berhubungan dengan penduduk di luar negeri juga sering dibahas, contohnya adalah: pembayaran fiskal luar negeri, kewajiban sebagai Wajib Pajak luar negeri serta tata cara lainnya.

Sebagai pegawai DJP, saya merasa terpanggil untuk memberikan sedikit penjelasan dalam milis tersebut tentang hal yang dibahas melalui peraturan perpajakan yang berlaku. Tentunya setelah berdiskusi dengan kolega DJP di Indonesia yang menangani secara langsung serta mendalami sumber peraturan perpajakannya. Namun demikian, terkadang perdebatan seru di dalam milis tersebut menghadapi jalan buntu ketika sampai pada pembahasan mengenai ulah beberapa pegawai DJP yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pengalaman buruk anggota milis di KPP disertai kritik tajam terhadap pelayanan di KPP membuat kuping terasa panas. Berdasarkan fakta yang dialami sendiri oleh beberapa anggota PPI Jepang, pada waktu itu memang banyak terjadi keluhan terhadap pelayanan pegawai di KPP. Maraknya aksi tidak bertanggung jawab tersebut memang terjadi pada saat transisi menuju proses modernisasi. Situasi ini membuat saya tidak bangga menjadi pegawai DJP. Beberapa pembahasan mengenai pelayanan di KPP tidak lagi menarik untuk dijawab karena khawatir akan berakhir pada kelakuan oknum DJP.

Setelah beberapa lama, muncul sebuah tulisan mengenai pelayanan di KPP yang disampaikan dalam milis. Dalam tulisan itu, seorang alumni PPI, yang sekarang menjadi salah seorang direktur di perusahaan PMA yang berlokasi di Bekasi, menceritakan pengalamannya dalam berinteraksi dengan pelayanan di KPP. Pelayanan yang dimaksud adalah tentang

pengajuan restitusi PPN yang menurut beliau biasanya “*kembali 50% itu bagus, bisa 70% excellent.*” Setelah diajukan proses restitusi, ternyata pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit dan cepat. Yang lebih mengejutkan buat beliau adalah uang perusahaannya kembali 100% sesuai dengan permohonan. Hal ini sangat memberikan kepuasan baginya. Ditambah lagi, saat ada sosialisasi mengenai kewajiban ber-NPWP bagi karyawan di kantornya, petugas KPP yang datang tidak mau menerima apapun dari kantor tersebut, termasuk makan siang sekalipun. Berikut saya tampilkan tulisan tersebut:

Reformasi di Kantor Pajak

Ketika Departemen Keuangan mencanangkan reformasi birokrasi saya skeptis. Isu yang muncul ketika itu seolah pusat reformasi ini pada sistem remunerasi. Apa iya kalau gaji pegawai diperbaiki lantas mereka berhenti korupsi? Suatu ketika saya diundang menghadiri sosialisasi masalah perpajakan oleh KPP Karawang. Waktu itu pembicaraannya adalah Kakanwil Ditjen Pajak Jawa Barat. Isi pembicaraannya lagi-lagi soal reformasi di Kantor Pajak. [Ketika itu saya juga skeptis.](#)

Sekitar 3 bulan yang lalu, perusahaan tempat saya bekerja mengajukan restitusi PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi. Jumlahnya lumayan untuk ukuran sebuah PMA berskala kecil. Semua dokumen saya lengkapi, lalu permohonan saya ajukan. Saya ketar ketir. Di masa lalu restitusi PPN adalah salah satu objek perasan petugas pajak. Suara-suara di sekitar saya bernada sama soal ini. “Kembali 50% itu bagus, bisa 70% *excellent.*”

Meski yakin tidak ada yang salah dengan dokumentasi perpajakan perusahaan kami, saya tetap ketar ketir. Salah satunya karena trauma masa lalu. Ada saja kesalahan yang diungkit petugas pajak untuk membuka pintu negosiasi soal imbalan kalau nanti dana yang direstitusi sudah cair. Kali ini pun saya pasrah. Pokoknya serahkan saja dulu aplikasinya, kalau ada “masalah” ya siap-siap negosiasi.

Prosesnya berjalan relatif cepat. Setelah beberapa kali diminta melengkapi dokumen, disertai kunjungan petugas, akhirnya saya dapat kabar bahwa restitusi kami disetujui, nyaris tanpa koreksi. Sejauh prosesnya berjalan, tidak ada isyarat dari petugas untuk minta sesuatu.

Situasi ini jelas membingungkan buat saya. Biasanya belum-belum sudah ada bisik-bisik, isyarat, dan lain-lain. Bagaimana saya harus bersikap? Kalau saya tawarkan sesuatu, saya khawatir dituduh menawarkan suap. Kalau saya diam saja, bisa-bisa masalah perpajakan saya dipersulit di masa depan.

Dalam hati saya bertekad, sebisa mungkin saya tidak ingin memberi sesuatu ke petugas pajak. Sejauh yang sudah berjalan, saya lihat sudah ada beberapa perbaikan nyata dalam pelayanan mereka. Tapi soal uang imbalan ini adalah soal yang paling krusial. Kalau saya tawarkan sesuatu, meski mereka tidak meminta, boleh jadi mereka juga tidak akan menolak. Kalau itu terjadi, saya justru turut berperan dalam merusak tatanan baru yang dicanangkan lewat reformasi birokrasi.

Konsultasi juga saya lakukan dengan teman-teman yang punya kepedulian tentang masalah ini. Ada yang masih menjalankan tradisi lama, memberi sesuatu pada petugas, dan petugas itu menerimanya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk tidak memberi apapun ke petugas.

Akhirnya tadi pagi staf saya memberi tahu bahwa uang restitusi sudah masuk ke rekening kami. Sekali lagi saya sempat bingung harus berbuat apa. Nah, kebetulan hari ini atas undangan kami datang 2 orang petugas dari Seksi Pelayanan KPP Madya Bekasi untuk menjelaskan soal kewajiban punya NPWP kepada karyawan perusahaan kami. Ketika penyuluhan selesai, pas jam makan siang. Saya tawarkan kepada mereka untuk makan siang bersama. Tapi mereka menolak.

Di masa lalu, adalah lumrah kalau perusahaan menjamu makan petugas pajak. Di situ negosiasi dapat dimulai. Kali ini petugas sepertinya benar-benar menutup peluang itu. Meski mereka bukan petugas yang tadinya mengurus restitusi saya, sikap mereka ini bagi saya mewakili sikap institusi. Maka tekad saya bulat. Sama sekali tidak perlu memberi imbalan kepada petugas. Kalau itu saya lakukan saya melanggar hukum. Dan lebih buruk lagi, saya merusak tunas reformasi yang sebetulnya juga saya harapkan untuk tumbuh dan berkembang.

Tulisan ini adalah wujud rasa syukur saya atas perubahan di Kantor Pajak. Perubahan ini tentu belum mencerminkan hasil reformasi secara menyeluruh. Tapi serpihan peristiwa ini bagi saya adalah titik penting bagi perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Reformasi adalah soal perubahan mind set. Petugas pajak sudah menunjukkan perubahan itu. Masalahnya, bisakan Wajib Pajak mengubah mind set mereka? Saya sendiri merasakan betapa sulit mengubah mind set itu. Perlu banyak konsultasi hingga saya sampai pada kesimpulan bahwa petugas pajak sudah berubah.

Bagi mereka yang selama ini diuntungkan oleh kebusukan petugas pajak, cerita seperti yang saya alami ini boleh jadi merupakan lonceng kematian buat mereka. Semoga petugas pajak bisa konsisten, termasuk dalam menangani para Wajib Pajak yang nakal. Dari saya, sikap petugas pajak ini semakin mempertebal komitmen saya untuk senantiasa mengelola urusan perpajakan secara sah.

Hasanudin Abdurakhman
Direktur PT. Osimo Indonesia
11 November 2008

Apalagi yang menulis surat tersebut adalah seseorang yang biasanya paling keras dan tajam dalam memberikan kritik. Dengan perasaan suka cita, tulisan tersebut langsung saya teruskan kepada beberapa teman DJP untuk membacanya. Tanpa disangka, tulisan tersebut menjadi penyemangat bagi para pegawai di lingkungan KPP tempat perusahaan PMA tersebut terdaftar, bahkan sempat dibacakan dalam suatu acara internalisasi nilai-nilai organisasi DJP sebagai media untuk menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas pelayanan yang telah diberikan kepada WP.

Setelah adanya surat tersebut, *esprit de corps* serta rasa percaya diri saya bangkit kembali di milis PPI. Saya kembali dengan suka cita mencoba untuk menjawab berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan. Tidak ada lagi nada sinis yang ditujukan pada DJP, paling tidak sampai saya menyelesaikan sekolah pada akhir Maret 2009. Sebuah pengalaman yang menyenangkan.

Di atas itu semua, ada hal yang lebih penting lagi dalam proses modernisasi ini; yaitu untuk mempertahankannya. Proses modernisasi bukan suatu hal yang mudah, dan mempertahankannya juga tidak jauh lebih mudah. Jangan sampai *esprit de corps* bagi seluruh karyawan DJP yang sudah bangkit akhirnya terkubur kembali karena tidak bisa mempertahankannya. Mudah-mudahan seluruh pegawai DJP dapat mempertahankannya.

JAM KANTOR

Agus Dwi Putra

Tik...tak..tik...

Jam menunjukkan pukul 16.40. Itu berarti dua puluh menit lagi sebelum waktu absen pulang. Saat kutengok sekali lagi, jam hitam itu, entah sejak kapan bergantung di dinding sebagai penunjuk waktu bagi para pegawai, sudah mengangkat lengan panjangnya ke angka sepuluh.

Di meja kerja surat-surat bertumpuk saling berebut tempat. Surat terakhir datang dari salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lima menit yang lalu, dengan diantarkan langsung oleh petugas pengiriman. Jam hitam tadi tertawa, menggoda aku yang ingin pulang tenggo. Tik... tak... tik...

Alih-alih bergegas meng-*input* surat masuk, ingatanku meloncat mundur pada hari pertamaku diterima di sana. Ketika itu aku dan temanku menghadap Kepala Bagian Umum dengan membawa Surat perihal magang bagi lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kami diberikan penjelasan mengenai jam kerja di Direktorat Jenderal Pajak. “Di Pajak, kerja dimulai pukul setengah delapan. Sekarang kita sudah pakai *fingerprint*. Jadi, lewat sedetik pun akan terekam sebagai terlambat,” demikian kurang-lebih penjelasan dari Kabag Umum.

“Sudah tahu belum”, lanjut beliau, “pukul berapa absen pulang?”

“Jam lima sore, Pak.”

“Ya,” ujarnya membenarkan. “Tetapi, pada dasarnya, itu adalah waktu pulang minimal. Kalau dirasa pekerjaan menumpuk dan harus segera diselesaikan, absenlah dulu jam lima sekadar supaya tidak lupa, kemudian lanjutkan bekerja maksimal sampai jam sepuluh malam.”

Bagian terakhir ini membuatku heran. Secara tidak langsung, itu berarti bahwa waktu untuk pulang yang sebenarnya disesuaikan dengan volume pekerjaan masing-masing, tidak mesti selalu pukul 17.00. Betapa persepsi lama menghendaki diriku untuk melabelkan pembicaraan ini sebagai *lip service* belaka. Dengan memperhatikan apa yang secara umum menjadi citra pegawai negeri selama ini, terasa benar kata-kata itu mengawang-awang saja di ruang benakku.

Baiklah, pikirku sedikit berdamai dengan keheranan ini, Departemen Keuangan telah melakukan reformasi birokrasi, yang termasuk juga di dalamnya menyangkut kedisiplinan pegawai. Maka masih dapat kumengerti apabila pukul 17.00 ditetapkan sebagai waktu pulang. Namun, belumlah bisa kucerna kalau jam segitu ternyata merupakan waktu minimal untuk absen pulang. Bahwa penekanan jam kerja ada pada tanggung jawab pribadi terhadap pekerjaan, bukan lagi aturan kaku yang serta-merta minta ditaati.

Tik... tak... tik...

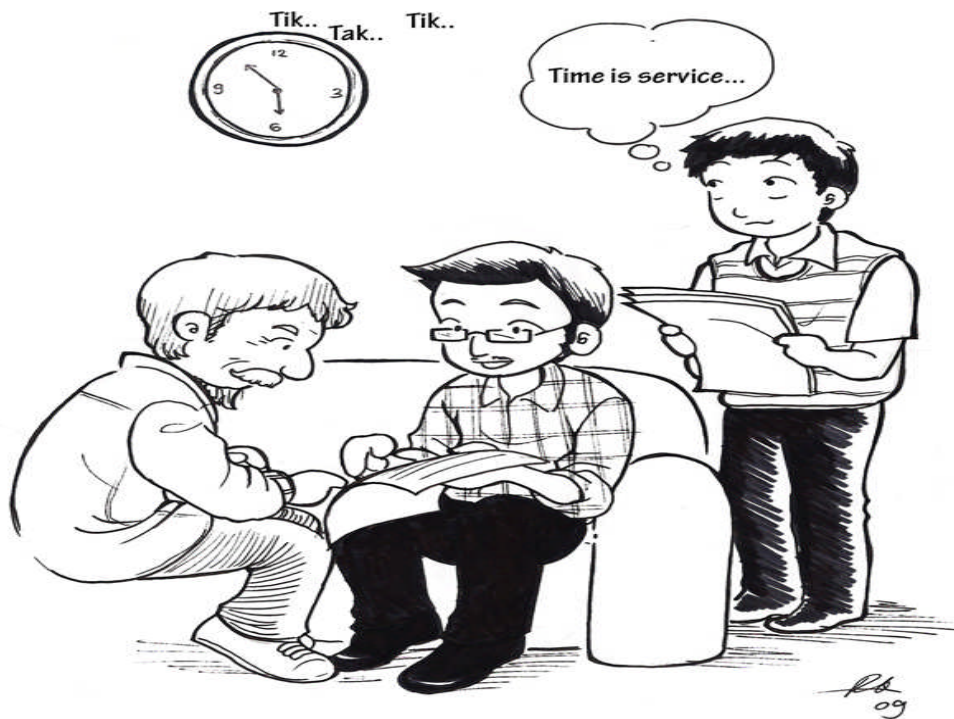
Ah, surat-surat di hadapanku seperti beranak-pinak. Tak ada habis-habisnya. Rasanya tak mungkin menyelesaikan semuanya tepat pada pukul lima. Maka lekas-lekas kupilah mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda penyelesaiannya Senin nanti.

Beberapa saat kemudian, dengan diantarkan *security*, dua orang Wajib Pajak (WP) datang menemuiiku. Keduanya bermaksud mengantarkan surat yang, setahuku, seharusnya tidak ditujukan ke Kanwil tetapi ke KPP. Lebih dari itu, keduanya hendak menyampaikan keluhan kesah karena menurut mereka surat tersebut telah ditolak tidak sebagaimana mestinya oleh KPP. “Karenanya, kami mohon agar Kanwil menerima surat ini. Setidaknya sebagai monitoring karena... bla bla bla,” jelasny kepadaku.

Aku di sana hanyalah peserta magang, yang kebetulan hari itu ditugaskan menangani surat masuk karena pegawai yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut sedang mengerjakan tugas lain yang mendesak. Sebelumnya aku telah diingatkan untuk selalu cermat terhadap surat yang diantarkan langsung oleh WP. Sebab, beberapa jenis surat seharusnya tidak dikirimkan langsung ke Kanwil. Entahlah. Di antara keraguan apakah sebaiknya menolak surat itu atau menerimanya saja, dengan beberapa catatan yang akan kutanyakan Senin depan kepada pegawai yang bertanggung jawab terhadap penerimaan surat, terdengar lagi tawa mengejek dari jam hitam di belakangku. Dengan kedatangan WP di akhir jam kerja—bersama surat dan permasalahan yang tengah dihadapinya—tampaknya aku akan pulang lebih lama dari biasanya.

Perihal penerimaan surat segera kutanyakan kepada atasanaku. Beliau, ditemani Kasubbag Kepegawaian yang kebetulan berada di dekatnya, menemui WP itu dan mendengarkan permasalahan yang dikemukakannya. Dan, ya, waktu seperti burung gereja yang lekas terbang. Sekali-kali tak ingin ditangkap. Waktu bergulir amat cepat seperti gerbong kereta meninggalkan stasiun. Aku menanti pembicaraan berakhir sehingga dapat segera

kurapikan mejaku, tetapi tak juga tampak tanda-tanda berakhirnya pembicaraan. Jam hitam di dinding bungkam, seperti halnya diriku. Hingga adzan maghrib berkumandang kedua Kasubbag itu masih mengidentifikasi permasalahan yang ingin disampaikan WP.



Akhirnya WP sepakat menunggu jawaban konfirmasi dari KPP Senin nanti. Beberapa saat setelah keduanya meninggalkan ruangan, terdengar dering ponsel dari meja Kasubbag Kepegawaian. “Halo. Ya, ini mama sudah di jalan. Iya, Ade tunggu ya, nggak lama kok...” ujar beliau sedikit berbohong menjawab panggilan telepon itu. Agak tergesa beliau merapikan meja kerja.

Waktu adalah pelayanan, *time is services*. Meski sudah ada yang menunggu di rumah. Meski jam hitam terus menggoda untuk lekas pulang. Dan aku tak menyangka apa yang dimaknai sebagai pelayanan baru saja terjadi di hadapanku. Bukan *lip service* belaka. Bukan sekadar ungkapan pemulas bibir, bahwa benih modernisasi telah menampakkan tunas-tunasnya di sana-sini.

Barangkali ini *semakna* dengan dua baris yang menggugah dalam puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul “Selamat Pagi Indonesia”:

...kami telah bersahabat dengan kenyataan
untuk diam-diam mencintaimu...

JELANG PENSIUN

Hendro Kusumo

Karir saya sebagai pegawai pajak yang berawal pada tahun 1975 sebenarnya bukanlah karena kesengajaan. Kebetulan saat itu saya diajak teman untuk menemani mendaftar, tetapi justru sayalah yang diterima. Pada saat yang sama saya juga diterima di Fakultas Arsitektur ITS. Kabar bahwa saya diterima sebagai pegawai pajak sengaja saya rahasiakan kepada orang tua, dengan tujuan agar keinginan saya kuliah selepas SMA bisa terwujud. Akan tetapi entah bagaimana caranya, ternyata orang tua bisa tahu dan mereka sangat mengharapkan agar saya bekerja saja.

Bulan Juni 1975 saya resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspeksi Pajak Surabaya Utara (sekarang KPP Pratama Krembangan), kantor pajak terbesar di Jawa Timur. Selang beberapa bulan kemudian, saya diangkat sebagai Juru Sita Pajak Negara. Sejak itulah benturan-benturan psikologis mulai terasa, dongeng-dongeng/kisah-kisah tentang tokoh satria, kepahlawanan, kejujuran yang selalu ditanamkan menjelang bobok oleh ibunda pada waktu kecil sekarang dihadapkan pada realitas dunia kerja yang *nota bene* berkata sebaliknya.

Sebagai Juru Sita Pajak Negara nama saya sering muncul di iklan lelang pajak negara Harian Surabaya Pos. Hal ini menambah beban, karena makin membuat saya dikenal sebagai pegawai pajak. Sudah menjadi kebiasaan pegawai pajak saat itu kalau ditanya di mana kerjanya, selalu jawabannya mengambang dikarenakan *image* masyarakat terhadap pegawai pajak sudah demikian jeleknya.

Pernah suatu ketika seorang tetangga memandang sinis ketika bertemu. Hal ini saya rasakan setelah saya punya mobil. Padahal mobil itu saya dapat karena kebaikan teman saja. Saya disuruh membeli mobilnya dengan harga yang sangat murah sekali, dapat dikata hanya diberi saja. Mungkin saja teman saya merasa berhutang budi karena berhasil mempersunting gadis idamannya setelah saya *comblangi*.

Pernah suatu ketika pula setelah saya sudah mandiri, di suatu kampung, ada orang yang sinis sekali setelah tahu bahwa saya adalah pegawai pajak. Sebaliknya, ada juga yang bersikap manis pada saat ada event tertentu. Ada ironi disini... ..pegawai pajak itu dicaci tapi juga dicari.

Ironi-ironi itulah yang membuat saya gamang dan tidak bangga menjadi pegawai pajak pada saat itu, dan pernah ada niat untuk mengundurkan diri. Namun niat itu saya batalkan karena saya terinspirasi oleh cerita teman saya tentang orang pajak di Negeri Paman Sam. Konon pegawai pajak disana sangat disegani dan dihormati sehingga sejak saat itu saya berkeyakinan bahwa pegawai pajak di sini pun akan dapat seperti itu pada suatu saat nanti.

Adanya reorganisasi di Direktorat Jenderal Pajak dan diluncurkannya Undang-Undang Perpajakan tahun 1984 memperkuat keyakinan saya akan tiba masanya aparat pajak disegani, apalagi saat itu orang nomor satu di DJP dijabat oleh orang yang terkenal dengan sebutan *Mr Clean*. Saya sangat terkesan oleh sidak-sidak beliau ke kantor pajak, langsung masuk ke gudang berkas yang panas karena belum ada AC dan duduk di kursi yang sudah reyot. Sosok beliau dan sepak terjangnya membuat saya semakin yakin bahwa sebentar lagi akan terjadi perubahan di DJP baik yang menyangkut Sumber Daya Manusia dan kesejahteraannya maupun sarana/prasarana penunjang kegiatan kantor.

Keyakinan saya bahwa DJP akan berubah menjadi institusi yang disegani menjadi sirna seiring dengan kebijakan kencangkan ikat pinggang, sehingga Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Negara (TKPKN) tidak pernah naik selama beberapa tahun.

Reorganisasi dan pelaksanaan undang-undang baru, ternyata tidak serta merta dapat mengubah *image* masyarakat terhadap pegawai pajak bahkan *image* masyarakat terhadap pegawai pajak semakin parah setelah banyak terbongkarnya kasus-kasus yang berkaitan dengan restitusi dan lain sebagainya.

Namun setelah dikumandangkan modernisasi di DJP yang dimulai tahun 2002 yaitu dibentuknya *Large Tax Office (LTO)* yang menyangkut segala aspek yaitu Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia *plus* perilakunya, mutu pelayanan, sarana/prasarana dan struktur organisasi, citra DJP berangsur menjadi semakin baik.

Disamping itu adanya *reward* yang memadai dan *punishment* yang ditegakkan akan menambah kenyamanan suasana kerja karena kasak-kusuk dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan. Semua itu muaranya adalah agar DJP menjadi institusi yang disegani.

Sebenarnya sebelum modernisasi ini sudah ada upaya-upaya dan ada rasa ketidakpuasan di dalam intern tubuh DJP agar segera ada perubahan

tetapi selalu kandas. Kenapa perubahan DJP setelah modernisasi lebih berhasil daripada sebelumnya, itu karena metodenya adalah *top-down* yaitu keinginan secara menyeluruh dari atas ke bawah, bukan *bottom up* dan tentu saja juga karena dukungan yang menyangkut segala aspek seperti tersebut di atas.

Dengan adanya modernisasi akhirnya apa yang saya harapkan sejak lama telah terwujud. Sekarang saya sudah dapat menjawab dengan lantang dan bangga apabila orang bertanya tentang pekerjaan saya. Jawabnya pasti “ Saya bekerja di Kantor Pajak”. Itulah berkah yang sangat besar yang saya rasakan dalam hidup. Pada bulan Februari 2008 saya ditempatkan di KPP Pratama dengan status modern. Saya sangat bersyukur karena sebelum pensiun (tahun 2011) masih sempat merasakan berkah modernisasi itu. Betapa panjang perjalanan menuju berkah itu, tentu saja saya sangat berharap agar kondisi ini berlanjut terus, tidak ada yang coba-coba mengotorinya.

SAMPAI DI SINI

Hardjono

Penulis masuk jajaran DJP pada tahun 1975 tepatnya tanggal 12 Februari 1975. Sampai saat ini penulis telah bekerja selama 34 tahun, dan akan purnatugas pada 1 Januari 2010 mendatang. Sebagai petugas fungsional, penulis akan pensiun pada usia 60 tahun.

Getar niat reformasi di Departemen Keuangan (DepKeu) sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1974, yaitu ketika Bapak Menteri Keuangan JB Sumarlin menangkap basah seorang Pegawai DepKeu yang melakukan pungutan liar dalam suatu urusan. Selanjutnya reformasi jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimulai dengan diundangkannya UU PPh, PPN dan KUP pada tahun 1983 melalui perubahan yang cukup radikal yaitu dengan dimulainya sistem *self assessment*. Namun dalam perjalanannya reformasi tersebut masih belum merambah ke perilaku aparat pajak (*fiskus*) dan Wajib Pajak (WP), karena kurang kuatnya niat mereformasi. Kegagalan itu diperbaiki sejak tahun 2002 hingga saat ini dimana niat reformasi telah dirasakan merambah baik ke internal DJP maupun kepada Wajib Pajak.

Perjalanan penulis dimulai dari Seksi Pusat Tata Usaha (PTU) di suatu Kantor Inspeksi Pajak Jakarta yaitu suatu seksi yang merupakan jantung kantor pajak saat itu. Semangat yang menggebu membuat penulis banyak belajar mengenai pajak dari segala sudut: filosofis, administrasi, kendala pemungutan, pokoknya semua yang bisa diserap penulis dengan *basic* pendidikan yang pas-pasan, yaitu SMA jurusan sosial saja.

Berprestasi di Seksi PTU, tahun 1978 penulis dipindahkan ke Seksi Dinas Luar dan sejak saat itu penulis mulai menyanggah tugas memeriksa sampai saat ini di akhir tahun 2009 (31 tahun bertugas memeriksa). Tugas ini ternyata teramat sangat mengasyikkan dalam arti karier yang sesungguhnya, bukan dari sudut materi. Benar-benar bukan soal materi, karena ternyata sampai saat ini pun tanpa malu-malu penulis akui bahwa penulis termasuk tidak sukses di bidang tersebut, meskipun juga tidak miskin-miskin amat.

Dalam menjalankan tugas banyak pengalaman yang menarik. Ada pengusaha yang dengan segala cara berusaha agar transaksi atau hasil

usahanya tidak terlalu terusik oleh pajak. Di sisi lain, penulis sebagai fiskus juga harus melaksanakan tugas untuk memeriksa apakah ketentuan perpajakan telah dilaksanakan olehnya. Di sini penulis menyadari bahwa pengusaha tersebut, apa pun adanya dan apa pun tindakannya, tidak boleh dibenci. Penulis berprinsip bahwa secuil apapun data yang diberikan oleh Wajib Pajak tetap masih bisa terus dikembangkan penelitiannya, sehingga seluruh data dapat secara maksimal dimanfaatkan.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat bergulir maka semakin besar pula tuntutan yang harus dipenuhi fiskus untuk melaksanakan tugasnya. Akan tetapi harus disadari pula bahwa bagaimanapun juga, ada usaha dari beberapa Wajib Pajak untuk mempertahankan usahanya dengan meminimalkan pajak. Maka dapat dipahami bahwa tugas Pemeriksa Pajak di masa mendatang sungguh teramat sangat menantang dan lebih mengasyikan.

Saat ini perjalanan itu akan berakhir. Penulis tidak akan lagi melakukan pencarian data yang akurat melalui komputer di meja, berdebat dengan WP perihal data yang tidak diakuinya atau karena kesalahan yang sengaja yang dibuatnya dengan konsekuensi pidana. Penulis juga tidak akan lagi merasakan getar hati ketika seorang anggota DPR terperiksa datang ke meja penulis, atau melihat tangis seorang wartawati senior sebuah surat kabar yang salah menyerahkan data-data yang ternyata telah dimanipulasikan dalam laporan pajak perusahaannya.

Penulis sungguh menyesal tidak mengembangkan diri dengan belajar sehingga tidak mampu menggabungkan pengalaman penulis sebagai pemeriksa dengan kajian secara ilmiah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh fiskus lainnya di masa mendatang. Namun yang jelas, pada saatnya nanti penulis harus merasa puas menikmati 75% Gaji Pokok sebagai pensiunan karena selama ini tidak mampu menabung atau melakukan usaha lainnya untuk bekal hari tua.

Meskipun tidak ada tanda jasa yang dapat dibanggakan kepada anak cucu, tetap saja penulis merasa bangga, meski hanya sedikit pernah berbuat untuk negara ini. Selesai sampai di sini tugas-tugasku sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Doaku semoga fiskus di masa datang lebih berdedikasi sehingga petugas pajak memang dapat dibanggakan oleh bangsa. Penulis melihat dengan modernisasi saat ini, petugas pajak terlihat bersemangat, bergairah dan ternyata penerus-

penerus penulis adalah generasi yang lebih baik secara moral dan intelektual. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Amin.

KINI SAYA BANGGA

Sekti Widihartanto

Topik apa yang biasanya menjadi menarik untuk dipilih oleh dua orang (atau lebih) yang baru bertemu dan berkenalan lalu berbincang. Jika usia Anda masih tergolong ABG barangkali topik film atau musik, jika Anda sedikit lebih dewasa mungkin tentang di mana kuliah dan jurusan apa yang diambil. Jika tampang Anda sudah paruh baya barangkali tentang anak-anak: berapa jumlahnya, sekolah di mana dan sebagainya. Jika Anda sudah terlihat menua, mungkin topik yang menarik adalah tentang anak-anak yang sudah berhasil bahkan mungkin tentang cucu-cucu. Bagaimana halnya jika Anda dan lawan bicara Anda berusia sekitar 25-45 tahunan? Tentu topik pembicaraan adalah tentang pekerjaan masing-masing yang biasanya dilanjutkan dengan saling tukar kartu nama, lengkap dengan nama perusahaan/instansi, alamat, nomor telepon, alamat email dan tentunya logo perusahaan/instansinya.

Lalu apa yang terjadi dengan saya? Tahun 1999, setelah kurang lebih selama satu tahun menjalani pendidikan dan penempatan sementara, secara resmi saya mulai berdinasi di Direktorat Jenderal Pajak dan ditempatkan di sebuah kantor pelayanan pajak di Jakarta. Sejak saat itulah hingga kurang lebih selama lima tahun saya selalu menyembunyikan identitas pekerjaan saya kepada orang-orang yang baru saya kenal. Di angkot yang selalu mengantar saya pergi-pulang kantor, di bis dalam perjalanan pulang kampung saya, atau bahkan di pesawat jika saya sedang beruntung mendapat tugas ke tempat yang jauh. Selama periode itu, menjadi “orang pajak” demikian orang awam biasa menyebut berkonotasi negatif, setidaknya itu yang saya rasakan. Sehingga untuk menutupinya saya selalu mengeluarkan dua jurus andalan. Pertama saya berusaha untuk langsung tidur begitu menaiki moda angkutan kecuali jika tidak mendapatkan tempat duduk. Kedua, saya selalu mengaku sebagai konsultan atau minimal sebagai auditor, dan sebagai seorang akuntan tidak terlalu sulit bagi saya untuk bicara panjang lebar tentang audit.

Keadaan tersebut berlanjut selama bertahun-tahun, sampai pada sebuah titik di mana saya mendapatkan pencerahan secara tidak sengaja di

dalam bis yang mengantar saya ke kantor setiap pagi. Seorang lelaki paruh baya duduk di samping saya dan langsung membuka percakapan. Jurus pertama saya gagal saya gunakan. Pembicaraan berkembang sampai pada topik tentang pekerjaan. Dari pembawaannya saya yakin lawan bicara saya tidak bekerja sebagai pegawai kantoran, sehingga mungkin tidak terlalu tertarik dengan “pekerjaan”, tiba giliran saya untuk bertanya tentang pekerjaannya.



Saat menjawab pertanyaan saya, air mukanya berubah menjadi lebih bersemangat dan penuh energi. Dia menceritakan bagaimana ia memulai harinya sebagai seorang *office boy* di sebuah perusahaan kecil di bilangan Tebet yang namanya pun baru saya dengar saat itu. Dengan sangat antusias ia menceritakan setiap detail pekerjaannya dibumbui dengan leluconnya. Yang lebih menakjubkan saya adalah bahwa pekerjaannya itu sudah dijalannya selama dua

puluh tahun (saat itu). Jauh sebelum krismon katanya. Sampai pembicaraan harus terhenti karena dia harus turun di perempatan Pancoran.

Setiba di kantor saya sempat merenungkan kejadian selama perjalanan di bis tadi dan masih terbayang di benak saya wajah si lelaki paruh baya tadi, air muka, semangat, dan energinya saat ia menceritakan setiap detail pekerjaannya. Jujur, terbuka, tidak ada yang ditutupi, riang dan membanggakan untuk dirinya. Saya lalu melihat ke dalam diri saya. Dengan apa yang saat itu saya miliki, apa yang bisa saya banggakan dari pekerjaan saya? Jangankan untuk bercerita secara mendetil dari setiap pekerjaan saya,

seperti yang dilakukan lelaki paruh baya itu, untuk menyebutkan pekerjaan saya sebagai pegawai pajak pun saya malu saat itu. Pekerjaan macam apa yang bagi sebagian orang yang mendengarnya akan langsung mencibir sinis karena stigma yang sudah terlalu lama terbentuk di masyarakat, karena perilaku sebagian besar orang-orangnya, termasuk barangkali juga saya di dalamnya? Bagaimana mungkin saya bisa memberikan potensi terbaik saya kepada institusi tempat saya bekerja, jika saya tidak mampu memberikan hal yang menurut Abraham Maslow merupakan puncak kebutuhan manusiawi *kebanggaan* dan *eksistensi*.

Bagaimana mungkin saya, dengan pekerjaan yang bagi sebagian orang di luar sana sangat menjanjikan dan barangkali didambakan, tidak mampu mengekspresikan kebanggaan akan pekerjaan itu seperti lelaki paruh baya yang saya temui di perjalanan pagi itu? Kemudian saya berpikir, ada berapa orang seperti saya di kantor saya, di kantor-kantor lain, dan di seluruh negeri ini, di semua instansi pemerintah pusat atau daerah, yang tidak bangga dengan pekerjaannya sehingga pada gilirannya tidak mampu memberikan potensi terbaik dari dirinya untuk pekerjaannya, untuk institusinya dan untuk negerinya? Mencintai pekerjaan memang sebuah keharusan untuk pencapaian keberhasilan, namun kebanggaan terhadap pekerjaan, menurut saya, adalah lahan yang subur bagi berkembangnya benih-benih prestasi. Kemampuan sebuah organisasi untuk memberikan rasa bangga kepada setiap anggotanya, dalam pandangan saya merupakan puncak keberhasilan organisasi tersebut, melebihi keberhasilan kuantitatif lain.

Kebanggaan terhadap pekerjaan saat ini mulai saya rasakan, metamorfosa yang dikenal dengan “modernisasi” berhasil diraih oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena ia bukan sebuah evolusi yang berjalan sangat lamban atau pun sebuah revolusi yang bisa terjadi dalam satu malam namun tak jarang memakan sangat banyak korban. Metamorfosa pada DJP telah mampu mengubah dirinya dari makhluk (institusi) yang “mengerikan” bagi sebagian besar rakyat negeri ini layak ulat sebagai cikal bakal kepompong, menjadi institusi yang indah. Keindahan itu tidak saja dalam penampilan namun jauh lebih penting dari itu adalah manfaat yang mampu diberikannya bagi lingkungan sekitarnya, layaknya kupu-kupu yang bermanfaat bagi proses penyerbukan sekar.

Demikianlah, dengan segenap proses perubahan yang telah, sedang dan akan terus dilaksanakan oleh DJP, mulai terasa semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap insitusi ini dan semakin baiknya citra

institusi ini di mata masyarakat. Kedua hal tersebutlah yang akan mampu pada gilirannya menumbuhkan rasa kebanggaan diri pada orang-orang di dalamnya, sebagai ladang subur tumbuhnya potensi dan munculnya prestasi. Itulah saya kira pencapaian tertinggi yang diraih DJP dalam modernisasi ini, melebihi pencapaian lainnya. Karenanya, sejak beberapa tahun ini tidak lagi ada alasan bagi saya untuk menggunakan dua jurus saya tadi untuk menutupi apa pekerjaan saya, namun kini saya bangga dengan pekerjaan dan institusi yang membesarkan saya.

MENUJU CAHAYA

Abdul Hofir

Hari itu Sabtu di bulan September 1997, aku harus melakukan registrasi karena dinyatakan lolos tes memasuki salah satu perguruan tinggi kedinasan favorit di Jakarta (lebih tepatnya di Tangerang, kebetulan berbatasan dengan Bintaro Jaya). Selang tiga tahun, aku lulus dan ditempatkan di KPP “ S ” sebuah kota yang sama sekali belum ada di kamus kehidupanku, apalagi ketika berpamitan dengan seniorku ketika praktek kerja lapangan (PKL) di KPP “ T “, mereka berkata, “Untung kamu. Ditempatkan di tempat bagus. Kota “ S “ adalah dambaan kita-kita. Selamat, deh!”

Aku hanya berpikir inilah tugas, penempatan di mana pun sama saja karena sewaktu menulis lamaran sebagai PNS kepada Menteri Keuangan, salah satu kontraknya adalah siap ditempatkan di mana pun.

Aku ditempatkan di Kota “ S “ sejak 1 Desember 2000. Di tempat yang baru itu, aku belum bisa melakukan apa-apa, kecuali membantu beberapa pelaksana untuk mengirimkan surat ke Subbagian Umum, atau sekadar membelikan sesuatu (ATK, dan sebagainya). Terlebih lagi, aku merasa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pegawai yang sudah berpengalaman meski pendidikan mereka hanya SMP atau SMA. Dulu, ketika kuliah, aku diajari cara mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, ternyata hal itu tidak bisa serta-merta dilakukan di sini. Para pegawai sangat mahir mengerjakan SPT.

Ketika aku tanya, “SPT siapa, Bu?”

Dengan enteng mereka menjawab, “Oh, ini punya WP A.” Sementara ada seorang bapak yang lain menjawab, “Biasa Dik, *njahit*. Buat tambahan.”

Njahit adalah kata yang sangat halus untuk mengatakan bahwa mereka mengerjakan sesuatu yang semestinya dikerjakan oleh Wajib Pajak. Tentu dengan imbalan tertentu, yang belakangan aku ketahui ternyata tarifnya kadang-kadang tidak murah.

Dua tahun kemudian, aku mendapatkan tugas pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Ketika itu tahun 2003. DJP memprogramkan pencairan cepat untuk mengamankan penerimaan pajak melalui pemeriksaan. Dengan

semangat yang tinggi sebagai *fresh graduate*, aku berniat untuk mempraktekkan ilmu pemeriksaan yang dulu kudapat di perguruan tinggi. “Inilah saatnya buatku mempraktekkan ilmu. Sekaligus mengetahui apakah benar rumor tentang penyimpangan dalam pemeriksaan yang selama ini kudengar,” kataku dalam hati. Aku pun mendapatkan temuan yang mencengangkan. Pajak yang kurang dibayar minimal Rp 80 juta. Spektakuler! Aku saja belum pernah melihat uang sebanyak itu.

Singkat cerita, supervisor memanggilku dan memintaku mempertimbangkan temuanku itu, katanya, “Mas, coba Mas pikir. Usaha grosir kayak gitu untungnya tidak sampai lima persen. Bagaimana mungkin akan kita kenakan norma 20%. Apa nggak kasihan, Sampeyan?”

Pergulatan batin aku rasakan sangat dahsyat di dada. Ternyata rumor itu benar, bahkan sekarang ada di depan mata. Sebagai pelaksana, aku meminta pertimbangan Ketua Tim. Ternyata jawabannya normatif dan cenderung menurut apa kata Supervisor. Menyerah, aku pun berujar, “Gini aja, Pak. Saya sebenarnya keberatan dengan cara Bos kita. Saya berlepas tangan aja. Keputusan yang nanggung Supervisor. Bagaimana? Saya tidak punya kekuatan. Sebagai pelaksana, saya hanya bisa membuat laporan. Apa permintaan Supervisor, akan saya kerjakan,” mungkin itu kata yang paling tepat untuk menggambarkan kepasrahanku di hadapan mereka yang kuanggap lebih senior dalam bekerja.

Akhirnya, laporan kubuat sebagaimana kemauan Supervisor. Wajib Pajak pun menerima keputusan itu. Dan soal “pemberian dari Wajib Pajak” itu lebih sulit lagi bagiku untuk menerima atau tidak menerima. Akupun perlu konsultasi dengan pembimbing agamaku di rumah, beliau bilang, “Agama jelas melarang *risywah* atau suap. Hukumnya haram. Berarti, Antum harus menolaknya.”

Lingkungan di DJP saat itu menghendaki setiap pegawai untuk berperilaku yang sama dengan para “senior”nya. Tidak mengherankan jika kawan-kawan yang berpikir idealis memilih keluar dari DJP dan mencari pekerjaan di luar, meski berijazah lulusan D III Perpajakan. Bahkan, saat ini salah seorang kawan sekelasku memilih menjadi seorang ustadz di Kalimantan, demi menghindari kerusakan yang ditimbulkan akibat bekerja di DJP.

Tidak demikian halnya aku, bagiku ini adalah ujian dari Allah. Apapun ujian yang diberikan oleh Allah, pasti mengandung hikmah. Setiap manusia yang lulus dengan satu ujian, akan ditingkatkan derajatnya di sisi-Nya. Inilah

hukum Allah. Dia tidak akan membiarkan seseorang mengaku beriman sebelum diuji keimanannya.

Alhamdulillah, pada akhirnya perubahan yang diharapkan pun terjadi. Melalui sebuah *political will*, Pemerintah mencanangkan reformasi birokrasi di DJP, sejumlah perangkat dibentuk untuk menjadikan DJP lebih bersih dan bermartabat. Pengawasan diperketat, pembinaan mental, *skill*, dan spiritual dibangun. Pola pikir dan pola tindak diperbaiki. Hasilnya bisa aku rasakan sekarang, bekerja lebih tenang, rejeki lebih barokah karena tidak lagi dicampuri dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sekarang adalah era ketika setiap insan di DJP menunjukkan karya terbaiknya demi bangsa dan negara. Masalah penghasilan? *No problem*, karena kami sekarang mendapatkan penghasilan yang lebih dari sekadar cukup, sehingga sangat tidak layak untuk berpikir bagaimana mengorupsi uang negara.

“Terima kasih ya Allah atas karunia yang Engkau berikan bagi bangsa ini melalui reformasi birokrasi di DJP. Semoga kami tetap istiqomah, Amin .“

AKU ORANG PAJAK

Sarbono

Tahun 1995 ada seorang anak kecil empat belas tahun bernama Anto dengan serius mendengar pengajian di Kaliasat, sebuah kampung kecil 25 km dari kota P di propinsi Jawa Tengah. Ustadz bercerita lucu, “Suatu saat ada orang punya hajatan, semua orang di lingkungannya diundang. Tamu yang pertama datang adalah tetangga tuan rumah yang sangat miskin. Tuan rumah bergumam, dasar orang miskin, datang pertama, pengen cepet-cepet makan enak. Datanglah tamu selanjutnya, orang kaya. Dengan senyuman tuan rumah bergumam, wah orang yang menghargai sesama datang untuk menghargai undangan orang lain. Menjelang acara selesai datanglah tamu undangan dengan pakaian seadanya, masuk tergesa-gesa dan masih ada sisa kelelahan di wajahnya. Setelah berkali-kali minta maaf segera ia mengambil tempat. Orang-orang di sekelilingnya memandang dengan pikiran, kebiasaan orang miskin! Tidak menghargai waktu, mo dikasih makan enak aja belagu! Tepat setelah acara selesai, hadirilah orang terkaya di kampung itu. Orang-orang mendekat menyalami dengan isi benak mereka, benar-benar orang baik, masih menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan tetangga.” Seluruh isi masjid pun terguyur tawa.

Tahun 1997. Usia Anto merambat remaja. Ia kini sekolah menengah atas. Tidak ada yang istimewa. Lantaran jarak sekolah dengan rumah yang 25 km dan berada di ibukota kabupaten tempat tinggalnya, orang tua Anto menitipkannya pada saudara yang tinggal dekat dengan sekolahnya. Remaja kampung itu tinggal di lingkungan keluarga kaya dengan segala kemudahan. Rupanya jadi orang berpunya itu enak. Ingatannya kembali pada lelucon ustadz di kampungnya. Ia kian yakin, “Miskin itu dosa dan suatu saat aku harus kaya.”

Tahun 2000, Anto mulai kuliah di tempat yang paling ia dambakan. Keluar sedikit biaya, banyak peminat, dan langsung bekerja jika sudah lulus, itulah motivasi utamanya. Dengan penuh harapan dan kebanggaan, Anto menapaki hari-hari dalam lingkungan kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Anto diterima di jurusan Penilai/PBB. Bergaul dengan kawan-kawan

yang meyakini sebuah nilai yang agung, karakter dan idealismenya mulai terbentuk untuk membalas apa yang telah ia dapat dari negara.

Tahun 2003 ia telah lulus kuliah. Tahun berikutnya Anto ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) “P” (nama sebuah kota di propinsi Sumatra Utara). Jelas, tempat itu jauh dari kampung halamannya. Untuk tiba di sana, Anto harus melalui perjalanan udara Jakarta-Medan. Lantas, Anto perlu menyambunginya dengan perjalanan darat selama sepuluh jam.

Di tanah rantau, rasa rindu pada keluarga kerap menghampirinya. Namun ia harus bisa mengatasinya. Dan ia berhasil. Dengan langkah mantap dan kebanggaan yang membumbung, dia bertekad berbuat yang terbaik untuk Direktorat Jenderal Pajak, dimana dia menjadi salah satu anggota keluarga besar itu. Idealisme membaja menyertainya untuk berbuat yang terbaik bagi Negara. Dia yakin “sistem jahiliyah” seperti yang diomongkan orang tidak akan ditemuinya, semua hanya isapan jempol dan omong kosong belaka. Setidaknya itulah keyakinan kuat yang dimilikinya saat itu.

Bulan pertama, kedua, dan ketiga semua masih berjalan baik-baik saja. Ia tak pernah mengeluh, meski mengabdikan diri di KPPBB, yang sering dianggap anak tiri DJP. Ia selalu menaati ketentuan jam kantor dan aturan kepegawaian dengan baik. Masuk kantor tiap hari, Senin sampai Jumat. Bahkan, ia tidak segan menambah jam kantor sendiri.

Bulan keempat, kelima, dan keenam ia mulai sadar ketika berbagi cerita dengan sesama pegawai. Pertama, seorang kepala seksi yang menjelang pensiun belum mempunyai rumah. Kedua, kepala seksi yang hanya menikmati sisa penghasilan tidak lebih dari Rp400 ribu karena berbagai potongan. Dan ketiga, pelaksana asal luar daerah seperti dirinya yang pulang dua tahun sekali karena sisa penghasilan yang disisihkan setahun hanya cukup untuk biaya perjalanan dan berlebaran di kampung halaman. Ingatan tentang lelucon ustadz muncul kembali.

Bulan ketujuh, ia mulai terhanyut “menikmati”, hari kerja hanya Selasa, Rabu, dan Kamis. Berangkat ke kantor seadanya, bohong sana bohong sini, sikut sana sikut sini. Yang ada dalam pikirannya kala itu adalah setiap pekerjaan harus ada harganya. Persetan dengan idealisme. Benaknya selalu dipenuhi beban pikiran tentang ngumpul duit dari mana pun asalnya, berandai-andai pindah ke tempat yang lebih “basah”, dan bisa berbuat sesuka hatinya.

Tahun 2005 pemuda itu semakin “tenggelam”, ia seolah-olah mendapat pembenaran. Lambat laun nilai “kebanggaan” yang ia rasakan juga mulai luntur. Hampir dua tahun ia tenggelam dalam “kenikmatan” semu. Proses perubahan yang mulai menyebar ke beberapa kantor di Jawa juga mulai memicu rasa gelisah terhadap apa yang ia lakukan dengan apa yang ia yakini dulu, idealisme untuk membalas jasa kepada Negara. Kegelisahan itu memuncak dengan satu tekad untuk menyudahi “kenikmatan” dan mulai meraih “kebanggaan”. Harapannya bertumpu pada dua hal. Bisa secepatnya pindah dari tempatnya bekerja sekarang atau harapan modernisasi yang mulai terdengar dilakukan di lingkungan DJP juga diterapkan di kantornya. Dan ia memilih untuk tetap tinggal, sambil mulai belajar untuk bekerja seperti saat awal dulu dia ditempatkan.

Tahun 2008, roda zaman berputar, perubahan adalah niscaya. Apa yang dia harapkan benar-benar terjadi. Pemuda itu mulai bekerja di KPP dengan label modern. Masih sedikit tersisa keraguan benarkah yang selama ini dia dengar? Perlahan ia mulai merasakan perubahan itu. Ia tidak lagi merasa sendirian pada hari Senin dan Jumat. Kantor mayoritas diisi anak muda dengan semangat dan kebanggaan tinggi. Hampir semua hal berjalan ke arah yang lebih baik. Tahun 2009, pemuda itu kian mantap. Mulai kini, tiap kali ditanya di mana tempatnya bekerja, dengan bangga dan senyum mengembang, ia menjawab, “Saya orang Pajak.”

PERGI DENGAN INDAH

Yacob Yahya

Bu Bibit

Ibu Bibit Suwartinah tiap hari sigap bekerja. Pagi jelang pukul tujuh, dia sudah mangkal di kantor. Bu Bibit, begitu saya panggil dia, adalah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Tepatnya, jadi pelaksana di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Ia tamatan SMEA. Usianya kepala lima, badannya subur, namun jangan tanya soal kecekatan. Saban hari dia menyokong kinerja para *Account Representative* (AR). Mulai dari fotokopi ini-itu, hingga mencetak surat dinas.

Semua AR di KPP Pratama Pati lebih muda daripada Bu Bibit. Namun Bu Bibit tak pernah merasa jadi suruhan mereka. Pada satu kesempatan beliau berujar,

“Memang itu tugas saya. Kalau pengen fotokopi, tinggal bilang sama saya, biar saya kerjakan. Tak usah rikuh,” pernyataan itu ia tujukan pada para AR, khususnya yang masih muda.

“Beliau memang rajin,” ujar Reban Saputro, AR paling muda, kepada saya secara terpisah. Bu Bibit juga rajin salat. Tiap azan Dhuhur maupun Ashar, ia langsung bergegas ke musholla.

Kini ia tengah menanti masa pensiun. “Banyak teman yang akan pensiun. Saya akhir tahun depan. Nanti giliran kamu yang melanjutkan tugas saya,” selorohnya renyah kepada saya, sambil menjereng nama-nama kolega sekantor yang akan mengakhiri masa kerja.

Pak Sumidjo

Ramadhan kali ini matahari bersinar sangat terik, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rembang minim pengunjung. Delapan belas kursi tunggu yang berderet, tiga lowong. Hanya satu-dua orang datang melaporkan Surat Pemberitahuan bulanan (SPT Masa), langsung menuju loket. Televisi yang bervolume sedang mengusir sepi ruangan. Walau sepi namun Pak Sumidjo tetap siaga menjaga loket. Pada hari itu, saya temani ayah satu anak tiga cucu itu.

“Ramenya tanggal 10 hingga 20,” terangnya.

Tanggal 20 adalah hari terakhir Wajib Pajak melaporkan SPT Masa. Beberapa jenis pajak tertentu, seperti PPh Pasal 22 dan PPN, malah harus dilaporkan oleh Bendaharawan Pemerintah lebih dini, yakni tiap tanggal 14.

“Saya asal Gunungkidul, tapi daftar kerja di Kudus. Hingga sekarang keluarga di Kudus. Tiap akhir pekan saya pulang ke Kudus naik bus. Ditunggu anak-cucu,” urai Pak Sumidjo kepada saya.

Kudus-Pati-Rembang adalah sederet kota Pantai Utara di Jawa Tengah. Jarak tempuhnya kurang dari dua jam dengan berkendara bus.

“Sudah kerja berapa lama?” saya bertanya.

“Sejak 1981. Situ sudah ada belum?” Pak Sumidjo balik bertanya.

Saya geleng kepala sambil tersenyum. “Kerja jauh-jauh, apa enak Pak?”

“Dinikmati saja. Yang penting kerja dengan benar. Kerja di Pajak jaman sekarang, tak usah terima uang dari luar. Sejak dulu saya tak mau macam-macam. Gaji dan tunjangan saja sudah cukup. Kalau kerja begitu, hati jadi sejuk,” tuturnya.

Tiap hari kerja, Pak Sumidjo bersama sejumlah rekan menginap di lingkungan rumah dinas Kepala KP2KP, persis di belakang kantor. Jumat sore, mereka yang asal Kudus, bareng-bareng mudik. Senin pagi-pagi, mereka bertolak ke Rembang lagi.

“Saya mau pensiun. Tahun depan,” ucapan itu yang paling saya ingat.

Pak Djatmiko

MESIN cetak Printronix 5215 di pojok belakang ruang Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) itu meraung. Beberapa detik berselang, puluhan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang warna oranye itu tuntas tercetak. Di ujung lain, bagian depan ruangan, Pak Djatmiko sibuk meng-*input* data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kepala Seksi PDI itu harus cermat membuat perkembangan pemasukan.

“Harus diteliti, mana pembayaran lewat bank persepsi, dan mana pelunasan lewat ATM,” ujarnya.

Seksi ini bertugas memutakhirkan data, termasuk urusan PBB. Tiap tahun pasti ada saja perubahan data subjek maupun objek PBB. Ada yang pembetulan nama wajib pajaknya, luas tanah dan bangunan, pemecahan, atau sebaliknya – penggabungan.

KPP Pratama Pati punya wilayah kerja dua kabupaten: Pati dan Rembang. Keduanya terdiri dari tiga puluh lima kecamatan. Dirinci lagi, ada

700 desa dan kelurahan. Nah, kira-kira, di sini terdapat hampir 1,1 juta objek PBB. Kalau dirata-rata, per desa ada 1.500-an tanah dan bangunan, untungnya, “jam terbang” Pak Djatmiko cukup tinggi. Apalagi dia bekerja di Kantor Pelayanan PBB sebelum KPP melebur jadi satu atap. Dia juga pernah ditempatkan di luar Jawa.

“Di sana orang punya tanah luas-luas. Tapi terlalu berat bayar PBB. Ada pemilik kebun pisang saya bujuk, ‘Pak kalau Bapak sisihkan satu saja (hasil panen) pohon pisang, itu sudah bisa buat melunasi pajak Bapak’,” ujarnya berbagi pengalaman.

Rambutnya boleh memutih. Namun, semangat kerjanya tak pernah menua. “Dia salah satu Kasi yang punya integritas,” tutur Kepala Kantor, secara terpisah, dalam sebuah percakapan dengan kami, para pemegang sarjana.

Dua-tiga tahun ke depan, Pak Djatmiko juga pensiun.

Bu Bibit, Pak Sumidjo, dan Pak Djatmiko bakal meninggalkan Direktorat Jenderal Pajak, namun, beliau telah memberi warisan berharga (*legacy*), dari beliau-beliau saya menemukan apa makna pengabdian dengan segala tantangannya di saat DJP telah mereformasi diri. Terima kasih para seniorku yang telah memberi pelajaran berarti bagi kami yang baru memasuki DJP untuk meneruskan estafet mengabdikan pada ibu pertiwi.

Kisah ini didedikasikan buat para pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menyambut masa pensiun dengan pengabdian teguh.

HATI YANG BERTASBIH

Abdul Gani

Abgan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi seperti teman-temannya, karena faktor ekonomi orang tua yang kurang mendukung. Namun dalam benaknya dia merasa bersyukur dapat menyelesaikan sekolahnya walaupun sebatas SLTA (dahulu SMA). Setamat dari SMA, Abgan mencoba untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan raksasa asing produsen aluminium batangan, yang berdiri megah di bumi Asahan Sumatera Utara. Dengan berbekal semangat, percaya diri dan selembat ijazah, Abgan mengajukan permohonan lamaran kerja ke bagian personalia. Setelah melewati serangkaian seleksi yang mendebarkan, tibalah pengumuman hasilnya. Abgan membuka amplopnya: Gagal...!!!. Tapi ia berikrar, “Aku harus bangkit, tidak ada kata putus asa!” Abgan mencoba lagi dan bangkit dari kegagalan. Permohonan yang kedua kalinya pun diajukan kembali ke perusahaan yang sama dan ... diterima.

Tugas pertamanya di *Team Start Up* yang sangat berkaitan dengan tegangan listrik berdaya sangat tinggi. Setiap karyawan dituntut disiplin dan sangat menghargai waktu, wajar saja kalau perusahaan sangat mempertimbangkan kesejahteraan karyawannya. *Start Up* adalah divisi *team work* sepuluh orang yang terdiri dari satu *supervisor*, satu *foreman* dan delapan *operator*. Tugas pokoknya mengawasi dan memantau sekian banyak tungku produksi yang berada di empat gedung yang cukup luas, untuk satu gedung luasnya lebih dari lapangan sepak bola. Tim harus selalu dalam kondisi *standby* dan *focus*. Sebelum melaksanakan tugas, tim melakukan *morning call*, menyusun *schedule* pekerjaan yang terukur baik waktu maupun volume pekerjaannya, menjaga kekompakan tim, menghargai waktu dan disiplin lainnya, seperti berpakaian sesuai standar proyek, rapi, bersih, *name tag* tetap dikenakan, dengan *sense of belonging* terhadap semua inventaris perusahaan.

Suatu saat pada jam *standby* si Abgan keletihan dan tertidur sejenak di atas kursi dengan posisi hampir merebah dan wajah menghadap ke langit-langit ruangan. Ia tidak menyadari lagi bahwa monitor yang terpasang di *control room* terus mengawasi segala peran anggota *team work*. Abgan pun

dipanggil sang manajer, apa yang baru dilakukan Abgan adalah pelanggaran disiplin. Pada jam *standby*, istirahat yang diperkenankan adalah dengan melipat kedua belah tangan dan meletakkannya di atas meja, wajah tunduk melekat di atas kedua tangan tersebut. Dalam posisi seperti itu seseorang akan tetap dalam kondisi siaga dan dapat mencegah kepanikan bila terjadi *trouble, safety first!* Abgan telah belajar satu hal.

Abgan telah menyatu dengan komunitas berpikir positif dan memiliki visi cemerlang ke depan, ini tentunya bekal yang sangat berharga bagi dirinya. Hari-hari liburnya terus dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang dunia kerja yang lebih baik. Suatu saat sebuah pengumuman terpampang di Kantor Depnaker Kota Medan, LOWONGAN KERJA PNS DI DEPARTEMEN KEUANGAN RI. Terketuk hatinya untuk mencoba. Rencana itu pun diatur sedemikian rupa tanpa mengganggu statusnya sebagai karyawan. Ujian tertulis pun dijalani, dan hanya itu saringan masuk untuk PNS pada saat itu. Alhamdulillah, lulus mulus.

Pertama kali ia ditempatkan di Direktorat Jenderal Anggaran namun tidak lama kemudian dialihkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dunia baru ini membuat dirinya terkejut, tercengang, dan bengong. Bayangkan... pagi-pagi di saat jam kerja, PNS pada ngerumpi panjang lebar sampai menjelang siang di kedai kopi, baca koran seenaknya, keluyuran ke mana-mana. “Kau datang dan pergi sesuka hatimu oohhh...” persis kayak lirik lagunya Diana Nasution di tahun delapan puluhan. Yang lebih seru lagi, tindakan persuasif maupun represif dengan maksud menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) malah berubah menjadi bagaikan ladang perburuan. Masyarakat cenderung resah dan mengeluh. Hak WP terabaikan dan diletakkan di barisan paling belakang. Pelayanan menjadi ancaman dan momok yang menakutkan sehingga masyarakat takut berurusan dengan kantor pajak.

Hati Abgan bertanya-tanya, “Sepertinya aku telah masuk ke lorong waktu menuju zaman batu”. Suatu hal yang menyedihkan, Abgan jadi ikut terseret lingkungan. Begitu kuatnya godaan yang menyesatkan, Abgan mulai lupa asal muasalnya, ia mulai bergabung dengan komunitas lainnya dengan karakter standar ganda. Kadangkala dalam kegelapan ini, ia merasakan masih ada seberkas cahaya lilin kecil yang berupaya menerangi lorong-lorong gelap itu. Lilin kecil itu sosok yang begitu tangguh dan tidak akan redup dalam kegelapan walaupun komunitasnya cukup sedikit. Sosok itu adalah komunitas yang selalu menyinari dan berbisik, “Abgan cobalah

bercermin dan merenung, kembalilah kepada fitrahmu, kau adalah sosok pemenang saat terlahir dari rahim ibumu, mengapa kini harus kalah dan menjadi pecundang, bangunlah dari mimpi burukmu, songsong masa depanmu dengan penuh harapan“. Komunitas itu terus berbisik dengan langkah yang tertatih-tatih, namun tak pernah lelah menghadang gempuran yang begitu mengkhawatirkan bagi masa depan DJP.

Komunitas itu telah banyak berbuat dan memberikan andil tanpa pamrih dengan harapan suatu saat akan tercipta perubahan di tubuh DJP. Di antara komunitas itu, ada satu sosok sederhana seperti ayah Abgan, sosok itu bertubuh kecil namun energik dan sangat peduli dengan pembinaan mental dan etika pegawai DJP. Ada satu hal yang tidak akan terlupakan dari ucapannya *“biasakan kerja benar bukan membenarkan kebiasaan“*. Pesan moral ini selalu disampaikan pada setiap event pertemuan yang beliau pimpin.

Ada satu sosok lagi yang tidak pernah luput dari perhatian Abgan. Sosok ini telah mewariskan dan memberikan panutan bagi setiap karyawan DJP, dia tak pernah lelah membenahi pola pikir para karyawan, dan hatinya begitu tulus. Pesan yang selalu beliau sampaikan adalah bahwa perubahan adalah harga mati, kalau tidak - sepertinya Kanwil DJP Sumut harus kembali ke zaman batu. Untuk itu, katakan dari relung hati yang paling dalam *“I wanna change right now!“*, untuk mencapai perubahan harus pasang niat dan tekad, kalau tidak ada niat, sekarang juga silakan minggir.

Kedua sosok yang sarat dengan karakter perubahan itulah inspirasi bagi diri Abgan untuk berubah. Sang hati yang dulu terbelenggu dan redup, kini mulai kembali bertasbih untuk hidup bermartabat dan sejahtera. Cahaya perubahan terus menyinari DJP, semoga DJP menjadi matahari bagi semua lembaga pemerintahan dan semua masyarakat luas. Mari kita jadikan DJP tempat bekerja dan sekaligus sebagai rumah untuk beramal ibadah.

MODERNISASI & INFAQ

Oji Saeroji

Modernisasi dan infaq masjid, sepertinya tidak ada hubungan sama sekali. Tapi mungkin juga ini fakta, maksud saya, benar-benar terjadi! Berdirinya masjid-masjid perkantoran yang megah dan nyaman, paling tidak menandakan sebuah arah positif dari keinginan untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Ada banyak kisah dan cerita yang dituturkan secara turun temurun dari para sesepuh kita tentang masjid-masjid yang berdiri di kantor pajak sehingga masjid-masjid tersebut dapat berdiri dengan kokoh, megah, indah dan nyaman.

Untuk keperluan operasional dan membiayai kegiatan khusus masjid-masjid tersebut, hampir-hampir tidak ada kendala. Tapi itu dulu....., yang kita semua *mafhum*. Bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan masjid saja, di banyak event yang lebih meriah dan besar pun, kantor pajak tidak kesulitan dalam pendanaannya. Sekarang kondisinya sedikit berbeda.

Di awal terbentuknya kantor modern, fakta menunjukkan bahwa pendapatan kas masjid tidak sebesar biasanya, bahkan tiap minggu berkurang cukup drastis sampai pada titik seimbang, penerimaan sama dengan pengeluaran. Sebagai salah satu pengurus masjid, saya cukup tahu bahwa sekarang masjid kami jarang menerima infaq dalam jumlah ratusan ribu, apalagi jutaan rupiah yang masih dibundel rapih dari bank. Jaman sebelum modern sih iya. Fenomena ini memang terjadi bukan hanya di dalam aktifitas masjid saja tetapi hampir di semua kegiatan-kegiatan sosial, termasuk untuk acara olah raga bersama.

Hari-hari selanjutnya, bagaimanapun juga, kami para pengurus masjid tetap mensyukuri apa yang terjadi. Alhamdulillah, masih ada infaq yang masuk untuk setiap Jumatnya. Pertanyaannya, apakah modernisasi menjadikan pegawai pajak malas berinfaq, sedekah atau sekedar patungan untuk bersosialisasi?

Namun kemudian sesuatu hal yang menggembirakan terjadi, pendapatan kas masjid di setiap Jumat yang tadinya menurun, rupanya secara perlahan-lahan dapat diimbangi dengan kenaikan jumlah donatur masjid itu sendiri. Akhir-akhir ini, tanpa putus asa kami selalu berusaha

meningkatkan pemasukan kas masjid dengan menawarkan proposal kepada lebih banyak pegawai untuk menjadi donatur. Mulanya kami memang ragu apakah akan ada yang menanggapi tawaran tersebut. Namun di luar dugaan hal ini mendapatkan respon yang cukup baik. Kalau sebelum modern daftar donatur tidak lebih dari hitungan jari, maka setelah modern semangat dan jumlah donatur semakin membesar, makin hari makin bertambah, tanpa melihat pangkat dan golongan mereka.

Walaupun secara kuantitas jumlah nominal yang masuk belum signifikan, tetapi semangat *fastabiqul khairat* itu sangat kentara muncul di setiap pribadi pegawai, yang terlihat dari kesediaan mereka untuk menjadi donatur tetap kas mesjid, menjadi *muzzaki* (orang yang berzakat) rutin setiap bulannya, atau menjadi orang tua asuh bagi kaum *dhu'afa*.

Kini infaq masjid itu tetap bergairah walaupun tidak sebesar “pada masa lalu”. Infaq masjid itu masih dan terus menjadi saksi bisu akan pergulatan batiniah para pegawai yang jujur di era modernisasi. Barangkali inilah buah dari sebuah keberkahan dalam beramal dengan ikhlas atas penghasilan yang diterima secara *halalan thoyyiban*. Ada hikmah yang tersembunyi yang tidak pernah kita tahu akhirnya.

Pada akhirnya masjid-masjid yang kita bangun memang tetap berdiri dengan kokoh, megah, nyaman lagi sejuk rasanya. Dalam *shaft-shaft* masjid ada banyak wajah-wajah cerah, berseri-seri dan senang ketika kotak-kotak amal itu diedarkan. Dan masih banyak lagi harapan kita untuk mengisi hidup ini dengan hal-hal yang lebih baik, barokah, dan penuh makna, untuk anak-anak, istri, keluarga dan institusi kita tercinta. Terima kasih modernisasi.

HAURA

Nur Fathoni

Hari Senin, tanggal 27 Rajab 1430 H, merupakan salah satu hari yang tak kan terlupakan dalam keluargaku. Pada hari itu, setelah kami datang ke dokter anak untuk yang kedua kalinya, karena kembung yang diderita anakku, Haura, dokter menyampaikan kecurigaannya bahwa anakku yang baru berusia enam setengah bulan kemungkinan menderita tumor *Williams*. Ini adalah jenis tumor di ginjal yang menyerang anak-anak di bawah usia sebelas tahun tanpa diketahui penyebabnya.

Dalam seminggu berikutnya merupakan minggu yang melelahkan sekaligus menegangkan, hingga akhirnya dipastikan terdapat tumor di anak ginjal sebelah kanan Haura. Tumor itu berukuran cukup besar dan telah melewati garis tengah perut. Ukuran yang besar itu juga yang menyebabkan tumor tersebut tidak dapat langsung diangkat. Menurut dokter, saat itu telah masuk stadium tiga atau empat! Badan ini terasa tersambar petir meskipun tidak ada awan maupun hujan. Bagaimana tidak, anakku yang sejak lahir hingga usia enam bulan terlihat sehat, gemuk, lincah, dan periang sekarang divonis menderita penyakit yang mematikan, yang sama sekali tak pernah terbayang dalam benakku. Ya Allah, ternyata belum cukup setelah kami harus menunggu kehadiran buah hati selama empat tahun, sekarang Kau berikan cobaan yang tidak ringan kepada keluargaku. Begitulah kata hatiku sesaat setelah mendengar penjelasan dokter-dokter di RS Dharmais. Aku berjalan gontai keluar dari rumah sakit.

Hari-hari berikutnya merupakan hari yang melelahkan dan penuh pengharapan. Meskipun tingkat kesembuhan anakku hanya sekian puluh persen tapi aku yakin dan sangat berharap keajaiban akan terjadi pada anakku. Kami melakukan terapi intensif di suatu tempat. Pada saat anakku menjalani terapi itulah ada salah satu Wajib Pajak-ku yang berkeinginan untuk untuk menjenguk anakku. Sebagai seorang AR aku relatif akrab dengan semua kontak person Wajib Pajak (WP), terutama dengan WP yang aktif memasukkan berbagai surat permohonan maupun WP yang sangat intens melakukan konsultasi perpajakan. Ada salah satu WP yang mengetahui bahwa anakku sedang sakit karena dia pernah menelponku

pada saat aku di rumah sakit. Saat itu hatiku memang sedang galau dan tidak dapat menyembunyikan kesedihan.

Selama tujuh tahun aku bekerja di *Large Tax Office* (LTO), telah beberapa kali WP menawariku natura maupun membawakan “amplop” ke kantor. Ada yang membawakan amplop setelah aku melayani permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, maupun tanpa sebab yang jelas. Selama ini aku tidak mengalami masalah dengan hal-hal tersebut dan dapat menjelaskan dengan baik dan ringan kepada WP bahwa saat ini kantor pajak telah mereformasi diri. Dan aku terus berupaya untuk sedapat mungkin menghindari kontak yang berlebihan untuk menjaga independensiku.

“Intinya jika merupakan hak WP dan telah sesuai dengan ketentuan, tentu permohonan WP akan diberikan. Sebaliknya jika merupakan hak negara, serupiah pun tentu akan diminta untuk disetorkan ke kas negara. Disamping itu, saat ini semua pegawai DJP juga terikat dengan kode etik. Jadi, terhadap hal-hal yang bisa mengganggu sikap profesionalisme, sebaiknya semua dikembalikan sesuai aturan yang berlaku saja. Tolong bantu DJP melaksanakan kode etik tersebut yang salah satunya adalah berkaitan dengan pemberian sesuatu dari WP.” Begitulah kira-kira penjelasanku dan selama ini WP dapat menerimanya dengan baik.

Di saat kondisi anakku seperti ini, apakah penjelasan yang selama ini kuberikan kepada para WP juga masih bisa kusuarakan dengan lantang? Kegundahan hati sempat terjadi pada saat anakku menjalani terapi. Salah satu *contact person* dari WP yang terbesar pembayaran pajaknya, bersikeras untuk menjenguk anakku. Aku memang sering memberikan konsultasi kepada bapak itu. Setelah membujukku cukup lama, akhirnya aku memberikan alamat dimana anakku dirawat. Lalu dia meninggalkan kantorku.

Sejak dia pergi itulah, hatiku gundah gulana dan kepikiran terus. Meskipun bapak tadi tidak menyinggung-nyinggung sama sekali tentang bantuan maupun amplop, tapi hati kecilku mengatakan kemungkinan besar bapak itu akan memberikan amplop bantuan kepada istriku yang sedang mendampingi anakku dirawat. Tapi saat ini kan aku memang lagi butuh uang banyak untuk biaya pengobatan anakku, apalagi saat itu bapak mertuaku juga sedang dirawat karena sakit. Sakit yang sedang dialami buah hatiku bukanlah penyakit ringan, akan membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang besar dan proses yang panjang. Jika aku menerima bantuan tersebut anggap

saja sebagai sumbangan dan saat ini sepertinya sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap kinerjaku dalam menangani WP tersebut. Surat himbauan dinamisasi PPh Pasal 25 yang aku kirim minggu lalu juga telah disetujuinya, meskipun pada surat tanggapan pertama menolak, jumlah pajak angsuran tiap bulannya pun naik menjadi lebih dari seratus miliar rupiah per bulan atau naik 67%. Sepertinya kalau pun aku menerima sumbangan tersebut tidak ada masalah. Begitulah kira-kira pikiran-pikiran yang berkecamuk.

Pikiranku berhenti berandai-andai setelah hati kecilku mengatakan, jika saja aku tidak menjadi AR apakah Wajib Pajak ‘super gajah’ tersebut akan memberikan sumbangan kepadaku? Astaghfirullah, ampuni aku ya Allah, aku ingin anakku sembuh, aku ingin anakku sehat tapi aku tidak mau menggunakan uang *subhat* apalagi yang haram untuk biaya pengobatan buah hatiku. Aku pun segera menelepon istriku untuk memberitahu bahwa akan ada seorang bapak yang berkunjung ke tempat anakku dirawat, dan berpesan agar jika dia memberikan bantuan jangan diterima, karena aku tidak mau terbebani dan merasa berhutang budi kepadanya. Suatu saat tentunya akan mempengaruhi juga dalam pekerjaanku melakukan pengawasan kepadanya.



Benar adanya, pada sore harinya istriku bercerita perihal kedatangan seorang bapak tadi siang dan hendak memberikan sumbangan dalam amplop yang terlihat sangat tebal untuk pengobatan anakku. Sumbangan itu dikumpulkan dari rekan-rekan sekerja yang biasa berhubungan atau berkonsultasi denganku. Walaupun benar sumbangan tersebut merupakan *saweran* dari rekan-rekan divisi pajak,

sangat mungkin sebagian (besar) berasal juga dari sumbangan perusahaan. Untungnya istriku dapat menolak dengan halus pemberian sumbangan tersebut. Hari berikutnya aku kirim email ke WP dan mengatakan penghargaan yang tinggi atas niat baik mereka yang hendak memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluargaku sekaligus memohon maaf yang sebesar-besarnya kami tidak dapat menerimanya, karena posisi saya sebagai AR tempat mereka bekerja tidak dapat membedakan apakah bantuan tersebut merupakan sumbangan atau gratifikasi.

Godaan-godaan itu akan selalu muncul. Gula-gula yang manis nan lezat itu pada suatu saat memang tidak menarik bagi kita, tapi pada suatu kondisi tertentu yang berbeda akan terasa sangat menarik bagi kita. Itulah mengapa sangat penting secara berkala dilakukan kegiatan yang kreatif dan menarik sekedar hanya untuk mengingatkan bahwa kita mempunyai kode etik dan kita berkewajiban untuk menjaganya. Karena itu adalah salah satu kebanggaan kita. Selain itu selalu mengingatkan WP agar mereka juga mereformasi diri dengan cara: mereka juga harus terbuka, melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak mencoba-coba memberikan natura atau kenikmatan maupun uang kepada fiskus dalam rangka menegakkan kode etik. Jadi kedua belah pihak, baik WP maupun fiskus, harus sama-sama mempunyai komitmen untuk menegakkan kode etik. Di sisi lain, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai dalam bentuk jaminan kesehatan, pendidikan, fasilitas kepemilikan rumah/tempat tinggal, imbalan pascakerja, dan lain-lain juga perlu diwujudkan. Peningkatan kesejahteraan tersebut merupakan satu rangkaian dengan upaya penegakan kode etik.

Jumat tanggal 28 Ramadhan 1430 H buah hatiku dipanggil pemilikNya berpulang ke rahmatullah. Semua bagaikan mimpi. Aku tidak menyangka semua ini akan berlalu secepat ini. Ya Allah, aku tahu semua ini adalah takdir-Mu dan merupakan yang terbaik bagi anakku dan keluargaku. Tapi aku hanyalah manusia biasa yang punya hati dan perasaan, berikanlah kekuatan iman kepadaku dan keluargaku agar dapat menerima dan melalui semua ini dengan sabar, ikhlas, dan ridho.

Aku yakin Haura kecilku kini telah menjadi bidadari. Meskipun hanya sembilan bulan kurang seminggu bersamanya, dia telah memberikan 1001 pelajaran kepada keluargaku. Mungkin ikhtiar dan doaku tidaklah sempurna, tapi aku lega bahwa aku tidak memberikan sesuatu yang bukan menjadi hakku kepada anakku. Aku juga tidak mau di akherat nanti anakku menuntut

papanya karena telah memberikan uang haram kepada dirinya. Ya Allah ampunilah dosa, kesalahan, dan kekhilafanku dan keluargaku selama ini.

Memang menjadi pegawai DJP tidaklah ringan godaannya, tapi jika kita mempunyai kemauan yang kuat untuk menegakkan kode etik dan kita terbiasa untuk saling mengingatkan satu sama lain insya Allah semuanya dapat kita lalui dengan lebih ringan dan nikmat. Aku teringat ceramah seorang ustadz pada awal Ramadhan 1430 H, bahwa rizki setiap orang sudah ditentukan takarannya, sedangkan kita mengambil yang halal atau yang haram itu adalah sebuah pilihan. *Wallahu a'lam.*

WARTAWAN & FISKUS

Yacob Yahya

Wartawan dan aparat pajak jelas merupakan profesi yang jauh beda. Bahkan mungkin bertolak belakang. Jurnalis, di satu sisi, konon adalah “kaki meja demokrasi yang keempat”. Tiada demokrasi tanpa kebebasan pers. Media merupakan anjing pengawas (*watchdog*) yang siap menyalak jika tiga pilar demokrasi lainnya, yakni lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif, menyeleweng. Pendek kata, wartawan merupakan perwakilan suara publik yang salah satu tugasnya menyoroti kinerja aparat negara. Sedangkan di sisi seberang, petugas pajak berada di kubu eksekutif. Ia merupakan bagian dari kekuasaan yang perlu dikontrol oleh pers. Namun, selain ada perbedaan, rupanya terdapat persamaan di antara keduanya. Setidaknya, mereka sama-sama profesi. Pekerjaan ini sama-sama memerlukan ketrampilan dan pengetahuan tertentu.

Atmakusumah Astraatmadja, jurnalis dengan riwayat terhormat, punya definisi soal “profesi”. Menurut mantan ketua Dewan Pers ini, profesi berasal dari kata Latin, “*profesus*”. Artinya, “bersifat kenabian”. Tugas nabi adalah menyampaikan misi suci. Jadi, profesi pada intinya adalah pekerjaan yang terhormat, bersih, suci. Mungkin, kata “*profesus*” ini belakangan diserap menjadi dua kata berbeda dalam bahasa Inggris, “*prophecy*” dan “*profession*”. Jika wartawan maupun aparat pajak adalah profesi, tentu keduanya merupakan pekerjaan yang mulia.

Gedung DHANAPALA di Lapangan Banteng pada Rabu 7 Januari 2009 tak seperti biasa. Hampir dua ribu orang berpakaian kemeja putih dan bawahan hitam memadati aula. Mereka, para calon pegawai rekrutan sarjana, takzim menyerap pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hampir 1.300 calon karyawan itu beroleh instansi Direktorat Jenderal Pajak. Saya salah satunya.

Bu Ani menyampaikan pesan itu dengan serius. Bekerja untuk Departemen Keuangan bukanlah hal remeh. Lembaga ini bertugas mengelola, mengawasi, menggunakan, dan melaporkan aset negara yang nilainya mencapai Rp1.600 triliun. Ada beberapa syarat penting yang perlu

dimiliki oleh para pegawai. Abdi Negara harus punya loyalitas, integritas, kompetensi, serta dedikasi. “Saya memegang filsafat pegawai teladan. Jika atasan saya menyuruh mengerjakan sepuluh, akan saya kerjakan dua kali lipatnya,” tuturnya di atas podium. Di antara sejumlah nasehat itu, yang paling menancap di benak saya adalah soal integritas. “Dari bahasa Yunani, artinya tameng. Integritas inilah yang melindungi diri Anda. Integritas harus menyatu dalam karakter Anda,” sambung beliau.

Hampir empat tahun saya jadi wartawan. Saya rasa jurnalis merupakan pekerjaan yang tepat untuk mengasah dan menyalurkan sikap kritis. Wartawan merupakan penyampai suara rakyat, *vox pops*. Itu tataran idealnya. Meski, saya prihatin dan tak bisa menutup mata, masih banyak wartawan yang bekerja sembarangan dan menggadaikan sikap kritisnya dengan menerima amplop. Ada istilah “wartawan Bodrex”, sekawanan kuli tinta yang hanya mengandalkan kartu pers, beredar di kantor-kantor instansi pemerintah maupun perusahaan besar. Mereka bukan meliput, namun menadah “sedekah” dari para narasumber. Celaknya, banyak narasumber yang memaklumi kondisi ini dengan masih saja menyediakan anggaran jatah buat wartawan. Kondisi ini bagai rangkaian mata rantai yang tak pernah putus.

Saya jadi anggota Aliansi Jurnalis Independen, organisasi profesi wartawan yang mengharamkan amplop. Jurnalis harus independen, memegang integritas, dan imparial. Amplop sangat berbahaya karena menggerus sikap netral jurnalis. Anggota Aliansi yang menerima amplop bakal terkena sanksi dipecat dari organisasi.

Namun, menerima amplop bukanlah dosa yang paling besar. Dalam jurnalisme, fakta adalah hal yang paling suci. Jurnalis harus memberitakan fakta apa adanya dengan berimbang, semanis atau sepahit apapun. Kesalahan jurnalis yang paling fatal adalah membuat berita bohong (*hoax*), memanipulasi fakta, bahkan menjiplak karya orang lain tanpa sesuai kaidah pengutipan yang dibenarkan.

Suatu ketika pada 2006. Saya menulis untuk rubrik “Tokoh” di *Tabloid Kontan*. Saya meliput seorang direktur utama sebuah bank swasta nasional. Usai wawancara, ia meminta konsep berita yang belum naik cetak, untuk ia edit. Banyak narasumber yang melakukannya dan wartawan pun meloloskan permintaan ini. Tapi saya menolak. “Berita yang belum dicetak masih milik redaksi dan tak boleh dibaca oleh narasumber sekalipun. Jika sudah naik cetak dan Anda merasa kurang pas atas tulisan kami, Anda dapat memakai

hak jawab atau mengusulkan ralat,” saya menjelaskan. Lagipula, ia bukan editor atau pemimpin redaksi yang berwenang menyunting tulisan saya.

“Saya harap you tidak tulis macam-macam,” ujarnya singkat. Selang beberapa hari kemudian, kami bertemu kembali.

“Oh, Anda yang menulis tentang saya yah? Tulisannya bagus,” tuturnya tersenyum. Saya lega. Tak ada rambu etika yang saya tabrak. Sebaliknya, narasumber pun puas.

“Sudah cocok jadi wartawan, mengapa hendak pindah jadi pegawai Depkeu?” seorang pewawancara bertanya kepada saya, pada sesi seleksi tahap akhir penerimaan pegawai baru, pada akhir tahun lalu.

“Dengan menjadi bagian dari organisasi ini, saya ingin berandil nyata. Intinya saya hendak mengabdikan kepada Negara,” jawab saya. Lagipula, saya yakin, organisasi ini yang paling cocok. Lembaga ini tengah berbenah dengan istilah “reformasi birokrasi”. Saya yakin masa depan negeri ini menuju arah yang cerah lantaran perbaikan yang bakal terjadi di tubuh lembaga ini. Dan saya merupakan salah satu bagian darinya. Saya tak mau asal cari tempat kerja, tentunya. Saya ingin berkarya di organisasi yang andal, bersih, dan berwibawa. Sempat ada seorang kawan mencibir, apakah dengan menjadi pegawai negeri saya akan tetap kritis. Saya dalam hati sendiri bertanya, “benarkah saya menanggalkan idealisme?”

“Ya *nggak* lah Cob. Idealisme itu kan sumbernya dari hati. Jadi, walaupun *lu* pindah kerja, *gak* berarti idealisme *lu* harus luntur kok,” jawab Palupi Anggraini, seorang teman baik. Uniknyanya, kami sama-sama pernah jadi jurnalis di *Tabloid Kontan*. Kini, kami juga sama-sama jadi calon pegawai Depkeu lewat jalur seleksi tingkat sarjana. Ia diterima di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Satu hari, saya puas bukan kepalang melihat kelegaan seorang warga yang baru saja mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak. “Benar, Mas? Gratis?” tuturnya sambil menjabat erat tangan saya. Saya jawab dengan tersenyum dan mengangguk.

Oh iya...rasanya saya menemukan satu lagi kesamaan antara wartawan dan aparat pajak. Mereka sama-sama melayani warga, *public servant*, dengan cara mereka sendiri. Saya beruntung merasakan dua profesi ini.

TIP

Ninoy Estimaria

Di sebuah pusat perbelanjaan yang padat penjual, pembeli maupun yang sekedar cuci mata, terlihat antrian panjang kendaraan yang hendak memasuki areal parkir, bercampur aduk dengan antrian keluar. Petugas parkir berseragam lengkap dengan peluit dan kadang tongkat kecil sibuk mengatur lalu lalang kendaraan. Dia harus pintar mengatur detik-demi detik, kapan giliran yang lewat, kapan giliran yang harus berhenti. Kalo tidak, pengunjung yang bermobil akan menggerutu dan ujung-ujungnya menyerobot antrian. Dan petugas parkir yang penghasilannya nggak jauh dari batas UMR, pasti nggak bisa berbuat apa-apa. Bila petugas tersebut tak punya “kekuatan” dan “keyakinan”, bisa dipastikan hukum rimba yang berlaku. Akhirnya, pengunjung bermobil jadi petugas parkir semua.

Pemandangan di atas yang menampakkan ketidakjelasan antara yang mengatur dan diatur tidak terjadi pada suatu tempat perbelanjaan lain yang sama padatnya. Petugasnya cukup tegas dan berkesan galak. Kalo perlu, itu mobil atau motor diketok bila tidak mengindahkan keberadaannya. Gerakan tangannya sangat ampuh menghentikan kendaraan mewah sekalipun. Ditambah *handy talky*, semakin mantaplah dia karena memahami peta perparkiran di area tersebut. Walhasil, walaupun padat, pengunjung yang bermobil mendapat perlakuan yang sama, tidak pandang jenis kendaraan, kalo memang giliran jalan ya silakan. Inilah yang dinamakan padat tapi lancar dan tertib. Pengunjung nyaman, petugas juga pasti puas.

Dua ilustrasi di atas sangat kontras suasananya. Yang paling membedakan dari dua tempat tersebut adalah, adanya tempelan pengumuman yang dipasang di mana-mana secara mencolok dan cukup banyak. Isinya: “Dilarang Memberi Tip Kepada Petugas”. Tak perlu sekolah untuk memahami arti pengumuman itu karena sudah pasti yang dimaksud “Petugas” adalah petugas parkir, dan “Tip” adalah uang.

Tulisan sederhana tersebut yang sangat ampuh, pastilah hasil dari suatu pemikiran yang tidak sebentar. Bukan tak mungkin hasil kajian suatu lembaga yang mengurus kepuasan konsumen. Bisa jadi diuji coba dahulu, bahkan ada parameternya. Hasilnya adalah kalimat pendek yang ditujukan



untuk pengunjung yang memanfaatkan layanan perparkiran agar hanya mengeluarkan uang sejumlah yang tertera di karcis parkir. Untuk petugas, ya sudah pasti dilarang menerima tip. Apakah petugas parkir merasa berkecil hati dengan adanya tulisan yang bisa jadi mengurangi rezeki tak terduganya? Yang saya perhatikan, mereka justru lebih

percaya diri, lebih tegas, lebih bersemangat lebih berwibawa dan tidak pandang mobil bagus atau jelek, pengemudinya cantik/tampan ataupun tidak. Apakah atas komitmen petugas parkir tersebut untuk tidak menerima tip diganjar dengan tambahan insentif?

Gambaran yang sama bisa ditemui di kantor pelayanan pajak se-Indonesia saat ini. Semua pelayanan yang diberikan petugas Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak (WP) tidak dipungut biaya. Mulai dari konsultasi, minta formulir perpajakan, *leaflet*, *booklet*, buku, semua gratis. Di pintu masuk, di dalam *lift*, di *standing banner*, bahkan *running text* tiada hentinya mewartakan pelayanan gratis. Semua itu semata-mata bukan hanya untuk Wajib Pajak agar tidak membayar atas suatu pelayanan yang diberikan, melainkan juga petugas pajak diingatkan terus menerus untuk tidak menerima atau bahkan meminta apapun imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada WP. Tentu saja tuntutan pelayanan prima sangat dijunjung tinggi.

Bila petugas parkir dibekali peluit dan pentungan kecil, petugas pajak dibekali peraturan perpajakan. Jadi tidak boleh asal memberi penjelasan. Bila petugas parkir meniup peluit atau mengetukkan pentungan ke mobil saat pengendara mobil bersikap ngawur, petugas pajak punya Himbuan, Tegoran, Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) bahkan sampai penjara. Tapi, peluit dan pentungan tidak boleh diketok terlalu keras. Kaca pecah atau bodi mobil penyok, petugas parkir bakal dijewer bos,

bahkan bukan tidak mungkin dipecat. Sama dong, bila petugas pajak tak bisa menahan nafsu amarah, bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan dan menimbulkan kekacauan, akan dikenakan sanksi kepegawaian.

Sejengkel apapun dan setelah bagaimanapun petugas pajak melakukan tugasnya, tidak pernah terbersit kata “imbalan” atau “tip” atau “uang lelah”. Komitmen yang sudah terpampang di mana-mana tidak hanya jadi tempelan belaka melainkan senantiasa dijaga terus-menerus untuk ditaati. Wibawa petugas pajak akan muncul dengan sendirinya manakala kejujuran dan ketegasan berpadu. Di awal bulan gajian, baru terasa betapa nikmatnya menerima remunerasi hasil kerja keras dan ikhlas selama sebulan. Tiada beban yang berbayar budi karena semua yang dikerjakan adalah kewajiban yang diganjar imbalan yang memadai.

SETITIK EMBUN PENYEJUK HATI

Tutik Setiyawati

Kaki ini telah cukup lama melangkah, menelusuri lika-liku kehidupan. Melangkah terus dan kadang merangkak mencapai impian yang telah digantung tinggi. Perjalanan hidup yang kadang melelahkan telah mengantarkan pada pengenalan dan pemahaman karakter diri. Karakter diri itu ternyata berkorelasi dengan hobi saya yaitu membaca. Saya lebih sering mencoba mencari jawaban atas permasalahan dari apa yang kubaca. Sebelum masuk DJP, saya membiasakan diri untuk menyisakan uang bulanan untuk belanja buku. Sejak masuk DJP, tepatnya awal tahun 2009, dengan status Calon CPNS struktur pengelolaan keuangan pribadi berubah menyesuaikan dengan besarnya uang tunggu yang ada di rekening. Pos belanja buku di-*delete* dari daftar rencana pengeluaran.

Di tengah perubahan pendapatan, pola kerja, status, dan masa penantian yang cukup lama, saya tidak mengelak bahwa sempat terjadi friksi dalam diri. Saya berusaha mencoba jujur, tapi takut kejujuran itu akan membuat diri saya semakin terpuruk. Sepintas bayangan keraguan akan langkah yang telah diambil muncul seiring dengan realita yang tak seindah harapan. Dalam tahapan yang cukup sulit ini saya berharap tetap dapat menguatkan diri dengan setitik embun yang menyejukkan hati.

Mang Ujang (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu *Cleaning Service (CS)* di KPP tempat saya sekarang sedang mengikuti program *On the Job Training (OJT)*. Perawakannya tidak terlalu tinggi, sedikit gempal, dengan mimik wajah sendu. Dia tergolong lelaki pendiam dan sedikit pemalu. Perhatianku mulai tercuri olehnya saat beberapa teman menjadikan tindakan konyolnya sebagai bahan *joking*. Saya memang bukan tipe orang yang terlalu serius, kaku, dan tidak suka bercanda, tapi dalam hal-hal tertentu saya berusaha sebisa mungkin membayangkan seandainya berada di posisi orang tersebut sebelum bersikap terhadapnya.

Mang Ujang adalah pria yang rajin dalam bekerja. Pagi hari sebelum para pegawai datang dia telah menyelesaikan tugasnya, membersihkan ruang kerja, mengepel lantai, mengeluarkan pot bunga di dekat jendela, membereskan segala yang berantakan di *pantry* dan membersihkan lobi. Dia

juga menjaga kebersihan lantai atas, aula yang digunakan sebagai ruang serba guna sekaligus tempat sholat. Saat karyawan sudah berdatangan, pekerjaan Mang Ujang untuk *session* pagi hari sudah *kelar* dan biasanya dia sibuk dengan pot tanaman di lobi atas atau membersihkan *smoking room*. Kalau bukan bulan Ramadhan, setelah tugas bersih-bersih selesai, tugas berikutnya adalah menerima *order-an* sarapan ini dan itu. Saya heran kenapa hanya untuk sarapan di pagi hari begitu banyak keinginan orang. Empat orang pegawai yang meng-*order* sarapan adakalanya menunya semua jauh berbeda dan penjualnya pun berjauhan. Tapi namanya juga Mang Ujang, pekerjaan apa pun dilakukan dengan senang hati. Setelah hari menunjukkan waktu Dhuha dan acara sarapan pun selesai, tugas berikutnya adalah menerima perintah minta tolong ini dan itu, kirim berkas lah, nyari sesuatu yang hilang lah, pokoknya ada aja kerjaan. Saat matahari mulai menunjukkan teriknya, dia mulai mempersiapkan aula atas yang biasanya dipakai untuk sholat berjamaah. Saat Adzan Dhuhur berkumandang dia sudah *stand by* di aula untuk sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah selesai dia segera menyiapkan alat pengeras suara, biasa untuk acara pemberian *tausyiah* atau sekedar membaca *hadits*.

Mang Ujang segera turun kembali ke ruang kerjanya, saat beberapa pegawai mulai merebahkan badan sejenak untuk melepas lelah atau kadang malah keterusan tidur selepas sholat dhuhur. Waktu itu saya pun segera turun kembali ke ruangan setelah *tausyiah* selesai karena ada panggilan yang harus saya jawab. Setiba di ruangan ternyata tugas sudah menanti Mang Ujang. Seorang karyawan yang memang tidak menjalankan ibadah puasa memintanya untuk membelikan makanan. Mang Ujang pun segera mencatat pesanan dan segera melaju untuk *hunting* kuliner yang dipesan. Tak kebayang oleh saya di tengah udara Jakarta yang terik panas tak bersahabat dan di tengah perjuangan untuk kuat dari segala godaan di bulan puasa Mang Ujang berjalan menelusuri trotoar untuk sekedar membelikan makan siang *order-an* si tuan. Terus terang sedih dan tidak menyangka jika ada kejadian seperti itu, tetapi Mang Ujang melalui dengan penuh kesabaran. Sepulang membeli makan siang untuk sang pegawai, dia terus ke *pantry* mengambil segenap peralatan makan dan menyajikannya untuk sang pegawai.

Hari itu pelajaran berharga saya dapatkan dari Mang Ujang, bukan lagi dari buku-buku cerita yang dulu kerap saya beli tiap bulan. Apa yang kusaksikan itu menjadi setetes embun yang menyejukkan hatiku disaat diri

mulai memikirkan langkah yang telah saya ambil. Saya bisa melihat bahwa Mang Ujang melakukan pekerjaan itu bukan karena diperintah tapi dia sadar betul bahwa pekerjaan itu adalah amanah. Sebuah amanah yang harus dia pegang teguh sebagai konsekuensi pilihan hidup. Terus terang saya jadi malu sama Mang Ujang, selepas sholat dhuhur saya masih sempat merebahkan badan dan kadang melebihi jatah waktu istirahat yang diberikan. Walaupun saya pikir ketentuan istirahat di bulan puasa yang hanya 15 menit tidak memikirkan kebutuhan istirahat seorang pegawai. Waktu 15 menit habis untuk sholat berjamaah, taushiyah dan mengaji jadi istirahat pun belum sempat.

Terlepas dari itu semua, saya menjadi sadar bahwa pekerjaan saya sekarang sebagai CPNS DJP sekaligus peserta OJT adalah amanah yang harus saya lakukan sebaik mungkin sebagai konsekuensi pilihan hidup. Semua pekerjaan berat maupun ringan, kecil maupun besar harus diperlakukan sama sesuai porsinya. Sempat saya berfikir kenapa kami diberi pekerjaan seperti ini dalam jangka waktu hampir satu tahun. Kalau dibandingkan di tempat kerja sebelumnya memang cukup jauh berbeda. Dalam dua bulan awal bekerja, pekerjaan *drafting* kontrak pengadaan alat pembangkit dengan perusahaan asing senilai 2 juta Dollar Amerika yang berpengaruh pada *supply* listrik di area Jawa Bali bukan lagi hal yang aneh untuk diserahkan kepada saya. Akan tetapi sekarang memasukkan data ke aplikasi, mencetak, menstempel dan memasukan surat dalam amplop adalah pekerjaan sehari-hari. Sebelumnya jujur itu membawa keresahan dalam hati, tapi setelah melihat Mang Ujang saya sadar semua itu adalah amanah konsekuensi dari pilihan hidup.

Saya pikir sikap amanah pegawai adalah modal besar dalam proses modernisasi DJP. Proyek perubahan modernisasi adalah hal yang besar yang kita ketahui harus dimulai dari hal dasar dan kadang tersepelekan yaitu sifat amanah pegawai. Seorang pegawai yang amanah tidak sedikit pun memanfaatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Mereka takut menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi, karena sadar sekarang hanya waktu yang dimilikinya, tentu mereka tak ingin mengorupsinya. Bukankah hal besar berawal dari hal kecil? Perasaan malu akan dirasakan jika tidak melakukan apa pun. Berfikir bahwa negara telah menggaji dengan uang rakyat serta remunerasi yang cukup, walaupun sampai sekarang belum juga turun, bagaimana mungkin memberikan prestasi yang tidak sebanding. Tantangan besar bagi DJP, sebuah proyek perubahan menuju kualitas yang

lebih baik. Peran masing-masing individu adalah pondasi yang kuat bagi keberhasilan proyek ini.

BADE KA A éR

Agus Suharsono

Kita semua tentunya pernah merasakan bagaimana beratnya *ngampet* alias menahan kebelet pipis. Siksaan yang luar biasa beratnya dan bersifat sangat mendesak (*urgent*). Lebih baik menahan haus dan dahaga seharian daripada *ngampet* pipis seharian. Wajah kita pasti nampak gelisah seperti orang yang tertimpa depresi berat. Kandung kemih rasanya seperti balon yang ditiup terus menerus padahal sudah *melis-melis* mengkilat seperti mau pecah. Dalam situasi ini banyak orang akan mengambil jalan pintas untuk menyerah pada keadaan. Tanpa peduli pada sekeliling mengucurkan hajat di mana saja. Cukup balik kanan menghadap tembok atau pohon. Walaupun sebenarnya masih kelihatan dari jauh, tapi demi kesehatan kesopanan pun dilanggar. Bahkan saya sering lihat beberapa sopir truk dan bus menjadikan ban depan sebagai korban pelampiasan. Kejadian tersebut bisa terjadi di mana saja, artinya desakan alam itu bisa datang kapan saja tidak pernah peduli kita sedang di mana. Dan tentunya tidak semua tempat menyediakan tembok, pohon atau ban.

Anda boleh percaya atau tidak, ternyata masalah kebelet pipis ini juga terjadi di ruangan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sebuah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Tatar Pasundan yang sejuk dan dingin menyegerkan. Dilihat dari namanya sudah memakai tambahan “Pratama” tentu kantor pelayanan pajak yang satu ini sudah melakukan reformasi birokrasi atau yang lebih dikenal dengan modernisasi. Jadi jangan tanya apakah ada toilet di TPT-nya. Sudah pasti ada bahkan sangat baik dan bersih. Karena ciri kantor pajak yang sudah modern adalah peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, Pelayanan Prima atau *Service Excellent* istilahnya.

Hari tersebut antrian Wajib Pajak sangat banyak, sebagian besar ingin membayar PBB di loket bank yang ada di TPT. Seperti biasanya kebanyakan orang inginnya membayar mendekati jatuh tempo. Sehingga menimbulkan antrian panjang dan lama. Petugas TPT dan Satpam dengan sigap mengatur antrian dan membantu Wajib Pajak yang datang silih berganti. Sampai suatu saat terlihat seorang ibu yang mulai gelisah menunggu antrian. Sepertinya

sudah lama mengantri, tapi belum juga mendapat giliran. Pandangan matanya disapukan ke sekeliling TPT seperti mencari sesuatu. Wajahnya seperti seseorang yang sangat menderita. Sebentar kembali melihat antrian yang masih banyak, kemudian kembali menatap sekeliling mencari sesuatu. Sampai akhirnya ibu tadi mengambil sebuah keputusan penting yang dari tadi ditimbang-timbang. Ia berdiri dan menghampiri satpam yang sedang berjaga di depan pintu masuk.

“Pak, mau ke AÉR, di mana ya..?” tanya ibu tersebut kepada satpam setengah berbisik.

“Ibu tinggal di kelurahan mana ..?” tanya pak satpam dengan ramah. Rupanya keramahan satpam justru mengejutkan ibu tadi. Roman mukanya menunjukkan keheranan, seolah tidak percaya apa yang ia dengar, sekali lagi menegaskan “Pak, saya hanya mau ke AÉR, di mana ya..?” tidak dengan suara berbisik lagi. Sekarang ganti pak Satpam yang kaget, perasaan kata-katanya sudah disampaikan dengan sopan kok kayaknya ibu ini tersinggung “Maaf ibu, sekarang ketentuannya jika ingin ke AÉR harus tahu tinggalnya di kelurahan mana..?”



“Bapak ini ada-ada saja, saya ini hanya mau ke AÉR kok dipersulit, nanti bapak saya laporkan ke atasan,” rupanya marah ibu ini tidak main-main pikir Pak Satpam. Rupanya suara ibu tadi agak keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang antri di TPT. Mereka mengalihkan pandangan ke ibu dan Pak Satpam. Merasa dilihat orang banyak pak Satpam kurang enak, tanggung jawabnya jika sampai ada keributan di TPT. Nanti orang

akan mengatakan pelayanan pajak masih bertele-tele dan berbelit-belit padahal sudah modern. Merasa keadaan sudah diluar kemampuannya, maka Pak Satpam menawari ibu tadi sebuah solusi “Ibu, jika ibu ingin ketemu AÉR mari saya antar ke lantai dua, karena ruang AÉR ada di lantai dua”.

Sampai di lantai dua, dengan ramah pak satpam memandu ibu tadi ke ruang AÉR “Ibu disini terdapat dua puluh AÉR yang mana AÉR ibu nanti biar saya panggilkan untuk menemui ibu”. Coba salah apa dan kurang ramah apa Pak Satpam kita ini. Tapi rupanya maksud baiknya masih tidak berkenan di hati sang ibu tadi. “Bapak ini terlalu bertele-tele saya ini cuman mau ke AÉR kok tadi ditanya kelurahannya apa, sekarang disuruh memilih pegawai pajak yang mana,” gantian sekarang pak Satpam yang bingung dan tidak paham. Perasaan semua penjelasan dan pelayanan sudah sesuai prosedur dan ramah. Tapi kenapa ibu ini masih merasa dipersulit. “Ibu di bawah tadi saya sudah tanya ibu tinggal di kelurahan mana, tapi ibu tidak mau menjawab. Sekarang sudah saya antar ke ruang AÉR ibu juga bingung. Perlu ibu ketahui bahwa untuk ketemu dengan AÉR, harus tahu tinggal di kelurahan mana, karena masing-masing AÉR mempunyai wilayah kerja sendiri-sendiri,” sekarang ibu tadi yang tambah bingung “Pak saya ini cuman mau ke AÉR kenapa harus ditanya alamat dan kelurahan, sekarang di bawa ke lantai dua, memangnya di lantai satu tidak ada AÉR untuk pipis.” Akhirnya pak satpam ketawa “Ooo... mau ke AÉR to.. saya kira mau ke A..eR ” sambil membawa ibu tadi ke arah toilet.

Bagi Anda yang tidak memahami bahasa Sunda tentunya masih bingung dengan kejadian tersebut. Sedikit saya jelaskan bahwa bagi orang Sunda jika ingin ke kamar mandi atau toilet menyebutnya dengan “ingin pergi ke air” atau “*bade ka cai*” atau kadang dicampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda menjadi “*bade ka air*”. Sekarang Anda sudah paham kan bahwa sebenarnya ibu tadi *bade ka cai* atau ingin ke toilet untuk pipis, tapi Pak Satpam mendengarnya ingin ke *Account Representative* atau A eR. Perkiraan Pak Satpam ibu tadi ingin bertemu dengan A eR untuk berkonsultasi masalah pajak. Memang di KPP Pratama, wilayah kerja AR dibagi berdasarkan kecamatan dan kelurahan. Jadi untuk ketemu dengan AR memang prosedurnya harus memberitahu tinggal di kelurahan mana. *Aya aya wae*.

JAGADU

Rosafiaty Unik Wahyuni

Ini orang baru semua! Semua? Oh, sebentar... tidak, ternyata tidak semua. Jadi kalimat awal tadi harus kuubah.

Ini hampir orang baru semua! Atau.. Ini hampir semua orang baru! Atau.. Ah, pokoknya begitulah...

Surat keputusan (SK) mutasi untuk mengisi kantor ini terasa istimewa, terutama bagiku. Perjalanan mutasi dan promosiku di kantor-kantor sebelum ini tidaklah seistimewa ini. Ini tempat yang kupilih karena kesempatan untuk memilih itu ada. Memilih untuk mengikuti jalur modernisasi. Aaah.. akhirnya ada juga pilihan untuk bekerja dengan cara lebih baik, dan tentu dengan remunerasi yang lebih baik. Alhamdulillah.

Kenapa istimewa? Bagaimana tidak, SK ini hanya menyebut nama-nama yang masuk dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama pertama di Indonesia ini, dan nama-nama pejabat sebelumnya yang dimutasikan ke kantor lain. Tidak seperti SK Mutasi regular yang borongan itu. Boleh? Boleh kan aku bangga karenanya? Pelantikannya pun tak kalah istimewa. Hanya ada 20 orang dengan jabatan Kepala Seksi yang dilantik, 10 orang yang akan menduduki jabatan di kantor ini dan 10 orang yang akan meninggalkannya.

Kantor ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, kami biasa menyingkatnya dengan sebutan akrab: JAGADU. Waktu masuk pertama di kantor ini, sudah lebih dahulu ada teman-teman yang menduduki jabatan *Account Representative* (AR). Mereka mutasi dengan SK yang keluar lebih dahulu dari SK kami. Menyusul setelah kami adalah teman-teman Fungsional Pemeriksa. Itulah yang kusebut sebagai orang baru: Kepala Seksi, AR dan Fungsional Pemeriksa.

Kalau tadi aku mempermasalahkan kalimat di awal tulisan, itu karena masih ada 'orang lama' yang ditempatkan di kantor ini. Mereka yang menduduki jabatan sebagai pelaksana. Mereka ini adalah pelaksana yang direkomendasikan oleh Kepala Kantor untuk tetap bertugas di kantor ini secara *definitive*. Hak untuk memilih petugas ini merupakan hak *prerogative* yang dimiliki kepala kantor. Untuk hal ini kami rasa, Kepala Kantor tentu tak

akan gegabah dan pasti penuh perhitungan untuk memilih si A atau B atau C untuk tetap tinggal. Selebihnya, hmm... *no comment* – lah.

Sudahkah semua unsur kantor kusebut?

Aaah, nyaris terlupa. Beliau yang menempati jabatan tertinggi di kantor ini, Sang Kepala Kantor! Tak ada SK *definitive* untuk beliau. Jadi, orang lama yang satu ini tetap menduduki jabatan sebelumnya, Kepala Kantor dengan tambahan embel-embel Pjs – Pejabat Sementara. Dengan embel-embel yang melekat di jabatan itu, Pak Kepala Kantor menjadi satu-satunya orang dengan jabatan paling tinggi namun memperoleh *take home pay* paling rendah di kantor ini. Segala daya upaya dikerahkan oleh bendahara kantor, mencari referensi aturan ini atau itu, agar si bapak memperoleh hak tunjangan yang sama dengan pegawai lain, namun semuanya tak membuahkan hasil. Pjs is Pjs, titik!

Di awal berjalannya kantor itu, belum ada aturan yang jelas tentang jalannya perubahan terutama tentang ‘kode etik’ yang menjadi isu utama perubahan ini. Kami hanya melihat contoh kantor modern yang telah lebih dahulu ada. Bagaimana batasan tentang kode etiknya, kami belum tahu.

Dipimpin Kepala Kantor kami harus duduk bersama, membahas tentang hal ini. Aturan tak tertulis yang tercipta adalah, tidak menerima apa pun dari Wajib Pajak dalam bentuk dan dengan maksud apa pun.

Tak jarang kami dengar dari teman-teman AR yang melakukan *visit* ke Wajib Pajak, mereka meninggalkan teh botol (tidak menyebut merk, he he..) suguhan Wajib Pajak, tanpa menyentuhnya, karena demikian takutnya terhadap aturan kode etik ini.

Tak perlu kuberikan contoh berapa jumlah amplop (beserta isinya) dari Wajib Pajak yang kami tolak. Bagaimana cara menolaknya pun termasuk dalam bahasan kami. Itu bila dalam jumlah besar, dilihat dari ukuran ketebalan amplop. Bagi kami di Seksi Pelayanan, bagian pembuatan NPWP seringkali harus menunjukkan masjid di belakang kantor untuk mengalihkan selipan amplop yang diserahkan Wajib Pajak untuk pelayanan yang kami berikan. “Mari pak, saya antar ke masjid di belakang kantor. Amplop beserta isinya silakan dimasukkan ke kotak amalnya”. Kalimat ini terpaksa terucap bila Wajib Pajak yang datang *ngeyel*, *ngotot*, memaksa kami untuk menerima amplop walau sudah dijelaskan bahwa kami tidak diperkenankan menerimanya. Hmm.. kami perlu publikasi yang lebih besar, gaung yang lebih lebar, karena perubahan ini rupanya belum terdengar.

Ada lagi hal baru terkait dengan perubahan ini, menggunakan mesin *finger print* untuk presensi. Mesin *finger print* yang baru satu-satunya itu, kebetulan terletak di Seksi Pelayanan, seksiku. Kami bisa menyaksikan mereka yang tergopoh-gopoh menyetorkan jarinya ke mesin itu bila waktu telah mendekati 07.30. Pemandangan yang biasa terlihat, mereka memarkir asal saja kendaraan mereka di depan kantor, berlari, setor jari, baru merapikan kendaraan di area parkir belakang kantor. Bila perlu, mereka disemangati agar berlari lebih cepat, ‘Hayo! Hayo!’ Ada *cheersleader’s team*-nya... **yang ini lebay.com**

Berikan *applause* untuk yang berhasil lolos dan jari telunjuk yang meliuk-liuk untuk mereka yang terlambat sambil berucap, “Kaciaaan deh luuu”. Tak ada yang dendam, karena di lain waktu, mungkin saja giliran yang meledek akan diledek teman yang lain, termasuk aku. Bagaimana dengan Sang Kepala Kantor sebagai penerima *take home pay* terendah? Saat itu belum ada aturan yang mengharuskan kepala kantor untuk melakukan absensi. Namun beliau tetap ikut setor jari ke mesin itu. Yang lebih hebat, sekalipun unsur yang akan dikurangi bila terlambat, tidak beliau peroleh, tapi beliau tetap berlari mengejar waktu absen bila telah dekat dengan 07.30. Padahal untuk beliau, telat nggak telat, *kagak ngaruh!*

Berkomitmen tinggi, memberi contoh yang baik pada *staff*-nya dan berusaha menyatukan kami dengan segala caranya, merupakan sikap Kepala Kantor yang membuat kami merasa sangat kehilangan saat beliau pindah. Beliau adalah pegawai dengan jabatan tertinggi yang menerima *take home pay* terendah di kantor. Di kantor barunya, beliau baru akan menerima tunjangan sesuai levelnya. Namun tak ada yang memungkiri, di bawah kepemimpinan beliau, betapa indahnyanya masa itu. Kekompakan, keriangannya, semangat mencari solusi, itulah hari-hari kami saat itu. Aku merindukannya...

BOSS vs LEADER

Windhy Puspitadewi

Hal terbaik dari modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi saya selain remunerasi, adalah dipangkasnya birokrasi hingga kesenjangan antara atasan dan bawahan bisa diminimalkan. Saya masih ingat benar bagaimana dulu ketika masih ada yang dinamakan Korlak (koordinator pelaksana), jabatan pelaksana (jika memang itu bisa dikatakan jabatan) sebagai penghuni kasta terendah dalam hirarki kepemimpinan institusi tercinta kita ini, harus bekerja keras bagai kuda yang dicambuk dan didera (lagu GIGI ini seakan menjadi *soundtrack* saya saat itu). Bagaimana tidak, selain atasan langsung yaitu Korlak (Koordinator Pelaksana), atasan tidak langsung seperti Kasi (Kepala Seksi) hingga Kepala Kantor kadang-kadang berinisiatif dengan memberikan perintah langsung kepada para pelaksana, baik itu masalah pekerjaan atau pribadi. Bahkan saya pernah disuruh mengerjakan tugas-tugas kuliah S2 beliau-beliau itu. Saya sampai bingung, yang mestinya dapat gelar MM itu saya atau mereka? Lucunya lagi, para atasan ini saat itu enggan sekali jika harus dimintai tanggung jawab padahal mereka sudah memberikan paraf atau tanda tangan atas hasil pekerjaan saya. Logikanya begini, jika mereka sudah paraf atau tanda tangan, berarti mereka sudah setuju kan? Jika mereka sudah setuju berarti itu artinya sudah mereka baca kan? Kan? Kaaan? Kaaaaan? Tapi kenyataannya, saat saya melakukan kesalahan dalam pembuatan laporan, saya malah dimarahi. Ketika saya mengajukan pledoi alias nota pembelaan dengan mengatakan bahwa Korlak saya itu sudah memberikan paraf yang berarti sudah setuju, tahukah apa yang dikatakannya?

"Lho, tugas saya itu memang cuma memaraf," jawabnya. "Baca saja di *jobdesk*, tugas korlak hanya memaraf".

Walah.. entah beliau membaca di mana tapi satu hal yang saya tahu pasti sejak saat itu, bahwa ada aturan tak tertulis yang mengatakan: pertama, atasan selalu benar dan kedua, jika atasan berbuat salah, lihat aturan pertama. Seorang atasan adalah mutlak seorang Bos, Raja, *Daimyo*, Tuan Tanah yang semua kata- katanya adalah *sabda pandhita Ratu* dan saya

(serta sebagian besar pelaksana, saya rasa) hanyalah rakyat jelata, kaum sudra, proletar yang tidak bisa melakukan hal lain selain menurutinya.

Untunglah, arus modernisasi DJP turut membuat perubahan dalam gaya kepemimpinan orang-orang yang mempunyai jabatan, terutama yang memiliki anak buah. Sebenarnya, semua itu memang kembali ke orangnya masing-masing, tapi saya cukup yakin bahwa modernisasi ikut memberikan andil besar dalam hal ini. Sebagai contoh dengan keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2009 tentang Pembinaan Disiplin PNS di Lingkungan DJP dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2009 tentang Mentaati dan Memanfaatkan Jam Kerja Bagi Pejabat Eselon III, atasan-atasan saya itu tidak bisa lagi tiba-tiba menghilang entah kemana. Berbicara tentang atasan saya yang sekarang, baik langsung maupun tidak langsung, mereka adalah sampel seorang atasan produk dari modernisasi. Mereka bukan tipe atasan yang menganggap para pelaksana seperti saya sebagai hanya bawahan tapi bagian dari tim. Setiap terjadi kasus atau masalah yang harus dipecahkan, saya selalu dimintai saran. "Menurutmu bagaimana Win?", tanya beliau- beliau itu. Tentang apakah saran saya itu ditampung kemudian dibuang, itu masalah nanti. Pengakuan kecil seperti ini saja sudah cukup membuat saya merasa dihargai. Bahkan kalau saran saya salah sekalipun, biasanya mereka hanya mengatakan, "Begitu ya? Tapi menurut saya...." dan diakhiri dengan "terima kasih".

Saya jadi ingat sebuah quote atau kata-kata yang bagus dari Gordon Selfridge: *"The boss drives people, the leader coaches them. The boss depends on authority, the leader on good will. The boss inspires fear, the leader inspires enthusiasm. The boss says "I", The leader says "WE". The boss fixes the blame for the breakdown, the leader fixes the breakdown. The boss says, "GO"; the leader says "Lets GO!"* Benar, sebelum modernisasi, atasan saya adalah seorang bos. Mereka memberikan perintah, mengandalkan kewenangan atau jabatan, menguarkan rasa takut, mencari kambing hitam dan tidak pernah menganggap anak buah sebagai bagian dari tim. Sebaliknya, setelah modernisasi, atasan adalah seorang pemimpin. Mereka memberikan arahan, berpegang pada niat baik, mendorong antusiasme, memperbaiki masalah tanpa mencari kambing hitam, dan menganggap anak buah sebagai bagian dari tim. Manakah yang lebih baik? Saya tidak bisa menjawabnya tapi jika saya ditanya tipe atasan mana yang saya sukai, jelas saya memilih yang terakhir.

Menjadi seorang pemimpin, bukan berarti lalu mengendurkan kewibawaan, seperti yang dikatakan Jim Rohn: *“The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly”*. Secara teori, sepertinya tidak sulit. Cukup bertindak kuat, tanpa harus kasar; bersikap lembut, tapi tidak lemah; memberi kesan gagah; tapi tidak mengintimidasi; penuh pertimbangan, tapi tidak malas; rendah hati, tapi tidak gampang panik; memiliki kebanggaan, tapi tidak sombong; memiliki rasa humor, tapi tanpa terlihat konyol.

Jika sekarang Anda sedang mempunyai jabatan dan ingin tahu tipe manakah anda: apakah bos atau pemimpin? Indikatornya gampang. Ketika para anak buah Anda mendapat kabar bahwa Anda tiba-tiba ditugaskan atau cuti atau ada sesuatu yang membuat Anda tidak bisa masuk kantor dan mereka langsung menampakkan wajah bahagia bahkan mengucapkan *hamdalah* atau *halleluya*, maka bisa dipastikan selama ini di mata mereka Anda adalah seorang bos. Tapi jangan khawatir, sebagai seorang pelaksana saya tahu satu hal sederhana pertama yang bisa Anda lakukan agar bisa merubahnya, yaitu dengan mengucapkan terima kasih. Sederhana itu. *“The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say THANK YOU (Max De Pee)”*.

POSTER ANTI KORUPSI

Yond Rizal

Lama saya tercenung memandangi poster anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Poster itu saya dapat dari petugas KPK yang menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang saya serahkan kepada KPK di bulan Desember 2008. Poster itu dibingkai dan dipasang oleh Pak Kasman, petugas Subbag Umum, di dinding dekat mesin absensi. Poster itu menggambarkan seorang anak usia sekolah dasar yang sedang membaca buku di atas tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Kata-kata dalam poster itu berbunyi: “Ini Ruang Kelasku”.

Menengok ke belakang, saya tercenung mengingat betapa beruntungnya saya yang berasal dari keluarga melarat dapat menikmati pendidikan tinggi tanpa harus mengalami suasana seperti dalam poster itu. Tapi berapa banyak anak Indonesia yang seberuntung saya? Begitu banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati indahnya masa-masa sekolah. Begitu banyak anak-anak yang terpaksa bergelut dengan kekumuhan, dengan bahaya, dengan maut untuk menyambung hidup dan terjauh dari sekolah?

Kenikmatan yang saya alami tidak terlepas dari kegigihan ibu saya - sendirian untuk menyekolahkan keenam anaknya. Tetapi berapa banyak orang tua yang gigih berjuang untuk mengubah nasib dan diberi keberuntungan untuk menyaksikan anak-anaknya diwisuda? Tapi yang lebih penting berapa banyak orang tua yang menyadari perlunya kerja keras untuk mengubah nasib, menyekolahkan anaknya dan berupaya keras untuk tidak korupsi karena korupsi mengambil hak orang lain untuk bersekolah dengan layak?

Korupsi membebani sebagian besar rakyat Indonesia. Korupsi yang meluas telah mengambil uang yang semestinya dapat digunakan untuk membuat rakyat hidup lebih baik termasuk mendapat pendidikan yang layak. Hak rakyat telah dirampas oleh koruptor untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga segala macam bentuk tindakan kriminal yang asal muasalnyanya adalah uang, dapat ditimpakan kepada para penjahar besar ini. Sikap jalan pintas yang mengebelakangkan kerja keras dari manusia

Indonesia seperti yang diindikasikan oleh Mochtar Loebis beberapa dekade lalu, bisa jadi merupakan penyebab terjadinya korupsi.

Adakah asa bahwa negeri ini bisa berubah meninggalkan kedurjanaan kubangan korupsi? Atau pasrah ke pernyataan frustrasi almarhum Dr. Syahrir: “korupsi adalah penyakit kanker stadium akhir yang tidak dapat lagi disembuhkan, kanker terminal, sehingga kita tinggal menunggu ajal penderitanya. Si penderita adalah negara Republik Indonesia?” Saya memilih untuk tidak frustrasi! Dengan menyaksikan proses reformasi di DJP, saya memilih untuk optimis. Saya memilih untuk berkata bahwa korupsi di Indonesia baru berupa borok! Dan itu bisa disembuhkan, hanya perlu waktu. Perlu waktu untuk membuat manusia Indonesia kembali tumbuh rasa malunya. Memberi kesadaran kepada manusia Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan salah. Beda dengan manusia Jepang atau Korea yang malu ketika perbuatan kriminal atau korupsinya terungkap, kemudian memilih untuk mundur dan atau bunuh diri, manusia Indonesia lebih memilih mencari pembenaran dan jalan pintas agar tidak semua kenikmatan tercabut dengan berbagi uang jarahan.

Ada pepatah bijak, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, maka mulailah dengan menumbuhkan rasa malu. Jika tidak merasa malu dengan Tuhan, karena Tuhan tak terlihat, malulah dengan diri sendiri, malu pada orangtua, malu pada pasangan hidup, malu pada anak, malu pada tetangga, malu pada saudara, malu pada teman, malu pada kenalan: malu karena korupsi.

Pada penghujung bulan Juli, kami mengundang KPK untuk datang ke KPP Pratama Jakarta Gambir Empat untuk memberikan pemaparan kepada para pegawai tentang program pemberantasan korupsi dan peningkatan kinerja pelayanan. Petugas KPK datang dan kemudian kami asyik berbincang sebelum acara dimulai. Perbincangan berkisar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bergetar hati saya, mendapat cerita bagaimana KPK tetap tegar walau gempuran datang dari berbagai penjur. Sungguh saya menaruh harapan besar kepada KPK dalam pemberantasan korupsi sebagaimana saya menaruh harapan besar ke DJP untuk benar-benar menjadi institusi publik yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan menjadi panutan institusi lainnya.

Sebelum kami ke aula tempat seminar diadakan, saya menatap kembali poster anti korupsi dari KPK dan berdoa suatu saat tidak ada lagi anak-anak

usia wajib belajar berada di tempat semacam itu, tetapi berada di sekolah merajut masa depan yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya.

PIONIR-PIONIR MODERNISASI

Tang Dewi Sumawati

Di awal modernisasi, terutama untuk di daerah, "komitmen perubahan" hanya dimiliki oleh segelintir pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Yang menjadi topik utama bahasan modernisasi pada saat itu adalah remunerasi, selebihnya tidak menjadi hal yang menarik. Walaupun sudah ada kantor modern, belum semua pegawai mempunyai *mindset*/ paradigma berpikir secara modern. Namun, selalu ada pionir dalam setiap peristiwa dan justru karena merekalah maka modernisasi akhirnya bisa berjalan hingga hari ini.

Pionir modernisasi ini kebanyakan adalah orang-orang yang memang pada saat masuk DJP mempunyai idealisme dan sebagian besar dari mereka masih tetap seperti itu walaupun mereka sudah cukup lama bekerja di DJP. Ada sebagian dari mereka yang sudah terkontaminasi, namun segera bertobat dan ada pula yang tetap menjaga idealismenya sehingga tidak sampai terkontaminasi. Masing-masing memiliki cerita perjuangan bagaimana mereka akhirnya bisa menemukan jati dirinya dan mempertahankan idealismenya.

Sebagian dari mereka, ada yang terinspirasi oleh teman-temannya yang sudah lebih dulu modern pada saat awal modernisasi DJP, yang pada saat itu hanya berlaku untuk kantor-kantor tertentu di Jakarta. Serasa tidak ingin ketinggalan dengan semangat teman-temannya yang sudah modern lebih dulu, para pionir di daerah ini mulai mencoba "modern" di lingkungan yang sama sekali "belum modern". Modern di sini dalam arti bahwa mereka mulai membatasi diri, mencukupkan dengan apa yang ada dan mendisiplinkan jam kerja. Harapannya, pada saat mereka harus masuk dalam situasi kantor modern, mereka sudah siap mental dan muncul sebagai pionir-pionir yang rela berjuang menyisihkan waktu dan tenaga demi keberhasilan modernisasi.

Ada pula di antara pionir itu yang terinspirasi oleh atasannya (seorang Kakanwil) yang begitu *istiqomah*, sampai pernah pada suatu saat sang atasan ini mentraktirnya bersama-sama dengan teman-temannya makan

siang dengan honor dari seminar yang baru diterima sang atasan. Adapula yang saling mempengaruhi antara beberapa orang sahabat. Mereka biasanya mempunyai kelompok diskusi yang aktif dan termasuk orang-orang yang idealis sejak dari bangku kuliah. Pembawaan mereka yang santun, ramah, tipe pekerja yang ulet, membuat mereka menjadi populer dan banyak diikuti oleh bawahannya maupun murid-muridnya, karena biasanya mereka juga ditugasi sebagai pengajar.

Mereka semua adalah pekerja keras yang tulus ikhlas dan tidak pamrih apa pun dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Mereka penuh kreatifitas dan inovasi dan tak kenal lelah dalam melaksanakan tugasnya. Mereka adalah orang-orang yang dengan tegas berani mengatakan “saya sudah berubah” dan berani mengajak sebagian besar orang-orang di lingkungannya untuk berubah. Mereka tidak menghiraukan orang-orang yang masih membahas masa lalunya. Bagi mereka, bertobat adalah urusannya dengan Tuhan-nya dan mereka akan berusaha komitmen dengan pertobatannya.

Dalam suatu kesempatan, para pionir ini menjadi *trainer* dalam kegiatan Diklat Modernisasi DJP dan Kode Etik Pegawai. Walaupun waktu untuk persiapannya sangat singkat, mereka melaksanakannya dengan kesungguhan dan semangat tinggi. Yang ada dalam benak mereka hanya satu, yaitu: “Modernisasi harus berhasil dan untuk itu yang terpenting adalah perubahan paradigma para pegawai DJP”. Mereka mempersiapkan diklat itu hingga tengah malam, melaksanakan secara maksimal dengan penuh semangat dan tanpa kenal lelah. Walaupun penuh halangan dan rintangan, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan tugas itu dan membuat hampir seluruh peserta menitikkan air mata. Mereka berhasil meyakinkan para peserta Diklat bahwa modernisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Para pionir ini adalah orang-orang yang patuh dan taat pada Tuhan-nya, orang-orang yang mencintai *Rabb*-nya dan menyadari bahwa modernisasi ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan-nya untuk bertobat. Untuk itu mereka menjadikan kesempatan ini untuk mengajak sebanyak-banyaknya teman dan sahabatnya untuk kembali ke jalan yang lurus. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dan profesional dalam bekerja serta ramah. Apabila sampai hari ini DJP masih terus melaksanakan modernisasi, itu karena orang-orang seperti ini yang ada dalam organisasi

DJP di seluruh Indonesia. Mungkin keberadaan mereka tidak banyak, namun dengan semangat merekalah maka modernisasi bisa berlangsung.

Untuk melaksanakan reformasi tidaklah mudah. Reformasi tidak akan berhasil bila hanya diniatkan oleh pimpinan organisasi. Modernisasi DJP jilid satu dianggap berhasil karena semangat perubahan itu berasal dari dalam DJP sendiri. SDM nya memang butuh perubahan dan mempunyai komitmen untuk berubah. Puji syukur ke hadirat *Illahi Rabbi* yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam era perubahan dan diberi amanah untuk melaksanakan modernisasi. Apabila kita bersungguh-sungguh melaksanakannya maka keberhasilan merupakan keniscayaan dan pahalanya tidak hanya kita rasakan di dunia namun juga menjadi amal jariah sampai akhirat kelak. Untuk itu marilah kita kuatkan barisan bersama para pionir-pionir yang berada di seluruh negeri tercinta ini untuk bertekad bulat demi keberhasilan modernisasi DJP. Karena pada posisi seperti saat ini, bila kita kuat, maka modernisasi akan mudah dan cepat berhasil. Namun, bila kita tidak komitmen secara maksimal atau hanya formalitas, maka modernisasi ini akan semakin cepat pula kehancurannya. Karena tantangan terbesar suatu organisasi yang sedang melaksanakan reformasi adalah ada di dalam organisasi itu sendiri.

MEREKALAH PENERUS “De Je Pe”

Sri Rahayu Murtiningsih

Mereka adalah lulusan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) yang magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana saya ditugaskan. Mereka berjumlah empat orang. Mereka datang saat KPP sedang sibuk mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada Wajib Pajak. Mengingat waktu pengiriman SPT yang terbatas, mereka ditempatkan di Seksi Pelayanan untuk membantu pegawai di Seksi Pelayanan. Mereka menunjukkan kinerja yang tak kalah dengan pegawai yang telah menerima gaji plus Tunjangan Khusus Pengelola Negara (TKPKN), walaupun saat itu uang magang belum mereka terima.

Belum juga sempat menarik nafas, KPP kembali sibuk dengan *Sunset Policy (Sunpol)*, dan mereka dinota-dinaskan sebagai perekam SPT *Sunpol* yang merupakan tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Karena tidak tersedianya kursi dan meja di Seksi PDI, mereka ditempatkan di ruang rapat, yang merupakan ruangan tertutup dan tidak bergabung dengan ruangan lain. Walaupun tidak ada pengawasan, mereka tetap bekerja tanpa henti. Mereka sadar bahwa mereka berangkat ke kantor untuk bekerja tanpa memandang ada atau tidaknya pimpinan di tempat kerja. Istilah “tak ada kucing tikus berpesta”, tak ada dalam pikiran mereka. Sungguh hebat.

Belum selesai perekaman SPT *Sunpol*, bulan Maret telah tiba. Di bulan ini banyak Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya. Karena pelaksana di Seksi Pelayanan tidak mencukupi untuk kegiatan penerimaan SPT Tahunan, mereka dinota-dinaskan sebagai perekam dan pencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). Namun, karena tidak ada tempat di Seksi Pelayanan, mereka pun masih menempati ruang rapat. Mereka bekerja tanpa lelah untuk segera menyelesaikan perekaman LPAD, seolah tahu panggilan untuk pendidikan Diklat Teknis Substantif Dasar I (DTSD I) akan segera tiba. Dan perkiraan mereka tepat, saat perekaman LPAD selesai, mereka yang jurusan Akuntansi dipanggil untuk pendidikan DTSD I di Jakarta dan berangkatlah mereka. Saat temannya menjalani pendidikan DTSD I, mereka yang jurusan Adimistrasi Perpajakan dipanggil mengikuti pendidikan pra jabatan.

Selesai pendidikan DTSD I di Jakarta, dan belum juga kembali ke KPP tempat mereka magang, lulusan STAN yang jurusan Akuntansi dipanggil pendidikan pra jabatan. Ada yang di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Malang, ada yang di Balikpapan. Satu hal lagi yang membuatku terkesan kepada mereka adalah sehari setelah selesai pendidikan dan kembali ke Surabaya, mereka langsung datang ke kantor dan menyatakan siap untuk bekerja walaupun mungkin rasa kangen dengan keluarga serta rasa *capek* selama pendidikan belum hilang.

Saat Kepala Subagian Umum membuat Nota Dinas (ND) Penempatan Sementara bagi mereka, penempatan pegawai lulusan STAN dari Kepegawaian Kantor Pusat terbit. Mereka langsung melihat di mana mereka ditugaskan. Ada yang ditempatkan jauh dari keluarga dan ada yang dekat dengan keluarga. Mereka langsung menyatakan siap berangkat. Seolah mereka memang tahu, bahwa sebagai pelayan masyarakat, kitalah yang harus datang mendekati mereka, walau ke ujung Indonesia sekalipun.

Saat akan berangkat menuju ujung wilayah Indonesia di mana dua dari mereka ditempatkan, mereka masih tetap masuk ke kantor sampai satu hari sebelum keberangkatan dan tetap bekerja seperti biasa. Untuk mencari tiket pun mereka gunakan waktu istirahat, seolah tak ada alasan untuk ijin bagi mereka sendiri. Disiplin yang patut dijadikan contoh. “Ya Allah Ya *Rabbi* berilah keselamatan dan kemudahan di mana pun mereka berada. Mereka sedang mengemban tugas yang mulia, mengumpulkan uang pajak demi kesejahteraan bangsa. Mereka penerus DJP-ku, berilah selalu penerang jalan agar mereka selalu lurus menuju visi dan misi DJP-ku”. Mereka adalah lulusan STAN yang kini telah ditempatkan di KPP-KPP di seluruh Indonesia.

Seandainya diibaratkan, mereka adalah bibit unggul, ladangnya adalah KPP dan kita adalah petaninya. Tumbuh kembangnya bibit tergantung dari bagaimana petani mengolah ladang dan bibit. Bibit unggul akan berkembang menjadi tanaman yang berkualitas tinggi dan menghasilkan buah yang banyak apabila dirawat dan dijaga dari hama, demikian juga sebaliknya. Apapun jadinya mereka kelak, tergantung bagaimana kita merawat mereka. Adalah tugas kita untuk menjadikan mereka pegawai yang profesional, berintegritas tinggi dan penuh inovasi. Masa depan DJP tergantung kepada mereka, karena merekalah penerus dan yang akan memimpin DJP. Kini, kugantungkan harapanku kepadamu teman.

NAMAKU RAJAWALI

Kholid H. Sutanto

Namaku RajaWali. Dua kata digabung menjadi satu dengan huruf R besar dan W juga tetap besar. Itu kemauan ibuku. Kendati mungkin akan dimarahi oleh J.S. Badudu, tapi ayahku menyetujuinya, dan aku menyukainya. Sejak lahir, kecil dan tumbuh remaja aku hidup dalam lingkungan keluarga dan masyarakat kitab kuning, pecinta *hadits* Bukhori dan penyuka *sholawat*. Pada sejumlah orang-orang sekitarku itulah aku berguru, dan mencari tahu.



Namaku RajaWali. Ayahku memberi contoh untuk sedikit bicara dan banyak membaca. Ibuku adalah tempat berguru ilmu kesabaran. Selain ayah ibuku tadi, guruku yang paling aku kagumi adalah alam. Karena alam mengajariku tentang apa itu hukum. Alam memberitahuku tentang pohon yang makin tinggi akan makin mendapatkan terpaan angin, dan alam juga memberitahuku bahwa air akan selalu menemukan jalannya untuk bergerak dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah.

Namaku RajaWali. Saat awal tahun 1999, aku pertama kali masuk dan bekerja di instansi yang bernama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), aku

menemukan fakta bahwa ternyata air tidak mudah begitu saja mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Begitu pula pohon-pohon tinggi ternyata lebih suka merunduk berlindung di balik pohon lainnya ataupun mencari cara untuk menghindari terpaan angin yang lebih besar. Gambangnya, aku menemukan dan terperangkap dalam sebuah sistem besar yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Sistem yang angkuh, seangkuh aksen orang Inggris. Mungkin ini yang orang bilang lingkaran setan, labirin birokrasi, atau apalah itu.

Sebagai salah satu pemeriksa di Seksi PPh Badan, seksi yang dibilang oleh banyak orang sebagai seksi paling basah, saat itu aku dikelilingi oleh dunia, yang jika aku terlena, aku bisa meminta apa saja dari dunia yang mengelilingiku itu. Tapi aku bersyukur tidak merasa memilikinya. Aku mempunyai banyak sekali teman dalam dunia kerjaku, tetapi sungguh mengalami kesendirian dalam keheningan malamku.

Sebagai seorang PNS golongan II-c, penghasilanku sebulan mungkin hanya pas untuk makan, bayar kost, bayar kuliah, sedikit hiburan, tanpa mampu menyisakan untuk tabungan dan sedikit menatap suram untuk masa depan. Mungkin karena masih membujang, sedikit uang untuk hiburanku itu sering aku relakan buat Pak Dadang, rekan satu kantorku yang tiap hari harus menempuh jarak 100 kilometer lebih untuk pulang pergi, dan kadang harus bolos di tanggal-tanggal tua karena tidak mempunyai uang lagi untuk biaya transport ke tempat kerja.

Pernah juga, saat aku masih punya uang sisa Rp10.000,00 di tanggal tua, pak Haji, rekan sekantorku lainnya, tiba-tiba datang dan ingin meminjam uang Rp50.000,00 buat kepentingan transportasi anaknya ke Bandung untuk kuliah. Bagi pak Haji, dan juga bagi kebanyakan orang, memandang posisi kerjaku, aku dianggap orang muda yang berlimpah penuh materi, tempat orang bisa menghutang berapapun dan kapanpun. Akhirnya, aku pinjam uang temanku Rp50.000,00 dan berjanji untuk mengembalikannya saat gaji nanti. Kemudian, Rp50.000,00 aku berikan pada pak Haji, dan aku tetap memegang Rp10.000,00 tadi sambil menanti tanggal gaji tiba dua hari lagi.

Setengah mati aku mensiasati diri untuk bisa menabung. Mulai dari menjarangkan sarapan pagi, menggabungkan makan pagi dengan makan siang dengan cara makan di jam-jam 10.30-an, sampai membeli nasi uduk yang terkenal murah melimpah dan memakan setengah porsi untuk sarapan,

setengah porsi berikutnya untuk makan siang. Tetap saja tabungan itu tidak beranjak jauh dari nilai sebelumnya.

Namaku RajaWali. Di pertengahan 2003, aku memutuskan menikah dengan meminang seorang wanita bernama Ranting Kecil yang sudah aku kenal setahun yang lalu. Pada dirinya, dan pada beberapa rekan dekatku yang jadi pengurus masjid kantor, aku ceritakan tentang kekhawatiranku akan sistem besar di DJP ini, kepesimisanku akan adanya perubahan serta kecemasanku akan tergerusnya keyakinan. Aku bilang pada mereka, jika keadaannya seperti ini, perlu dua generasi untuk bisa mengubah lingkaran setan labirin birokrasi ini menjadi sistem yang baik.

Tapi rupanya Tuhan tidak diam dan tidak tidur. Sekitar tahun 2002, di DJP ini dibentuk kantor *pilot project* sebuah program yang bernama modernisasi. Proses ini kemudian berlanjut dengan program yang bernama remunerasi bertahap, dari mulai Jakarta lalu ke seluruh unit di Jawa, hingga semua daerah di Indonesia. Setiap pegawai di DJP mendapatkan penghasilan yang jauh lebih layak, dan sistem lama yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dirombak total sehingga meminimalisir ketidaksesuaian sistem.

Tahun 2006, buah perjalananku mencapai puncak Rinjani, aku ceritakan pada Ranting Kecilku. Sekitar 100-an meter mendekati puncaknya, aku menemukan medan pendakian yang berpasir, dan di antara pasir-pasir itu terdapat beberapa buah cangkang kerang laut yang memfosil. Pasir-pasir ini pun sangat identik dengan pasir-pasir pantai. Rinjani memberitahuku bahwa puncaknya yang berketinggian 3.726 mdpl (meter di atas permukaan air laut) itu dulu adalah sebuah pantai. Rinjani mengajarku tentang tidak adanya kata mustahil untuk sebuah perubahan. Rinjani membuatku kembali mempunyai keyakinan kuat dan optimisme sebuah perubahan di instansi tempat kerjaku, maupun di keseluruhan permasalahan negeriku. Aku meyakini perubahan itu, kendati untuk itu dibutuhkan ratusan atau ribuan tahun seperti halnya perubahan pantai menjadi puncak Rinjani ini, aku tidak peduli.

Namaku RajaWali. Aku mulai merasakan remunerasi di akhir 2007 dan kini sudah memiliki rumah tinggal sendiri dengan sistem cicilan untuk keluarga kecilku. Tidak perlu menunggu dua generasi untuk terjadinya perubahan. Kini, dengan modernisasi DJP, aku mulai berani bermimpi untuk membahagiakan orang tuaku, membantu orang lain, menyisihkan tabungan untuk anak-anak, dan....naik haji!! Lebih besar lagi, aku mulai berani

berharap Indonesia mempunyai masa depan penuh kemandirian yang lebih cerah.

Namaku RajaWali. Dan aku masih percaya, kendati dibendung seperti apapun, air akan tetap mencari jalan untuk mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Dan selama apa pun pohon tinggi merunduk berlindung di balik pohon lain, dia tetap harus mengambil pilihan untuk kembali tegak kalau tidak ingin tumbang karena terlalu lama menunduk. Dan kemenangan sebuah kebenaran akan selalu menjadi akhir cerita yang menggembirakan.

IKUT BERBAGI KISAH

Kisah & harapan seputar modernisasi DJP tidak hanya datang dari pegawai DJP saja. Untuk menguatkan kisah-kisah yang dibagi oleh pelaku modernisasi, tulisan juga datang dari pihak eksternal. Dalam bagian akhir buku ini akan Anda baca tulisan dari Rendi A. Witular - seorang wartawan, dr. Arief Alamsyah Nasution, M.A.R.S., - seorang dokter yang “nyambi” jadi motivator dan penulis, serta Ustadz Yusuf Mansur - seorang ustadz yang sudah sering kita lihat wajah dan baca tulisannya di berbagai media massa.

MESIN ABSENSI & REFORMASI PAJAK

Rendi A. Witular

(Editor Investigasi dan Special Report The Jakarta Post)

Memasuki kantor pajak setidaknya di seluruh Jakarta, akan jelas terlihat mesin absen dengan pengenalan sidik jari terpasang di pintu-pintu masuk karyawan. Walau terlihat sepele, mesin absen yang datanya sulit untuk dimanipulasi ini, adalah titik mula reformasi penegakan integritas bagi seluruh karyawan pajak dalam hari-hari mereka bekerja.

Dengan mesin absen canggih ini, karyawan akan takut untuk masuk telat atau pulang lebih awal dari yang seharusnya karena akan berdampak besar pada pemotongan tunjangan mereka dan pada penilaian kinerja mereka. Setidaknya menegakkan disiplin untuk masuk dan pulang tepat waktu adalah hal kecil yang berhasil diterapkan di pajak selain berbagai macam instrumen pengawasan yang akan menciutkan nyali pegawai yang coba-coba untuk berbuat nakal.

Salah satu terobosan untuk menegakkan disiplin dan integritas pegawai pajak mungkin dapat terlihat dengan dibentuknya Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, atau populernya disebut KITSDA, yang bertugas seperti polisi militernya pajak.

Dalam berbagai kesempatan diskusi dengan beberapa pegawai pajak eselon III dan IV, tertangkap kesan bahwa mereka sangat takut pada direktorat ini. Namun kalau pegawai sudah bekerja dengan tingkat kedisiplinan tinggi dan tidak melanggar aturan, kenapa harus takut? Direktorat ini juga menampung keluhan masyarakat terhadap petugas pajak untuk diselidiki dan diambil tindakan.

Penegakan aturan main yang tegas untuk menindak pegawai nakal, perbaikan regulasi perpajakan dan remunerasi yang tinggi – tertinggi di antara pegawai negeri sipil, telah membawa reformasi perpajakan sebagai salah satu contoh sukses pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengubah kantor pajak dari lembaga paling korup di Indonesia menjadi salah satu lembaga bersih hanya dalam waktu kurang dari tiga tahun adalah pencapaian yang patut dihargai. Keberhasilan di pajak juga

adalah contoh bahwa korupsi yang mengakar dalam seperti pohon beringin bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dibersihkan.

Tapi tentunya reformasi di pajak belumlah selesai. Masih banyak hal yang harus dilakukan, terutama dalam hal memelihara semangat bebas dari korupsi. Yang diharapkan adalah : siapa pun presiden, menteri dan dirjen pajaknya, petugas pajak akan selalu menjaga integritasnya berdasarkan inisiatif dari dalam, bukan dari desakan luar.

BERSAMA MELUKIS MAKNA

dr. Arief Alamsyah Nasution, M.A.R.S.
(Dokter, Dosen, *Trainer, Public Speaker, Motivator, Writer*)

Malam itu di sebuah hotel di bilangan Gatot Subroto Jakarta, saya memiliki *appointment* bertemu teman-teman dari Direktorat Kepatuhan Internal Dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KISTDA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kami memiliki agenda untuk membicarakan teknis pelatihan internalisasi nilai-nilai organisasi DJP keesokan harinya untuk kurang lebih 300-an karyawan kantor pusat DJP. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta sejak siang, tidak ada sama sekali terlihat tanda hujan akan beresitirahat. Ada sedikit terselip keraguan di hati saya, “Hari ini Minggu, hujan begini deras, akankah mereka datang?” Apalagi saya hanyalah seorang *trainer* pemula yang sama sekali jauh dari terkenal. Saya selama ini hanya mengorbit lebih banyak di pelatihan-pelatihan lokal di sekitar Jawa Timur.

Namun, keraguan saya sirna ketika tim KISTDA berjumlah lima orang datang lengkap dengan ramah menjumpai saya. Ada perasaan sangat terhormat di hati saya kala itu. Tampak dari kehadiran mereka, bahwa saya ditempatkan dalam posisi yang strategis dalam reformasi nilai di DJP. Sebagai layaknya orang Timur, saya spontan memanggil pelayan untuk memesan minuman *orange juice*, sekedar untuk menghormati mereka dan melepas dahaga. Namun, saya sungguh terperanjat ketika mereka dengan hampir serempak mengatakan, “Maaf Pak, kami tidak bisa menerima kebaikan bapak, ini melanggar kode etik kami.” Sungguh, sebagai orang beragama, sama sekali tidak ada niatan saya untuk menjadikan *orange juice* itu sebagai gratifikasi atau apa pun namanya, tetapi teman-teman itu sungguh menyadarkan saya arti sebuah kode etik (*baca: kehormatan*). Akhirnya, salah satu dari mereka berjalan ke *lobby restaurant* dan memesan serta membayar sendiri *orange juice* yang saya maksud.

Dalam hati saya menangis haru. Terus terang saya bangga, orang-orang di hadapan saya ini telah menunjukkan bahwa nilai-nilai semacam integritas, profesionalisme, inovasi dan *teamwork* bukanlah hanya di tulis di kertas, ditempel di dinding atau di teriakkan di dalam yel-yel. Nilai-nilai itu

haruslah mengalir sebagai darah yang terus meng-inspirasikan kebaikan dalam hidup kita. Saya teringat kata-kata Ken Blanchard, penulis *best seller* “*One Minute Manager*”, “Bukan nilai yang bekerja tetapi manusialah yang membuat nilai-nilai itu bekerja”. Peristiwa malam itu membawa saya pada mimpi indah bahwa perubahan ini telah dimulai. Perubahan suci ini tidak bisa dibendung hanya oleh segelintir oknum yang hanya sanggup berkeluh kesah atau segolongan tukang intrik yang oportunistis. Modernisasi yang saya anggap sebagai gerbong perubahan bangsa ini telah menemukan takdirnya untuk terus melaju cepat menjadi kekuatan sistemik yang membanggakan.

Teman-teman DJP agaknya menyadari sepenuhnya bahwa *image* mereka di mata masyarakat pernah berada di titik nadir. Bahkan, seorang pejabatnya pernah bercerita kepada saya bahwa dulu, sepuluh tahun yang lalu, jika ditanya orang ia bekerja dimana, ia malu jika menyatakan bahwa ia karyawan DJP. Tapi sekarang, *Alhamdulillah*, beliau merasa ada perasaan bangga untuk menunjukkan diri sebagai karyawan DJP. Ia merasa bahwa optimalisasi penerimaan pajak adalah untuk anak-anak di pelosok negeri yang tidak bisa sekolah, untuk sekolah-sekolah tanpa atap yang mau ambruk, untuk anak-anak *leukemia* (*baca: kelainan darah*) yang tidak punya uang berobat, untuk proyek revitalisasi bencana dan konflik di pelosok negeri.

Inilah juga yang selalu saya sampaikan kepada teman DJP di setiap pelatihan saya bahwa mereka tidak perlu menjadi dokter, insinyur atau guru di pelosok, tetapi mereka hanya dituntut bekerja dengan penuh integritas mengoptimalkan pendapatan bangsa. Dan saya menjadi saksi atas semangat mereka di berbagai pelatihan *outdoor* maupun *indoor*. Seluruh pejabat dan karyawan berbau menjadi satu mentransformasi dirinya menjadi seseorang yang bisa hidup dengan nilai-nilai yang mereka yakini membawa mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Mereka juga aktif mengajak masyarakat untuk taat pajak.

Satu pengalaman yang tidak terlupakan adalah ketika di sebuah kota sepelosok Pacitan di Jawa Timur dapat mengumpulkan pelajar dalam jumlah besar di aula kota. Setiap orang pasti tidak mengira bahwa kegiatan itu adalah penutupan sebuah acara lomba perpajakan untuk pelajar. Karena kegiatan semacam itu biasanya hanya bisa dilakukan EO profesional dengan *band-band* terkenal sebagai bintang tamunya. Rupanya teman-teman DJP sadar bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk Indonesia Hari ini tetapi mereka berjuang untuk Indonesia Hari Esok. Dan Generasi Muda adalah

Pemimpin bangsa ini di Masa Depan. Melihat antusiasme ini, saya memutuskan untuk terus membantu mereka, termasuk memberikan sedikit pengalaman dalam tulisan singkat ini. Saya merasa, sudah cukup anak bangsa ini mengeluh dan saling menyalahkan. Lebih baik menyalakan satu lilin daripada mengutuk kegelapan. Kita bersama melukis makna untuk negeri tercinta. Bagaimana dengan Anda?

DOA UNTUK PEJUANG PAJAK

Ustadz Yusuf Mansur

(Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an Wisata Hati)

Pajak sangat saya yakini bisa membangun negeri ini dan berkontribusi besar untuk mengubah dan mensejahterakan masyarakat. Saya senantiasa berdoa, agar kawan-kawan di instansi pajak dikaruniai kesabaran dalam mencari rizki, agar tidak mencarinya dengan cara yang haram. Saya juga berdoa, agar kawan-kawan pengelola pajak diberikan kemudahan dan keberkahan rizki, dan tahu cara mencari rizki lewat sisi Allah Swt, dengan cara menebar kebaikan-kebaikan, dengan cara bertugas penuh khidmat untuk negara, dengan cara menjadi pemeluk agama yang baik dan beribadah dengan benar. Semuanya akan membuat rizki dari Allah Swt akan datang dari arah yang tiada disangka, dan semua urusan hidup dan matinya diurus oleh Allah Swt. Bukan sebaliknya.

Saya pun berdoa agar masyarakat semakin sadar akan kewajibannya membayar pajak sebagai ibadahnya kepada Allah lewat baktinya kepada negara dan sesama. Semuanya harus ada *trust*. Dan sepertinya kawan-kawan pengelola pajak di negeri ini sudah sedikit demi sedikit mendapatkan *trust* itu. Masyarakat jangan dibangun ketakutannya, tapi dibangkitkan kesadarannya.

Dan saya lihat dari sisi ini, kawan-kawan pengelola pajak berhasil. Tinggal perbaikan, perbaikan dan perbaikan. Perbaikan bisa bermacam-macam. Ya cara kerjanya, cara *campaign*-nya, cara pengelolaannya, cara publikasi pengelolaan pajaknya, termasuk ke urusan ibadah-ibadah para pengelola pajak, yang sepertinya tidak ada hubungannya, tapi sungguh sangat-sangat berpengaruh pada keberhasilan perolehan dan pemanfaatan pajak. Seperti doa saja misalnya. Bagaimana berdoa dijadikan SOP; doa *in the morning*, doa habis dhuha bersama, doa habis shalat-shalat fardhu, doa sehabis shalat malam, hingga kemudian doa-doa khusus di saat situasi-situasi khusus.

Salam hormat saya kepada pejuang-pejuang pajak. Semoga Allah mencatat semua usaha kawan-kawan sebagai ibadah kita kepada Allah dan pelayanan terbaik kepada sesama.

